



MAJELIS

EDISI NO.10/TH.XVI/OKTOBER 2022



Kota Bandung Kembali Mencatat Sejarah

PEMBENTUKAN FORUM MPR Dunia dengan Semangat KAA 1955



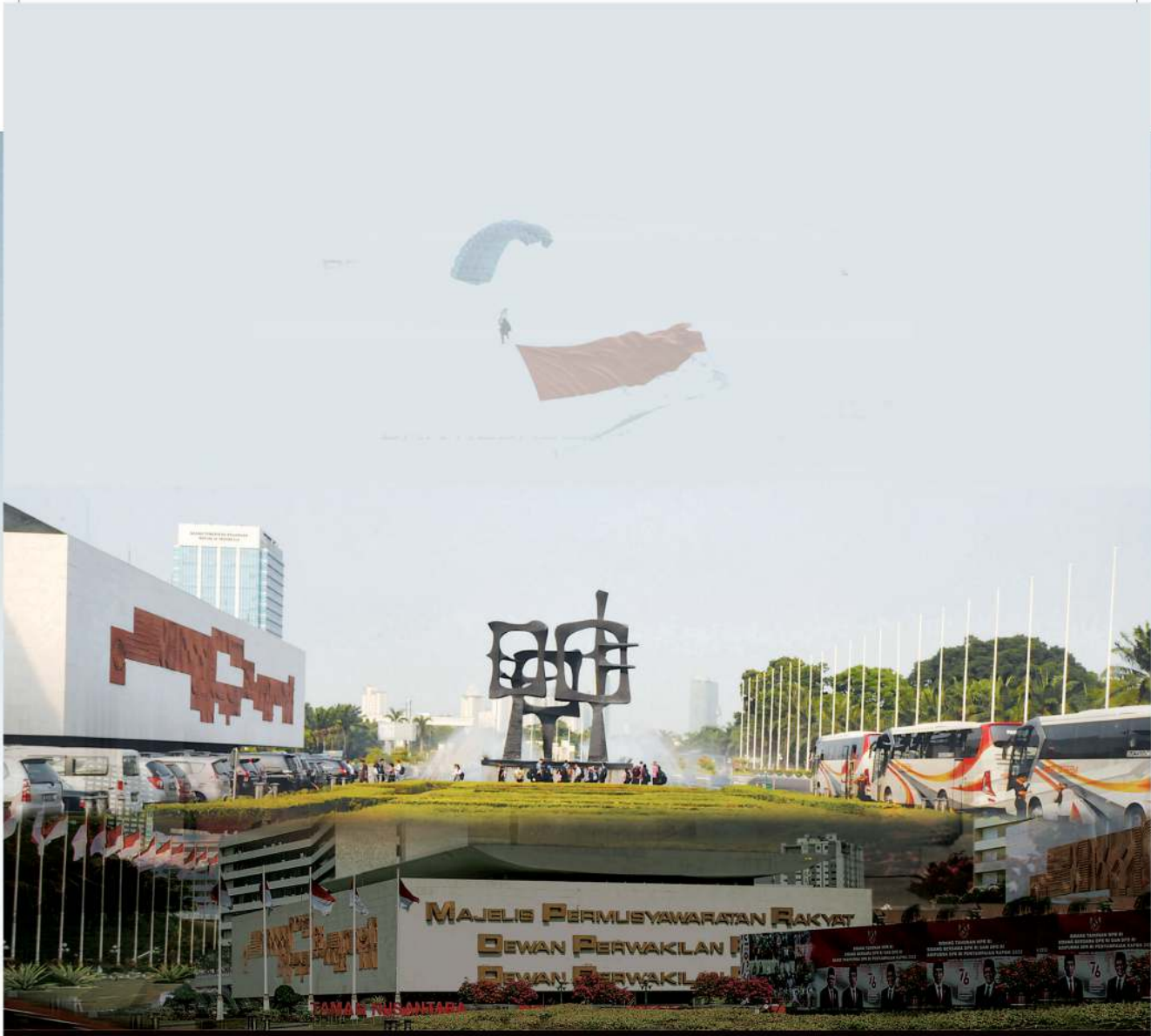
ISSN 0854-6371
9 770854 637158

06 Refleksi
Bersama Merawat Daya
Tahan Ekonomi Negara

24 Nasional
Bansoet Ingatkan Tingginya
Ancaman Kebutaan

39 Selingan
Revitalisasi Hingga
Berujung Batavia

60 Sosialisasi
Ketua MPR Ajak Sebarkan
Vaksin Ideologi



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

Daftar Isi

EDISI NO.10/TH.XV/OKTOBER 2022



08 BERITA UTAMA

Pembentukan Forum MPR Dunia

MPR RI telah siap menyelenggarakan Forum MPR Dunia yang akan dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung, pada 24-26 Oktober 2022. Rencananya Presiden RI Joko Widodo akan membuka acara ini, dan penutupan oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin.



18 Nasional

Bansoet Dorong Peningkatan Pemberdayaan Perempuan



60 Sosialisasi

Terima Putri Anak dan Remaja Indonesia Bali 2022



39 SELINGAN

Revitalisasi Hingga Batavia



74 Profil

Romo H. R. Muhammad Syaifi

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	34
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	48
Varia MPR	66
Wawancara	68
Figur	70
Ragam	74
Dari Rumah Kebangsaan	78
Rehal	80



COVER

Edisi No.10/TH.XVI/Oktober 2022

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasita,

Heri Herawan, Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Muliawan

KOORDINATOR REPORTASE

Ario Setiawan

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,

Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Yenita Revi, Try Syilvani,

Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta,

Alfonso DK Tahapary

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Faridz Rizky,

Wira, Subhan

PENANGGUNG JAWAB/

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayati

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Anggun Permana,

Achmad Farobi,

Widya Permataningrum

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahriil Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

Pembentukan Forum MPR Dunia

PADA bulan Oktober ini, tepatnya 24-26 Oktober 2022, MPR RI akan menggelar pertemuan Consultative People's Assembly (MPR) Dunia di Bandung, Jawa Barat. Pertemuan itu sekaligus akan mengukuhkan pembentukan Forum MPR Dunia, atau nama lain yang ditentukan pada waktu pertemuan nanti. Menurut rencana, agenda itu akan dibuka Presiden RI Joko Widodo, sedangkan penutupan oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

MPR saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan agenda internasional ini, mulai dari penjemputan delegasi di Bandara, transportasi serta akomodasi dan lainnya selama di Bandung. Juga persiapan terkait dengan bahan dan materi kajian serta bahasan untuk pembentukan dan deklarasi Forum MPR Dunia.

Gedung Merdeka, Bandung, sengaja dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Forum MPR Dunia. Gedung Merdeka, kota Bandung, adalah tempat bersejarah. Pada tahun 1955, di tempat itu diselenggarakan Konferensi Asia Afrika. Konferensi inilah yang mendorong sejumlah negara di kawasan Asia dan Afrika kemudian mencapai kemerdekaan. Dari negara-negara yang diundang mengikuti Konferensi Asia Afrika di Bandung, hanya tinggal negara Palestina yang belum merdeka.

Sebenarnya, gagasan MPR untuk membentuk Forum MPR Dunia sudah ada sejak lama. Diawali muhibah Pimpinan MPR ke Arab Saudi dan Maroko pada Desember 2019. Gagasan pembentukan Forum MPR Dunia berkembang dalam pertemuan Pimpinan MPR dengan Raja Arab H.H Salman bin Abdulaziz al-Saud, Ketua Majelis Syuro Saudi Arabia di Riyadh, dan Ketua Majelis Syuro Maroko di Rabat, pada Desember 2019 yang lalu.

Di depan Sidang Tahunan MPR Tahun 2020, Jumat 14 Agustus 2020, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengumumkan secara resmi gagasan pembentukan Majelis Syuro Dunia—saat itu disebut sebagai Majelis Syuro Dunia. Masih pada tahun yang sama, dalam rangka HUT Ke-75 MPR, MPR juga menggelar seminar nasional tentang pembentukan Majelis Syuro Dunia. Meskipun sepanjang 2020-2021 diterpa pandemi

Covid-19, tapi tak menyurutkan gagasan pembentukan Majelis Syuro Dunia.

Barulah pada tahun 2022, MPR melakukan langkah konkret mewujudkan Majelis Syuro Dunia—kemudian sebutannya berubah menjadi Forum MPR Dunia—dengan pertemuan para duta besar negara sahabat. Pimpinan MPR mengadakan dua kali pertemuan dengan para duta besar negara sahabat dalam rangka mematangkan rencana pembentukan Forum MPR Dunia. Pertama, Kamis, 9 Juni 2022, yang dihadiri beberapa duta besar, antara lain Kesultanan Oman, Maroko, Yaman, Iran, Qatar, Bahrain. Kedua, pada Senin 19 September 2022, yang dihadiri 24 duta besar atau perwakilan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Para duta besar menyambut baik dan mendukung gagasan MPR untuk membentuk Forum MPR Dunia.

Forum MPR Dunia merupakan inisiatif dari MPR untuk melaksanakan salah satu perintah dan ketentuan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan kata lain, gagasan pembentukan Forum MPR Dunia dilatarbelakangi kebutuhan untuk menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban, mengingat landscape ideologi, politik, dan ekonomi global saat ini penuh dengan disrupsi dan kompetisi yang semakin tajam dan memanas sehingga dampaknya dirasakan langsung masyarakat dunia.

Kita berharap dengan Forum MPR Dunia ini semakin menguatkan peran diplomasi MPR dalam menggagas berbagai gerakan internasional. Saatnya, MPR menggagas kerjasama antarparlemen yang lebih luas cakupan, lebih inklusif, dan memberikan kontribusi serta alternatif bagi penyelesaian masalah-masalah global, yaitu krisis kemanusiaan, krisis lingkungan, krisis ekonomi global, krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Forum MPR Dunia ini jangan hanya sekadar forum, melainkan forum yang meningkatkan kualitas hubungan antarbangsa, antarnegara, melalui kuatnya hubungan antarparlemen. □

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan

Sistem Informasi,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238,

57895251 Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



Bersama Merawat Daya Tahan Ekonomi Negara

KETIDAKPASTIAN dunia yang berlarut-larut akibat konflik dan wabah penyakit nyata-nyata telah memperlemah kinerja perekonomian banyak negara. Tekanan terhadap perekonomian global makin diperparah oleh ragam eksese akibat perubahan iklim, seperti kasus gagal panen pada sektor pertanian tanaman pangan. Karena itu, merawat daya tahan ekonomi menjadi tantangan bagi semua negara, termasuk Indonesia.

Ketika dinamika global hari-hari ini benar-benar tidak kondusif, Indonesia tidak boleh bangkrut karena salah urus. Itulah tujuan utama menjaga daya tahan perekonomian nasional. Masih segar dalam ingatan banyak orang ketika bulan Juli 2022 lalu, sebuah negeri di Asia Selatan dinyatakan bangkrut karena salah urus. Pemimpin negeri itu melarikan diri ke negara lain. Sebagian masyarakatnya meluapkan kekecewaan dengan menyerbu dan menduduki Istana Kepresidenan.

Diyakini bahwa semua elemen masyarakat Indonesia pun selalu berharap salah urus atau mismanagement tidak pernah terjadi pada aspek tata kelola perekonomian nasional. Segenap warga bangsa pasti berharap daya tahan perekonomian selalu terjaga. Sebab, dengan perekonomian nasional yang daya tahannya terjaga di tengah ragam tekanan eksternal itu, negara dipastikan masih mampu menjalani fungsinya menjaga kedaulatan, melindungi segenap warga bangsa, dan terutama menyelenggarakan ragam jaring pengaman sosial untuk membantu kelompok masyarakat yang lemah.

Agar ekonomi Indonesia mampu bertahan di tengah ketidakpastian itu, salah urus atau kecerobohan tata kelola tidak bisa ditolerir. Keputusan pemerintah mengurangi subsidi BBM (bahan bakar minyak) pada pekan pertama September 2022 patut dipahami sebagai jalan keluar atau strategi menghindar dari salah urus. Jor-joran

memberi subsidi adalah salah satu bentuk salah urus keuangan negara.

Apalagi, realisasi subsidi BBM sendiri sudah ditandai dengan salah urus yang demikian mencolok, yakni tidak tepat sasaran. Seperti sudah menjadi catatan bersama, 80% dari total subsidi BBM justru dinikmati oleh kalangan yang mampu. Dengan fakta ini, sama artinya negara mensubsidi kelompok masyarakat berkecukupan. Tentu saja tidak bisa diterima akal sehat, sebab subsidi lazimnya menyasar mereka yang lemah.

Karena tidak tepat sasaran itulah mekanisme penyaluran subsidi BBM perlu dikoreksi. Mau tak mau, subsidi BBM-nya harus dikurangi sehingga harga jual BBM bersubsidi harus naik. Sedangkan nilai pengurangan subsidi BBM itu digunakan atau dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT) yang hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhak.

Kalau kebijakan subsidi yang jor-joran alias tidak tepat sasaran itu dibiarkan berlanjut, neraca keuangan negara menjadi sangat tidak sehat. Bahkan bisa menjerumuskan negara ke posisi bangkrut. Benar bahwa tidak semua orang mau menerima atau memahami keharusan negara mengurangi subsidi BBM yang konsekuensi logisnya berwujud naiknya harga jual BBM bersubsidi. Namun, sebuah keputusan untuk menyelamatkan kepentingan nasional yang lebih besar tetap harus diambil, sekali pun keputusan itu bernuansa tidak populis.

Sebagaimana dipahami bersama, akibat lonjakan harga minyak di pasar dunia, anggaran subsidi BBM dalam APBN 2022 membengkak dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502,4 triliun untuk kuota 23 juta kilo liter Peralite dan 15,1 juta kiloliter Solar. Akibat penyaluran yang tidak tepat sasaran itu, kuota pertalite dan solar subsidi diperkirakan akan

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI



habis pada Oktober mendatang.

Kalau penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran itu ingin dipertahankan hingga akhir tahun anggaran 2022, kuota pertalite harus ditambah menjadi 29,1 juta kiloliter, dan solar bersubsidi ditambah menjadi 17,4 juta kiloliter. Untuk tambahan dua kuota BBM bersubsidi itu, anggaran subsidi BBM 2022 memerlukan tambahan biaya sedikitnya Rp 195 triliun.

Dan, 80% dari tambahan anggaran subsidi itu masih dikonsumsi oleh kelompok masyarakat yang mampu. Kalau pola kebijakan seperti ini terus dipertahankan, sama artinya masyarakat membiarkan negara dan pemerintah salah urus keuangan negara. Potensi salah urus keuangan negara itulah yang mestinya diprotes oleh siapa saja peduli.

Maka, keputusan pemerintah mengurangi subsidi BBM yang mulai berlaku pada 3 September 2022 siang itu patut dipahami sebagai jalan keluar atau strategi menghindar dari salah urus keuangan negara. Menghindari salah urus keuangan negara itu menjadi bagian dari upaya menjaga daya tahan perekonomian nasional saat dunia masih diselimuti ketidakpastian yang berlarut-larut.

Karena strategi yang dipilih pemerintah dalam merawat daya tahan perekonomian nasional adalah mengurangi subsidi BBM, pilihan itu layak dimaknai sebagai ajakan kepada semua elemen masyarakat

untuk bersama-sama merawat daya tahan ekonomi negara di tengah ragam tekanan eksternal.

Memang, dinamika kehidupan hari-hari ini tidak nyaman karena harga barang dan jasa, termasuk harga bahan pangan, menjadi lebih mahal dari hari-hari sebelumnya. Kenaikan harga barang dan tarif jasa-jasa itu menjadi konsekuensi logis dari naiknya harga energi sebagai salah faktor dalam proses produksi.

Namun, ketidaknyamanan akibat lonjakan harga energi itu tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia. Komunitas masyarakat di berbagai belahan dunia pun merasakan hal yang sama. Masyarakat di negeri-negeri kaya seperti Amerika Serikat dan Eropa sudah sejak beberapa waktu lalu mengeluhkan mahalannya harga bensin dan gas.

Di Indonesia, berkat daya tahan dan pertumbuhan ekonomi yang impresif, negara masih mampu mensubsidi kebutuhan masyarakat akan energi, seperti BBM, gas dan daya listrik. Hanya karena sebagian besar subsidi BBM terbukti tidak tepat sasaran, pemerintah harus berkeputusan mengurangi subsidi BBM. Namun, bagi mereka yang lemah dan rentan, subsidi tetap disediakan dalam wujud BLT.

Dengan tetap memprioritaskan daya tahan perekonomian nasional, diyakini bahwa pemerintah akan tetap mengalokasikan anggaran untuk subsidi energi pada tahun anggaran 2023 mendatang. □

TERIMA DUBES LIBYA: BAMSOET DORONG PENINGKATAN KERJASAMA EKONOMI

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.10/TH.XV/OKTOBER 2021

MENUJU ADAPTASI KEBIASAAN BARU HIDUP BERDAMPINGAN DENGAN COVID-19



ISSN 0854-6371



9 770854 637158

06 Refleksi
Kecenderungan Positif
Cegah Gelombang Tiga

19 Nasional
Sepakat Pentingnya
Indonesia Miliki PPHN

39 Selingan
Sejarah Penjara
Mulai Abad XVIII

54 Sosialisasi
Tidak Ada Agenda Perpanjangan
Masa Jabatan Presiden

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Sosialisasi **EMPAT PILAR MPR RI**
MELALUI PAGELARAN SENI BUDAYA

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

INDONESIA
INI BARU
DARI MPR BUNTUK NKRI

INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

Daftar Isi

EDISI NO.10/TH.XV/OKTOBER 2021



08 BERITA UTAMA

Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Pengendalian pandemi ini tidak hanya sebatas obat, vaksin, vitamin, atau kebijakan pemerintah lainnya. Tetapi yang lebih penting adalah perubahan pola hidup dan perilaku. Jadi perlu ada edukasi dan sosialisasi tentang perubahan perilaku hidup masyarakat.



16 Nasional

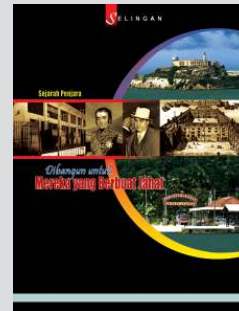
Pimpinan MPR Menerima Duta Besar Libya untuk Indonesia



50 Sosialisasi

Bamsot: Amandemen Terbatas Hasilkan PPHN

MAJELIS EDISI NO.10/TH.XV/OKTOBER 2021



39 SELINGAN

Sejarah Penjara



76 Profil

Illiza Saaduddin Djamal

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	26
Aspirasi Masyarakat	47
Diskusi Mejlis	36
Gema Pancasila	48
Varia MPR	68
Wawancara	70
Figur	72
Ragam	74
Dari Rumah Kebangsaan	78
Rehal	82



COVER

Edisi No.10/TH.XV/Oktober 2021
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasita,

Heri Herawan, Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Muliawan

KOORDINATOR REPORTASE

Ario Setiawan

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,

Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Bayu Nugroho, Yenita Revi,

Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Faridz Rizky,

Wira, Subhan

PENANGGUNG JAWAB/

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayatni

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana,

Armansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru

TREN pertambahan kasus positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia mulai melandai. Tanda-tanda penurunan kasus Covid-19 ini terlihat sejak awal Agustus 2021. Merujuk pada data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sepanjang Juli sampai September 2021, terlihat adanya tren penurunan kasus positif Covid-19 secara perlahan memasuki Agustus 2021 dan terus berlanjut pada September 2021.

Hingga September 2021 terjadi penurunan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia secara signifikan. Angka kasus harian Covid-19 berada di bawah 10.000 kasus, bahkan pada akhir September 2021 angka kasus positif Covid-19 turun hingga kisaran 2.000 kasus. Selain itu, tingkat pasien sembuh mencapai 90%. Rasio keterisian rumah sakit secara nasional berada di angka 19%.

Contohnya, data Satgas Penanganan Covid-19 pada 26 September 2021. Pada hari itu tercatat pertambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 1.760 kasus. Penambahan ini lebih rendah dibanding hari sebelumnya yang tercatat 2.137 kasus. Sedangkan kasus meninggal bertambah 86 orang. Pertambahan kasus baru sudah di bawah angka 2.000, sedangkan angka kematian juga terus mengalami penurunan.

Memang, sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak Juli dan terus diperpanjang hingga saat ini, kasus positif Covid-19 di Indonesia terus melandai. Tentu ini kabar gembira bagi masyarakat. Warga masyarakat seolah euforia dengan penurunan pertambahan kasus positif Covid-19 ini. Masyarakat pun melakukan berbagai aktivitas sosial, budaya, keagamaan, maupun ekonomi, yang selama ini terhenti.

Kementerian Kesehatan menyebutkan, ada dua faktor yang membuat kasus Covid-19 di Indonesia melandai. Pertama, masyarakat secara disiplin menjalankan protokol kesehatan

(prokes). Kedua, berjalannya vaksinasi nasional secara massif. Atas upaya itu, Indonesia mendapat apresiasi dari dunia atas keberhasilan menurunkan jumlah kasus positif Covid-19. Apresiasi itu datang dari WHO, World Bank, dan negara-negara lain.

Pandemi Covid-19 di Indonesia memang mulai terkendali. Epidemiolog menyebut fase ini sebagai fase yang menyenangkan. Namun, pandemi ini belum berakhir. Beberapa negara yang telah berhasil mengendalikan pandemi justru sekarang menghadapi gelombang ketiga dengan kemunculan varian baru virus Corona. Berkaca dari negara-negara itu, Indonesia memang perlu waspada. Sebab, sewaktu-waktu kasus Covid-19 bisa melonjak kembali. Karena itu, meskipun kita berhasil menurunkan angka Covid-19, kita tetap waspada dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Seiring dengan penurunan kasus harian Covid-19 di Indonesia belakangan ini, pemerintah hendaknya juga mulai mempertimbangkan untuk penerapan *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru. Masyarakat mesti melakukan adaptasi kebiasaan baru karena harus hidup berdampingan dengan Covid-19. Caranya, dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Masyarakat harus membiasakan diri dengan norma-norma baru dalam semua aktifitas, yaitu dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan mematuhi berbagai peraturan.

Agar tetap bisa beraktivitas dan hidup berdampingan dengan Covid-19 secara aman dan terkendali, mau tidak mau, masyarakat harus meningkatkan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan. Di sisi lain, pemerintah juga harus konsisten dalam kebijakan pengendalian penyebaran virus Corona. Dengan kebijakan yang konsisten, masyarakat pun menjadi terbiasa dengan norma-norma baru yang wajib dipatuhi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. □

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238,

57895251 Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



ILUSTRASI: SUSTHANTO

Pejabat dan Segenap Pegawai
Setjen MPR RI
Mengucapkan Turut Berduka Cita
atas Wafatnya:

Evieta Fajar Pusporini

Reporter Majalah Majelis

*Semoga Amal Ibadah Almarhumah
Diterima Allah SWT.
dan Keluarga yang ditinggalkan diberi
Ketabahan.*

Kecenderungan Positif untuk Mencegah Gelombang Tiga

SETELAH melalui puncak penularan gelombang kedua, tantangan bersama berikutnya adalah mencegah dan menghindari gelombang ketiga penularan Covid-19. Kecenderungan positif dalam pengendalian pandemi Covid-19 di dalam negeri sekarang ini harus dipertahankan dan dirawat dengan tetap bersikap waspada, berhati-hati dan konsisten mematuhi protokol kesehatan (Prokes).

Penurunan jumlah kasus Covid-19 dan turunnya tingkat keterisian rumah sakit atau BOR (bed occupancy rate) pada rumah sakit rujukan Covid-19 akhir-akhir ini jangan sampai membuat pemerintah dan masyarakat lengah atau ceroboh. Sepanjang tahun kedua ini, perkembangan pandemi masih menghadirkan ketidakpastian. Vaksinasi korona yang telah dilaksanakan di banyak negara memang sangat bermanfaat, tetapi vaksin itu sendiri belum menyelesaikan masalah. Faktanya, penularan virus korona yang menyebabkan lonjakan jumlah pasien masih terjadi di banyak negara.

Data terkini memang memperlihatkan bahwa Indonesia sudah melalui puncak penularan Covid-19 sepanjang gelombang kedua pandemi di dalam negeri. Boleh jadi, pekan ketiga Juli 2021 menggambarkan puncak penularan. Pada 14 Juli 2021, ada 54.517 tambahan kasus baru. Keesokan harinya, 15 Juli 2021, bertambah lagi 56.757 kasus. Dan pada 16 Juli 2021, tambahan kasus baru mencapai 54.000.

Pekan kedua Agustus 2021, tambahan jumlah kasus per hari sudah memasuki level di bawah 30.000-an kasus. Per Sabtu (14/8), data resmi pemerintah melaporkan tambahan 28.598 kasus baru Covid-19 yang tersebar di 34 provinsi. Konsekuensi dari menurunnya jumlah kasus baru adalah berkurangnya tekanan pada sektor jasa layanan kesehatan.

Beberapa hari lalu, Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa BOR untuk ruang isolasi di rumah sakit di seluruh provinsi, per 12 Agustus 2021, tidak ada lagi yang mencapai 80%. Namun, khusus ruang Intensive Care Unit (ICU), BOR rumah sakit pada beberapa provinsi masih di atas 80%. Antara lain, Bali, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Kecenderungannya layak disebut positif, karena pulau Jawa yang sebelumnya sempat berstatus sebagai episentrum wabah korona

di dalam negeri mulai menampakkan perubahan yang menjanjikan. Data menunjukkan bahwa angka atau jumlah kasus penularan di Jawa sejak Juli mulai melandai. Karena alasan itulah pemerintah dan Satgas Covid-19 mendorong semua pemerintah daerah di luar Jawa meningkatkan kewaspadaan dan bekerja lebih keras untuk menekan penularan.

Jika saja kecenderungan di pulau Jawa bisa dibuat lebih baik lagi, upaya pemulihan pada sejumlah aspek, terutama aspek ekonomi, bisa dimulai. Produktivitas pulau Jawa masih menjadi kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kecenderungan positif dalam pengendalian pandemi Covid-19 di dalam negeri sekarang ini harus dipertahankan dan dirawat, antara lain dengan tetap bersikap waspada, berhati-hati dan konsisten mematuhi protokol kesehatan (Prokes). Kesadaran bersama akan hal ini sangatlah penting, karena semua elemen masyarakat dihadapkan pada tantangan berikutnya, yakni mencegah dan menghindari gelombang ketiga penularan Covid-19.

Hingga kini, pandemi Covid-19 pada tingkat global sekali pun masih menghadirkan ketidakpastian. Durasi pandemi ini belum bisa dihitung. Karena itu, ketidakpastian dan ketidaktentuan itu harus disikapi dengan cerdas dan bijaksana oleh semua elemen masyarakat. Semangat dan tujuan utamanya adalah menghindari dari gelombang ketiga.

Pada puncak penularan gelombang kedua, tersaji dengan gamblang ragam permasalahan dan banyak kisah memilukan. Rumah sakit rujukan tidak mampu menampung dan melayani semua pasien akibat besarnya lonjakan kasus Covid-19. Jumlah dokter dan tenaga kesehatan (Nakes) jauh lebih sedikit dibanding tambahan jumlah pasien.

Akibatnya, tidak sedikit pasien yang tidak tertolong atau terlambat mendapatkan pertolongan dari dokter dan Nakes. Juga di puncak gelombang kedua itu, penanganan pasien Covid-19 diwarnai dengan stok obat-obatan yang menipis dan keluhan banyak manajemen rumah sakit karena kehabisan oksigen.

Siapa pun tentu tidak ingin tragedi serupa terulang lagi. Semua orang harus mau belajar dari puncak penularan Covid-19 pada

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI



gelombang kedua yang menghadirkan ragam eksekusi yang nyata itu. Kini, data-data resmi menjelaskan bahwa Indonesia telah melalui puncak penularan gelombang kedua. Akan tetapi, ancaman dari Covid-19 tidak berkurang dengan sendirinya. Virus korona yang terus bermutasi masih menghadirkan ancaman. Ancaman yang tidak terlihat itu memaksa orang lanjut usia, kaum muda, remaja hingga anak bayi sekalipun melindungi diri dengan Prokes.

Benar bahwa ada kegelisahan sebagian publik karena faktor penerapan pembatasan sosial. Bahkan ada yang menuntut pelonggaran atas PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat). Sayangnya, pada saat yang sama, semua pihak harus mengakui dan menerima fakta bahwa pandemi ini belum berakhir. Pada tingkat global, durasi pandemi yang tidak menentu ditunjukkan oleh kurva penularan yang fluktuatif; menurun di kawasan tertentu, tetapi melonjak di kawasan lain.

Bahkan, karena tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, sejumlah negara sudah menyatakan siap berdampingan hidup dengan virus korona. Namun, kesiapan itu harus didukung oleh sistem layanan kesehatan publik yang efektif merespons pasien yang terinfeksi Covid-19. Salah satu tolok ukur kemampuan itu adalah mencegah atau meminimalisir jumlah kematian pasien Covid-19. Jika kematian akibat infeksi Covid-19 masih tinggi, itu pertanda sistem layanan kesehatan publik negara bersangkutan belum efektif.

Karena itu, setiap negara didorong untuk tidak gegabah dalam melonggarkan Prokes atau PPKM. Dalam konteks ini, pengalaman buruk Amerika Serikat (AS), Israel, serta Inggris layak dijadikan contoh kasus pembelajaran. Pekan keempat April 2021, Pusat Pengendalian dan Pencegahan

Penyakit pemerintah AS melonggarkan aturan prokes Covid-19.

Karena sudah banyak warga AS yang menerima vaksinasi, peraturan yang mewajibkan penggunaan masker di luar ruangan tidak lagi diwajibkan. Sebelumnya, Israel juga mengumumkan kebijakan pelonggaran yang sama. Inggris pun cenderung melonggarkan ketentuan Prokes selama berlangsungnya turnamen sepakbola Piala Eropa 2020.

Akibat pelonggaran Prokes itu, AS, Inggris dan Israel kembali mengalami lonjakan kasus Covid-19. Memasuki pekan kedua Agustus 2021, jumlah tambahan kasus baru per hari di AS bisa mencapai 100.000 kasus. Rumah sakit di beberapa negara bagian AS sempat kewalahan karena lonjakan jumlah pasien itu. Di Israel, kendati 80% warga dewasa sudah menerima vaksinasi, pelonggaran Prokes justru menyebabkan terjadinya lonjakan kasus baru Covid-19.

Banyak negara sudah belajar dari pengalaman AS, Israel, dan Inggris itu, dan semuanya tidak ingin gegabah melonggarkan Prokes. Untuk menghindari gelombang ketiga penularan Covid-19, Indonesia pun tidak boleh gegabah melonggarkan Prokes. Apalagi, persentase penduduk yang sudah divaksinasi belum proporsional.

Puncak penularan Covid-19 gelombang kedua di dalam negeri dengan banyak cerita pilu itu hendaknya mendorong semua elemen masyarakat semakin cerdas dan bijaksana menyikapi ancaman virus korona. Pengendalian pandemi sudah menunjukkan kecenderungan positif, dan kecenderungan ini menjadi modal awal bersama untuk mencegah musibah berikutnya. Biasakan mematuhi Prokes agar Indonesia terhindar dari gelombang ketiga penularan Covid-19. □

Kota Bandung Kembali Mencatat Sejarah

Pembentukan **Forum MPR Dunia** dengan Semangat KAA 1955



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR RI telah siap menyelenggarakan Forum MPR Dunia yang akan dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung, pada 24-26 Oktober 2022. Rencananya Presiden RI Joko Widodo akan membuka acara ini, dan penutupan oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin.

MEJA bundar dan kursi-kursi ditata apik di Ruang Delegasi, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta. Meja disusun berbentuk *roundtable* sudah dirapikan menyambut kedatangan para duta besar atau perwakilan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Indonesia. Pada hari itu, Senin, 19 September 2022, Pimpinan MPR menggelar pertemuan dengan para duta besar negara-negara OKI dalam rangka mematangkan rencana pembentukan World Forum People's Consultative Assembly (Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia), atau nama lain yang belum diputuskan, pada 24-28 Oktober di Bandung, Jawa Barat.

Menjelang pukul 10.00 WIB, satu per satu duta besar atau perwakilan duta besar mulai berdatangan. Mereka menempati tempat duduk yang sudah tertera nama negara di meja *roundtable*. Pimpinan MPR pun mulai hadir di Ruang Delegasi. Sebelum acara dimulai, Pimpinan MPR berbincang-bincang dengan para duta besar. Para pimpinan yang pada acara itu adalah: Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan para Wakil Ketua MPR yakni Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Pertemuan Pimpinan MPR dengan para duta besar negara-negara OKI ini juga mengundang Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Namun,

Menlu berhalangan hadir karena masih berada di New York, Amerika Serikat. Undangan kepada Menlu dalam pertemuan ini diwakili Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenlu, Muhsin Syihab. Pertemuan juga diikuti Sekretaris Jenderal MPR, Ma'ruf Cahyono, dan para pejabat Sekretariat Jenderal MPR.

Sebanyak 24 duta besar atau perwakilan duta besar menghadiri pertemuan ini. Para duta besar yang hadir, antara lain: Duta Besar Aljazair H.E. Lahcene Kaid Slimane, Duta Besar Arab Saudi H.E. Esam A. Abid Althagafi, Duta Besar Bahrain H.E. Ahmed Abdulla Alharmasi Al Hajri, Duta Besar Bangladesh H.E Air Vice Marshal Mohammad Mostafizur Rahman, Duta Besar Iran H.E. Mohammad Khoush Heikal Azad, Duta Besar Mauritania H.E Houssein Sidi Ahdellah Deh, Duta Besar Mesir H.E Ashraf Sultan, Duta Besar Qatar H.E Fawzeeya Edrees Salman Al-Sulaiti, dan Duta Besar UAE H.E Abdulla Salem Obaid Salem Aldhaeri.

Selain itu, juga hadir Wakil Duta Besar Kazakhstan Kazbek Bokebayev, Wakil Duta Besar Azerbaijan Mrs. Gultakin Habibli, Konsul Kehormatan Kedutaan Albania Fabian Pascoal, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Irak Ammar Hameed Saadallah Al-Khalidy, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Lebanon Karim Khalil, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Malaysia Adlan Bin Mohd Shaffieq, Kuasa Usaha



Ad Interim Maroko Kedutaan Faouzi Touiger, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Mozambik Jose Pedro Lucas Matenga, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Oman Issa Ibrahim Al Farai, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Pakistan Muhammad Faisal Fayyaz, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Palestina Ahmed M.I. Metani, Sekretaris II Kedutaan Nigeria Zaharadeen M. Musa, dan Konselor Kedutaan Yordania Saif Al Adaileh.

Dalam pertemuan dengan para duta besar dan perwakilan negara-negara OKI di Indonesia, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan pidato pengantar, lalu diikuti pidato dari Staf Ahli Menlu Muhsin Syihab, dilanjutkan dengan penjelasan dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, serta penjelasan teknis pertemuan Forum MPR Dunia di Bandung oleh Fadel Muhammad. Pertemuan diakhiri dengan acara ramah tamah dan makan siang bersama.

Usai pertemuan, Bambang Soesatyo mengungkapkan, para duta besar dan perwakilan negara-negara OKI memberikan

dukungan pada Indonesia atas pembentukan Forum MPR Dunia. “Dukungan tersebut ditunjukkan oleh para duta besar dengan meminta kepada MPR RI agar mereka dilibatkan dalam proses mengundang para ketua parlemen di masing-masing negara. Bahkan, dari keinginan MPR RI hanya mengundang dua orang dari setiap parlemen, para duta besar malah meminta untuk ditambah hingga lima orang dalam satu delegasi,” ujar Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo.

Pertemuan Pimpinan MPR dengan para duta besar negara sahabat ini adalah pertemuan kedua. Pada Kamis, 9 Juni 2022, Pimpinan MPR juga telah menggelar pertemuan dengan duta besar negara-negara Islam. Pada pertemuan pertama, para duta besar juga menyampaikan dukungan atas inisiasi MPR membentuk Forum MPR Dunia—pada waktu itu masih disebut sebagai Forum Majelis Syuro Dunia. Pada waktu itu hadir Duta Besar Kesultanan Oman Al Sayyid Nazar Al Julanda bin Madjid Al Said, Duta Besar Maroko Quadia Benabdellah, Duta

Besar Yaman Abdulgani Nassr Ali Al-Shamiri, Duta Besar Iran Mohammad Azad, Duta Besar Qatar Fawziya Edress Salman Al-Sulaiti, dan Duta Besar Bahrain Ahmad Abdulla Alharmasi Alhajeri.

Sebenarnya sudah dua tahun lalu, MPR merencanakan pembentukan Forum MPR Dunia atau Majelis Syuro Dunia. MPR secara resmi mengumumkan gagasan pembentukan Forum atau Majelis itu dalam Sidang Tahunan MPR 2020 yang digelar di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. Sidang Tahunan MPR tahun 2020 itu digelar di tengah pandemi dan masih tingginya kasus positif Covid-19.

Dalam Sidang Tahunan MPR itu, Bambang Soesatyo dalam pidatonya mengungkapkan, MPR menginisiasi pembentukan Majelis Syuro Dunia. “Pada saat kunjungan kerja Pimpinan MPR ke Arab Saudi dan Maroko beberapa waktu lalu, Pimpinan MPR menyampaikan gagasan untuk membentuk Majelis Syuro Dunia,” ujarnya. Pimpinan MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bertemu dengan Raja Arab H.H. Salman bin Abdulaziz al-Saud, Ketua Majelis Syuro Saudi Arabia di Riyadh, dan Ketua Majelis Syuro Maroko di Rabat, pada Desember 2019 lalu.

Setelah diumumkan secara resmi dalam Sidang Tahunan MPR, MPR juga menggelar seminar nasional tentang pembentukan Majelis Syuro Dunia. Seminar dalam rangka HUT Ke-75 MPR ini diisi oleh beberapa narasumber, antara lain Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah (alm) Prof. Dr. Azyumardi Azra, mantan ketua Program Kajian Timur Tengah UI Dr. M. Luthfi Zuhdi, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UI Dr. Fitra Arsil, dan Direktur Sosial Budaya Organisasi International Negara Berkembang Kemenlu RI Kamapradita Isnomo.

Untuk mematangkan konsep pembentukan Majelis Syuro Dunia, Pimpinan MPR telah menunjuk Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid sebagai koordinator pembentukan Majelis Syuro Dunia. Salah satu tugas koordinator adalah melakukan komunikasi lebih lanjut dengan negara-negara Islam dan negara-negara Barat tentang perlunya Majelis Syuro Dunia.

Usai pertemuan Pimpinan MPR dengan para duta besar dan perwakilan negara-negara OKI, Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, MPR RI telah siap menyelenggarakan Forum MPR Dunia yang akan dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung, pada 24-26 Oktober 2022. Rencananya

Presiden RI Joko Widodo akan membuka acara ini, dan penutupan oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. "MPR sudah mempersiapkan semua yang diperlukan, mulai dari penjemputan delegasi di Bandara, transportasi serta akomodasi selama di Bandung. Juga yang terkait dengan bahan dan materi kajian dan bahasan untuk pembentukan dan deklarasi Forum ini," ujar HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid.

HNW menambahkan, Forum MPR Sedunia akan diselenggarakan di Kota Bandung, kota bersejarah tempat Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. "Kami ingin menyegarkan kembali ingatan sejarah, semangat Asia Afrika, semangat Bandung, yang memberikan kontribusi bagi negara-negara dan menghadirkan kemaslahatan



Hidayat Nur Wahid

bagi semuanya, dan betapa pentingnya kebersamaan, termasuk pentingnya membela Palestina dan membela kemanusiaan dan peradaban. Dari negara-negara yang diundang mengikuti Konferensi Asia Afrika di Bandung, hanya tinggal Palestina yang belum merdeka," katanya.

Amanat Pembukaan UUD

Menurut Bamsoet, sapaan Ketua MPR Bambang Soesatyo, gagasan pembentukan Forum MPR Dunia dilatarbelakangi atas kebutuhan menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban, dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. "Mengingat landscape ideologi, politik, dan ekonomi global saat ini penuh dengan disrupsi dan kompetisi. Persaingan semakin tajam dan memanas. Konflik dan ketegangan global memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh dunia," jelasnya.

HNW pun menyebutkan, Forum MPR Dunia merupakan inisiatif dari MPR RI untuk melaksanakan salah satu perintah dan ketentuan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu negara harus hadir untuk terlibat aktif, termasuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan juga berpendapat sama. Sebagai warga dunia, katanya, Indonesia harus terlibat dan berkiprah di dunia internasional. Apalagi Alinea keempat UUD NRI Tahun 1945 secara jelas tertulis, "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia".

"Poinnya, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembentukan Forum MPR Dunia adalah salah satu representasi amanah Pembukaan UUD itu. Pada awalnya bernama Majelis Syuro Dunia, tapi akhirnya untuk tujuan yang lebih besar, tercetuslah World Forum People's Consultative Assem-

bly (Forum MPR Dunia),” katanya kepada *Majelis*.

Syarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, mengakui, memang sudah ada forum kerjasama parlemen sejenis. Namun, dia menyebutkan Forum MPR Dunia juga cukup penting. “Sebab, Forum MPR Dunia ini akan menyempurnakan kerjasama parlemen yang sudah ada. Jika perbincangan permasalahan dunia tidak mencapai titik temu, maka bisa diupayakan melalui Forum MPR Dunia. Hubungan kerjasama tidak hanya antar DPR, tetapi juga antar MPR,” imbuhnya.

Tidak jauh berbeda, HNW juga mengatakan, dalam era demokrasi seperti ini peran dan kerjasama parlemen sangat diperlukan. “Saat ini sudah ada banyak forum dan kerjasama. Tetapi forum antar MPR, Majelis Syuro, Majelis Tinggi atau nama sejenis di lingkungan keseluruhan OKI malah belum ada. Kami melihat Forum MPR, Forum Majelis Syuro, atau forum lembaga tinggi dari parlemen sangat diperlukan. Karena itu, MPR RI menginisiasi pembentukan Forum MPR Dunia. Inisiatif ini sudah dikomunikasikan dengan pimpinan lembaga parlemen di berbagai parlemen negara OKI. Mereka sangat mendukung,” paparnya.

Sementara itu, Bamsoet menerangkan, menjadi keuntungan tersendiri apabila terdapat sejumlah saluran organisasi internasional dalam rangka menyikapi persoalan yang dihadapi umat manusia. “Forum MPR Dunia sebagai bentuk organisasi yang tidak permanen, bisa memiliki peran strategis di kancah global. Antara lain, turut memberikan alternatif solusi saat dunia menghadapi berbagai isu global, yaitu krisis kemanusiaan, krisis lingkungan, krisis ekonomi global, krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Berbagai isu global inilah yang harus dihadapi dan dicari solusi bersama,” katanya.

Sejumlah Harapan

HNW berharap, Forum MPR Dunia ini bukan hanya sekadar forum, tapi forum yang memberikan kontribusi bagi peningkatan peran dan kualitas hubungan antarbangsa, antarnegara, melalui kuatnya hubungan



Fadel Muhammad

antarparlemen. “Kita berharap, Forum MPR Se-dunia bisa menghasilkan pembentukan Forum MPR sedunia atau nama lain yang disepakati, serta komunike bersama di Bandung, sebagaimana dahulu Konferensi Asia Afrika menghasilkan Dasa Sila Bandung. Sangat mungkin Forum MPR Dunia itu membuat semacam Dasa Sila Bandung sesuai kesepakatan ketua parlemen,” tuturnya.

HNW juga berharap, penyelenggaraan Forum MPR Se-dunia bersamaan dengan Indonesia menjadi pimpinan negara G-20 menjadi momentum yang baik, sehingga apa yang dihasilkan pada pertemuan Forum MPR Se-dunia bisa disampaikan pada forum pimpinan G-20. “Sehingga menjadi sumbangsih Forum MPR Se-dunia untuk kebaikan, kemaslahatan, kedamaian, peradaban, dan solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dunia di



Sodik Mudjahid

masa sekarang dan yang akan datang,” katanya.

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad juga mengaitkan penyelenggaraan Forum MPR Dunia ini dengan posisi Indonesia sebagai presidensi G-20. “Penyelenggaraan Forum MPR Dunia ini juga untuk mendukung Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan G-20. Karena itu, kita selenggarakan pada bulan Oktober sebelum pertemuan pemimpin G-20 di Bali. Dengan Forum MPR Dunia ini kita harapkan Indonesia bisa memiliki satu hubungan internasional dalam bidang parlemen, terutama untuk upper house-nya,” katanya kepada *Majelis*.

Pimpinan MPR lainnya, Syarief Hasan juga berharap, dengan Forum MPR Dunia ini semakin menguatkan peran sentral MPR dalam menggagas berbagai gerakan internasional. Seperti pada waktu lalu, Indonesia pernah menggagas ASEAN, Gerakan Non Blok, dan yang paling fenomenal Konferensi Asia Afrika. “Saatnya kita menggagas kembali organisasi internasional yang lebih luas cakupannya, lebih inklusif, dan lebih berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah global. Karena itu, keberadaan Forum MPR Dunia harus didorong agar lebih mendunia,” ujarnya.

Keberadaan Forum MPR Dunia, lanjut Syarief Hasan, akan menjadi kebanggaan karena menjadi tempat musyawarah berbagai permasalahan dunia. “Mudah-mudahan Forum MPR Dunia bisa menjadi catatan sejarah dunia masa kini dan masa yang akan datang, sejajar dengan KTT Non Blok, KAA, dan ASEAN, yang mengharumkan nama bangsa Indonesia hingga kini,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, berharap, dengan pembentukan Forum MPR Dunia, maka Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam forum itu harus memiliki bargaining power yang kuat. “Jangan sampai forum ini hanya sebagai tempat rapat tanpa power apapun. Forum MPR Dunia harus memiliki kiprah yang nyata dan dirasakan seluruh dunia,” katanya. □

DER/MBO/BSC

Gedung Merdeka, Tempat Pertemuan Forum MPR Dunia

Delegasi Forum MPR Dunia juga akan melakukan history walk dari Hotel Savoy menuju Gedung Merdeka, untuk mengenang perjuangan Konferensi Asia Afrika tahun 1955.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PEMBENTUKAN World Forum People's Consultative Assembly (Forum MPR Dunia) rencananya diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung, pada 24-26 Oktober 2022. Presiden Joko Widodo akan membuka pertemuan delegasi Forum MPR Dunia dan akan ditutup oleh Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. Untuk mematangkan pembentukan Forum MPR Dunia, Pimpinan MPR menggelar pertemuan dengan para duta besar 24 negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 19 September 2022.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, Forum MPR Dunia sengaja diadakan di Gedung Merdeka, Bandung. Gedung Merdeka menjadi saksi bisu sejarah karena menjadi tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Konferensi Asia Afrika ini cukup fenomenal sebagai ajang diplomasi internasional Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia. "Karena itu, para delegasi Forum MPR Dunia nanti juga akan melakukan history walk dari Hotel Savoy menuju Gedung Merdeka, untuk mengenang perjuangan Konferensi Asia

Afrika tahun 1955," ujarnya usai pertemuan dengan 24 duta besar negara OKI.

Letak Gedung Merdeka Bandung memang cukup strategis, yakni di Jalan Asia Afrika Nomor 65, Braga, Kecamatan Sumur, Bandung, Kota Bandung. Gedung ini mudah dijangkau dari Stasiun Bandung. Kini, gedung yang banyak menyimpan cerita sejarah bangsa digunakan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Di museum ini dipamerkan berbagai benda koleksi dan foto Konferensi Asia Afrika yang digelar pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika menjadi cikal bakal Gerakan Non Blok.

Secara keseluruhan Gedung Merdeka memiliki dua bangunan utama. Bangunan pertama disebut Gedung Merdeka sebagai tempat sidang utama. Sedangkan bangunan kedua berada di samping Gedung Merdeka, yaitu Museum Konferensi Asia Afrika sebagai tempat memorabilia Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955.

Gedung Merdeka juga terkait dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37/1975, Gedung Merdeka adalah aset MPR yang dikerjasamakan dengan pemerintah provinsi.

Pemerintah provinsi dalam keputusan itu disebut sebagai penanggungjawab pemeliharaan gedung tersebut. Sementara itu, berdasarkan MoU tahun 2011 antara MPR dan Kementerian Luar Negeri, Kemenlu diberi kesempatan mengelola bagian museum. Kementerian Luar Negeri sebagai penanggungjawab substansi pengisian museum. Bagaimana sejarah Gedung Merdeka yang memiliki ikatan sejarah dengan MPR?

Berawal dari tahun 1879. Orang Belanda di Bandung mendirikan sebuah perkumpulan bernama Societeit Concordia pada 29 Juni 1879. Mereka merupakan pegawai perkebunan, pejabat, perwira, pengusaha, dan kalangan lain yang cukup kaya. Sebelumnya lokasi perkumpulan rekreasi dan hiburan mereka ada di Warung De Vries.

Mereka kemudian membeli sebuah toko yang dimiliki warga keturunan Tionghoa. Bangunan toko ini diperluas pada tahun 1895. Setelah perluasan toko ini selesai, perkumpulan Societeit Concordia pindah tempat dari Warung De Vries ke bangunan baru ini yang diberi nama "Concordia". Pada tahun itu, tempat ini hanya berupa bangunan sederhana. Sebagian dindingnya terbuat dari papan, dan halamannya hanya diterangi memakai lentera minyak tanah. Bangunan layaknya sebuah warung kopi, sesuai dengan tujuan perkumpulan ini, yaitu "...de bevordering van gezellig verkeer" yang artinya sebagai tempat pertemuan, sambil duduk-duduk minum teh.

Pada tahun 1920, bangunan sederhana itu kemudian direnovasi secara besar-besaran dengan gaya arsitektur modern (Art Deco) yang fungsional dan menonjolkan struktur. Arsitek renovasi bangunan ini adalah C.P. Wolff Schoemaker dan Van Gallen Last. Kedua arsitek Belanda ini adalah Guru Besar pada Technische Hoogeschool te Bandoeng (TH Bandoeng, yang kemudian menjadi Institut Teknologi Bandung-ITB). Setelah direnovasi, gedung itu berubah



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

menjadi gedung pertemuan “super club” yang paling mewah, lengkap, eksklusif, dan modern saat itu. Gedung pertemuan ini bisa menampung 1.200 tamu.

Societeit Concordia kembali direnovasi pada tahun 1940. Pada sisi timur dibangun gedung baru. Renovasi dirancang arsitek A.F. Aalbers dengan gaya arsitektur internasional style sehingga bentuk bangunan berbeda dari bangunan aslinya. Bagian depan bangunan berupa garis dan elemen horizontal. Gedung semakin megah dan mewah dengan arsitektur bergaya Eropa. Pada waktu itu, lantai terbuat dari marmer Italia, dihiasi dengan lampu kristal. Bangunan gedung tetap bertahan hingga sekarang. Namun, lantai sudah diganti dengan tegel asli Cimindi, Cimahi, Jawa Barat. Dan lampur kristal diganti dengan lampu neon. Gedung ini menempati areal seluas 7.500 m2.

Keadaan berubah pada masa pendudukan Jepang. Gedung Societeit Concordia berubah nama menjadi Dai Toa Kaman. Fungsi gedung juga ikut berubah. Gedung tidak lagi menjadi tempat berkumpulnya orang elit, tapi menjadi tempat pertemuan dan pusat kebudayaan. Ketika Jepang takluk di tangan sekutu, Gedung Societeit Concordia berubah fungsi menjadi kantor pusat pemerintahan Kota Bandung. Sedangkan pada masa kemerdekaan Indonesia, gedung digunakan sebagai markas pemuda Indonesia untuk menghadapi tentara Jepang karena Jepang belum mau menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia.

Berikutnya, setelah peristiwa Bandung Lautan Api pada Maret 1946, Gedung Societeit Concordia berfungsi sebagai bangunan seni dan hiburan. Kemudian pemerintah Indonesia (1946-1950) menjadikan gedung itu

sebagai gedung pertemuan umum. Pada 1954, pemerintah menetapkan Bandung sebagai tempat Konferensi Asia Afrika. Gedung pertemuan itu dijadikan sebagai tempat konferensi. Pertimbangannya, gedung pertemuan itu merupakan gedung termegah dengan lokasi strategis, dekat Hotel Savoy Homann dan Hotel Preanger.

Untuk itu pada awal 1955, gedung kembali dipugar untuk disesuaikan dengan konferensi bertaraf internasional. Renovasi dilakukan oleh Jawatan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 7 April 1955, Presiden Soekarno mengganti nama Gedung Societeit Concordia menjadi Gedung Merdeka dan Jalan Raya Pos menjadi Jalan Asia Afrika. Alasannya, penamaan Gedung Merdeka untuk memberikan semangat perjuangan mencapai kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Asia Afrika yang masih mengalami penjajahan saat itu.

Gedung Merdeka menjadi gedung konstituante setelah terbentuk Konstituante Republik Indonesia sebagai hasil Pemilihan Umum 1955. Kemudian, Gedung Merdeka menjadi tempat kegiatan Badan Perancang Nasional, lalu menjadi Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terbentuk pada tahun 1960. Di sinilah keterkaitan Gedung Merdeka dengan MPR (MPRS). Pada tahun 1971, kegiatan MPR di Gedung Merdeka seluruhnya dialihkan ke Jakarta. Meski demikian, melalui surat keputusan Pimpinan MPRS tanggal 6 Juli 1968 mengenai Gedung Merdeka (bekas Gedung MPRS), Gedung Merdeka masih menjadi tanggung jawab MPRS.

Di Gedung Merdeka pernah berlangsung Konferensi Islam Asia Afrika (tahun 1965) dan tempat pertemuan Gerakan Non Blok (1974). Selain itu, gedung ini juga pernah digunakan sebagai tempat pertemuan-pertemuan nasional maupun internasional, seperti Konferensi Wartawan Asia Afrika, Konferensi World Health Organization (WHO). Pada tahun 2015 pemerintah menggelar Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika.

Kini, Gedung Merdeka yang masih memiliki ikatan sejarah dengan MPR, kembali menjadi tempat pertemuan internasional, yaitu Forum MPR Dunia yang digelar pada 24-26 Oktober 2022. □

BSC





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dr. Sjarifuddin Hasan, SE, MBA Wakil Ketua MPR RI

Forum MPR Dunia Menjadi Forum Memusyawarahkan Permasalahan Dunia

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) mematangkan rencana pembentukan Forum MPR Dunia yang akan diselenggarakan di Bandung pada 24-26 Oktober 2022. Untuk itu, MPR mengadakan pertemuan dengan para duta besar negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 19 September 2022. Sebanyak 24 duta besar negara-negara OKI menyambut antusias inisiasi MPR untuk membentuk Forum MPR Dunia. Delegasi yang akan mengikuti Forum MPR Dunia masih bisa bertambah di luar 24 negara itu mengingat anggota OKI sebanyak 54 negara.

Inisiasi MPR membentuk Forum MPR Dunia—Majelis Syuro Dunia, atau nama lain yang nanti disepakati—sudah sejak tahun lalu. Pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2022, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga sudah mengungkapkan rencana MPR untuk membentuk Forum MPR Dunia. Saat ini MPR sedang

melakukan persiapan untuk suksesnya gelaran internasional ini.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang Forum MPR Dunia ini, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MBA. Berikut perbincangan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat yang juga anggota Komisi I DPR RI. Petikannya.

Sebenarnya apa yang melatarbelakangi MPR berinisiatif untuk mengajukan pembentukan Forum MPR Dunia?

Indonesia adalah warga dunia. Sebagai warga dunia Indonesia harus memiliki atau terlibat dalam kiprahnya di dunia. Apalagi, dalam Pembukaan konstitusi Indonesia pada Alinea ke-empat itu jelas tertulis, 'Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia'

Poinnya itu, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia. Inisiasi Forum MPR Dunia adalah salah satu sebagai representasi amanah Pembukaan UUD itu. Pada awalnya keluar gagasan untuk membentuk Dewan Syuro Dunia. Namun, pada akhirnya keluar pandangan untuk tujuan yang lebih besar hadirnya sebuah lembaga internasional yang memfasilitasi MPR dunia, tercetuslah World Forum Peoples Consultative Assembly (Forum MPR Dunia).

Ini digagas MPR RI sebagai wadah berhimpunnya MPR dari berbagai negara yang memiliki sistem yang sama, termasuk negara-negara berpenduduk muslim di dunia. Melalui forum tersebut, MPR RI berusaha mendorong terwujudnya tatanan dunia Islam dan Barat yang harmonis dan berkeadaban.

Saya pun mendorong, agar Dewan Syuro Dunia menjadi Forum MPR Dunia, tujuan diarahkan bukan hanya pada negara-negara Islam saja. Tetapi, ruang lingkupnya diperluas untuk menghimpun MPR dari negara-negara

Islam dan negara-negara lainnya yang memiliki penduduk beragama Islam atau non Islam. Tujuannya, agar terjadi kolaborasi yang baik dari negara maju dan berkembang untuk menyelesaikan masalah global.

Apakah saat ini ada urgensinya membentuk Forum MPR Dunia ini?

Menurut saya sangat penting. Saat ini belum ada lembaga atau organisasi MPR di dunia. Forum MPR dunia adalah bagaimana kita meningkatkan kerjasama MPR dunia. Di dunia, parlemen dapat terdiri atas beberapa kamar atau majelis, dan biasanya berbentuk unikameral atau bikameral meskipun terdapat beberapa model yang lebih rumit.

Menurut hemat saya, apapun bentuk parlemen dunia semestinya masuk dan bergabung dalam forum ini, perlu digalang

diberikan ruang untuk saling bantu membantu dalam mengatasi masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu negara saja. Terlebih jika masalah tersebut menjadi masalah global.

Bukankah sudah banyak forum parlemen (misalnya forum kerjasama antarparlemen) sebelumnya? Apa yang membedakan Forum MPR Dunia dengan forum parlemen sebelumnya?

Memang sudah ada organisasi atau lembaga dunia seperti forum parlemen. Namun, eksistensi lembaga atau organisasi, seperti Forum MPR Dunia, saya rasa mesti ada dan penting. Karena forum ini akan menyempurnakan kerjasama dunia yang sudah ada. Jika berbagai perbincangan permasalahan dunia tidak mencapai titik temu

Antara lain, terwujudnya amanah Pembukaan UUD, yakni ikut menjaga dan melaksanakan ketertiban dunia. Kehadiran Forum MPR Dunia akan melengkapi dan menguatkan peran Indonesia di berbagai organisasi dunia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, OKI, Liga Muslim Dunia. Keberadaan forum ini harus didorong agar lebih mendunia dan Indonesia yang menjadi penggagas utama MPR Dunia ini akan menguatkan peran sentral Indonesia dalam menggagas berbagai organisasi dunia dan gerakan internasional.

Dulu, pendahulu kita pernah menggagas ASEAN, Gerakan Non blok, sampai yang fenomenal yakni Konferensi Asia Afrika. Saatnya kita menggagas kembali organisasi internasional yang lebih luas cakupannya,



sehingga kerjasama MPR itu lebih dapat ditingkatkan. Intinya, kita membentuk wadah Forum MPR Dunia atau apapun namanya, yang penting, semua negara dengan sistem yang berbeda, juga bisa ikut sehingga ada kebersamaan sebagai warga dunia untuk membicarakan masalah global.

Apalagi, berbagai masalah global hari ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh komunitas kecil atau beberapa negara saja. Mulai dari masalah perdamaian, keamanan, demokrasi, HAM dan toleransi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan pembangunan. Berbagai tantangan tersebut perlu disikapi serius bersama-sama dengan melibatkan negara maju dan berkembang dengan berbagai sistem parlemennya masing-masing.

Sebuah prinsip untuk menyelesaikan masalah bersama lewat musyawarah sebagai masyarakat dunia. Setiap negara

maka di Forum MPR dunia sepertinya akan lebih disempurnakan. Hubungan kerjasama organisasi tidak hanya DPR saja, tapi MPR juga harus lebih dimaksimalkan.

Siapa saja yang menjadi anggota Forum MPR Dunia? Apakah lebih banyak negara-negara yang tergabung dalam OKI?

Setiap negara pasti memiliki instrumen kelembagaan, seperti MPR Indonesia, itu bisa tergabung dalam forum ini. Negara-negara anggota OKI memang menjadi sasaran awal untuk bergabung. Negara-negara lain yang non muslim itu pun dalam perluasan gagasan, dirasa baik untuk juga bergabung karena masalah dunia adalah yang merasakan semua warga dunia tanpa melihat agama atau sistem politiknya

Apa yang hendak diperjuangkan atau menjadi goal dari Forum MPR Dunia ini?

lebih inklusif, dan lebih berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah global.

Jika nanti terbentuk, maka Forum MPR Dunia menjadi legacy (warisan) MPR RI periode 2019-2024?

Salah satunya seperti itu. Namun, yang terpenting adalah jika Forum MPR Dunia ini terbentuk dan mampu berkiprah aktif di dunia, ini akan menunjukkan kepada rakyat atau merupakan kebanggaan rakyat, bahwa MPR Indonesia mampu memberikan kebanggaan buat rakyat Indonesia. Kebanggaan itu adalah MPR bukan hanya mampu menjadi tempat musyawarah berbagai hal dan permasalahan dalam negeri juga masalah dunia. Dan, mudah-mudahan Forum MPR Dunia bisa tertoreh dalam perjalanan sejarah dunia masa kini dan masa yang akan datang sejajar dengan KTT Non Blok, KAA dan Asean yang mengharumkan nama bangsa Indonesia hingga kini. □

Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru

Hidup Berdampingan dengan Covid-19



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pengendalian pandemi ini tidak hanya sebatas obat, vaksin, vitamin, atau kebijakan pemerintah lainnya. Tetapi yang lebih penting adalah perubahan pola hidup dan perilaku. Jadi perlu ada edukasi dan sosialisasi tentang perubahan perilaku hidup masyarakat.

PARA penikmat konser musik sudah bisa bergembira. Pasalnya, pemerintah mulai mengizinkan kegiatan berskala besar itu. Alasannya, tren kasus positif Covid-19 menunjukkan tanda-tanda membaik. Kabar ini bukan hanya menggembirakan bagi penggemar konser musik, tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Pemerintah memberikan izin untuk gelaran hajatan pernikahan, konferensi, pameran dagang, atau festival.

“Pemerintah mempertimbangkan perlunya mewedahi aktivitas masyarakat agar tetap produktif, tetapi juga aman dari Covid-19,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, di Jakarta, Ahad, 26 September 2021. Sebagai bukti, pemerintah pun menggelar kegiatan berskala besar, yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dan mengizinkan bergulirnya kompetisi sepakbola Liga 1 dan Liga 2.

Belakangan, tren pertambahan kasus positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia memang mulai melandai. Tanda-tanda penurunan kasus Covid-19 ini mulai terlihat sejak awal Agustus 2021. Merujuk pada data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sepanjang Juli sampai September 2021, terlihat adanya tren penurunan kasus positif Covid-19 secara perlahan memasuki

Agustus 2021, dan terus berlanjut pada September 2021.

Tengok saja data-data ini. Pada periode 1 – 7 Juli, pertambahan jumlah kasus Covid-19 mencapai 201.125 kasus. Kemudian periode 8 – 14 Juli, melonjak menjadi 290.649 kasus. Sepekan kemudian (periode 15 – 21 Juli), melonjak lagi menjadi 313.784 kasus. Jika dihitung rata-rata per hari, terjadi antara 40.000 – 50.000 pertambahan kasus positif Covid-19 setiap hari. Inilah puncak kasus Covid-19 di Indonesia. Ada yang mengatakan puncak ini merupakan gelombang kedua pandemi Covid-19 di Indonesia.

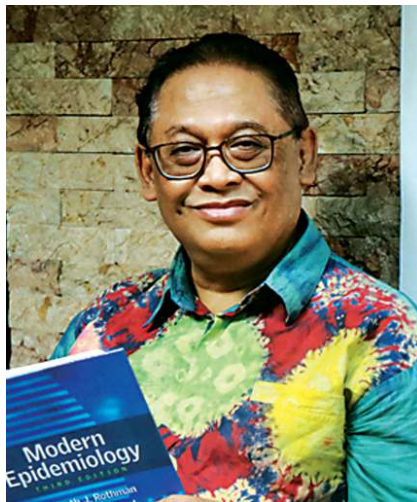
Namun, pada 22 – 28 Juli, tambahan kasus baru mulai menurun menjadi 303.897 kasus. Tren penurunan jumlah kasus baru terus berlanjut. Pada periode 29 Juli – 4 Agustus, kumulatif Covid-19 hanya bertambah 244.480 kasus. Kemudian, pada 5 – 11 Agustus, kasus positif Covid-19 bertambah 216.879 kasus. Sepekan kemudian pertambahan menurun menjadi 158.801 kasus. Setelah itu, pada 19 – 25 Agustus kasus kembali turun menjadi 118.590 kasus. Tren penurunan terlihat konsisten. Tambahan kasus baru pun turun mencapai 100.000 kasus dalam sepekan.

Berlanjut pada periode 26 Agustus – 1 September, pertambahan kasus positif turun menjadi 73.301 kasus. Tren penurunan terus



berlanjut di bulan September. Sekadar contoh, data pada 27 September 2021 pukul 12.00 WIB. Kasus baru Covid-19 di Indonesia bertambah 1.390 kasus. Pertambahan ini lebih rendah dibanding sehari sebelumnya (Ahad, 26 September 2021) yang tercatat 1.760 kasus. Sementara kasus meninggal bertambah 118 kasus. Jadi, tren penurunan pertambahan kasus baru Covid-19 juga diiringi dengan penurunan jumlah kasus kematian.

Jika kita ingat, saat terjadi gelombang kedua pada kurun Juni – Agustus 2021, sepanjang periode tersebut, sistem kesehatan Indonesia berada pada situasi terburuk sejak wabah Covid-19 melanda pada Maret 2020. Inilah pengalaman pahit gelombang kedua: rasio kasus positif harian tembus 20%, fasilitas kesehatan kewalahan menangani pasien Covid-19, oksigen langka, kasus positif Covid-19 mencatat rekor tertinggi di atas 50.000 kasus, demikian pula angka kematian harian melampaui 2.000 orang per hari.



Pandu Riono

Hingga September 2021 terjadi penurunan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia secara signifikan. Angka kasus harian Covid-19 berada di bawah 10.000 kasus, bahkan pada akhir September 2021 angka kasus positif Covid-19 turun hingga kisaran 2.000 kasus. Selain itu, tingkat pasien sembuh

mencapai 90%. Rasio keterisian rumah sakit secara nasional berada di angka 19%.

Melihat tren pertambahan jumlah kasus Covid-19 yang menurun diiringi jumlah kematian yang juga ikut turun, Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyebutkan bahwa untuk sementara pandemi Covid-19 di Indonesia terkendali. “Kunci keberhasilan adalah karena satuan gerak secara nasional. Keberhasilan bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia,” katanya dalam rilis hasil Survei Nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk “Evaluasi Publik terhadap Penanganan Pandemi Covid-19, Pemulihan Ekonomi, dan Demokrasi,” di Jakarta, Ahad, 26 September 2021.

Saat ini, menurut Pandu Riono, adalah fase yang cukup menyenangkan. Hampir semua orang menyangka pandemi ini telah terkendali. “Tapi ini fase paling berat. Jika situasi ini bisa dipertahankan sampai Januari saja sudah cukup luar biasa karena kita akan menghadapi liburan Natal dan tahun baru nanti,” ujar Pandu.



Jazilul Fawaid

Sementara itu Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebutkan, dua faktor yang membuat kasus Covid-19 di Indonesia melandai. Pertama, masyarakat secara disiplin menjalankan protokol kesehatan (*prokes*). Kedua, berjalannya vaksinasi nasional secara masif. Atas upaya itu, Indonesia mendapat apresiasi dari dunia atas keberhasilan menurunkan jumlah kasus positif Covid-19. Apresiasi itu datang dari WHO, World Bank, dan negara-negara lain.

Wakil Ketua MPR Dr. Jazilul Fawaid melihat, pemerintah memang bekerja keras untuk mengendalikan pandemi ini. Upaya itu dilakukan melalui sosialisasi protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, minum vitamin, menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan), menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hingga vaksinasi nasional kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Alhamdulillah, saat ini kasus positif Covid-19 sudah menunjukkan penurunan. Saya kira kita patut memberikan apresiasi kepada semua pihak. Tren positif tersebut mesti dijaga, jangan sampai melonjak lagi sehingga bangsa ini bisa fokus untuk *me-recovery* dampak pandemi, seperti membangun kembali ekonomi rakyat," katanya kepada *Majelis*.

Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo, juga mengapresiasi pemerintah, presiden dan seluruh jajarannya di pusat dan daerah, serta seluruh rakyat Indonesia, yang dengan penuh kesabaran dan bergandengan tangan, hingga kasus positif Covid-19 dan tingkat kematian bisa melandai. "Hasil ini patut kita syukuri dan

inilah hasil kerja kita bersama," katanya kepada *Majelis*.

Namun, Rahmad Handoyo mengingatkan masyarakat untuk tidak euforia dengan penurunan kasus positif Covid-19 ini. Sebab, penurunan kasus Covid-19 dan tingkat kematian sebenarnya masih bersifat labil. Artinya, sewaktu-waktu kasus Covid-19 bisa kembali melonjak. Contohnya, beberapa negara yang dianggap sudah berhasil mengendalikan pandemi, seperti Singapura, Malaysia, Cina, Amerika Serikat, Inggris, ternyata mengalami gelombang ketiga kasus Covid-19. Di negara-negara itu, kasus Covid-19 melonjak kembali. (lihat bagian dua, "Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19")

"Bercermin dari negara-negara itu maka tidak ada negara yang benar-benar bisa mengendalikan Covid-19. Artinya, kasus Covid-19 bisa melandai, tetapi sewaktu-waktu bisa naik kembali. Karena itu, meskipun kita berhasil menurunkan angka Covid-19, kita harus tetap waspada dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kita tidak boleh abai dan tetap mengencangkan ikat pinggang," ujar anggota Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan.

Tidak jauh berbeda, anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, juga mengapresiasi penanganan Covid-19 sehingga jumlah kasus positif Covid-19 bisa melandai. "Saya kira kita harus apresiasi penanganan Covid-19 sekarang. Penanganan Covid-19 di Indonesia juga mendapat apresiasi dari WHO dan lainnya. Secara garis besar penanganan Covid-19 sudah bisa dikatakan menurunkan jumlah kasus

positif Covid-19," katanya.

Meski kondisi saat ini relatif baik, Abidin Fikri mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Masyarakat harus tetap waspada. Apalagi muncul varian-varian baru virus korona. Abidin juga meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika sewaktu-waktu kasus positif Covid-19 kembali melonjak. "Salah satu langkah antisipasi adalah dengan memperketat kebijakan karantina internasional, termasuk dalam entry dan *exit testing* di bandara-bandara," tutur anggota Komisi IX ini.

Menurut Abidin, penanganan Covid-19 yang berhasil menurunkan angka kasus positif tidak terlepas dari hasil kerja keras pemerintah, komponen masyarakat, TNI, Polri, dan BIN. "Daerah-daerah melalui prakarsa kepala daerah dalam mengawasi pelaksanaan vaksinasi merupakan indikator terjadinya percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang luar biasa," katanya.

New Normal

Sejalan dengan penurunan kasus positif Covid-19, pemerintah melonggarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Masyarakat seolah euforia dengan kasus Covid-19 yang melandai. Masyarakat mulai menjalankan kegiatan seperti biasa dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Karena itu, pemerintah hendaknya mulai mempertimbangkan untuk penerapan *new normal*, atau adaptasi kebiasaan baru seiring penurunan kasus harian Covid-19 dalam



Abidin Fikri



Lestari Moerdijat

beberapa waktu terakhir.

Dalam pandangan Jazilul Fawaid, jika pandemi Covid-19 menjadi endemi maka kita mesti hidup berdampingan dengan Covid-19. Cara hidup berdampingan dengan Covid-19 adalah dengan hidup sewajarnya tanpa takut berlebihan. "Kita mesti hidup berdampingan dengan Covid-19 dan menjalani hidup dengan sewajarnya namun tetap waspada. Tidak perlu takut berlebihan yang justru akan menurunkan imunitas tubuh," kata Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid.

Gus Jazil juga melihat masyarakat siap hidup berdampingan dengan Covid-19. "Saya melihat masyarakat sudah bisa beradaptasi selama setahun lebih pandemi ini. Adaptasi masyarakat sudah sangat baik.



Rahmad Handoyo

Yang harus lebih dipraktikkan lagi dalam kehidupan masyarakat adalah saling membantu satu sama lain, gotong royong, tepo seliro, dan saling menguatkan," tuturnya.

Wakil Ketua MPR Dr. Lestari Moerdijat juga berpendapat sama bahwa masyarakat mesti melakukan adaptasi, karena harus hidup berdampingan dengan Covid-19. Caranya, dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. "Pada masa pandemi, masyarakat harus membiasakan diri dengan norma-norma baru dalam semua aktivitas. Yaitu, dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan," katanya dalam keterangan tertulis pada Senin, 20 September 2021.

Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, menambahkan bahwa kepatuhan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan harus terus ditingkatkan agar tetap bisa beraktivitas dan hidup berdampingan dengan Covid-19 secara aman dan terkendali.

Pemerintah, lanjut Rerie, juga harus melaksanakan sejumlah kebijakan pengendalian penyebaran virus korona secara konsisten. Dengan kebijakan yang konsisten itu, masyarakat pun menjadi terbiasa dengan norma-norma baru yang wajib dipatuhi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. "Berbagai persyaratan dalam sejumlah kebijakan pengendalian Covid-19 harus konsisten sehingga masyarakat bisa mematuhi kebijakan tersebut," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Nasdem ini.

Rerie memberi contoh, misalnya persyaratan ketika berada di area public, seperti mal harus konsisten dalam pelaksanaannya, termasuk sanksi bila persyaratan itu dilanggar. Hal ini penting agar penerapan kebijakan itu mendorong masyarakat untuk menerapkan norma-norma baru dalam aktivitas sehari-hari.

Anggota MPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah mulai memikirkan untuk menerapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru seiring penurunan kasus harian Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir. Pasaunya, pandemi Covid-19 belum berakhir. "Oleh karena itu, satu-satunya cara kita memang membiasakan hidup di tengah situasi pandemi



Saleh Partaonan Daulay

ini," ujarnya.

Sementara itu, Rahmad Handoyo menegaskan bahwa hidup *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru adalah sebuah keniscayaan. Sebab, realitasnya, Covid-19 tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Covid-19 akan tetap ada. Dengan demikian, siap atau tidak siap, masyarakat memang harus menyiapkan diri untuk hidup berdampingan dengan Covid-19.

"Siap atau tidak siap memang masyarakat harus disiapkan karena fakta dan realitasnya seperti sekarang, yaitu Covid-19 akan tetap ada. Bahkan, dari pandangan pakar, akademisi, epidemiolog, bahwa Covid-19 ini tidak akan pernah hilang. Karena itu, siap atau tidak siap, memang harus siap mandiri, yaitu perubahan pola dan perilaku hidup kita," jelasnya.

Rahmad Handoyo memberi contoh, jika sebelumnya masyarakat tidak memakai masker, maka mau tidak mau, kita harus mengubah pola hidup dengan selalu memakai masker. Sekarang di mana pun terpampang spanduk atau pemberitahuan wajib menggunakan masker. Contoh lainnya adalah kebiasaan mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Semua menyangkut perubahan pola hidup.

"Pengendalian pandemi ini tidak hanya sebatas obat, vaksin, atau vitamin. Tetapi yang lebih penting adalah perubahan pola hidup dan perilaku. Jadi perlu ada edukasi dan sosialisasi tentang perubahan perilaku hidup masyarakat," ucapnya. □

DER/BSC

Antisipasi Gelombang Ketiga Pandemi Covid-19

Banyak negara yang sudah berhasil memperluas cakupan vaksinasi kepada penduduknya, toh tetap mengalami lonjakan kasus Covid-19 gelombang ketiga.



Suryopratomo



Khairy Jamaluddin

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PANDEMI Corona Virus Disease 2019 atau dikenal dengan Covid-19 belum berakhir. Pada saat Indonesia sedang mengalami penurunan jumlah kasus positif Covid-19, banyak negara-negara di dunia justru sedang menghadapi gelombang ketiga Covid-19. Ketika Indonesia mengalami puncak kasus kedua pada Juli 2021, negara-negara lainnya di dunia tidak mengalami kenaikan. Tetapi pada September 2021, kasus Covid-19 di Indonesia melandai, sedangkan kasus dunia mengalami *third wave* atau puncak ketiga.

Pada periode Agustus – September, pandemi Covid-19 di Indonesia mulai terkendali. Sebaliknya, negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia tengah menghadapi pandemi Covid-19 gelombang ketiga. Ambil contoh Singapura. Penduduk negara kecil yang berdekatan dengan Indonesia itu dikenal sangat disiplin menjalankan protokol kesehatan. Bahkan, pemerintah menetapkan denda atau hukuman penjara bagi pelanggar protokol kesehatan.

Setelah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, pemerintah Singapura menyatakan masyarakat harus siap hidup berdampingan dengan Covid-19. Singapura menganggap wabah Covid-19 sama seperti penyakit flu. Namun, belakangan kasus positif Covid-19 di Singapura justru melonjak. Dalam Dialog Produktif Semangat

Selasa, Forum Merdeka Barat 9 KPCPEN, Selasa 28 September 2021, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryopratomo, menyebutkan, kasus di Singapura di atas 1.000 kasus. “Bagi Singapura, jumlah ini cukup besar,” kata Suryopratomo.

Pada Sabtu, 18 September 2021 misalnya, kasus baru di negara tersebut dilaporkan mencapai angka 1.009 kasus. Sebanyak 1.004 kasus positif Covid-19 di antaranya adalah kasus lokal. Lebih rinci lagi, dari jumlah itu sebanyak 926 kasus penularan masyarakat dan 78 orang warga asrama, serta 5 kasus impor. Jumlah kasus positif Covid-19 ini adalah kasus harian tertinggi di Singapura sejak 23 April tahun lalu. Kala itu tercatat 1.037 kasus baru.

Hal serupa terjadi di negara jiran Malaysia. Pada 1 Juli 2021, Kementerian Kesehatan Malaysia sempat mengumumkan nol kasus baru Covid-19. Ketika terjadi pandemi Covid-19, Malaysia memang menerapkan *lockdown*. Setelah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, Malaysia mencabut kebijakan *lockdown* dan seluruh kegiatan bisnis maupun ekonomi kembali berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.

Namun, belakangan terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Malaysia. Bahkan, negara itu berencana untuk kembali menerapkan *lockdown*. Anggota parlemen Malaysia Lim

Kit Siang justru heran ketika kasus Covid-19 di Malaysia melonjak, kasus positif Covid-19 di Indonesia justru melandai. Ia pun mengkritik Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin, yang tak mampu menurunkan kasus Covid-19 di Malaysia.

“Bisakah Menteri Kesehatan yang baru, Khairy Jamaluddin, menjelaskan mengapa selama 16 hari berturut-turut, Indonesia telah mengurangi kasus baru Covid-19. Di saat Indonesia mencatat 8.955 kasus baru pada Kamis (2/9/2021), Malaysia justru membukukan angka 20.988 kasus,” kata Lim Kiat siang, Pemimpin Partai Aksi Demokratik (DAP) Malaysia, seperti dikutip Malay Mail, pada Jumat, 3 September 2021. Saat itu, jumlah kasus harian Covid-19 di Malaysia sekitar 20.000 kasus.

Lie menyebut Malaysia adalah salah satu negara dengan kinerja terburuk dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan Our World in Data per 1 September 2021, kasus baru di Malaysia mencapai 572,43 per satu juta orang. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia 37,40, Filipina 126,95, dan Myanmar 61,27.

Masih berdasarkan Our World in Data, Malaysia juga menduduki puncak angka kematian Covid-19 di kawasan Asia Tenggara. Angka kematian di Malaysia 8,48 per satu juta orang. Vietnam berada di urutan kedua dengan 8,19, sementara kematian harian per satu juta

orang di Indonesia adalah 2,36.

Negara Cina, negara pertama kali ditemukan virus korona, juga tengah menghadapi gelombang ketiga Covid-19. Setelah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, Cina kembali melaporkan adanya kasus baru Covid-19. Pada 26 Juli lalu, Cina melaporkan adanya 61 kasus baru. Dari jumlah itu, 57 di antaranya adalah kasus penularan lokal. Sebelumnya, Cina melaporkan kasus harian Covid-19 sebanyak 46 kasus.

Selain ketiga negara di atas, beberapa negara lain juga menghadapi gelombang ketiga pandemi Covid-19, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Jepang. Pada Juli 2021, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sudah mengingatkan bahwa dunia telah memasuki serangan gelombang ketiga virus korona. Lonjakan

Cina, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, berhasil menekan penyebaran virus korona, tetapi sekarang malah melaporkan adanya lonjakan kasus Covid-19. Negara-negara itu tengah menghadapi gelombang ketiga pandemi Covid-19. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, menjelaskan tiga gelombang Covid-19. Gelombang pertama terjadi pada Januari 2021 sebagai puncak pertama. Kemudian gelombang kedua pada April 2021 sebagai puncak kedua. Gelombang ketiga pada Agustus – September 2021 sebagai puncak ketiga.

Menurut Wiku, vaksinasi tidak menjamin kasus Covid-19 terhenti atau berkurang. Contohnya, negara-negara yang sudah

di negara itu muncul kluster baru seperti kluster restoran, tempat makan di Bandara, tempat karaoke, mal, hingga terminal bus.

Tidak jauh berbeda, lonjakan kasus Covid-19 di Jepang disebabkan karena masyarakat cenderung berkerumun untuk menonton pertandingan (saat penyelenggaraan Olimpiade) di ruang publik seperti bar, kafe, atau restoran. Sedangkan di AS, lonjakan kasus Covid-19 kembali terjadi karena vaksinasi tidak dibarengi dengan pengawasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik.

Karena itu, Wiku Adisasmito mengingatkan agar Indonesia tidak boleh semata-mata bergantung pada efek vaksinasi. “Dengan adanya lonjakan kasus di berbagai negara dengan cakupan vaksinasi dosis pertama



Wiku Adisasmito

kasus positif Covid-19 sudah terlihat di beberapa negara, terutama sejak munculnya varian Delta yang bermula di India.

Secara global, kasus Covid-19 meningkat. Begitu pula dengan tingkat kematian yang kembali melonjak. Varian Delta adalah satu faktor utama meningkatnya penularan Covid-19. WHO mencatat varian Delta sudah ditemukan di lebih dari 111 negara. Atas dasar itu, WHO memperkirakan varian Delta menjadi varian virus korona yang dominan di seluruh dunia.

Indonesia

Banyak negara yang sebelumnya sempat sukses menangani wabah virus korona, tetapi kembali terjadi lonjakan kasus baru. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia,

berhasil memperluas cakupan vaksinasi kepada penduduknya, toh tetap mengalami lonjakan kasus Covid-19 gelombang ketiga. Singapura, misalnya. Cakupan vaksinasi di Singapura sudah mencapai 79,12%. Contoh lain adalah Jepang. Angka vaksinasi di Jepang sudah mencapai 69,84%. Pun Amerika Serikat. Cakupan vaksinasi di negara Paman Sam itu sudah mencapai 63,04%. Demikian pula Inggris, yang vaksinasinya sudah mencapai 71,28%.

Mengapa negara-negara yang cakupan vaksinasi sudah tinggi masih mengalami lonjakan kasus Covid-19? Dalam kasus Singapura, Wiku menjelaskan, lonjakan kasus Covid-19 di Singapura disebabkan Singapura kurang fokus pada protokol kesehatan di tempat umum. Itu sebabnya,

yang tinggi, kita tidak boleh semata-mata bergantung pada efek vaksinasi. Kita tidak boleh berpuas diri dan merasa aman hanya dengan vaksin, terutama jika hanya vaksin dosis pertama,” katanya dalam konferensi pers pada Kamis, 13 September 2021.

Saat ini Indonesia baru berhasil melewati serangan pandemi Covid-19 gelombang kedua. Pandemi gelombang ketiga di Indonesia diprediksi baru akan terjadi pada Desember 2021. Karena itu, kita perlu terus waspada dengan cara melanjutkan PPKM, memperbanyak testing, memperbaiki tracing, dan terus menegakkan protokol kesehatan. Pemerintah pun harus membatasi pintu masuk bagi orang asing ke Indonesia. □

BSC



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dr. Jazilul Fawaid Wakil Ketua MPR RI

Masyarakat Bisa Beradaptasi dengan Pandemi Covid-19

SEJAK awal Agustus 2021, penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia menunjukkan tren menurun atau melandai. Padahal, se-belumnya, kasus positif Covid-19 sempat melonjak dan mencapai rekor tertinggi pada 15 Juli 2021 dengan 56.757 kasus harian. Merujuk data Satgas Penanganan Covid-19, memasuki Agustus hingga September 2021, tren pertambahan kasus positif virus korona perlahan menurun.

Sejalan dengan penurunan kasus positif Covid-19, pemerintah melonggarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Masyarakat seolah euforia dengan kasus Covid-19 melandai. Masyarakat mulai menjalankan kegiatan seperti biasa dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Wakil Ketua MPR, Dr. Jazilul Fawaid, menilai, masyarakat seperti euforia setelah lebih dari satu tahun terkungkung pandemi Covid-19.

Berikut ini ungkapan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB dalam wawancara dengan Majelis seputar tren penurunan kasus positif Covid-19. Petikannya.

Kasus positif Covid-19 di Indonesia mulai melandai sejak puncak kasus yang mencapai lebih dari 50.000 kasus positif per hari pada pertengahan Juli 2021. Pada September ini kasus positif Covid-19 turun di kisaran 2.000 kasus. Apa pendapat Bapak?

Sejak awal melanda Indonesia sampai saat ini, pandemi Covid-19 memang membuat semua pihak kesulitan, terutama karena membawa dampak yang luas hingga memporakporandakan berbagai bidang kehidupan, baik kesehatan masyarakat dan juga perekonomian.

Selama setahun lebih bangsa Indonesia terus disibukkan dengan pandemi ini. Tapi sebagai umat beriman, semestinyalah kita memahami bahwa pandemi ini adalah ujian dari Allah SWT. Selain bersabar, kita berupaya semaksimal mungkin untuk keluar dari masalah ini.

Alhamdulillah, saat ini kasus positif Covid-19 sudah menunjukkan penurunan. Tren positif tersebut mesti dijaga, jangan sampai melonjak lagi sehingga bangsa ini bisa fokus untuk *me-recovery* dampak pandemic, seperti membangun kembali ekonomi rakyat.

Apakah bisa dibilang pandemi Covid-19 sudah terkendali? Pemerintah telah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19?

Upaya pemerintah untuk mengendalikan pandemi ini sangat keras, seperti melakukan sosialisasi protokol kesehatan antara lain memakai masker, mencuci tangan, minum vitamin, menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan, kebijakan PPKM, sampai mengupayakan vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mengimbau rakyat untuk vaksinasi agar *herd immunity* bisa tercapai sehingga terbentuk kekebalan komunal terhadap virus.

Melihat upaya keras pemerintah dan penyebaran pandemi yang melandai saat ini, saya kira kita patut memberikan apresiasi kepada semua pihak. Tetapi kita tidak boleh lengah karena virus ini masih ada dan belum hilang sama sekali. Untuk itu, sekali lagi kita jangan lengah. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersinergi, bahu membahu menghadapi bencana yang menjadi musuh kita bersama ini.

Masyarakat pun sudah berani bergerak. Ada euforia di tengah masyarakat.

Pemerintah memberi kelonggaran-kelonggaran sesuai level PPKM. Roda ekonomi bergulir. Sekolah mulai pembelajaran tatap muka. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini?

Kita semua sudah lama terkungkung pandemi ini. Ketika pemerintah melonggarkan kebijakan PPKM karena melihat penurunan penyebaran pandemi, saya pikir wajar masyarakat ber-euforia dengan kembali melaksanakan berbagai kegiatan yang sebelumnya tertunda atau berhenti sama sekali, terutama kegiatan ekonomi dan juga sekolah-sekolah. Kalau masyarakat tidak segera bergerak melakukan kegiatan ekonomi, lalu bagaimana mereka memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya?

semangat dan tenaga baru bagi kita untuk menghadapi masalah apapun yang melanda negara kita.

Tetapi masih ada kekhawatiran terjadinya gelombang ketiga pandemi karena masih adanya varian baru Covid-19, seperti varian MU yang lebih ganas dibanding varian Delta. Bagaimana mengantisipasi kemungkinan terjadinya gelombang ketiga pandemi Covid-19?

Itulah, seperti yang sudah saya sampaikan, kita boleh euforia, boleh bersuka cita, dan bersyukur kepada Allah SWT, namun kita tidak boleh lengah sedikit pun. Pemantauan mesti terus dilakukan untuk menjaga kemungkinan terburuk dengan

kesehatan tubuh, berpikir positif. Saya melihat masyarakat sudah bisa beradaptasi selama setahun lebih pandemi ini. Adaptasinya sangat baik. Yang harus digencarkan lagi dalam tataran implementasi adalah saling membantu satu sama lain, gotong royong, tepo seliro, dan saling menguatkan

Apa saran atau masukan dari Bapak agar masyarakat bisa hidup new normal berdampingan dengan Covid-19?

Sekali lagi jalani hidup dengan sewajarnya saja. Ini perlu kesungguhan dengan menerapkan aturan yang sifatnya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.



Untuk itu kita saat ini perlu kembali memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa, antara lain gotong royong. Kata gotong royong adalah kata-kata sakti asli Indonesia, warisan, dan tradisi khas Indonesia. Kita hidupkan lagi nilai luhur bangsa itu saat ini. Sebab nilai luhur bangsa itu berdampak luar biasa. Contohnya sudah ada, yakni bagaimana para pendiri bangsa dan pejuang kita dengan senjata bambu runcing dan semangat gotong royong berhasil mengalahkan penjajah Belanda yang memiliki senjata militer yang canggih.

Nah, semestinya di era sekarang kita menunjukkan kepada para pendiri dan pejuang bangsa bahwa dengan gotong royong kita mampu mengalahkan pandemi ini seperti mereka mengalahkan penjajah. Nilai gotong royong akan memberikan

varian yang lebih ganas.

Bahkan pandemi Covid-19 diperkirakan akan menjadi endemi. Covid-19 tetap ada dan masyarakat hidup berdampingan dengan Covid-19. Bagaimana Bapak melihat kesiapan masyarakat hidup berdampingan dengan Covid-19?

Kalau memang pandemi ini menjadi endemi dan kita mesti hidup berdampingan maka kita harus menjalani hidup dengan sewajarnya, tidak perlu takut berlebihan yang justru akan menurunkan imunitas tubuh. Ketakutan berlebihan akan berdampak buruk kepada hubungan sosial, misalnya terbiasa tidak berjabat tangan, pembatasan kegiatan, menjauhi teman, saudara atau keluarga kita yang terkena virus.

Kita jalani hidup dengan sewajarnya saja, namun tetap waspada, antara lain menjaga

Bagaimana dengan program vaksinasi massal, karena masih ada orang yang enggan divaksinasi dan apakah herd immunity atau kekebalan komunal bisa tercapai?

Tujuan pemberian vaksin, salah satunya adalah upaya besar untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona untuk mencapai kekebalan komunal. Bila terjadi kekebalan komunal maka pandemi akan semakin melandai, sehingga kegiatan ekonomi kembali berjalan normal. Upaya ini kembali kepada rakyat juga.

Lagi pula vaksin itu sekarang mudah dan gratis hanya menunjukkan KTP saja. Melalui program vaksinasi kita harapkan herd immunity bisa tercapai. Karena itu, diperlukan dukungan aktif seluruh elemen masyarakat. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. □

HNW Terima **Pengurus** Pusat BP2 Daerah Istimewa Minangkabau



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Secara historis kaedah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sudah menjadi budaya dan perilaku masyarakat Sumbar, sejak sebelum Indonesia Merdeka, hingga sekarang ini.

WAKIL Ketua MPR, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., menegaskan, UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat tidak bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, malah sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi, yakni Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengakui dan mengakomodasi budaya dan adat lokal, serta kekhasan setiap daerah.

Dalam UU No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat itu disebutkan dan diakui bahwa adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah". Adat dan budaya ini dalam sejarah maupun praktiknya tidak menegasikan atau menghilangkan adanya keragaman budaya dan agama di masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

Kekhawatiran UU ini akan membuat Sumbar menerapkan syariah secara eksklusif dan mendiskriminasi penganut agama selain Islam, menurut HNW, tidak beralasan. Karena, ketentuan dalam UU tersebut jelas tetap mengacu kepada Pancasila dan dalam bingkai UUD NRI Tahun 1945. Secara historis kaedah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sudah menjadi budaya dan perilaku masyarakat Sumbar, sejak sebelum Indonesia Merdeka, hingga sekarang ini.

"Pandangan yang menyalahpahami 'adat basandi syara', syara' basandi kitabullah' bisa membahayakan dan memecah belah NKRI dan menimbulkan diskriminasi adalah pandangan yang tidak benar dan a-historis, tak sesuai fakta sejarah," kata HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, ketika menerima Pengurus Pusat Badan Persiapan

Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Lantai 9, Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (12/9/2022).

Pengurus BP2DIM yang hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua Umum Prof, Dr. Masri Mansur, MAG., didampingi para pengurus lainnya di antaranya Dr Iramadi Irdja, Radians Dilan, SH., Dr Manoefris Kasim, Sp.Jp., Kol TNI (Purn) Adrianus Ilra, Dr. Hj Nurdiati Akma, MPd., Dr. Taswem Tarib, SH., MH., Deki PS Chaniago, SH., dan Anton Pratama, SE.

Dalam kesempatan itu HNW mengungkapkan syukur bahwa Pemerintah (diwakili Kemenkumham dan Mendagri) bersepakat dengan DPR dan semua fraksinya yang juga didukung oleh DPD, menyepakati bulat pengesahan atas UU No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. "Pemerintah setuju, DPR juga setuju, demikian juga DPD. Semua mendukung UU ini. Tidak ada partai politik di DPR yang menolak falsafah budaya mensejarah yang dianut di Sumatera Barat, yaitu adat basandi syara, syara basandi kitabullah," tuturnya.

Pasal 5 huruf C UU No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat berbunyi: "Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik, yaitu: adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan



kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.”

Sedangkan penjelasan Pasal 5 huruf c menyatakan: “Pelaksanaan nilai falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut HNW, konstitusi yang berlaku di NKRI mengakomodasi dan menerima keistimewaan dan karakteristik itu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat 3 yang menyebutkan: “Hak identitas budaya dan masyarakat tradisional untuk dihormati dan selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Keistimewaan dan karakteristik Provinsi Sumbangar tidak menegasikan kelompok lain, misalnya warga Mentawai. UU itu tidak menegasikan Mentawai. Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, juga tidak menegasikan kelompok non muslim. Justru kitabullah menegaskan penghormatan terhadap keragaman, sikap toleransi, moderasi dan persaudaraan dan kerjasama dalam mewujudkan kebajikan dan kebaikan.”

Dari ranah Minang dengan falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, kata HNW, muncul tokoh-tokoh pahlawan dan bapak bangsa dari Sumatera Barat. Mereka justru hadir dari karakteristik adat dan budaya Minangkabau yang berdasarkan nilai falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah. “Tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, Agus Salim, Moh. Yamin, Natsir, Tan Malaka, Sutan Syahrir, datang dari masyarakat dengan adat dan budaya Minangkabau yang berfalsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah,” ungkap HNW.

Mereka, lanjut HNW, bergabung dengan seluruh potensi bangsa menyepakati Indonesia merdeka, dan merumuskan Pancasila, UUD 45, serta menyelamatkan NKRI. Selain itu, masih ada tokoh bangsa seperti Buya Hamka. Dari Ranah Minang/Bukittinggi juga tampil Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mempertahankan eksistensi Indonesia lewat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). “Mereka beragam, ideologinya, partainya, tapi mereka bekerjasama untuk kemerdekaan dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia,” kata HNW.

HNW menambahkan, UU No. 17 Tahun

2022 perlu dipahami dan dilaksanakan dengan benar dan utuh, dengan disosialisasikan dan mengomunikasikan ke masyarakat dan pemangku kepentingan dan kebijakan di Sumatera Barat. “Sehingga terbangun pemahaman kolektif dan benar tentang UU ini. Dengan semakin paham dengan UU dan makna UU itu maka diharapkan bagaimana UU ini dapat diimplementasi dengan baik, dan membawa masalah dan keunggulan serta lanjutan sumbangsih unggulan Sumatera Barat untuk jayaranya NKRI,” ucapnya.

Akhirnya, dalam pertemuan itu, HNW juga mendukung Ketua Umum BP2DIM, Prof. Masri Mansur yang menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2022, terutama aturan turunan dari UU itu, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) sampai Peraturan Daerah (Perda). “Kita ingin segera ada PP yang bisa ditindaklanjuti melalui peraturan daerah sebagai turunan pelaksanaan dari UU ini. Agar Gubernur Sumatera Barat dapat mengejawantahkan dengan baik dan benar UU Sumatera Barat secara keseluruhan, termasuk Pasal 5C UU ini dalam Perda dan regulasi turunannya,” katanya. □

Menerima Forum PPI

Bamsoet Dorong Peningkatan Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan peran perempuan dalam setiap aspek kehidupannya merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) yang telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas kerja perempuan melalui pendidikan dan pelatihan, pendampingan, dan pengkajian, serta pemberdayaan peran perempuan di bidang sosial dan ekonomi. Di masa pandemi Covid-19, FPPI juga telah menunjukkan jiwa

solidaritas dan semangat gotong royong, dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi.

“Saya mendukung setiap upaya pemberdayaan perempuan melalui berbagai wadah organisasi kemasyarakatan. Saya meyakini, melalui kerja keras dan kesungguhan dalam bekerja, FPPI akan sanggup mewujudkan cita-cita yang telah dibangun sejak organisasi ini didirikan, yaitu membangun perempuan Indonesia yang maju, mandiri, dan berprestasi, dengan

mewujudkan kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan gender,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus FPPI, di Jakarta, Kamis (15/9/22).

Pengurus FPPI yang hadir, antara lain Ketua Umum Marlinda Irwanti, Ketua II Fianne Jannne Sanger, Ketua III Hanny Hendrani, dan Sekretaris Bidang Ekonomi dan Koperasi Lingga Pranita.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sejak awal kelahirannya, isu kesetaraan dan keadilan gender telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam setiap diskusi publik mengenai pembangunan sumberdaya dan pemberdayaan perempuan. Tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia. Patut disyukuri, bahwa sesungguhnya semangat kesetaraan gender sudah tersirat pada perumusan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi merujuk individu subjek hukum dengan sebutan ‘setiap orang’ atau ‘setiap warga negara’.

“Kita patut berbangga bahwa Indonesia ‘lebih maju’ jika dibandingkan Amerika Serikat (AS), di mana Amandemen Kesetaraan Hak (Equal Rights Amendment) untuk mengesahkan prinsip kesetaraan gender, termasuk hak perempuan dalam Konstitusi AS, mengalami stagnasi selama puluhan tahun. Sejak diusulkan pertama kali pada tahun 1920-an, dan diberi tenggat waktu ratifikasi hingga tahun 1982, hingga kini usulan amandemen tersebut masih terkendala” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menekankan, landasan legalitas dalam konstitusi tersebut hanya akan bermanfaat dan berdaya guna ketika hadir dalam ruang realita. Keberadaan aturan-aturan yang mempromosikan kesetaraan gender hanya akan menjadi dokumen kearsipan yang miskin pemaknaan, bila tidak diikuti dengan implementasi secara nyata.



“Peningkatan peran perempuan dalam setiap aspek kehidupannya merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Di

sinilah peran penting FPPI sebagai organisasi kewanitaan yang memiliki tanggung jawab untuk mendorong terwujudnya sikap mandiri perempuan Indonesia dalam mengembang-

kan potensi dirinya, dan melaksanakan tugas mulia dalam membentuk manusia-manusia Indonesia yang berkarakter dan berkualitas,” pungkas Bamsoet. □

Musyawarah Nasional I 234 Solidarity Community

Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Ormas Rekatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Dalam konsepsi organisasi kemasyarakatan (ormas) modern, menurut Bamsoet, penyelenggaraan MUNAS selalu memiliki makna strategis, baik ke dalam maupun ke luar.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo meluruskan berbagai pandangan yang menyatakan bahwa pasca amandemen Konstitusi, MPR tidak lagi berwenang membuat Ketetapan MPR. Perubahan Konstitusi memang membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. Pasca amandemen Konstitusi, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang, dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. MPR juga tidak lagi berwenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Konsekuensi dari perubahan Konstitusi tersebut, MPR tidak lagi memiliki kewenangan

untuk membuat Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling). Namun demikian, MPR masih dapat membuat ketetapan yang bersifat penetapan (beschikking). Banyak pakar yang sependapat dengan hal ini, misalnya Prof. Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua MK), Prof. Maria Farida (mantan hakim konstitusi), dan Hamdan Zoelva (mantan Ketua MK).

“Bahkan jika kita jeli mencermati Undang-Undang MD3 Pasal 39 Ayat (3), secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa MPR dapat membuat Ketetapan MPR, dalam hal MPR memutuskan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden (pasal 39 Ayat 1) atau dalam hal MPR memutuskan tidak memberhentikan presiden dan/atau

wakil presiden (pasal 39 ayat 2),” ujar Bamsoet saat membuka Musyawarah Nasional I 234 Solidarity Community, di Jakarta, Sabtu (17/9/22).

Turut hadir antara lain, Ketua Dewan Pembina DPP 234 Solidarity Community K.P.H. H. Yapto Sulistio Soerjosoemarno, Ketua Umum DPP 234 SC K.R.M.H. Sahid Abishalom Suryosumarno, dan Sekretaris Jenderal DPP 234 SC Bambang Ismuyono, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila M Ali yang juga Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, M. Arsjad Rasjid P.M. yang juga Ketua Umum KADIN Indonesia, Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Robert Rouw.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menekankan, berkaitan dengan Munas I Ormas 234 SC merupakan kebanggaan baginya dapat hadir di tengah-tengah Keluarga Besar 234 SC.

“Saya mengenal 234 SC sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial-budaya, olahraga, kepemudaan, dengan keanggotaan yang bersifat inklusif dan merangkul semua golongan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip persaudaraan, solidaritas, dan nasionalisme,” ujar Bamsoet. Dalam konsepsi organisasi kemasyarakatan (ormas) modern, lanjut Bamsoet, penyelenggaraan MUNAS selalu memiliki makna strategis, baik ke dalam maupun ke luar.

Ke dalam, secara internal kelembagaan, penyelenggaraan MUNAS dapat menjadi momentum untuk memperkuat soliditas dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

solidaritas organisasi, memperdalam internalisasi visi-misi organisasi, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Ke luar, secara eksternal kelembagaan, penyelenggaraan MUNAS diharapkan bermuara pada optimalisasi peran dan fungsi organisasi, khususnya sebagai bagian dari subjek pembangunan. Di samping itu, penyelenggaraan MUNAS juga menjadi sarana penegasan eksistensi organisasi, di tengah pertumbuhan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berkembang

sedemikian pesat.

Merujuk pada data Kementerian Dalam Negeri, hingga bulan Juni 2022, tercatat ada 512.997 ormas di Indonesia. Di satu sisi, banyaknya ormas mengindikasikan bahwa kehidupan berdemokrasi kita berjalan di jalur yang tepat, di mana hak-hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah wadah organisasi, terjamin dan terlindungi. Di sisi lain, banyaknya jumlah ormas di Indonesia juga dituntut agar memiliki sinergi positif sebagai

sumberdaya pembangunan, sehingga memberikan kemanfaatan seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat. “Kehadiran ormas tidak boleh menjadi sarana untuk membangun sekat-sekat yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi “duri dalam daging” bagi pembangunan,” ujar Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPi dan Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini juga memberikan apresiasi atas peran dan kontribusi 234 SC di berbagai daerah, yang telah mengabdikan diri pada kepentingan masyarakat melalui kerja-kerja sosial, seperti pemberian bantuan kepada korban bencana alam, bantuan sembako kepada masyarakat miskin, bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi, serta berbagai aksi kemanusiaan lainnya.

“Dalam berbagai aksi kemanusiaan tersebut, 234 SC juga membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Ini menunjukkan sikap egaliter dan sifat inklusif dari 234 SC, dan dengan karakter organisasi tersebut, saya yakin dan percaya bahwa 234 SC akan semakin maju dan berkembang, karena mampu membangun jaringan (networking) dengan institusi dan organisasi lainnya,”pungkas Bamsuet. □



Bamsoet: Sektor Pendidikan Menjadi Faktor Penting

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, mimpi yang ingin dibangun dalam bidang pendidikan, sebagaimana digagas oleh Presiden Jokowi, adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, menyongsong Indonesia Emas 2045 salah satu pilar yang ingin diwujudkan dalam visi Indonesia Emas adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, sektor pendidikan menjadi faktor penting. Mimpi yang ingin dibangun dalam bidang pendidikan, sebagaimana digagas oleh Presiden Jokowi adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia.

“Dalam bidang pendidikan tinggi, Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi yang pada tahun 2015 hanya berada di kisaran 29,9%, diharapkan meningkat menjadi 60% pada tahun 2045. Pengembangan ilmu di perguruan tinggi juga diselenggarakan agar mampu menjawab perubahan struktur ekonomi, dengan ditopang oleh penguatan kemitraan tiga pihak, yakni pemerintah, perguruan tinggi, dan industri yang kuat,” ujar Bamsoet saat acara Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Jakarta secara daring dari Bali, Senin (12/9/22).

Acara yang dihadiri oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Ma'mun Murod, S.Sos., M.Si., dan para wakil rektor

UMJ, Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menuturkan, target yang ingin dicapai adalah terciptanya sumber daya manusia terampil dan mempunyai daya saing untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif. Angkatan kerja dengan kualifikasi SMA dan perguruan tinggi, yang pada tahun 2015 masih berkisar pada angka 39,3%, diharapkan meningkat hingga 90%.

“Kita beruntung bahwa kita memiliki modal sumber daya untuk mewujudkan harapan-harapan pada sektor pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Salah satunya adalah modal bonus demografi. Pada tahun 2045 nanti kita akan berada pada periode puncak bonus demografi, di mana sekitar 70% dari komposisi jumlah penduduk akan didominasi oleh kelompok usia produktif,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini mengingatkan, bonus demografi hanya akan menjadi data statistik komposisi kependudukan tanpa makna yang tidak akan memberikan dampak apa-apa, jika tidak disikapi dengan benar dan dimanfaatkan dengan optimal. Jumlah penduduk usia produktif ini hanya akan bermanfaat sebagai generator dan dinamisator pembangunan,

jika memiliki kompetensi dan daya saing. Sebaliknya, keberlimpahan usia produktif yang tidak tersalurkan dan terserap pada pasar lapangan kerja, hanya akan menjadi beban pembangunan.

“Kondisi ini meniscayakan adanya kepedulian dari segenap pemangku kepentingan, khususnya pemerintah. Namun di sisi lain, juga harus ada kesadaran dari masyarakat, khususnya generasi muda untuk memahami pentingnya bonus demografi sebagai kesempatan untuk memberdayakan diri. Terkait hal ini, kita dapat merujuk pada hasil survei tentang persepsi generasi muda terhadap bonus demografi,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menambahkan, dari hasil survei program Gue Muda yang dilakukan pada Maret 2022, terdapat pemahaman dan pemaknaan yang berjenjang di antara generasi muda dalam menyikapi bonus demografi. Sekitar 66,4% responden dapat mengetahui istilah bonus demografi. Meski demikian, masih ada sekitar 42,5% yang tidak yakin bahwa mereka telah melakukan manajemen yang baik menyongsong masa depan pada periode bonus demografi. Bahkan 37% responden tidak menyadari bahwa mereka menjadi bagian dari bonus demografi.

Sementara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, dari sekitar 138 juta angkatan kerja pada 2020, hanya sekitar 10-12% yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Fakta lain, setiap tahun, dari sekitar 3,7 juta lulusan SMA dan sekolah sederajat, sekitar 1,9 juta orang diantaranya tidak melanjutkan kuliah.

“Tentu kondisi tersebut harus menjadi perhatian kita bersama. Pendidikan, khususnya perguruan tinggi, sebagai faktor fundamental dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 dan optimalisasi bonus demografi harus mampu menjawab berbagai tantangan yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan,” pungkas Bamsoet. □

Orasi Kebangsaan di UMJ

Mahasiswa Harus Resapi Jatidiri Muhammadiyah

Wakil Ketua MPR, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., diundang untuk menyampaikan pidato kebangsaan di hadapan ribuan mahasiswa baru UMJ (Universitas Muhammadiyah Jakarta).



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

HIDAYAT Nur Wahid, yang biasa disapa HNW mengingatkan, para mahasiswa UMJ untuk meresapi jatidiri Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bermisi dakwah amar dan tajdid yang menghadirkan Islam Berkemajuan. Para mahasiswa, kata HNW, bukan sekadar generasi milenial, generasi Y, generasi Z, atau generasi alpha, melainkan generasi muda Muhammadiyah yang memiliki ideologi dasar, sejarah, visi, dan misi, yang menghadirkan keterlibatan, kemanfaatan, dan kemaslahatan, baik untuk warganya, keumatan, dan kebangsaan, bahkan kemanusiaan global.

“Muhammadiyah mempunyai sejarah dan kiprah heroik sejak republik ini belum lahir.

Pimpinan Muhammadiyah terlibat langsung menghadirkan dan menyelamatkan Indonesia Merdeka. Kesadaran akan sejarah dan kiprah Muhammadiyah ini mutlak harus dimiliki mahasiswa baru UMJ. Melalui Muktamar ke-47, Muhammadiyah menegaskan jatidirinya untuk menghadirkan Islam Berkemajuan. Mahasiswa baru UMJ penting untuk meresapi jatidiri Muhammadiyah ini, agar bisa membangun karakter unggul, dan sekaligus membekali diri dengan faktor-faktor sukses sebagai mahasiswa di UMJ untuk disumbangkan bagi umat, bangsa dan negara,” kata HNW ketika menyampaikan orasi kebangsaan dalam Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru UMJ di Kampus UMJ, Tangerang Selatan,

Rabu (14/9/2022).

Orasi kebangsaan ini dihadiri sekitar 3.000 mahasiswa baru UMJ dari 10 fakultas, baik Kampus A UMJ Cirendeuh maupun Kampus B UMJ Cempaka Putih. Selain itu, hadir Rektor UMJ Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy, M.Si., Wakil Rektor I Dr. Muhammad Hadi, S.KM., M.Kes., serta Pembina dan Pimpinan Organisasi Otonom UMJ, antara lain Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Hizbul Wathan, dan Tapak Suci UMJ.

Pada Orasi Kebangsaan bertema: “Mahasiswa Muhammadiyah Berkemajuan: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” itu, HNW menjelaskan, pada Muktamar ke-47 Muhammadiyah telah memutuskan, menegaskan jatidirinya ber-Islam yang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

membawa kemajuan. Dalam Islam yang berkemajuan ada dinamika, kemandirian, kontribusi, kolaborasi, dan kemauan untuk menghadirkan kebaikan, kebenaran, kemaslahatan. “Dari definisi dasar Islam berkemajuan, maka akan menghadirkan sikap hidup yang membawa kemaslahatan untuk diri sendiri, masyarakat, organisasi/persyarikatan, negara, dan kemanusiaan secara menyeluruh,” ujarnya.

HNW memberi contoh tokoh dan pimpinan Muhammadiyah yang terlibat secara langsung dalam memerdekakan Indonesia, di antaranya KH. Mas Mansoer, K.H. Abdul

Kahar Muzakir, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo. “Tokoh-tokoh dan pimpinan Muhammadiyah itu aktif terlibat bersama tokoh-tokoh bangsa dari berbagai latar belakang, memberi masukan, berdebat, dan mengoreksi jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Muhammadiyah dan para tokohnya memberikan keteladanan. Mereka tidak diam dan tidak membiarkan kemunkaran, melainkan mengkritisnya, serta menghadirkan kemaslahatan bagi bangsa dan negara,” ujar politisi PKS ini.

HNW mengingatkan, bila mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah tidak

mempunyai spirit pemahaman yang baik tentang Muhammadiyah, baik sejarahnya, aqidahnya, kiprah kekiniannya maupun cita-cita besarnya, maka mereka tidak bisa memberikan sesuatu yang baik secara maksimal, yang bisa dikaitkan dengan Muhammadiyah. “Mahasiswa Muhammadiyah harus punya pemahaman yang baik dan benar tentang Islam berkemajuan, sehingga bisa menjadi kader penerus yang berkontribusi dan berkolaborasi menjadi bagian yang menghadirkan kemajuan berkelanjutan. Bila mahasiswa Muhammadiyah tidak cerdas, maka tidak bisa dibayangkan bagaimana ia bisa mencerdaskan masyarakat. Kalau mahasiswa tidak mempunyai visi yang benar tentang berbangsa dan bermuhammadiyah maka tidak bisa dibayangkan dia bisa ikut serta aktif dan produktif memajukan dan mencerdaskan bangsa,” kata HNW yang juga tercatat sebagai staf pengajar di Pasca Sarjana UMJ.

Menurut HNW, UMJ telah menghadirkan diri sebagai institusi yang terbukti bisa membuat mahasiswa berkemajuan. UMJ bisa membuat mahasiswa melanjutkan tradisi Muhammadiyah yang berkemajuan. UMJ bisa membuat mahasiswa cerdas sosial, intelektual dan spiritual. Sebagai bukti, UMJ telah memenangkan kejuaraan dan lomba di tingkat nasional dan internasional. Dalam lima tahun, 2016-2021, UMJ (sebagai juara I, II, atau III) memenangkan 87 beragam event pertandingan dan kompetisi internasional. Di tingkat nasional, UMJ (sebagai juara I, II, atau III) memenangkan 89 even pertandingan dan kompetisi.

Kepada mahasiswa baru UMJ, HNW berpesan agar memaksimalkan potensi diri dan tidak memubazirkan kesempatan berada di lingkungan UMJ. “Kampus ini melahirkan juara di tingkat nasional dan internasional. Jadi, jangan pernah memubazirkan potensi dan kesempatan berada di lingkungan UMJ. Maksimalkan seluruh potensi yang ada, maksimalkan diri Anda, maksimalkan waktu, usia, dan potensi di UMJ. Itulah awal sumbangsih untuk kemajuan, Muhammadiyah, umat, bangsa dan negara,” pungkasnya. □



Terima Persatuan Dokter Mata Indonesia Bali

Bamsoet Ingatkan Tingginya Ancaman Kebutaan

Ketika menerima Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) dan Direksi RS Mata Ramata Bali, Selasa (13/9/2022), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti tingginya prevalensi kebutaan di Indonesia, yang mencapai 3 juta orang atau sekitar 1,5% dari populasi penduduk.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menerima Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) Bali dan Direksi Rumah Sakit Mata Ramata Bali. Menyoroti tingginya prevalensi kebutaan di Indonesia yang mencapai 3 juta orang atau sekitar 1,5% dari populasi penduduk. Setiap menit, dikabarkan 1 orang menjadi buta. Tertinggi di Asia Tenggara, karena Bangladesh saja hanya 1%, India 0,7%, dan Thailand 0,6%.

"Insiden kebutaan di Indonesia setiap tahunnya mencapai 0,1% atau sekitar

210.000 orang. Berdasarkan data Perdami, pada tahun 2017 saja terdapat 8 juta orang dengan gangguan penglihatan di Indonesia. Terdiri dari 1,6 juta orang yang mengalami kebutaan, ditambah 6,4 juta orang dengan gangguan penglihatan sedang dan berat," ujar Bamsoet usai menerima Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) Bali dan Direksi RS Mata Ramata di Bali, Selasa (13/9/22).

Pengurus Perdami dan Direksi RS Mata Ramata yang hadir, antara lain Komisaris Made Ardjaja, Direktur Eka Bayu Putra, Kadiv Pelayanan Medis Surya, Kadiv Penunjang Medis Ika Wardani, Kadiv Keuangan &

Administrasi Adi Putra, serta Casemix Teguh. Hadir pula Direktur RS Puri Raharja Bagus Darmayasa.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, banyak faktor yang menyebabkan kebutaan. Misalnya, glaukoma, katarak, hingga diabetes. Hasil survei kebutaan Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) tahun 2014 hingga 2016 dari Badan Litbangkes Kemenkes melaporkan, pada usia 50 tahun ke atas angka kebutaan di Indonesia mencapai tiga persen. Sebanyak 81% di antaranya disebabkan karena katarak.

"Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2019 lalu melaporkan, secara global ada 2,2 miliar penduduk dunia mengalami gangguan mata, sebanyak 76 juta di antaranya menderita glaukoma. Kebutaan akibat glaukoma di dunia mencapai 6,9 juta penduduk," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain katarak dan glaukoma, penyebab kebutaan terbesar lainnya, yakni dikarenakan diabetes yang menyebabkan retinopati diabetik. Data International Diabetes Federation (IDF) melaporkan, pada tahun 2017 terdapat 425 juta pasien diabetes di dunia. Sebanyak 127 juta diantaranya menderita retinopati diabetik, dengan 12 juta diantaranya terancam mengalami kebutaan.

"Pemerintah terus berupaya menekan angka kebutaan. Untuk menyembuhkan katarak, misalnya, masyarakat bisa memanfaatkan BPJS Kesehatan yang menanggung operasi katarak. Begitupun dengan berbagai penyebab kebutaan lainnya. Keseriusan ini tak lain karena dari berbagai kajian dilaporkan, kerugian Indonesia akibat gangguan penglihatan parah dan kebutaan, bisa mencapai Rp 84,7 Triliun setiap tahunnya. Oleh karena itu, antisipasi maupun pengobatan terhadap kebutaan sangat penting untuk dilakukan," pungkas Bamsoet. □



Setelah Tragedi Tewasnya Seorang Santri Gontor

Ahmad Basara Tolak Pembubaran Gontor, Dukung Proses Hukum

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, meyakini kasus kematian itu terjadi hanya akibat emosi para santri yang berdarah muda, bukan atas instruksi para guru dan pimpinan Gontor.

SETELAH lebih dari sepekan pemberitaan tentang tewasnya santri Gontor merebak di media massa, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dengan tegas menolak pembubaran pondok pesantren ini. Penolakan itu disampaikan anggota Komisi X DPR RI yang antara lain membidangi pendidikan ini setelah muncul suara-suara di media massa dan media sosial agar Gontor dibubarkan atau izin operasionalnya dicabut.

"Kekerasan pada santri yang berujung pada kematian tentu sangat kita sayangkan. Tapi, mengusulkan agar Gontor sebagai institusi pendidikan Islam berbasis asrama dibubarkan atau izin operasionalnya dicabut, hemat saya itu pikiran terburu-buru. Apakah jika di Akademi Kepolisian, Akademi Militer, atau asrama lain terjadi kekerasan fisik lalu semua institusi pendidikan itu dibubarkan atau izin operasionalnya dicabut?" tegas Basarah di Jakarta, Rabu (14/9/22).

Selama sepekan media massa ramai memberitakan tragedi AM (17 tahun), santri Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, yang tewas akibat dianiaya santri senior. Santri asal Palembang ini bersama dua rekannya dihukum senior mereka akibat tidak bisa mengembalikan peralatan perkemahan. Seorang senior memukul paha mereka dengan tongkat pramuka, tapi seorang senior lain menendang dada AM hingga jatuh terjungkal kemudian kejang pada 22 Agustus 2022 pukul 06:00 waktu setempat. Setengah jam kemudian AM tewas. Setelah jenazah AM diautopsi, pihak keluarga membawa kasus ini ke ranah hukum.

Atas kronologi yang ada, Ahmad Basarah mengajak semua pihak *cooling down* dan proporsional melihat kasus yang terjadi.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini meyakini bahwa kasus kematian ini terjadi hanya akibat emosi para santri yang berdarah muda, bukan atas instruksi para guru dan pimpinan Gontor. Kasus kekerasan sesama pelajar tidak hanya terjadi di Gontor, tapi juga banyak terjadi di asrama dan sekolah lainnya.

Dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang itu menyebut tiga alasan mengapa pemerintah dan masyarakat Indonesia hendaknya berpikiran positif dan bertekad terus menjaga keberadaan Gontor di tengah masyarakat Indonesia. Pertama, Gontor adalah pesantren modern yang mendidik dan mengajarkan pikiran-pikiran terbuka kepada para santrinya lewat materi ajar yang ada, misalnya kitab "Bidayatul Mujtahid" karangan Ibnu Rusyd dan kitab "Al-Adyan".

"Kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd ini tidak hanya mengajarkan satu mazhab, tapi semua mazhab. Itu artinya

sejak remaja, calon alumni Gontor dibiasakan dengan perbedaan pendapat, keterbukaan pikiran, tidak fanatik pada satu mazhab, dan sikap toleransi. Dengan kitab Al-Adyan, Gontor mengajarkan agama-agama yang ada di tanah air pada para santrinya. Ini cocok sekali dengan falsafah Pancasila dan kondisi kebangsaan kita yang bhineka tunggal ika," jelas Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.

Alasan kedua, Gontor selama ini telah melahirkan banyak tokoh moderat yang pro politik kebangsaan, misalnya KH Hasyim Muzadi, Prof. Nurcholish Madjid, dan lain-lain. "Saya tidak yakin jika budaya kekerasan dilakukan sistematis oleh pimpinan Gontor akan lahir tokoh-tokoh besar dan moderat seperti mereka," tandas Sekretaris Dewan Penasehat PP Baitul Muslimin Indonesia itu.

Alasan ketiga, Ahmad Basarah memberi apresiasi yang tinggi pada empat motto Gontor, yakni: berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Motto ini banyak diulas dalam karya

akademis mulai dari skripsi sampai disertasi. Jika banyak sekolah dan institusi pendidikan di Indonesia meniru motto Gontor, hasilnya akan positif.

“Lewat motto itu Gontor mengarahkan para santrinya untuk bersikap rasional tapi berakhlak mulia. Ini kita butuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jika banyak warga Indonesia hanya berpikiran bebas saja tapi tidak ber-

pengetahuan luas apalagi tidak berbudi tinggi, mereka tidak mudah diajak berbangsa dan bernegara secara sehat dan rasional, malah jadi beban negara,” tandas Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Karena itu, Doktor Bidang Hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang ini tidak keberatan proses kematian santri Gontor dibawa ke meja pengadilan, sebab hanya di sana sajalah semua bukti dan dugaan bisa

diperdebatkan secara rasional.

“Gontor terbiasa mengajarkan para santrinya berpikiran rasional dan terbuka. Karena itu saya yakin, para pimpinan dan alumnyanya percaya bahwa lembaga pengadilan adalah pilihan paling rasional untuk membuktikan, apakah Gontor sebagai institusi telah bersalah, atau kasus kematian ini hanyalah akibat keteledoran anak muda saja,” tutup Ahmad Basarah. □

Gebrakan Polres Malang Berangus Perjudian

Basarah Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Melawan Perjudian

Penjudi itu orang malas. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong melawan perjudian yang membonceng kemajuan teknologi komunikasi,” tegas Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KITA dikenal sebagai bangsa pelaut, bukan bangsa pemalas. Penjudi itu orang malas. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong melawan perjudian yang

membonceng kemajuan teknologi komunikasi,” tegas Ahmad Basarah di Jakarta, Senin (26/9/22).

Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, memberi apresiasi dan mendukung penuh

gebrakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memerangi perjudian yang merusak mental masyarakat. Gebrakan terbaru dilakukan Polres Malang, Jawa Timur, yang memberangus 19 praktik judi dan menangkap 27 tersangka pelaku hingga September 2022 ini.

“Perjudian merusak moral bangsa dan tidak sesuai dengan kebudayaan nenek moyang kita yang rajin bekerja dan berkarya. Kita dikenal sebagai bangsa pelaut, bukan bangsa pemalas. Penjudi itu orang malas. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong melawan perjudian yang membonceng kemajuan teknologi komunikasi,” tegas Ahmad Basarah di Jakarta.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur V (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) itu memuji Polres Malang yang telah bergerak aktif memerangi perjudian sebelum Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi memerintahkan jajarannya memberantas perjudian, Kamis (18/8/2022) lalu. Sedangkan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat telah menggulung 19 praktik togel, togel online, Kyu-Kyu, serta judi online lainnya sejak Januari 2022 lalu.

“Ini langkah yang sangat baik untuk menjaga identitas Kabupaten Malang yang religius. Malang memiliki ‘Satata Gama Karta Raharja’, yang artinya ‘Menata Semua Untuk Kesejahteraan, di atas Kesucian yang Langgeng.’ Langkah polisi menjaga kesucian Kabupaten Malang dari penyakit sosial masyarakat, terutama perjudian, layak mendapat apresiasi,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.

Doktor bidang hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu menyadari sangat sulit memberantas perjudian, apalagi jika tindakan melawan hukum itu dilakukan secara online. Untuk itu, Ahmad Basarah mendorong Polri untuk tidak lelah memerangi tindak pidana yang melanggar pasal 27 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 UU ITE itu. Dalam pasal itu dikatakan pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Pasal 303 bis KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling

lama empat tahun dan/atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah. “Generasi Indonesia ke depan harus menjadi bangsa yang rajin bekerja, bukan bangsa yang bermalas-malasan tapi ingin cepat kaya. Dulu para pendiri bangsa memperjuangkan kemerdekaan negara kita dengan darah dan nyawa, masa generasi saat ini malah mengisinya dengan sengaja melanggar hukum dan berleha-leha,” tegas Ahmad Basarah.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengingatkan tentang pentingnya membangun karakter rakyat Indonesia yang pernah diperjuangkan Bung Karno lewat konsep Trisakti. Bung Karno saat itu mengaku membangun karakter bangsa bukan perkara mudah. Karena bangsa Indonesia saat itu baru saja merdeka dari penjajahan Belanda selama tiga setengah abad dan tiga setengah tahun oleh Jepang yang membuat mereka terbiasa menjadi bangsa kuli di antara bangsa-bangsa lainnya.

“Akibat perjuangan melawan Belanda, Bung Karno menyadari banyak terjadi kerusakan material, mental, serta moral di

kalangan masyarakat. Nah, jika memperbaiki kerusakan mental dan moral itu yang sangat sukar itu telah dilakukan Bung Karno dan pendiri bangsa lainnya, mengapa sekarang generasi saat ini malah merusaknya lewat candu judi,” tegas Ahmad Basarah.

Wakil Ketua Lakpesdam PBNU itu juga mengingatkan, perjudian adalah salah satu penumpang gelap kemajuan teknologi komunikasi yang di dalamnya kelompok-kelompok tertentu menjadikannya sarana kampanye ideologi transnasional, liberalisme, serta fundamentalisme agama yang menasar ke semua lapisan masyarakat.

“Semangat judi online juga sama, yaitu sama menyusupkan virus malas berkarya dan malas bekerja. Karena judi online ini dipromosikan lewat selebgram, popularitas artis, atau mendompleng event olahraga, dalam banyak kasus mereka yang diamankan dalam kasus judi ini adalah pelaku dengan kisaran usia produktif. Di usia ini mereka sebenarnya bisa melakukan banyak hal positif dan berkontribusi besar untuk bangsa,” tandas Ahmad Basarah. □



Terima Dubes Libya untuk Indonesia

Bamsoet **Dorong** Peningkatan Kerjasama Ekonomi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dan Duta Besar Libya untuk Indonesia, Mr. Zakarya MM El Maghrabi, sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Libya.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo bersama Duta Besar Libya untuk Indonesia, Mr. Zakarya MM El Maghrabi sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Libya. Terhadap berbagai hambatan yang terjadi, keduanya menekankan agar diselesaikan secara kekeluargaan melalui konsultasi dan negosiasi. Sejalan dengan hubungan persahabatan dan sikap saling dukung pemerintah kedua negara yang sudah terjalin selama 30 tahun, sejak 17 Oktober 1991.

“Karenanya, menyangkut permasalahan Pertamina dengan National Oil Company Libya (NOC Libya) terkait kerjasama eksplorasi minyak bumi di Block 17.3 (offshore Sabratah) dan Blok 123.3 (onshore Sirte) yang ditandatangani pada 10 Desember 2005, kita mendorong bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Mengingat terhentinya proyek eksplorasi tersebut salah satunya disebabkan gejolak politik dan keamanan Libya,” ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Libya untuk Indonesia Mr. Zakarya MM El Maghrabi, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Rabu (22/9/21).

Sehubungan dengan itu, lanjut Bamsoet,

sangat penting bagi Pertamina dan NOC Libya untuk duduk bersama, mencari solusi terbaik agar keduanya bisa saling diuntungkan.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, akibat konflik dan pemblokiran sejumlah terminal minyak penting di Libya oleh pihak-pihak yang bertikai, menyebabkan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Libya sempat menurun. Secara rata-rata, selama periode 2016 hingga 2020 terjadi penurunan tren perdagangan sebesar minus 32,08%. Nilai perdagangan tertinggi antara Indonesia dan Libya tercatat pada 2012





mencapai US\$ 576,5 juta.

“Selain menawarkan kerjasama eksplorasi minyak bumi di berbagai block lainnya, Libya juga sangat terbuka terhadap peningkatan kerjasama ekonomi di berbagai bidang. Salah satunya, Libya tertarik untuk take over kredit pesawat dari Garuda maupun Lion Air untuk memperkuat armada maskapai mereka,” jelas Bamsuet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Indonesia bisa menjadikan Libya sebagai salah satu pintu masuk dalam memperluas pasar komoditas unggulan Indonesia mencapai Eropa. Mengingat letak geografis Libya sangat strategis, sekitar satu jam penerbangan ke Italia dan berbagai negara Eropa lainnya.

“Komoditi utama ekspor Indonesia ke Libya antara lain plywood, karet, besi, dan baja, sabun, glassware, kertas, furniture, rempah-rempah, dan alas kaki. Sedangkan produk yang potensial untuk dikembangkan, antara lain teh, kopi, produk makanan, barang dari plastik, farmasi, kertas stationeries, elektronik,



minyak nabati, suku cadang mobil, dan produk mesin,” terang Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, investasi langsung (FDI) Libya ke Indonesia tercatat sebesar US\$ 15 juta oleh PT. Solar Sahara Investment (PT. SSI) dalam bentuk pendirian pabrik ban dalam, pabrik pipa PVC, dan proyek pembiakan ikan laut di Bali. Pemerintah Indonesia juga bisa menawarkan kepada Libya untuk menaikkan nilai investasinya, seiring dengan banyaknya peluang kerjasama yang bisa digarap. Baik

dari sektor infrastruktur, telekomunikasi hingga pertanian.

“Kita berharap, Pertamina bisa segera menyelesaikan persoalan dengan NOC Libya dan saya juga menyambut hangat permintaan Libya agar Indonesia bisa mengirimkan perawat untuk bekerja di sana. Selain membuktikan bahwa perawat Indonesia memiliki kualitas yang baik, tawaran tersebut juga semakin merekatkan hubungan people to people contact antara Indonesia dengan Libya,” pungkas Bamsuet. □

Perpres Dana Abadi Pesantren

HNW Sampaikan Tiga Catatan Kritis

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 resmi ditandatangani Presiden Jokowi. Diharapkan, masa depan pendidikan pondok pesantren jauh lebih baik dari sebelumnya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Dr. HM. Hidayat Nur Wahid, MA., menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Dana Abadi).

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 merupakan aturan lanjutan dari UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (pasal 49 ayat 2) yang juga telah mendapatkan dukungan terbuka dari PB Nahdlatul Ulama, Partai Kebangkitan Bangsa, PPP, dan Partai Solidaritas Indonesia.

Hadirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 diharapkan masa depan ponpes semakin baik. Apalagi, pasal 23 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2019 menyatakan, Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren.

Lembaga pendidikan ini terus berkembang.

Berdasarkan data Pontren Kemenag, hingga saat ini, jumlahnya mencapai 27.722 pesantren. Dengan keluarnya Perpres Dana Abadi Pesantren maka Pemerintah sudah membuat Peraturan turunan yang legal untuk melaksanakan UU Pesantren. Antara lain, untuk merealisasikan bantuan pendanaan pesantren bersifat abadi, hingga masa yang akan datang.

PKS, menurut Hidayat, akan bersama umat mengawal agar tujuan untuk membantu pesantren bisa dilaksanakan secara adil dan amanah. Sehingga Perpres bisa membantu pesantren sebagaimana harapan dunia pesantren dan para ulama pengasuh ponpes sesuai ketentuan UU.

Hidayat, yang bisa disapa HNW, mengingatkan, jangan sampai aturan ini hanya memberikan harapan tanpa perwujudan, apalagi menghadirkan ketidakadilan. Atau malah menyulitkan pesantren dan para kiaiinya, sebagaimana dikhawatirkan oleh sebagian pesantren dan kiai.

“Kami apresiasi pemerintah menindaklanjuti UU Pesantren dengan mengeluarkan Perpres Dana Abadi Pesantren. Ada beberapa catatan penting, khusus terkait pasal 23 dan pasal 25 pada Perpres tersebut”, ungkap HNW dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/9/2021).

Catatan kritis yang disampaikan politisi PKS ini adalah: *Pertama*, pasal 23 ayat (1) menyebutkan, Dana Abadi Pesantren merupakan bagian dari Dana Abadi Pendidikan. Sementara Dana Abadi Pendidikan dibiayai dari alokasi 20% APBN untuk sektor Pendidikan. Oleh karena itu, HNW mewanti-wanti, munculnya alokasi anggaran untuk Dana Abadi Pesantren tidak mengurangi anggaran program bantuan pesantren yang sudah ada, yang dikelola melalui Kementerian Agama.

Kedua, implikasi dari pasal 23 ayat (1) adalah Dana Abadi Pesantren sebagai bagian dari Dana Abadi Pendidikan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan, disebutkan bahwa LPDP sebagai pengelola bisa menginvestasikan dana tersebut pada berbagai instrumen/portofolio. HNW mengingatkan pemerintah agar memastikan bahwa hasil pengembangan Dana Abadi Pendidikan yang dialokasikan untuk pesantren harus berasal dari investasi yang dibenarkan oleh Dunia Pesantren, yaitu investasi yang sesuai dengan Syariah.

Ketiga, soal pasal 23 ayat (3) yang menyebutkan bahwa alokasi dana pemanfaatan untuk pesantren mengikuti prioritas dari Dana Abadi Pendidikan. Hidayat yang merupakan alumnus pondok Pesantren Gontor ini juga berharap, pesantren mendapatkan prioritas yang proporsional dengan sektor penerima manfaat lainnya. Tidak justru dipinggirkan apalagi sampai diakhirkan. □

MBO

Webinar LHKP PP Muhammadiyah

Sepakat Pentingnya Indonesia Miliki PPHN

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, kembali menegaskan bahwa pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN mempunyai konsekuensi adanya amandemen terbatas, sekurang-kurangnya berkaitan dengan dua pasal dalam konstitusi.

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, bersama Ketua Bidang Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Benny Harman, sepakat tentang pentingnya Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan.

MPR RI melalui Badan Pengkajian bekerjasama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI serta melibatkan pakar/akademisi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk Lembaga Negara dan Kementerian Negara, sedang menyelesaikan Rancangan PPHN berikut naskah akademiknya. Ditargetkan pada awal tahun 2022 sudah selesai.

Badan Pengkajian MPR RI juga telah melakukan kajian tentang pilihan bentuk hukum PPHN, yakni bisa dimasukkan dalam konstitusi, dalam bentuk Ketetapan MPR, ataupun undang-undang. Paling ideal, menurut laporan Badan Kajian MPR yang disampaikan pada pimpinan MPR pada Januari 2021, dilakukan dalam bentuk Ketetapan MPR. Bukan melalui undang-undang yang masih dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Juga bukan diatur langsung dalam konstitusi, karena PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik, dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat, serta bersifat direktif, tidak normatif seperti halnya konstitusi. Maka, materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja dalam konstitusi," ujar Bamsoet dalam Webinar yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, secara virtual dari Bali, Senin (13/9/21).

Turut hadir, antara lain: Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Yono Reksoprodjo; Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, Titi Anggraini; Peneliti Senior LIPI, Siti Zuhro; dan Peneliti Senior Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Iwan Satriawan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN mempunyai konsekuensi adanya amandemen terbatas, sekurang-kurangnya berkaitan dengan dua pasal dalam konstitusi. Antara lain, penambahan ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, serta penambahan ayat pada Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan Presiden apabila tidak sesuai PPHN.

"Kekhawatiran amandemen terbatas akan membuka kotak pandora dan membuka peluang dilakukannya amandemen pada substansi lain di luar PPHN, juga tidak beralasan dan terlalu premature. Proses panjang amandemen sudah diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat 1-3 UUD NRI Tahun 1945. Ayat 1 menjelaskan, usul perubahan pasal-pasal konstitusi dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, sekitar 237 dari 711 jumlah anggota

MPR, dan pengambilan keputusan harus memenuhi quorum 2/3 anggota MPR yang terdiri dari 9 Fraksi di DPR dan 136 anggota DPD," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPP dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, di ayat 2 dijelaskan bahwa setiap usul perubahan pasal-pasal konstitusi harus diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Sedangkan di ayat 3, dijelaskan untuk mengubah pasal-pasal konstitusi, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, sekitar 474 dari 711 anggota MPR.

Sementara di ayat 4 dijelaskan, putusan mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR, sekitar 357 dari 711 anggota MPR.

"Sehingga tidak mungkin ada penumpang gelap di luar PPHN. Seperti untuk mengubah periodisasi masa jabatan kepresidenan menjadi 3 periode," pungkas Bamsoet. □

Diskusi Empat Pilar MPR

Amandemen UUD Tak Boleh untuk Kepentingan Politik Jangka Pendek

Amandemen UUD sah-sah saja jika rakyat menghendaki, termasuk amandemen UUD NRI Tahun 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR, H. Asrul Sani, SH., M.Si., mengungkapkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 harus diperlakukan sebagai 'The Living Constitution' atau konstitusi yang hidup. Artinya, konstitusi bisa dilakukan perubahan atau tidak sesuai keperluan dan keinginan rakyat.

Contohnya, kini sedang hangat wacana tentang perlunya amendemen UUD NRI Tahun 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Itu boleh boleh-boleh saja jika rakyat menghendaki dan memang jika berdampak baik. "Yang tidak boleh adalah proses amendemen itu dilakukan dan digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek, apalagi kepentingan politik kelompok tertentu," kata Asrul Sani.

Asrul Sani menyampaikan hal itu dalam Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center Parlemen, Lobi Gedung Nusantara I, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021). Diskusi yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Sistem Informasi, Setjen MPR, bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen.

Selain menghadirkan Asrul Sani, diskusi bertema: 'Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dalam Mencapai Cita-Cita Bangsa,' itu juga menghadirkan pembicara lainnya, yakni: Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., dan pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, serta diikuti oleh para awak media massa

cetak, elektronik dan online.

Pimpinan MPR dari unsur Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, MPR sangat berhati-hati dalam menyikapi wacana tersebut sejak pertama kali digulirkan melalui rekomendasi yang diterima oleh MPR periode 2019-2024 dari MPR periode 2014-2019. Rekomendasi itu, antara lain terkait dengan





perlu menghadirkan haluan negara (PPHN).

“Mengapa kami sangat hati-hati, sebab di MPR periode lalu ada dinamika soal PPHN ini, yaitu ada tujuh raksi plus Kelompok DPD menyetujui PPHN dengan payung hukum TAP MPR, dan ada 3 Fraksi menyetujui PPHN, namun dengan payung UU. MPR periode sekarang pun ada perbedaan pendapat di tengah masyarakat tentang perlu tidaknya amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 dalam menetapkan payung hukum PPHN,” katanya.

Kepada masyarakat agar bisa lebih memahami terkait amandemen, Arsul Sani menginformasikan, amandemen hanya bisa terwujud melalui aturan dan prosedur yang ditetapkan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Di mana pada salah satu ayat, yaitu ayat (1) berbunyi, ‘Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis

Permusyawaratan Rakyat’.

“Di MPR, sampai saat ini usul tersebut belum ada. Saya sendiri berharap agar PPHN jika memang baik untuk rakyat Indonesia dan sebagai jalan memperlancar perjalanan bangsa ini menuju cita-cita Indonesia yang maju dan sejahtera, mesti mendapat dukungan. Arah ke sana sudah terlihat dengan banyak yang sepakat soal PPHN-nya. Tinggal bagaimana mencari jalan tengah untuk pembahasan payung hukumnya. Rakyat mesti bersabar, sebab saat ini negara dan kita semua sedang fokus mengatasi pandemi Covid-19,” tandasnya.

Perlu Kajian Mendalam

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., memastikan bahwa sampai saat ini, MPR RI belum memutuskan apapun terkait amandemen UUD NRI Tahun 1945. Ini menjawab pertanyaan berbagai pihak, perihal wacana yang masih hangat bergulir tentang memunculkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

melalui amandemen.

“Kabar terbaru yang bisa saya sampaikan, sesuai hasil Rapat Pimpinan MPR terakhir, adalah MPR masih akan terus melakukan kajian secara mendalam karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan,” ujarnya.

Lebih jauh Syarif Hasan menekankan, ketelitian dalam melakukan kajian perlu diperhatikan. Sebab, MPR sangat memahami bahwa wacana ini jika terwujud, akan sangat besar manfaatnya untuk bangsa. “Jadi intinya, karena PPHN ini untuk rakyat maka dibutuhkan konsentrasi dalam menyikapi dan mengelolanya,” tambahnya.

Kesepakatan Pimpinan MPR selanjutnya, lanjut Syarif Hasan, setelah selesai melakukan pendalaman dan keluar hasilnya maka langkah berikutnya adalah melakukan sosialisasi, dengan maksud mendapatkan respon balik dari rakyat. “Rakyat atau siapapun itu kami berikan hak yang sama untuk memberikan pandangannya,” ucapnya.

Pandangan rakyat, bagi Syarif Hasan, sangat penting sebab, karena MPR tidak menginginkan karena wacana ini di tengah masyarakat terjadi pro kontra semakin tajam, sehingga rakyat terkotak-kotak, terbelah, yang pada ujungnya mengancam persatuan bangsa. “Wacana ini juga jangan sampai menghabiskan energi bangsa yang semestinya digunakan untuk memikirkan penyelesaian pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum kunjung usai,” imbuhnya.

Untuk itu, Syarif Hasan mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung langkah-langkah MPR ini. “Kami di MPR akan berusaha semaksimal mungkin agar apapun hasil kajian dan keputusannya berdampak baik untuk semua,” tegasnya. □

DER



Pusat Isoman Pesantren NU

Wujud Pemerintah Hadir untuk Umat

Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah, pembangunan ruang isolasi mandiri di tujuh pondok pesantren NU jelas merupakan wujud nyata dari gotong royong yang menjadi saripati nilai-nilai Pancasila.



WAKIL Ketua MPR yang juga menjabat Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (PP LAZISNU) PBNU, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa pembangunan pusat isolasi mandiri di tujuh pesantren NU adalah wujud kehadiran pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin untuk umat. Dia menegaskan hal itu saat memberikan sambutan pada acara diresmikannya ruang isolasi Covid-19 di tujuh pondok pesantren NU dari berbagai daerah, Jumat (24/9/21).

"Pembangunan ruang isolasi mandiri di tujuh pondok pesantren ini jelas merupakan wujud nyata dari gotong royong yang menjadi saripati nilai-nilai Pancasila. Ini bukti pemerintah hadir untuk umat, sebab sesuai undang-undang perhajian, keuntungan dari dana haji benar-benar digunakan untuk kemaslahatan umat Islam, bukan untuk yang lain," jelas Ahmad Basarah yang juga dosen Universitas Islam Malang itu.

Sebagai wujud gotong-royong keumatan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan NU Care-Lazisnu membangun ruang-ruang isolasi mandiri di tujuh pesantren di Jakarta dan luar Jakarta. Ketujuh pondok pesantren itu, masing-masing: Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah di Jakarta Selatan, Pondok Pesantren Fauzan Garut (Jawa Barat), Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon

(Jawa Barat), Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin, Cilacap (Jawa Tengah), Pondok Pesantren Maslakul Huda Pati (Jawa Tengah), Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang (Jawa Timur), dan Pondok Pesantren Fathul Ulum Kewagean Kediri (Jawa Timur).

Menurut Ahmad Basarah, program gotong-royong keumatan itu dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. "Sesuai amanat Pasal 1 ayat 2 UU ini, dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam," jelas Ahmad Basarah.

Ahmad Basarah yang juga menjabat Sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) menjelaskan, berdasar data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga akhir Agustus 2021, ada 723 kiai di Indonesia meninggal dunia akibat terinfeksi virus korona (Covid-19). Sedangkan data resmi Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama atau Rabithah Ma'had Islamiyah PBNU menyatakan, per 27 Desember 2020 baru ada 234 kiai dan tokoh NU meninggal dunia

akibat Covid-19.

"Itu berarti terjadi peningkatan 200%. Karena itu, kerjasama dan gotong royong ini sangat bermanfaat untuk ikhtiar mencegah korban Covid-19 yang lainnya. Kendati pembiayaan fasilitas ruang isolasi Covid-19 di tujuh pesantren ini dibiayai oleh dana haji, pendanaan ini harus kita yakini halal karena dilakukan dengan cara yang benar, sebab undang-undang memang menyatakan dan mengaturnya demikian," tandas Ahmad Basarah

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menguraikan, Pasal 10 Huruf G Undang-undang Perhajian itu jelas memberi amanat kepada BPKH agar menggunakan keuangan haji untuk banyak sektor, antara lain kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Dengan demikian, program ini layak dicontoh karena tujuan program ini adalah tersedianya fasilitas yang layak untuk mendukung pelayanan kesehatan, khususnya penanganan Covid-19 bagi peserta didik/santri di pondok pesantren.

Kehadiran pemerintah dalam bentuk pembangunan pusat isolasi mandiri Covid-19 di tujuh pesantren itu disambut baik oleh para kiai pesantren yang hadir secara virtual dalam acara peresmian itu. Menurut KH Abdul Ghofarrozin, pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda Pati, Jawa Tengah, ia awalnya

menolak bantuan tapi berubah pikiran saat menilai sisi baik dari bantuan ini.

“Jika saya terima bantuan, itu berarti saya membenarkan bahwa santri-santri saya akan kena Covid-19. Tapi, setelah saya pelajari, bantuan ruang isolasi Covid-19 ini harus diterima sebab Islam mengajarkan kita harus siap-siap sebelum musibah datang. Tentu saya dan semua santri senang atas bantuan pemerintah ini,” jelas KH Abdul Ghofarozin.

Sementara itu, Rahmat Hidayat, anggota Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemasyarakatan BPKH, menjelaskan bahwa mengelola dana umat adalah amanat yang berat. Sekali tujuan pengelolaan salah diterapkan, taruhannya adalah risiko kehancuran umat.

“Jadi, tiga hal penting mengelola keuangan haji harus terus kami pegang, yakni kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas

dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan manfaat bagio kemaslahatan umat Islam,” jelas Rahmat Hidayat yang hadir secara virtual.

Sebagai penutup, Ahmad Basarah memberi apresiasi kepada Lembaga NU Care yang telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 12 negara. Di dalam negeri, NU Care tersebar di 34 Provinsi dan 376 Kabupaten/Kota. □

Menistaan Agama

HNW Kutuk Lembaran Alquran Jadi Petasan

Penistaan terhadap agama Islam kembali terjadi. Kali ini, lembaran Kitab Suci Alquran digunakan sebagai pembungkus dan bahan petasan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengutuk keras penggunaan lembaran Alquran sebagai pembungkus dan bahan petasan. Hidayat sepakat dengan MUI dan Muhammadiyah, peristiwa yang terjadi di Ciledug, Tangerang, itu merupakan perbuatan penistaan terhadap Alquran, kitab suci umat Islam.

Karena itu, menurut Hidayat, kasus tersebut perlu diusut tuntas, dan diberi sanksi hukum yang tegas agar tak berulang. Apalagi, kasus ini sempat viral di medsos, dan itu menunjukkan bahwa peristiwa tersebut sudah jadi perhatian publik.

Berulangnya penistaan terhadap agama dan simbol semua agama yang diakui di Indonesia membuktikan perlunya instrumen hukum bersifat *lex specialis*. Yaitu, instrumen hukum yang bisa melindungi simbol agama-agama di Indonesia agar tidak terjadi pengulangan penistaan agama, tokoh agama ataupun simbol-simbol agama.

Saat ini, kata Hidayat yang biasa disapa HNW, instrumen hukum yang tersedia belum menimbulkan efek jera kepada pelaku penistaan terhadap agama Islam dan simbolnya, sehingga masih terus terjadi. Bahkan, ada tokoh Budha yang heran dengan terus terjadinya penistaan terhadap Agama Islam (simbol) di Indonesia, Negara

Pancasila, yang mayoritas warganya justru beragama Islam.

“Selain dijadikan sebagai bungkus petasan, agama Islam juga beberapa kali menjadi bahan lawakan. Itu terjadi karena permissifnya publik dan tidak ada sanksi hukum yang tegas, sehingga para penista agama serta simbol agama mengira mereka tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga nista itu terulang lagi dan lagi,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (13/9/2021).

Selama ini, kata HNW, penistaan agama kerap kali diusut dengan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Atau Pasal 156s KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun. “UU tersebut hanya terdiri dari 5 pasal, jadi tidak secara komprehensif mengatur perlindungan terhadap agama atau simbolnya seperti rumah Ibadah maupun Kitab Suci,” ujarnya.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini mengingatkan agar DPR RI menyiapkan RUU Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU PTASA). Nantinya, RUU PTASA ini diharapkan menjadi salah satu upaya memberikan perlindungan terhadap semua Agama.

“Ini seharusnya menjadi prioritas DPR agar segera diundangkan. Supaya kejadian penistaan Agama dan Simbol Agama yang meresahkan masyarakat tidak terulang lagi,” ujarnya.

Dalam draft RUU PTASA itu, menurut HNW,

dijelaskan secara rinci simbol-simbol agama yang diakui oleh Negara Indonesia, dan dihormati oleh pemeluk-pemeluknya. Tujuannya adalah selain memberikan kepastian hukum, juga memberi pemahaman terhadap masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum berupa penistaan Agama. Dan, supaya Agama dan Simbol Agama yang terkait dengan sila I Pancasila dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 bisa dihormati dan dijaga.

“Selain memberikan sanksi lebih keras, juga ada upaya preventif berupa edukasi kepada masyarakat untuk menghormati simbol semua Agama. Sehingga tidak menjadi bahan penistaan, lawakan atau hal lain yang tidak meletakkannya pada posisi yang dihormati. Agar tercipta kondisi yang lebih kondusif untuk merawat toleransi dan harmoni juga kokoh kuatnya kedaulatan NKRI,” tuturnya. □

MBO

Usut Kasus Penyerangan Tokoh Agama

Wakil Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk menyelidiki teror penyerangan ulama dan penodaan simbol agama yang terus terjadi di Indonesia. Hidayat menilai penyerangan terhadap ulama dan penodaan simbol agama yang terus terjadi sebagai peristiwa yang ganjil. Pasalnya, peristiwa tersebut terjadi di negara yang telah mendeklarasikan diri sebagai negeri hukum, mayoritas mutlak penduduk dan pejabatnya beragama Islam.

Kasus terbaru, terjadi pada Ahad (19/9/2021), sehabis salat Maghrib. Seorang Ustad di Tangerang ditembak hingga wafat oleh orang tidak dikenal. Lalu, pada Senin (20/9/2021) siang ba'da dhuhur, seorang ustad yang sedang mengisi kajian di dalam masjid di Batam, dikejar dan diserang oleh orang yang ngaku sebagai Komunis.

HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, mengatakan, penembakan atau penyerangan terhadap tokoh Agama tersebut bukan yang pertama kali. Melainkan telah berulang kali terjadi selama dua tahun terakhir. “Ini yang harus diselidiki secara komprehensif terkait motif dan penerapan hukum dari peristiwa-peristiwa yang meresahkan warga dan umat. Apalagi,

pelaku penyerang ustad di Batam di bulan September ini, saat diperiksa oleh polisi, menyatakan dirinya sebagai komunis,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (20/9/21).

Lebih lanjut, HNW mencatat, ada lebih dari sepuluh kasus penyerangan dan teror terhadap tokoh agama dan rumah ibadah dalam kurun dua tahun terakhir. Beberapa di antaranya adalah penusukan ulama, penyerangan penceramah, penganiayaan imam masjid (saat salat subuh dan isya'), pelemparan bom molotov ke masjid, vandalisme di mushola, dan berbagai perusakan serta penistaan simbol agama lainnya. “Itu



perlu diusut secara tuntas, apakah ada kaitannya satu sama lain? Bagaimana vonis hukumnya?,” ujarnya.

HNW mengingatkan umat dan para tokoh agama untuk makin waspada, tapi jangan sampai terprovokasi. Karenanya, diperlukan penegakan hukum melalui aturan hukum yang khusus (*lex specialis*). Selain itu, fenomena berulangnya kasus ini juga harus diselidiki secara mendalam. Tak terkecuali, kasus terakhir penembakan seorang ustad di Tangerang, dan penyerangan ustad di Batam.

“Memang ada pelaku yang diproses

secara hukum dan divonis pengadilan, tapi vonis tidak memberikan efek jera. Apalagi beberapa kasus dihentikan karena pelaku dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Tapi, pengakuan penyerang ustad di Batam bahwa dirinya komunis, di tengah kewaspadaan umat soal bulan September dan kejahatan PKI terhadap NKRI dan Pancasila dan umat Islam, perlu diusut yang lebih serius,” ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, perlu penelusuran yang lebih mendalam dan komprehensif, bagaimana rangkaian peristiwa tersebut bisa terjadi. “Ada yang sebut itu suatu kebetulan. Tapi, sangat langka sekali bagaimana suatu kebetulan bisa terus berulang dengan modus korban yang sejenis (tokoh Agama Islam, ustad/masjid/mushola) dan pelakunya juga sejenis (diklaim gangguan jiwa). Apalagi bila dirujuk pernyataan mantan Kepala BIN Sutiyoso bahwa tidak mungkin hal seperti itu berulang kecuali ada faktor pengendalinya,” tambahnya.

Oleh karena itu, HNW menilai, pembentukan Pansus yang melibatkan Komisi VIII yang membidangi urusan keagamaan dan Komisi III yang membidangi urusan hukum di DPR merupakan langkah yang perlu diambil. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat dan tokoh Agama, terkait rangkaian peristiwa semacam itu yang terus terjadi. Dan, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban DPR sebagai Wakil Rakyat dalam mengkritisi kewajiban negara untuk menegakkan hukum yang adil dan benar. Agar Negara benar-benar melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Konstitusi. Yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk tokoh dan simbol agama.

“Pansus itu dibutuhkan dalam rangka DPR laksanakan amanat rakyat, serta hak pengawasan terhadap eksekutif dalam kewajiban penegakan hukum dan perlindungan terhadap rakyat, termasuk para tokoh Agama, seperti ulama/ustadz dan simbol agama. Bagaimana menghentikannya, dan apa solusinya agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Itu yang penting kita selesaikan bersama di DPR, sebagai realisasi laksanakan Amanat sebagai wakil rakyat,” pungkasnya. □

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid

Santri Punya Trah Menjadi Pemimpin

SAYA ingin menyampaikan kepada para santri bahwa santri punya hak untuk menjadi pemimpin. Di negeri ini, saya katakan pesantren, santri, pertama punya trah keilmuan. Namanya juga santri, ulama, jangan sampai para santri kehilangan trah keilmuannya. Santri kok nggak pintar, nggak punya ilmu, ya bukan santri, utamanya ilmu agama,” ujar Gus Jazil—sapaan akrab Jazilul Fawaid— saat melakukan Dialog Kebangsaan di Pondok Pesantren Bina Insan

khususnya KH Hasyim Asy’ari, mengeluarkan fatwa wajib hukumnya kaum muslim laki-laki dewasa dalam radius 94 km untuk berjuang melawan penjajah. “Setelah 22 Oktober 1945, ada peristiwa besar tanggal 10 November 1945 yang disebut Hari Pahlawan. Tidak akan pernah ada Hari Pahlawan 10 November jika tidak ada tanggal 22 Oktober 1945 (Resolusi Jihad),” katanya.

Setelah adanya Hari Santri Nasional,

Pesantren (Ponpes) Bina Insan Mulia di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menggelar acara tasyakuran. Acara tasyakuran serupa juga digelar di Kantor DPC PKB Kabupaten Cirebon.

Gus Jazil yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB mengatakan, dengan disahkannya Perpres 82/2021, kini para santri dan juga pesantren memiliki peluang yang lebih luas untuk mengembangkan diri dan bersaing dalam menapaki tantangan global.



Mulia, Cirebon, Kamis (16/9/2021).

Pesan senada juga disampaikan Gus Jazil saat Sosialisasi 4 Pilar di Pondok Pesantren Ulumuddin, Susukan, Cirebon, di hari yang sama.

Selain memiliki trah keilmuan, menurut Gus Jazil, santri juga memiliki trah sebagai pemimpin dan pejuang. “Indonesia lahir itu nggak turun dari langit seperti hujan. Kemerdekaan Indonesia itu diperjuangkan, dan andil terbesarnya adalah para santri, ulama. Dulu itu tidak diakui, alhamdulillah 2015 diakui ada Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober,” urainya.

Pemilihan tanggal Hari Santri Nasional tersebut karena tanggal itu bersamaan dengan momentum Resolusi Jihad di Surabaya, di mana para ulama saat itu,

Pemerintah bersama dengan DPR kemudian melahirkan Undang-Undang Pesantren pada 2019. Gus Jazil mengatakan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki andil besar dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Pesantren.

Dan, akhirnya pada 2 September 2021, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengatur tentang dana abadi pesantren. Gus Jazil mengatakan, hal ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kalangan pesantren yang selama ini terpinggirkan.

Sebagai bentuk rasa syukur atas disahkannya Perpres Dana Abadi Pesantren, jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB bersama dengan para santri Pondok

“Dulu pondok pesantren dianaktirikan. Lulusan-lulusan pesantren sulit untuk menempuh jenjang pendidikan di luar negeri karena subsidi dan support pemerintah kurang. Dengan Perpres Dana Abadi Pesantren ini terbuka peluang untuk santri melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri,” ungkapny.

Selain diikuti ribuan santri, tasyakuran yang ditandai dengan pemotongan tumpeng nasi kuning tersebut juga dihadiri Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, KH Imam Jazuli, sejumlah politisi PKB antara lain Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Anggota Komisi VIII DPR KH Maman Imanulhaq, Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon Hasan Bashori, Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Muhamad Shidqon, dan sejumlah politikus PKB lainnya. □



H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI/Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD/

Dosen Universitas Terbuka

Menjaga Efektivitas dan Keamanan PeduliLindungi

DIGITALISASI pada segenap aspek kehidupan kini sudah menjadi keniscayaan. Oleh karena platform digital *PeduliLindungi* telah difungsikan sebagai penyimpan data masyarakat yang sudah divaksinasi, efektivitas, dan keamanan platform ini harus terjaga.

Digitalisasi sudah menjadi tuntutan era terkini, sehingga siapa pun tak lagi bisa menghindarinya. Terbaru adalah pemanfaatan platform digital *PeduliLindungi*. Aplikasi ini semula memuat informasi daerah-daerah yang terpapar Coronavirus Disease (Covid-19). Karena tuntutan keadaan akibat perkembangan pandemi, aplikasi ini dikembangkan sedemikian rupa guna mendukung sejumlah instansi pemerintah dalam kegiatan pelacakan kasus Covid-19, sekaligus upaya memutus rantai penularan virus korona. Karena efektivitasnya cukup mumpuni, aplikasi *PeduliLindungi* kini telah menjadi penyimpan data masyarakat yang sudah divaksinasi.

Sebagai bagian dari kewaspadaan seluruh elemen masyarakat, aplikasi *PeduliLindungi* akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut keseharian masyarakat di masa pandemi. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan penggunaan platform digital ini tak hanya sekadar alat bantu pelacakan area atau wilayah terpapar virus korona, tetapi juga untuk mengidentifikasi seseorang itu sudah divaksin atau belum. Caranya, dengan menempatkan alat baca barcode *PeduliLindungi* yang tersimpan di ponsel dan diberbagai titik kegiatan publik; mulai dari pintu-pintu masuk transportasi umum, mal, bandara, dan ruang publik lainnya. Efektif, praktis, mudah, dan cepat.

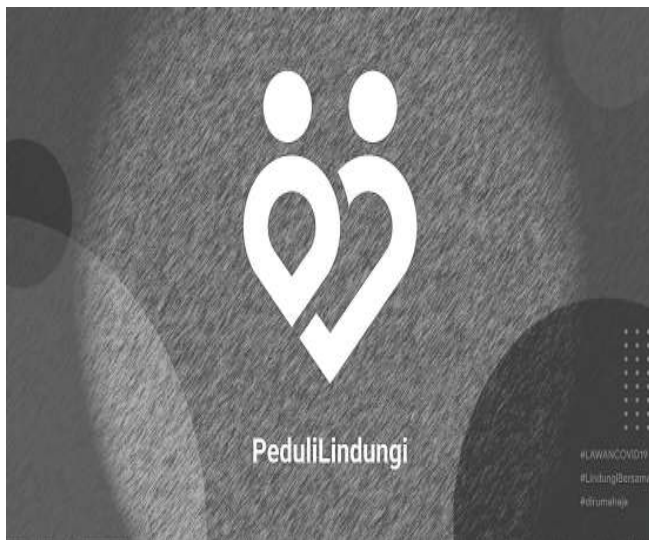
Sangat disayangkan, karena baru saja aplikasi

ini diterapkan, lagi-lagi muncul persoalan lama yang berulang, yakni kebocoran data pribadi! Tanpa perlu lagi menyebut satu per satu kasus terdahulu, untuk kesekian kalinya masyarakat dipaksa menyaksikan lagi kasus terjadinya kebocoran data pribadi. Kebocoran dari aplikasi *PeduliLindungi* itu kemudian muncul di platform media sosial, yang bisa dilihat dan diakses siapa saja. Bahkan, bisa digunakan untuk tindak kejahatan digital.

Kalau sekadar dilihat karena ingin tahu, kasus bocornya data pribadi bisa saja tak perlu dipersoalkan. Tapi, bagaimana jika data pribadi yang terpublikasi itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berniat melakukan tindak pidana? Sudah terjadi baru-baru ini, NIK dari Presiden Joko Widodo bisa dilihat pada platform-platform media sosial, akibat terjadinya kebocoran pada aplikasi *PeduliLindungi*.

Masyarakat tentu terkejut dan terusik karena kebocoran itu menyangkut data pribadi sosok seorang presiden, yang bisa saja jauh dari kemungkinan pemanfaatan datanya untuk tindak kejahatan pinjaman online ilegal serta kejahatan digital lainnya. Tetapi, apa jadinya jika kebocoran data itu berkaitan dengan pribadi warga kebanyakan? Potensi penyalahgunaannya terbilang tinggi karena barcode *PeduliLindungi* mencantumkan dengan lengkap data pribadi pemiliknya. Selain NIK, ada nama lengkap, nomor ponsel, bahkan email. Maka, tidak heran jika kasus bocornya data pribadi presiden meresahkan sebagian masyarakat.

Belajar dari kejadian itu, kini menjadi saat yang sangat tepat bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperbaiki kekurangan dan kelemahan pada aplikasi *PeduliLindungi*. Bukan



hanya soal cara melindungi data masyarakat agar selalu tetap aman. Faktor lain yang juga sangat penting adalah bagaimana agar masyarakat yang mengakses bisa melakukannya dengan mudah dan lancar, baik melalui aplikasi yang di-*download* atau lewat *website*-nya.

Kominfo juga harus mendengar dan segera menyikapi banyaknya keluhan masyarakat karena mereka kesulitan mengakses, yang kemudian berakibat pada gagalnya mengambil data sertifikat vaksinasi yang dibutuhkan untuk 'tiket' bepergian ke mana-mana. Mobilitas masyarakat bisa terhenti jika kemampuan aplikasi PeduliLindungi dalam memberi akses masuk masih begitu terbatas.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemerintah menjamin dan menjaga keamanan data yang tersimpan pada aplikasi PeduliLindungi. Jaminan akan keamanan data jelas sangat penting agar aplikasi PeduliLindungi dapat digunakan dengan efektif, efisien dan optimal oleh masyarakat. Mobilitas warga tidak terhambat, data terlindungi, dan tentu saja tujuan utama penggunaan

aplikasi ini juga bisa tercapai, yakni memutus rantai penularan virus korona.

Terhitung sejak dimulainya penerapan platform ini, data Kominfo menunjukkan bahwa aplikasi PeduliLindungi telah diunduh oleh lebih dari 39 juta orang, dan dimanfaatkan sebagai fungsi penyaringan (screening) di berbagai fasilitas umum. Ini jelas angka yang masih sangat rendah jika diperbandingkan dengan total 270 juta penduduk. Pemerintah seyogyanya semakin menyosialisasikan manfaat aplikasi ini, agar lebih banyak lagi yang men-*download* dan menggunakannya.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) sudah menerapkan penggunaan PeduliLindungi. Saat ini, tidak kurang dari 350 pusat belanja anggota APPBI telah memberlakukan ketentuan tersebut. Sejumlah area kegiatan publik lainnya pun sudah diwajibkan menerapkan aplikasi ini, seperti kegiatan industri berorientasi ekspor. Juga kelompok perusahaan kritikal seperti energi, logistik, pos, transportasi, dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat, serta supermarket dan hypermarket.

Belum lagi restoran dan kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka. Bahkan juga bioskop, tempat wisata hingga pusat kegiatan publik yang menyediakan fasilitas olahraga. Demi keamanan dan keselamatan, semua area kegiatan publik itu pasti butuh aplikasi PeduliLindungi.

Kendati masih ada kekurangan atau kelemahan di sana-sini pada platform PeduliLindungi, inisiatif dan langkah cepat bagi optimalisasi perlindungan dan keamanan data yang melibatkan sejumlah institusi patut diapresiasi. Sebagaimana sudah diketahui publik, melalui kerja sama yang melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sejumlah kementerian terkait dan PT Telkom Indonesia, telah dilakukan migrasi sistem PeduliLindungi ke Pusat Data Nasional yang dikelola Kemenkominfo.

Semoga, dari migrasi itu, aplikasi yang dikembangkan sejak awal 2020 sebagai hasil dari kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, PT Telkom Indonesia serta BSSN, akan jauh lebih aman dan efektif. □

Senayan, Jakarta

Syarief Hasan Raih Penghargaan dari Jepang

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., menjadi orang Indonesia kedua setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima penghargaan yang sama dari Pemerintah Jepang.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KEDATANGAN Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, ke Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 22 September 2022, disambut dengan hangat oleh Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA. Didampingi oleh dua stafnya, Kanasugi diterima Syarief Hasan, begitu Sjarifuddin Hasan biasa disapa, di ruang kerja, Lt.7, Gedung Nusantara III.

Kedatangan wakil resmi dari negeri matahari terbit ke kompleks Parlemen itu untuk memberi kabar bahwa Jepang akan memberi penghargaan kepada Sjarifuddin Hasan atas jasanya dalam meningkatkan hubungan Indonesia-Jepang.

Kepada wartawan, politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, dia tidak menyangka akan mendapat penghargaan ini," ujarnya. Penghargaan yang hendak diterima oleh Syarief Hasan itu serupa dengan penghargaan yang pernah diterima oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Setelah Pak Jusuf Kalla, pemerintah Jepang memberi penghargaan kepada saya", tuturnya.

Pria asal Sulawesi Selatan itu mengungkapkan, apa yang selama ini dilakukan olehnya rupanya secara diam-diam mendapat perhatian dari Pemerintah

Jepang. Selama ini ia mempunyai komitmen, tekad, agar hubungan kedua negara terus meningkat. Dia mendorong kerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, koperasi, dan UMKM terus dijalin dan ditingkatkan.

"Selain itu saya berusaha agar semakin banyak orang Indonesia belajar, bekerja, dan magang di Jepang", papar Syarief Hasan. "Kita ingin dalam semua sektor, termasuk medis, orang-orang Indonesia bisa bekerja

atau magang di sana", tambahnya.

Upaya yang demikian dikatakan sudah lama dilakukan, menurut Menteri Koperasi dan UMKM di masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, menjadi perhatian pemerintah Jepang hingga dirinya mendapat penghargaan. Dan penghargaan itu, kata Syarief Hasan, akan diserahkan kepadanya pada 9 November 2022 di Jepang. □



Golok Day Reborn 2022

Maknai Golok Day Sebagai Semangat Mengusir Kemiskinan dan Kebodohan

Golok Day Reborn mewariskan budaya leluhur dengan menjaga semangat Kiai Wasyid dalam peristiwa Geger Cilegon.

WAKIL Ketua MPR, Yandri Susanto, menghadiri *Festival Golok Day Reborn 2022* yang diikuti ribuan peserta di Stadion Krakatau, Cilegon, Banten, Sabtu (24/9/2022). Yandri menyebutkan, warga masyarakat Banten harus memaknai Festival Pencak Silat dan Golok Day Reborn 2022 sebagai semangat untuk mengatasi dan memerangi kemiskinan, kebodohan, perpecahan, dan adu domba di masyarakat.

“Kalau dulu masyarakat Banten menggunakan golok untuk mengusir penjajah, tapi sekarang harus dimaknai untuk mengusir dan memerangi kemiskinan, kebodohan, perpecahan, dan saling adu domba di masyarakat,” tegas Yandri Susanto dalam festival yang diselenggarakan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dan Himpunan Perguron Persilatan Banten (HPPB) Kota Cilegon di Stadion Krakatau, Cilegon, Banten, itu.

Hadir dalam Golok Day Reborn 2022 ini Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten H. Al Hamidi, Ketua IPSI Provinsi Banten H. Ajat Sudrajat, Walikota Serang (Ketua Bandrong Banten) H. Sjafrudin, Walikota Cilegon H. Helidy Agustian, Abah Jamhari Sakti, Ketua IPSI Cilegon H. Muharman Koto, Kapolres, Dandim, Danlanal, Ketua Panitia Rufaji Zahuri, tokoh masyarakat Ketua DPRD Cilegon Isro Mi'raj, serta dimeriahkan artis Opick.

Menurut Yandri, Golok Day Reborn 2022 ini menjadi momen bersejarah bagi Cilegon, Banten, dan Indonesia. “Karena kita memelihara semangat Kiai Wasyid, pejuang yang memimpin perang Cilegon pada *1888*. Semangat ini tetap dipelihara dengan penyelenggaraan Golok Day Reborn 2022 ini,” ujarnya.

Yandri menambahkan, Golok Day Reborn mewariskan budaya leluhur dengan menjaga semangat Kiai Wasyid dalam peristiwa Geger Cilegon. Namun, lanjut Yandri, makna Golok Day Reborn 2022 ini bukan lagi mengusir orang, penjajah pada masa lalu,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dengan golok atau pertumpahan darah.

Yandri menambahkan, golok adalah khas Indonesia sehingga jangan sampai diklaim negara lain. “Bagian yang lancip dari golok Cilegon adalah untuk pertahanan diri. Artinya, semangat Golok Day ini adalah kita mengusir atau memerangi kebodohan, kemiskinan, perpecahan, dan saling adu domba di masyarakat. Itu yang kita usir. Itu menjadi

pekerjaan rumah kita semua,” katanya.

Dengan semangat itu, Yandri berharap, Cilegon, Banten, dan Indonesia bisa terbebas dari kebodohan, kemiskinan dan perpecahan.

Golok Day Reborn 2022 merupakan event dalam rangkaian peringatan HUT Ke-22 Provinsi Banten. Sekitar 1.500 peserta mengenakan pakaian pendekar silat dan kaos Golok Day Reborn 2022 dengan membawa



serta aksesoris golok beraneka jenis. Golok Day Reborn 2022 bertema: “Dari Cilegon untuk Dunia” diisi dengan kirab 100 kendaraan kendang Pencak Silat dari Pintu Tol Cilegon Timur sampai Stadion Krakatau,

Gembrung Bersama, atraksi dan pagelaran seni bela diri pencak silat, atraksi debus kolosal dari 16 perguruan silat, juga pelantikan dan pengukuhan IPSI Cilegon.

Festival Golok Day sudah dimulai sejak

tahun 2015, secara rutin dilaksanakan pada setiap tahun. Terakhir kali dilaksanakan pada 2019, sebelum akhirnya terhenti selama dua tahun pada 2020 dan 2021 karena pandemi Covid-19. □

Pelatihan IT dan Data Science LPTNU DKI

Gus Jazil Serukan Kader Muda NU Kuasai IT dan Data Science

Perkembangan teknologi informasi (information technology/IT) begitu cepat dalam beberapa tahun belakangan. Hampir semua lini kehidupan masyarakat bersentuhan langsung dan sudah bergantung pada penggunaan IT.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

WAKIL Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, dunia modern saat ini semua serba canggih. Di tengah kecanggih-an teknologi modern, sebuah bangsa bisa dikatakan kuat salah satu parameter utamanya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). “Kalau parameter negara kuat itu diukur berdasarkan kekayaan alam (SDA-nya) maka Indonesia sangat kuat, tapi dari sisi kemampuan SDM umumnya kita masih tertinggal jauh dari negara-negara maju. Apalagi di bidang IT dan data science,” ujar Gus Jazil—sapaan akrab Jazilul Fawaid—

saat membuka Pelatihan IT dan Data Science yang digelar Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) DKI Jakarta di Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Dalam pelatihan bertajuk “Mencetak Generasi IT dan Data Science yang Terampil dan Siap Kerja,” Gus Jazil yang juga Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta menuturkan, pelatihan IT dan data science yang digelar LPTNU DKI Jakarta ini sangat penting guna menunjang pengetahuan dan keterampilan anak-anak muda NU. “Sebab kalau mencari ahli-ahli IT dan data science di NU masih minim. Padahal ini adalah salah

satu profesi terbaik saat ini,” tuturnya.

Menurut Gus Jazil, kecerdasan manusia terus mengalami perluasan. Jika dulu ukuran kecerdasan sering kali hanya dilihat dari kecerdasan emosi, intelegensia (IQ), dan kecerdasan spiritual, sedangkan saat ini muncul kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. “Itu yang kita latih karena kita butuh itu. Di zaman modern ini semua bergerak ke arah itu. Kecerdasan yang dibuat manusia sehingga memudahkan segalanya,” katanya.

Kendati begitu, Gus Jazil mengatakan bahwa perkembangan IT yang begitu dahsyat bukan tanpa risiko. Saat ini, selain hal-hal positif yang dimunculkan dari begitu dahsyatnya perkembangan IT, dampak negatifnya juga luar biasa besar. Dia mencontohkan betapa mudahnya akses terhadap pornografi, judi online maupun berita bohong (hoaks) yang menyebar begitu cepat dan memiliki kekuatan merusak yang begitu dahsyat.

“Hari ini banyak fitnah, berita-berita hoaks dari teknologi canggih ini. Dulu ada hoaks, tapi tidak seperti sekarang yang bisa menyebar sedemikian dahsyat. Berita benar kadang kalah dengan berita bohong. Itulah mengapa pentingnya NU memperkuat SDM-SDM muda yang menguasai IT, data science dan sebagainya,” tuturnya.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PKB ini, penguasaan IT oleh kader-kader NU juga bisa dijadikan sebagai langkah untuk mempermudah dan mempercepat syiar

ajaran *ahlussunnahwal jamaah*. “Kita di NU ini juga butuh penceramah yang bisa menguasai IT, bisa membuat konten ceramah yang singkat 5 menit tapi mudah dipahami dan disebar. Jadi, selain penceramah yang punya banyak jamaah seperti para kiai, juga butuh penceramah yang punya banyak follower di medsos,” katanya.

Menurutnya, saat ini NU menghadapi situasi dan tantangan yang sama sekali berbeda dengan masa lalu. Karena itu, diperlukan kemampuan beradaptasi dengan teknologi, dan kader-kader NU harus bisa melakukan percepatan budaya yang menyesuaikan dengan perkembangan. “Itulah mengapa pelatihan seperti ini penting agar kita tidak ketinggalan dan mampu

mengontrol sehingga kita tidak dijadikan “tempat sampah” dari perkembangan teknologi canggih,” tuturnya.

Gus Jazil mengatakan bahwa kader-kader muda NU harus ikut memberikan warna dalam pengembangan data science dan teknologi sebagai tanggungjawab dan tantangan, terutama bagi anak-anak muda NU ke depan. □

Festival Budaya GBN

Bamsoet Dorong Bangun Nasionalisme Melalui Gerakan Kebudayaan

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam event Gerakan Bhinneka Nasionalis menegaskan bahwa seni dan budaya dapat menjadi piranti untuk membangun semangat kebersamaan, merajut sinergi dan kolaborasi, atau yang biasa kita sebut dengan gotong royong.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) yang dipimpin Ketua Erros Djarot dan Sekretaris Jenderal Dhia Prekasha Yoedha, sebagai wadah perjuangan membangun nasionalisme melalui gerakan kebudayaan. Salah satunya dengan menyelenggarakan Bhinneka Culture Festival untuk meng-

hadirkan narasi kebudayaan, yang seringkali cenderung ‘terabaikan’ di tengah kesibukan dan geliat pemulihan perekonomian rakyat, yang selama lebih dari 2 tahun terdampak oleh pandemi Covid-19, serta di tengah hiruk pikuk kehidupan sosial-politik yang semakin dinamis.

“Bhinneka Culture Festival merepresentasikan aktualisasi kreasi seni dan budaya dalam beragam coraknya. Antara lain

melalui diskusi, pagelaran musik, peragaan busana, pertunjukan wayang kulit, pameran dan lokakarya kartun dan festival kopi, mengisyaratkan pesan penting, bahwa aktualisasi seni dan budaya memiliki ruang interpretasi yang begitu luas. Seni dan budaya menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan,” ujar Bamsoet usai membuka Bhinneka Culture Festival, di Gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis, Jakarta,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Rabu (28/9/22).

Hadir antara lain Menkopolkum Mahfud MD, Ketua Umum DPP GBN Erros Djarot, Sekretaris Jenderal DPP GBN Dhia Prekasha Yoedha, Musisi Candra Darusman, serta politisi Hamdan Zulvan.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Bhinneka Culture Festival juga mengemban misi mulia untuk menguatkan nilai-nilai kebhinekaan, kebangsaan dan nasionalisme, yang seiring perkembangan zaman dirasakan semakin terpinggirkan dari ranah realitas

sosial. Sekaligus menyadarkan bahwa pemberdayaan nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan.

“Di sisi lain, Bhinneka Culture Festival juga dapat memfasilitasi kebangkitan perekonomian rakyat, antara lain melalui promosi produk-produk UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam event ini juga menegaskan bahwa seni dan budaya dapat menjadi piranti untuk membangun semangat kebersamaan, merajut sinergi dan kolaborasi, atau yang biasa kita sebut

dengan gotong royong,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menuturkan, keprihatinan oleh publikasi beberapa hasil survei tentang Pancasila. Antara lain survei Komunitas Pancasila Muda pada akhir Mei 2020 yang mencatat bahwa masih ada 19,5% generasi muda yang menganggap Pancasila hanya sekedar istilah yang tidak dipahami maknanya. Sebelumnya, survei LSI Tahun 2018 juga mencatat bahwa dalam kurun waktu 13 tahun masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10%, dari 85,2% pada tahun 2005 menjadi 75,3% pada tahun 2018.

“Survei SMRC yang dirilis bulan Juni 2022 mengenai Sikap Publik terhadap Pancasila dalam rangka Konsolidasi Sistem Politik Indonesia, mengisyaratkan bahwa dari tingkat yang paling elementer sekalipun, pengetahuan dasar masyarakat tentang Pancasila masih belum optimal, dengan skor 64,6 atau dalam kategori sedang. Hasil survei juga mengungkap bahwa komitmen publik terhadap nilai-nilai Pancasila, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa juga diklasifikasikan dalam kategori sedang-sedang saja,” pungkas Bamsuet. □



Acara Pengukuhan Guru Besar di UNG

Masih Banyak Hasil Penelitian Disimpan di Rak-rak Buku

Setiap waktu, jumlah penelitian yang dilakukan civitas akademika terus bertambah. Tetapi, baru sedikit yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad berharap, kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi harus terus ditingkatkan. Karena perguruan tinggi memiliki banyak kerangka ilmiah, terkait upaya-upaya pengembangan ekonomi dan kemajuan masyarakat. Sayangnya, hingga kini, masih banyak hasil penelitian di kampus yang belum dimanfaatkan, dan hanya disimpan di rak-rak buku, belum memberi peran apapun baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Stop kebiasaan itu. Sangat disayangkan jika hasil-hasil penelitian, terus dibiarkan saja dan tidak memberi manfaat. Termasuk yang ada di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) ini,” ujar Fadel.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR usai menghadiri Sidang Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Tetap UNG. Ada tiga guru besar dikukuhkan pada acara tersebut, yaitu: Prof. Dr. Amir Halid, SE., M.Si.; Prof. Dr. Fahrudin Zain Oililungo, SE., M. Si.; serta Prof. Dr. Rieny Sulistijowati S, S.Pi., M.Si. Acara tersebut berlangsung di ball room Hotel Damhil UNG,

Selasa (27/9/2022).

Pada prosesi pengukuhan, ketiga guru besar berkesempatan menyampaikan orasi ilmiahnya masing-masing. Prof. Dr. Amir Halid, SE., M. Si., menyampaikan pidato ilmiah berjudul ‘Kebijakan Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak, Proyeksi Terhadap Perekonomian Nasional Jangka Pendek’. Prof. Dr. Fahrudin Zain Oililungo, SE., M.Si., berjudul: ‘Kutub Pertumbuhan Dalam Perencanaan Pembangunan.’ Sedang Prof. Dr. Rieny Sulistijowati S, S. Pi., M.Si., berjudul: ‘Pengembangan Kitosan Crustacea Flavonoid Buah Mangrove dan Bakteri Kitinolitik, Sebagai Kemasan Aktif Dan Kitinase Masa Depan’.

Pada kesempatan, itu, Fadel Muhammad mengapresiasi perkembangan yang dicapai UNG, khususnya selama tiga tahun terakhir kepemimpinan rektor UNG, Dr. Eduart Wolok, ST., MT. Pada 2004, saat pertama berdiri, kata Fadel UNG, hanya memiliki 4 guru besar. Kini, setelah berusia 18 tahun jumlah guru besarnya bertambah sangat pesat, menjadi 44 orang guru besar. Bahkan, dalam waktu dekat, jumlah tersebut dipastikan akan bertambah, karena ada 15 calon guru besar

yang masih dalam proses. Karena itu, Fadel yakin jumlah penelitian, karya ilmiah dan jurnal ilmiah yang dihasilkan UNG sangat besar dan itu belum terlalu banyak dimanfaatkan.

“Untuk menghasilkan riset dan penelitian ilmiah itu biayanya tidak kecil. Perlu dimanfaatkan lebih besar agar tidak mubazir dan bisa memberi manfaat bagi masyarakat serta kemajuan daerah,” katanya.

Fadel juga mengimbau agar pemerintah bisa lebih terbuka untuk mendengar dan menampung hasil penelitian dari perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan. Agar, kedua belah pihak bisa saling berkontribusi dalam pengembangan masyarakat dan daerah.

Kehadiran Fadel Muhammad pada Sidang Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Tetap UNG itu disambut penuh hangat. Maklum, selama ini Fadel tercatat sebagai salah satu inisiator pendiri UNG yang sebelumnya bernama IKIP Gorontalo. Bahkan, Fadel juga dikenang oleh Civitas Akademika UNG karena menjadi salah satu sosok yang selalu membantu dan memerhatikan setiap perkembangan yang terjadi di sana. □

MBO



H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI

PPHN untuk Tantangan Riil Akibat Perubahan Zaman

KETAHANAN pangan, percepatan tersedianya energi terbarukan, digitalisasi pada sejumlah aspek kehidupan, pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga penguatan program penelitian dan pengembangan menjadi tantangan riil pembangunan nasional era terkini dan di masa depan. Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) mendorong pemerintah dan semua elemen bangsa bersepakat memprioritaskan respons negara-bangsa terhadap semua tantangan riil itu.

Ragam tantangan riil itu mengemuka seturut perubahan zaman. Sebagai buah dari perubahan, semua tantangan itu tak terelakan sehingga mendorong semua elemen negara-bangsa beradaptasi. Respons dan penyikapan terhadap ragam tantangan baru itu harus konsisten dan berkelanjutan. Karena itulah negara-bangsa butuh PPHN sebagai penunjuk arah pembangunan nasional.

Dalam konteks mewujudkan kemampuan negara-bangsa untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman, PPHN praktis menjadi keniscayaan. Idealnya, PPHN dipahami sebagai pijakan politik negara-bangsa mewujudkan kesejahteraan warga bangsa di tengah perubahan zaman. Sebab, dengan selalu berpijak pada PPHN, negara dimampukan untuk melaksanakan kewajibannya mewujudkan kesejahteraan. Agar negara dapat mewujudkan kesejahteraan segenap warganya, politik pembangunan harus selalu mengacu pada politik kesejahteraan itu, siapa pun pemimpin atau presidennya.

Sebab, kepatuhan pada PPHN-lah yang akan memastikan kemampuan negara-bangsa beradaptasi dengan perubahan zaman yang nyata-nya telah menghadirkan ragam tantangan baru itu. PPHN pula yang akan mewajibkan setiap pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk

selalu fokus dan berorientasi pada upaya menjawab semua tantangan riil itu.

Kebutuhan negara akan PPHN era terkini dan di masa depan sangat relevan. Alasan utamanya, tantangan yang dihadapi tidak ringan dan juga cukup beragam. Jawaban terhadap ragam tantangan itu butuh proyeksi, perencanaan, dan kerja yang berfokus serta berkelanjutan. Maka, harus terwujud konsistensi kepatuhan pada PPHN sebagai pijakan. Artinya, jangan sampai tampilnya pemerintahan baru membelokkan fokus dan orientasi pembangunan nasional.

Semua orang sudah merasakan eksese perubahan iklim karena dampaknya terjadi pada semua aspek kehidupan. Suhu bumi yang naik tak hanya menyebabkan naiknya temperatur bumi, melainkan juga mengubah pola iklim. Perubahan itu tentu menghadirkan persoalan sekaligus menjadi tantangan.

Tantangan riil paling utama bagi negara-bangsa adalah menjaga dan merawat ketahanan pangan. Agenda ini perlu mendapat perhatian khusus, karena perubahan pola iklim dengan segala eksesnya berpotensi melemahkan ketahanan pangan nasional di masa depan. Generasi muda juga patut menggarisbawahi agenda ini karena perubahan iklim merusak pola tanam. Karena alasan ini, aspek ketahanan pangan nasional di masa depan ditetapkan dalam PPHN, agar setiap penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah, taat dan konsisten bekerja mewujudkan ketahanan pangan.

Sebagaimana dipahami bersama, perubahan iklim menyebabkan terjadinya kekacauan pola musim yang berdampak signifikan pada sektor pertanian tanaman pangan. Dari aspek kesuburan, daya dukung lahan terus menurun. Hasil penelitian para ahli juga menyebutkan bahwa dari aspek volume, ketersediaan air pun semakin berkurang dengan kualitas yang terus menurun. Belum lagi munculnya faktor gangguan lain

terhadap tanaman padi, seperti hama wereng batang coklat.

Fakta-fakta seperti itu menyebabkan produktivitas sektor pertanian pun terus menurun dari waktu ke waktu. Kasus gagal panen pada berbagai tanaman pangan sudah sering terjadi. Upaya beradaptasi dengan mencoba mengubah musim tanam pun menjadi tidak mudah karena cuaca yang serba tak menentu itu. Karena itu, diperlukan peningkatan aktivitas penelitian dan pengembangan (Litbang) untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Selain aspek ketahanan pangan, Indonesia pun sejak sekarang harus bekerja lebih sungguh-sungguh mempercepat tersedianya energi terbarukan yang bersih. Sebagai bagian dari komunitas global yang telah bersepakat untuk menghentikan penggunaan energi fosil yang polutif, Indonesia pun harus segera mewujudkan tersedianya energi alternatif.

Untuk menyediakan energi terbarukan, Indonesia memiliki modal yang lebih dari cukup. Modal itu adalah sumber daya alam (SDA) yang masih tersimpan di perut bumi nusantara. Agar semua SDA itu bernilai tambah bagi kehidupan, diperlukan kerja keras berkelanjutan. Indonesia memiliki cadangan nikel, bauksit dan tembaga yang cukup.

Belum lagi potensi energi hijau yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga hidro. Potensinya besar karena Indonesia memiliki 4.400 sungai. Ada juga potensi pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal). Pembangkit geothermal sangat melimpah dengan potensi mencapai 29 ribu megawatt, namun baru bisa direalisasikan sekitar 2.000 Megawatt.

Keragaman SDA Indonesia yang berlimpah ini belum digarap dengan maksimal akibat keterbatasan modal dan teknologi. Padahal, ketika nantinya komunitas global merealisasikan kesepakatan untuk tidak lagi menggunakan energi fosil yang polutif, keragaman SDA itu akan sangat dibutuhkan dunia. Itu sebabnya, PPHN akan mewajibkan pemerintah untuk lebih bersungguh-sungguh menggarap SDA nasional untuk menghadirkan energi alternatif pengganti energi fosil.

Tantangan riil lainnya yang juga tak kalah strategisnya adalah digitalisasi. Menjadi fakta tak terbantahkan bahwa roda perubahan zaman terus berputar, dan kadang terasa demikian cepat. Perubahan itu menghadirkan kebutuhan dan tuntutan baru yang berbeda dengan era sebelumnya.

Sebutlah kebutuhan dan tuntutan akan digitalisasi yang mewarnai dinamika kehidupan masa kini. Sebagai wujud perubahan, digitalisasi tak bisa dihindari oleh siapa pun, baik masyarakat perkotaan maupun mereka yang bermukim di pelosok-pelosok desa. Dalam konteks digitalisasi, nyaris tak ada lagi daerah atau wilayah yang terisolasi. Itu sebabnya, PPHN pun memberi penekanan pada aspek ini.

Komunitas global sudah mengadopsi Industri 4.0, era baru yang juga menghadirkan begitu banyak perubahan di bidang ekonomi dan industri. Proses yang konvensional pada era Industri 3.0 sudah harus ditinggalkan. Sebab, proses produksi dan distribusi pada sektor industri di era Industri 4.0 bekerja dengan dukungan teknologi digital dan internet.

Digitalisasi dalam proses produksi dan distribusi mengharuskan semua entitas yang terkait langsung dengan industri harus selalu terkoneksi untuk komunikasi dan berbagi informasi. Konsekuensinya, kecepatan tersedianya data dan informasi menjadi faktor yang utama.

Tak ada pilihan bagi generasi milenial dan generasi Z, kecuali segera beradaptasi dan mengadopsi perubahan-perubahan dimaksud. Utamanya karena dunia kerja juga berubah, tidak sama lagi dengan era Industri 3.0. Pada era sekarang, banyak fungsi dalam organisasi manajemen tidak lagi butuh otak dan tenaga manusia, karena sudah digantikan oleh internet of things (IoT).

Sudah barang tentu Indonesia harus terus memperkuat aspek kesiapan sumber daya manusia (SDM). Sekarang dan nanti, Indonesia butuh begitu banyak talenta digital. Tantangannya tak berhenti pada kebutuhan talenta digital. Persoalan berikutnya adalah seberapa jauh kesiapan dan kemauan dunia pendidikan nasional beradaptasi dengan perubahan sekarang ini. Kemauan beradaptasi setidaknya harus tercermin pada perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Aspek lain yang tak kalah pentingnya adalah percepatan realisasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dalam negeri. Bagaimana pun, TIK sudah diterima dan dipahami sebagai infrastruktur paling penting pada era sekarang.

Karena perubahan-perubahan itulah tantangan dan agenda pembangunan era terkini dan di masa depan praktis sangat berbeda dengan dekade-dekade sebelumnya.. Dengan demikian, urgensi PPHN menjadi sangat jelas. □

Pensiun Anggota DPR Menjadi Beban?

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan beban sebesar Rp 2.800 triliun terhadap keuangan negara. Dari ungkapan yang demikian lalu melebar bagaimana dana pensiun anggota DPR? Berikut pendapat dari wakil rakyat yang membidangi masalah itu.

Fauzi H. Amro Anggota MPR Fraksi Partai Nasdem

Akan Mengikuti Peraturan Perundangan

YA, INI benar adanya. Memang selama ini dana pensiun PNS itu jadi beban bagi APBN kita, mengingat begitu banyak PNS yang harus ditanggung negara ketika mereka memasuki masa tidak produktif atau pensiun. Bahkan, ketika yang bersangkutan sudah meninggal, negara masih berkewajiban memberikan gaji pensiun yang diterima oleh anggota keluarga yang bersangkutan, bisa istri atau pun anaknya. Ini sangat membebani keuangan negara kita.

Dengan mempertimbangkan beban APBN kita, karena besarnya dana pensiun yang harus disiapkan pemerintah atau negara, maka memang sebaiknya pemerintah melalui Kemenkeu perlu mengubah skema dana pensiun, misalnya dana pensiun cukup

diberikan 1 kali diakhir masa kerja atau ketika memasuki pensiun. Selanjutnya, dana tersebut bisa dipakai oleh si pensiunan untuk membuka usaha ketika memasuki pensiun. Sehingga dengan skema ini, selain menyehatkan pengelolaan APBN kita, juga bisa merangsang atau tumbuhnya wirausaha ketika memasuki masa pensiun. Soal berapa besaran, nanti akan dibahas oleh Pemerintah dan DPR. Pada prinsipnya saya setuju ada perubahan skema dana pensiun.

Lalu bagaimana dengan dana pensiun buat anggota DPR, apakah juga menjadi beban? Ya, pasti jadi beban bagi APBN. Namun, kalau pemerintah melakukan skema dana pensiun PNS, otomatis dana pensiun DPR juga akan berubah, sesuai peraturan



pemerintah. Kami pada prinsipnya, mengikuti sesuai peraturan perundangan yang ada, termasuk soal skema dana pensiun. □

AWG

Zulfikar Arse Sadikin Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Belajar dari Skema Kongres Amerika Serikat

MEMANG secara anggaran, pembayaran pensiun PNS menjadi kewajiban dari pemerintah yang nilainya semakin besar dari tahun ke tahun, karena adanya penambahan jumlah pensiunan dan Gaji Pokok PNS yang naik. Tahun ini negara harus membayar Rp 136,4 triliun dan, menurut BPK, di masa depan kewajiban negara untuk membayar pensiun ini mencapai Rp 2.900 triliun.

Pembayaran pensiun bukanlah beban melainkan hak PNS yang harus dijamin oleh negara. Namun, kenapa dianggap menjadi beban, karena ada dua hal. Pertama, sistem pembayaran dengan skema *pay as you go* yang diatur dalam Undang-undang Nomor



11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang mengatur program Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk PNS, membuat kewajiban pembayaran pensiun hanya bertumpu kepada APBN saja, karena tidak ada tambahan dana lain yang membantu. Oleh karena itu, ke depan, ada baiknya mengubah skema *pay as you go* menjadi *fully funded* agar menguntungkan semua pihak, baik PNS maupun pemerintah.

Kedua, karena skemanya *pas as you go* pemerintah sebagai pemberi kerja tidak memiliki dana yang disisihkan untuk masa depan yang dikelola lembaga khusus, seperti konsep BP Jamsostek. Dana di mana Jaminan Hari Tua diperoleh dari akumulasi

kelolaan iuran peserta plus pemberi kerja yang dikelola BP Jamsostek. Akibatnya, sekali lagi, APBN menjadi satu-satunya sumber dana untuk pembayaran pensiun. Lembaga dana pensiunan PNS ini akan dibentuk setelah pemerintah mengubah skema pensiunan PNS dari *pay as you go* menjadi *fully funded*.

Lalu banyak yang bertanya kenapa kemudian PNS tetap mengiur 4,75% tiap bulan yang dananya dikelola PT. TASPEN yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013, sebagai tindak lanjutnya Dana Pensiun PNS dialihkan kepada PT. TASPEN (PERSERO) berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-244/MK.011/1985 tanggal 21 Februari 1985. Iuran tersebut bukan untuk membayar kewajiban pensiun saat ini, melainkan dana tersebut setiap bulannya dipupuk sebagai

persiapan menuju skema *fully funded* yang dananya dikelola oleh lembaga pensiun tersebut. Memang pada masa lalu sempat ada sharing antara APBN dan Taspen untuk pembayaran APBN, karena pemerintah tidak punya anggaran untuk itu. Namun sejak 2009 kembali full APBN.

Sehingga memang usulan perubahan skema pembayaran pensiun yang sempat diungkapkan oleh Kemenpan RB untuk mengubah skema pembayaran pensiun sangat penting untuk dilaksanakan, seperti yang sudah diamanatkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Bila kita belajar dari negara yang maju demokrasi dan ekonominya, seperti Amerika Serikat, memang pemberian pensiun untuk anggota kongres tidak otomatis, pernah menjabat lalu kemudian menerima pensiun seumur hidup.

Dana Pensiun Kongres adalah pensiun

yang disediakan bagi anggota Kongres Amerika Serikat. Pada 2019, anggota yang berpartisipasi dalam sistem pensiun kongres diberikan hak setelah lima tahun masa kerja. Pensiun penuh tersedia bagi anggota yang berusia 62 tahun dengan masa kerja 5 tahun; usia 50 tahun atau lebih dengan masa kerja 20 tahun; atau 25 tahun bekerja pada usia berapa pun.

Mereka yang hanya sekali terpilih menjadi anggota kongres tidak mendapatkan pensiun apapun, kemudian anuitas pensiun tidak boleh melebihi 80% dari gaji terakhirnya. Anggota kongres pun membayar iuran selama menjabat kepada badan Federal Employees Retirement System (FERS) yang mengelola dana pensiun. Mungkin sistem ini bisa menjadi rujukan untuk memenuhi rasa keadilan yang diminta masyarakat terkait dengan dana pensiun bagi anggota DPR. □

AWG

Ahmad Yohan Anggota MPR Fraksi PAN

Mengarah pada Tatakelola Dana Pensiun Yang Efisien

YANG terjadi adalah pemerintah ingin menata ulang tanggungan pensiun ASN. Yang disampaikan Menkeu terkait dana pensiun ASN ke depan adalah skema pembayaran pensiunan PNS diubah. Dari skema *pay as you go* ke *fully funded*. Kalau skema yang sekarang (*pay as you go*) dinilai memberatkan fiskal/APBN. PNS hanya tanggung 4,75% dari gaji. Selebihnya ditanggung APBN.

Nah, ke depan, dengan *fully funded*, ini semacam *burden sharing*. Pemerintah dan ASN menanggung sama-sama. Iuran ASN diambil dari persentase tertentu dari THP (*take home pay*). Bukan dari gaji. Jadi, kalau *fully funded*-nya bisa mencapai Rp 1 Miliar, kan bisa membantu ASN pensiun untuk mengelola dana tersebut di hari tuanya.

Dari skema tersebutlah, selanjutnya, dana pensiun ini akan dikelola secara prudent oleh PT. Taspen (Persero), sehingga ASN yang pensiun dapat menikmati hari tuanya dengan dana pensiun yang memadai.

Jadi, pola pembayaran pensiun berubah, menjadi pembayaran penuh (*fully funded*) dari pembayaran tiap bulan (*pay as you go*). Kalau iuran berdasarkan THP maka makin besar iurannya. Tapi yang diterima juga

lumayan, untuk usaha di masa pensiun.

Kalau kita lihat negara-negara lain, seperti Belanda, Norwegia, AS, dan Korea, sebagai *benchmark*, maka dana pensiun mereka sudah tidak mengandalkan APBN, tapi dikelola melalui industri keuangan seperti PT. Taspen (persero) secara mumpuni.

Jadi, kalau tata kelola dana pensiunnya bagus, dengan imbal hasil dari investasi yang menarik maka perlahan-lahan APBN kita tidak terbebani. Namun, bila yang terjadi sebaliknya, pendapatan PT. Taspen kecil, sementara beban klaimnya besar, maka APBN yang kembali terbebani. Inilah salah satu substansi yang perlu didiskusikan.

Jadi, yang dibesar-besarkan itu jangan soal "beban APBN," tapi manfaat yang akan diperoleh ASN di masa pensiun dengan institusi pengelolaan dana pensiun yang lebih baik ke depan. Inilah yang menjadi poin penting yang perlu di-reform oleh otoritas fiskal.

Perubahan skema tanggungan dana pensiun tersebut dalam rangka menata kembali ruang fiskal, khususnya pada nomenklatur belanja pegawai. Tujuannya adalah agar APBN kita lebih efisien dan fleksibel. Toh kalau APBN-nya efisien, manfaatnya ke rakyat juga.



Penyaluran pensiunan DPR serta lembaga tinggi negara diatur dalam Undang-Undang (UU) 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara.

Masih dalam kerangka yang sama, terkait tata kelola fiskal, maka skema dana pensiun DPR/lembaga tinggi negara dalam proses diskursus. Tentu semuanya berdasarkan regulasi. Jadi perdebatannya mengarah pada perbaikan sistem dan tata kelola dana pensiun yang berimplikasi efisiensi APBN. □

AWG

Pembangunan Ma'had Islam Rafiah Akhyar

Yandri Tegas Menentang Penghapusan Madrasah

Tercerabutnya istilah Madrasah dari Rancangan Perubahan UU Sistem Pendidikan Nasional menuai banyak penolakan. Salah satunya dari Wakil Ketua MPR RI H. Yandri Susanto S.Pt.

WAKIL Ketua MPR RI H. Yandri Susanto S. Pt., menegaskan tekadnya untuk terus berpihak Madrasah. Karena terbukti, madrasah telah melahirkan banyak pemimpin bangsa, baik di masa lalu, masa kini, maupun di masa depan. Apalagi, saat ini ada upaya dari pihak tertentu yang ingin mengkerdilkan eksistensi madrasah. Salah satunya dengan menghapus madrasah dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

"Saya menentang keras upaya penghapusan madrasah dari rancangan perubahan UU Pendidikan Nasional. Mesti diingat, madrasah sudah ada sebelum Indonesia merdeka, dan berjasa besar dalam perjuangan bangsa dan negara. Karena itu, tidak seharusnya keberadaan madrasah dihilangkan dari UU Sisdiknas," tegas Yandri Susanto.

Pernyataan itu disampaikan Yandri Susanto saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Pembangunan Ma'had Islam Rafiah Akhyar (Mira), Kampung Cipancur, Kelurahan Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten, Ahad (11/9/2022). Pada kesempatan itu, Yandri mendapat kehormatan ikut meletakkan batu pertama, tanda dimulainya pembangunan Mira.

Ikut Hadir pada acara tersebut Menteri Perdagangan Dr. (HC). Zulkifli Hasan, SE., MM. Juga pembina Mira, Hj. Rafiah Akhyar, dan Ustad H.Dr. (H.C) Adi Hidayat, LC., MA. Serta Forkopinda Kabupaten Serang. Juga para ulama, ustad. dan kiai se Provinsi Banten.

Peran dan jasa madrasah serta pesantren itu, menurut Yandri, masih terasa hingga sekarang. Di masa kini, pondok dan madrasah memiliki kontribusi besar membina akhlak generasi muda agar tidak jauh dari akhlak Nabi SAW. Apalagi di tengah gempuran nilai-nilai dari luar yang masuk secara terus-menerus menggunakan berbagai cara, termasuk media sosial.

"Saya bisa merasakan benar peran serta itu, karena saya punya dan ikut mengurus madrasah serta pondok pesantren. Madrasah terbukti mampu menjaga dan mendidik generasi muda dengan Akhlakul



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Karimah, dan itu harus terus kita perjuangkan," kata Anggota Komisi VIII DPR RI, itu.

Karena itu, Yandri mengajak masyarakat terus mendukung dan menjaga keberadaan madrasah dan pondok pesantren. Tidak membiarkan madrasah berjuang sendiri menghadapi pihak-pihak yang bermaksud merusaknya. Dengan begitu diharapkan kontribusi madrasah dan pesantren melahirkan anak-anak masa depan bangsa yang hebat dunia akhirat bisa diteruskan.

"Semoga usaha ini menjadi amal jariah, berguna bagi kita di akhirat nanti. Karena, setiap yang bernyawa pasti akan mati. *Kullu nafs in zaaikatul maut*," kata Yandri lagi.

Sebelumnya, pembina Ma'had Islam Rafiah Akhyar, Ustad H. Dr. (H.C) Adi Hidayat, LC., MA., menyampaikan cita-citanya mendirikan lembaga pendidikan Ma'had Islam Rafiah Akhyar. Dia berharap, dari tempat itu akan lahir ulama-ulama besar yang bisa meneruskan perjuangan Nabi dan para kiai yang ada saat ini.

"Saya ingin mewakafkan diri dan waktu saya ikut melahirkan ulama. Mari bersama-sama, mewujudkan cita-cita itu, semoga menjadi amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir dan tak ada putus-putusnya," ujar Ustad Adi Hidayat. □

MBO



FGD BS-Center

'Booming dan Krisis Industri Asuransi dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila'

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan, perusahaan asuransi harus mampu memajukan kesejahteraan umum dan memberikan jaminan sosial



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, mengungkapkan, dalam pelaksanaan sila kelima Pancasila, industri asuransi telah memiliki berbagai produk asuransi. Antara lain, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang memberikan perlindungan risiko gagal panen, telah berjalan sejak 2015, dengan premi Rp 180 ribu dan disubsidi 80% oleh pemerintah. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yang memberikan perlindungan risiko atas kematian dan kehilangan sapi, telah berjalan sejak tahun 2016, dengan premi sejumlah Rp 200 ribu disubsidi 80% oleh pemerintah.

"Asuransi Perikanan Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) yang memberikan perlindungan risiko atas kematian udang/ikan dan kegagalan usaha karena bencana alam, telah berjalan sejak 2017 diawali dengan udang, dengan premi Rp 90 ribu sampai dengan Rp 225 ribu per tahun sesuai lahan, disubsidi 100% oleh pemerintah. Serta Asuransi Nelayan yang memberikan perlindungan risiko atas kematian dan cacat

nelayan saat di laut atau di darat, telah berjalan sejak 2016, dengan premi Rp 140 ribu, dan disubsidi 100% oleh pemerintah," ujar Bamsoet dalam Focus Group Discussion (FGD) 'Booming dan Krisis Industri Asuransi dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila', di Kompleks Parlemen, Rabu (8/9/21).

FGD yang diselenggarakan Brain Society Center (BS Center) bersama MPR RI ini turut dihadiri anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati; Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo; dan Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A OJK, Ahmad Nasrullah. Hadir pula para narasumber pembahas, antara lain Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Rizal E. Halim, Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika, Ketua Dewan Asuransi Indonesia Tatang Hidayat, Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya Angger P. Yuwono, dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi.

Ketua DPR RI ke-20 ini menyatakan, tidak

menutup mata di balik berbagai asuransi yang melindungi petani dan sektor produktif, masih juga terdapat asuransi bermasalah yang bukannya memberikan proteksi melainkan menambah beban hidup masyarakat akibat gagal bayar. Sebagaimana terjadi pada Jiwasraya, Kresna Life, Bumiputera, dan Himalaya Insurance.

"Berbagai kasus gagal bayar tersebut disebabkan lemahnya manajemen risiko dari proses bisnis sejak hulu sampai hilir. Berawal dari pengemasan produk dengan garansi hasil investasi di luar batas kemampuan pengelola aset dalam menghasilkan pengembalian investasi, dan berujung pada pengelolaan aset investasi. Pada prinsipnya, perusahaan asuransi belum optimal melaksanakan pedoman pengelolaan aset dan kewajiban yang menjadi unsur fundamental dalam perusahaan asuransi," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, merujuk berbagai kasus gagal bayar asuransi, perlu dilakukan restrukturisasi dan reformasi industri perasuransian. Restrukturisasi akan menekan pamor dan kepercayaan masyarakat terhadap industri dalam jangka pendek.

"Perlu ada tekad melakukan reformasi perasuransian seperti dicanangkan Presiden saat membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan awal 2020 yang ditindaklanjuti OJK, yaitu meliputi reformasi pengaturan dan pengawasan, reformasi institusional, reformasi infrastruktur dan penyiapan RUU Lembaga Penjamin Polis. Sudah saatnya perusahaan asuransi kembali ke khittahnya dalam ikut serta memajukan kesejahteraan umum dan memberikan jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi," tandas



Bamsuet.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim menerangkan, berbagai pokok permasalahan terkait industri asuransi. Antara lain, kesalahan pembentukan harga produk atau mispricing, lemahnya prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi, adanya rekayasa harga saham lewat masifnya jual beli saham dengan dressing reksadana, serta tekanan likuiditas dari produk asuransi yang kemudian berdampak terhadap penurunan kepercayaan nasabah yang menyebabkan merosotnya penjualan.

“BPKN telah mengeluarkan rekomendasi terkait asuransi tahun 2020. Antara lain, Indonesia perlu mempercepat pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) demi menjalankan amanat UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai langkah untuk melindungi pemegang polis dan memastikan industri perasuransian berjalan dengan sehat. Perlu segera membuat peraturan turunan yang mengatur persyaratan agen asuransi yang bersertifikat serta memiliki kredibilitas secara jelas dan sistematis dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Serta membuat pedoman bagi

perusahaan asuransi untuk melengkapi perjanjian asuransi dengan ringkasan perjanjian tentang manfaat dan risiko agar mudah dipahami konsumen,” terang Rizal Halim.

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, mengingatkan, mengambil pelajaran dari kasus Jiwasraya, beberapa masalah mendasar yang potensial terjadi pada perusahaan asuransi, terdiri dari kesalahan pricing produk, aktivitas investasi yang rentan, manipulasi kinerja perusahaan dengan aggressive window dressing, dan tekanan likuiditas akibat mismatch. Portofolio Manajemen yang buruk juga menyebabkan risiko kerugian yang sangat besar akibat penempatan pada aset-aset yang berisiko tinggi. Kerugian yang sangat besar juga terjadi akibat fraud dan tata kelola yang tidak baik. Ketegasan institusi pengawas untuk melakukan tindakan koreksi juga tidak berjalan optimal.

“Pelaku usaha industri asuransi, pada 2021 ini industri asuransi juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Krisis Covid-19 menyebabkan bisnis asuransi tertekan karena penurunan pendapatan masyarakat. Menyebabkan daya beli masyarakat untuk membeli asuransi semakin menurun,” tandas Anis Byarwati. □



Temu Pakar Ratu Kalinyamat

Ratu Jepara, Penggagas Poros Maritim

Ratu Kalinyamat atau Retno Kencono memiliki pemikiran sangat maju, melampaui batas perempuan kebanyakan pada zamannya. Oleh portugis, ia dijuluki Rainha da Jepara, Ratu dari Jepara.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. Lestari Moerdijat, SS., MM., mengapresiasi upaya pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah yang akan mengusulkan kembali Ratu Kalinyamat (RK) agar memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Menurut Lestari, upaya tersebut sejalan dengan keberanian serta perjuangan Ratu Kalinyamat yang sukses menggagalkan upaya tentara Portugis yang hendak menjajah wilayah Nusantara.

Pada kurun 1549-1579, RK melakukan tiga kali perlawanan terhadap kolonialis Portugis. Tahun 1551, Ratu Kalinyamat mengirimkan pasukannya ke Malaka untuk menyerang tentara Portugis. Serangan ini dilakukan sesuai permintaan Raja Johor yang meminta bantuan kepada RK, meski kemudian pasukan Ratu Kalinyamat bisa dipukul mundur.

Tahun 1556, Ratu Kalinyamat terus berusaha melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Saat itu RK mengabdikan permintaan Sultan Aceh untuk membantu menyerang Malaka. Ratu Kalinyamat mengirimkan 5 ribu pasukan dan satu jung.

Kemudian, pada 1574, Ratu Kalinyamat mengirimkan 15 ribu pasukan didukung persenjataan lengkap, 300 perahu layar dan

80 kapal jung besar ke Malaka untuk menggempur pasukan Portugis. Pasukan RK berhasil menguasai Malaka selama enam bulan, sebelum dipukul mundur oleh pasukan Portugis, yang berkekuatan 50 ribu prajurit.

“Tidak berlebihan bila Ratu Kalinyamat mendapat julukan Perempuan Perintis Anti Kolonialisme. Ia memiliki visi, misi yang sangat maju. Termasuk menyoal Poros Maritim. Karena keberanian dan kemampuannya itu bangsa Portugis memberinya julukan Rainha Da Jepara yang berarti Ratu dari Jepara,” kata Lestari Moerdijat.

Lestari yang biasa disapa Rerie menyampaikan hal itu memaparkan pokok-pokok pikiran pada acara Temu Pakar Ratu Kalinyamat. Acara tersebut berlangsung di Semarang, Sabtu (11/9/2021). Ikut hadir dan menjadi pembicara pada acara tersebut, antara lain Pratikno dan Nur Hidayat selaku anggota DPRD Jepara; Prof. Ratno Lukito, Ketua tim pakar Ratu Kalinyamat; Dr. Sa’dullah Assa’idi, M.Ag., Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Jepara; Pengamat militer, Dr. Connie Rahakundini; Serta Dr. Agustinus Supriono, Dr. Alamsyah, dan Dr. Chusnul Hayati, ketiganya sejarawan Universitas Diponegoro.

Pemikiran Ratu Kalinyamat menyangkut

pemanfaatan laut, menurut Rerie, sangat cocok untuk dilanjutkan. Terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan yang harus selalu disatukan agar tidak tercerai berai. Salah satunya adalah dengan melanjutkan pembangunan poros maritim, seperti yang diinisiasi Ratu Kalinyamat.

Menurut Rerie, pemikiran Ratu Kalinyamat menyangkut pembangunan kawasan laut patut dilanjutkan, bahkan bisa menjadi dasar pemikiran pembangunan Indonesia. “Karena itu perlu terus dikumandangkan,” ungkap Rerie.

Rerie percaya upaya memberikan anugerah Pahlawan Nasional kepada Ratu Kalinyamat akan membuahkan hasil. Meski, upaya tersebut sempat mengalami dua kali kebuntuan. Karena itu, Rerie meminta semua pihak bahu-membahu, mendukung rencana tersebut. Apalagi, data dan fakta menyangkut asal usul, jasa, dan perjuangan Ratu Kalinyamat sudah didapat, dan jauh lebih lengkap dibanding sebelumnya.

Usaha ini sudah dilakukan sejak lama, mulai 1994. Namun, dua kali upaya mendapatkan anugerah Pahlawan Nasional bagi Ratu Kalinyamat gagal, karena minimnya data dan fakta pendukung. Kita tinggal memiliki satu kali kesempatan, dan harus diupayakan secara optimal. “Semoga kali ini berhasil,



dengan ditemukannya data-data primer, yang sebelumnya tidak diketahui rimbanya,” kata Rerie.

Poros Nusantara

Yang paling penting dari usaha memberikan gelar kehormatan ini, kata Rerie, adalah pembelajaran bagi generasi muda terhadap ketokohan Perempuan Perintis Anti Kolonialisme. Dan, itu ada pada sosok Ratu Kalinyamat. Dia adalah tokoh yang mampu melakukan konsolidasi dan membentuk aliansi, juga pemikiran poros nusantara, tanpa menimbulkan konflik dengan siapapun. Sikap-sikap tersebut patut ditiru dan

diteruskan oleh generasi muda.

Harapan serupa disampaikan Prof. Ratno Lukito, ketua tim pakar Ratu Kalinyamat. Menurut Ratno, upaya memberi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional kepada RK menemukan titik terang. Optimisme itu didasari keberhasilan para peneliti memperoleh data-data primer yang selama ini tersimpan di Portugis.

“Buku dan catatan yang didapat dari Portugis itu menyatakan, benar bahwa Ratu Kalinyamat-lah yang telah menggagalkan rencana Portugis menginvasi nusantara. Jadi, sangat tepat jika beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional,” kata Ratno Lukito.

Salah satu catatan tentang Ratu Kalinyamat

yang diperoleh dari Portugis, ditulis oleh De Couto yang menyatakan bahwa RK sebagai pemberani. Selain itu, De Couto juga menyebut Ratu Kalinyamat dengan istilah *Rainha de Japara, senhora paderosa e rica*, yang berarti Ratu Jepara, seorang wanita kaya dan berkuasa. Intinya, Ratu Kalinyamat adalah seorang tokoh wanita yang sangat terkenal. Dia tidak hanya berparas cantik, tetapi juga berkepribadian gagah berani, dan berkuasa.

Dengan ditemukannya bukti-bukti baru dari Portugis terkait eksistensi dan perjuangan Ratu Kalinyamat, menurut Sejarawan Universitas Diponegoro Dr. Alamsyah, membuat peluang pemberian anugerah sebagai Pahlawan Nasional kepada RK semakin besar. Terbuti dua kali percobaan sebelumnya, selalu gagal, karena tidak ada bukti-bukti ilmiah yang ditemukan.

“Dokumen-dokumen asal Portugis itu mampu membuktikan bahwa keberadaan Ratu Kalinyamat bukan legenda semata. Tetapi memang ada, mulai dari asal usul, keluarga hingga perjuangannya. Tidak ada keraguan lagi, upaya memberikan penghargaan sebagai Pahlawan Nasional kepada Ratu Kalinyamat akan menemui hasil,” katanya. □

MBO



KH. Ahmad Sanusi

Pendiri PUI Layak Bergelar Pahlawan Nasional

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A., mengingatkan pentingnya merawat dan menjaga persatuan di kalangan umat Islam. Karena persatuan di kalangan umat Islam merupakan wujud kontribusi untuk menjaga persatuan di antara anak bangsa dari sejumlah provokasi yang hendak merusaknya.

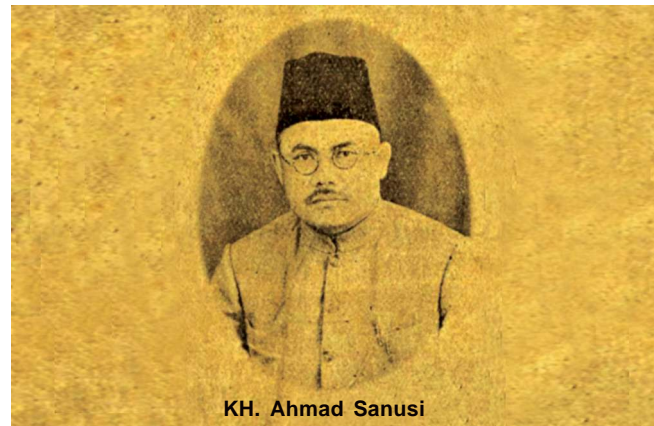
“Terutama upaya memecah persatuan umat. Dengan cara mendiskreditkan umat beragama, antara lain memberikan stigma tidak Pancasila dan radikal, perlakuan yang tidak adil kepada tokoh Agama, bahkan menistakan agama. Itu semua merupakan provokasi yang hendak melemahkan per-

persatuan umat dan bangsa untuk bersama-sama menyukseskan perjuangan Indonesia Merdeka. Sebagaimana telah diberikan keteladanannya oleh para pendiri PUI.

HNW menyebut KH. Abdul Halim, KH. Ahmad Sanusi, dan Mr. R. Syamsudin, sebagai pendiri PUI, juga founding fathers Republik ini, dengan berkiprah aktif di BPUPK. Bahkan, sesuai nama organisasi ‘Persatuan Ummat Islam,’ ketiganya bersama para tokoh ormas Islam, Partai Islam dan elemen bangsa dari beragam suku, agama dan organisasi lainnya bersatu di BPUPK ikut menghadirkan keteladanan besar dalam menghadirkan toleransi, persaudaraan dan bersatu dalam kesepakatan perjuangan bagi

NKRI dengan berbagai cara. Seperti upaya normalisasi komunisme, mencabut TAP MPRS No. XXV / 1966 yang membubarkan PKI. Dan, mengaburkan fakta sejarah PKI sebagai pelaku kudeta berdarah pada 30 September 1965, seperti dalam Kamus Sejarah Indonesia versi Dirjen Kebudayaan, dihilangkannya frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035, iklan LGBT yang menyusup kepada anak-anak kita melalui YouTube, bahkan tindakan penistaan agama yang sengaja dilakukan sejumlah pihak.

Untuk menghadapi upaya-upaya neo-imperialisme, neo-kolonialisme, bahkan neo-komunisme itu, menurut Hidayat, pihaknya



KH. Ahmad Sanusi

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

satuan antara sesama anak bangsa,” ujar Hidayat saat memberikan sambutan pada acara Training Intisab PD Persatuan Ummat Islam (PUI) Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021).

Pada bulan September, kata Hidayat, bangsa Indonesia diingatkan dengan Jenderal Besar A.H. Nasution. Nasution pernah menyampaikan bahwa PKI memakai cara adu domba antara Pancasila dengan Islam untuk merusak persatuan bangsa. Karena itu, sudah tepat kalau Pimpinan PUI (Persatuan Umat Islam) menyegarkan ingatan sejarah dan komitmen keharusan menguatkan persatuan umat dan bangsa dari upaya provokasi dan adu domba.

Maka dari itu, anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II yang akrab disapa HNW ini, menggarisbawahi peran penting yang diemban PUI dalam melanjutkan sejarah

terwujudnya Indonesia merdeka. Jauh dari egoisme, arogansi, intoleransi. “Yang dikedepankan adalah kemaslahatan terbesar bagi suksesnya perjuangan umat dan bangsa,” jelas HNW.

Saat ini, kata HNW, PUI bersama seluruh elemen bangsa lainnya harus memberi peran nyata, merawat kemerdekaan dengan melanjutkan persatuan bangsa yang sudah dicita-citakan para pendiri Republik Indonesia, dari segala bentuk penjajahan gaya baru.

Lebih lanjut HNW menyatakan, kita diresahkan dengan upaya pecah belah bangsa, gerakan separatis, maupun pembelahan bangsa akibat politik pemilu, maupun ketidakadilan hukum dan ekonomi, juga penjajahan.

Begitu pula neo-imperialisme, neo-kolonialisme, bahkan neo-komunisme terus berupaya membahayakan serta merusak

sebagai organisasi politik di DPR selalu siap bersama elemen umat dan bangsa lainnya mewaspadai upaya pecah belah yang sangat bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana dicontohkan para Pendiri PUI bersama tokoh-tokoh bangsa lainnya.

Oleh karenanya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS, ini mendukung sikap PUI agar melanjutkan sejarah perjuangannya dalam menghadirkan persatuan umat dan bangsa. Termasuk memperjuangkan diangkatnya KH. Ahmad Sanusi sebagai Pahlawan Nasional demi menjadi teladan persatuan bagi generasi masa kini.

Apalagi, perjuangan KH. Ahmad Sanusi di BPUPK, di PUI, maupun di medan perjuangan lainnya, sangat penting untuk diabadikan sebagai teladan besar dalam merawat persatuan Indonesia. Oleh karenanya, PKS

sangat mendukung agar Negara menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional. Untuk itu, PUI melakukan persiapan yang diperlukan.

Seperti, dokumentasi dan penulisan sejarah perjuangan KH. Ahmad Sanusi, seminar dan lainnya, demi terpenuhinya persyaratan

pengangkatan KH. Ahmad Sanusi sebagai Pahlawan Nasional. □

MBO

Hari Tani Nasional

Permaian Kartel Menyebabkan Petani Tak Berdaya

Cita-cita bangsa ini untuk menjadi lumbung pangan dunia masih jauh panggang dari api. Buktinya, petani banyak hidup miskin. Komoditas pangan masih bergantung pada impor.

WAKIL Ketua MPR, Jazilul Fawaid mengatakan, kebijakan pertanian di Indonesia sebenarnya sudah cukup ideal. Pertanyaannya, kenapa Indonesia belum bisa menjadi negara agraris yang maju. “Menurut saya, bukan soal kebijakannya saja, tetapi implementasi dari kebijakan yang ada. Masalahnya tidak semata-mata dari undang-undang, tapi kebijakan kita,” ujar Jazilul Fawaid, yang biasa disapa Gus Jazil, pada acara Hari Tani Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-7 Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) secara virtual, Kamis (23/9/2021).

Jadi, menurut Gus Jazil, sampai hari ini petani kita atau Indonesia belum bisa disebut sebagai negara lumbung pangan dunia, padahal pangan itu sangat penting. “Hari ini kedaulatan pangan petani kita belum menjadi kekuatan, belum mampu menciptakan swasembada,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, dulu, di era Orde Baru, Indonesia pernah swasembada pangan. Sekarang, kenapa justru sekarang tidak bisa. “Dulu saya pernah di Komisi IV, kita memutuskan swasembada di 5 sektor: gula, padi, garam, kedelai, dan jagung. Tetapi sampai hari ini belum juga selesai. Pertanyaannya, ini soal ideologi atau anggaran, atau soal pembinaan dan implementasi,” ungkapnya.

Menurut Gus Jazil, hal ini menjadi persoalan besar ketika Indonesia sebagai negara agraris, namun tidak mampu mengejar cita-cita untuk swasembada di sektor pangan, dan tidak mampu menaikkan indeks kesejahteraan petani.

“Jangan berkata anggaran kita tidak cukup, tapi apakah benar semua program dan kebijakan yang sudah diputuskan itu mampu diimplementasikan. Saya kok melihat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ada banyak masalah. Lahan bermasalah, distribusi pupuk bermasalah, penyediaan bibit itu juga bermasalah. Bahkan petaninya pun bermasalah. Akhirnya indeks petani juga belum terlalu baik,” urainya.

Hal lain yang menjadi soal, kata Gus Jazil, saat ini anak-anak muda justru meninggalkan sektor pertanian dan tidak bangga menjadi petani. “Kalau begitu, berarti ancaman kita ke depan bisa kekurangan pangan. Kalau kita kekurangan pangan atau ketanahan pangan kita rapuh, maka negeri kita juga akan rapuh,” tuturnya.

Di sisi lain, Gus Jazil juga mengkritisi banyaknya permainan kartel di berbagai komoditi pertanian yang menyebabkan petani kita tidak berdaya. “Banyak produk pertanian menjadi game politik dalam konteks tata niaga. Kartel ada di gula, di kedelai, di bawang putih, kartel juga ada di daging. Ini semua masalah sehingga petani kita tak bisa berdaya,” tuturnya.

Menurut Gus Jazil, kebijakan tata niaga

pertanian ini sangat penting untuk menjadi perhatian pemerintah. Sebab, sering kali ketika petani panen, kemudian harganya jatuh. “Tata niaga itu penting. Kebijakan menyangkut harga komoditas pertanian, distribusi dan penjualan hasil pertanian itu penting,” urainya.

Oleh sebab itu, Gus Jazil menegaskan, faktor implementasi kebijakan pertanian menjadi sangat penting. Pihaknya mendorong Gerbang Tani untuk menjadi bagian dalam mengkritisi sekaligus mengoreksi dan mengawasi semua implementasi dari semua kebijakan pertanian, baik kebijakan dalam hal pengadaan bibit, kebijakan lahan, anggaran, termasuk tata niaga pertanian.

Gus Jazil berharap, Gerbang Tani menjadi pelopor atau perintis kembalinya Indonesia menjadi negara agraris yang berwibawa dan betul-betul menghasilkan komoditi-komoditi pertanian andalan dunia, serta menjadi sentrum kekuatan pertanian dan pangan dunia. □



Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
Wakil Ketua MPR RI, dan Ketua Umum DPP Masyarakat
Agribisnis Indonesia

Membangun Sistem Agribisnis Jagung Berbasis Kelembagaan Ekonomi Petani/Koperasi, Solusi Permanen Masalah Harga

JAGUNG merupakan komoditi strategis nasional, dengan luas panen 5.16 juta Ha, produktifitas rata-rata 4.8 ton/ha dan produksi 24.95 juta Pipilan Kering (Pusdatin Kementan 2021), dan melibatkan jutaan petani, 94 unit Pengusaha Pabrik Pakan, ratusan ribu peternak rakyat, jutaan konsumen, dan telah menempatkan Indonesia termasuk produsen jagung no. 6 di antara 12 negara produsen jagung dunia. Oleh karena itu, masalah jagung akan berdampak pada dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM). Sejak tahun 2018 Kementerian Pertanian tidak menerbitkan rekomendasi izin impor jagung, adapun impor yang masuk bukan untuk pakan, tetapi untuk bahan baku industri, sebagai pemanis, lebih kurang 1 juta ton.

Sampai sekarang persoalan klasik agribisnis jagung di Indonesia belum terselesaikan secara komprehensif dan fundamental. Setiap kali ada pertemuan petani, peternak rakyat, pengusaha pabrik pakan, dengan pejabat pemerintah, mulai Bupati sampai Presiden, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi, selalu muncul persoalan. Mulai di tingkat petani jagung, selalu mengatakan bahwa kami sudah menanam jagung tapi tidak ada yang membeli, kalau ada yang membeli harganya kurang layak, kalau harga sudah layak sulit mendapat benih yang bermutu, pupuk, dan jasa alat pertanian dengan harga layak, permodalan dengan prosedur sederhana dan sebagainya. Sementara di pihak pengusaha hulu (benih, pupuk, pestisida, dan alsintan) sulit menjual produk secara cash, sementara KUR untuk petani jagung tidak terserap sesuai target, karena Bank pelaksana KUR tetap berprinsip sukses penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian, untuk itu harus ada avalis.

Selanjutnya dipihak pengusaha pabrik pakan mengatakan bahwa produksi jagung dalam negeri tidak cukup, kalaulah cukup kualitasnya kurang baik,

dan kalau kualitasnya baik harga mahal, sehingga mengambil jalan pintas, yaitu lebih baik impor. Sementara peternak unggas mengatakan harga pakan mahal, karena harga jagung mahal. Hal tersebut muncul lagi pada kunjungan Presiden ke Blitar, Jatim 2 minggu lalu, seorang peternak memprotes atas kenaikan harga jagung dari Rp 4.200 menjadi Rp 6.000/kg yang menyebabkan kenaikan harga pakan, sementara harga telur mengalami penurunan dari sekitar Rp 20.000 menjadi sekitar Rp 15.000/kg.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa; "Apapun persoalan agribisnis jagung baik ditingkat petani maupun konsumen dan pengusaha hulu-hilir yang selalu muncul, ini menunjukkan bahwa sistem agribisnis jagung belum terbangun dengan baik, mulai di tingkat lapak maupun di tingkat pengambilan keputusan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini secara fundamental, sistematis dan berjangka panjang dan tidak symptomatic, serta tidak partial dan jangka pendek? Oleh karena itu kita harus bangun sistem agribisnisnya, mulai dari sub-sistem hulu sampai hilir. Agar sistem ini terbangun secara berkesinambungan, ada 3 pertanyaan kunci (key question) harus terjawab: 1. Harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab di hulu, tengah, dan hilir, 2). Bagaimana interkoneksinya antarpemangku kepentingan (Stake holders) untuk saling membesarkan, dan 3). Siapa yang menjadi derigen (pemerintah?) yang mensinkronisasikan dan mensinergikan agar semua pemangku kepentingan mendapat keuntungan yang layak sesuai resiko dan pengorbanan (sacrifice) masing-masing pihak. Sepanjang 3 persolaan ini tidak terjawab dengan baik, maka persolan klasik tersebut akan selalu muncul dan akan mengancam keberlanjutan (sustainability) sistem agribisnis jagung di Indonesia. Dengan terbangunnya sistem ini, masalah harga jagung yang layak terutama ditingkat petani

mendapat perlindungan, jangan diserahkan ke mekanisme pasar, pihak yang lemah akan tergilas terutama petani.

Hasil identifikasi dan inventarisasi persoalan sistem agribisnis jagung menunjukkan bahwa; 1). Tidak ada Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) seperti yang diamanatkan dalam UU No 19 tahun 2013, dalam hal ini Koperasi Petani yang menghubungkan pihak yang bergerak di hulu dalam hal ini petani jagung dan para pengusaha agribisnis yang bergerak di penyediaan sarana, jasa alsintan, permodalan pengolahan dan pemasaran, dan 2). Kurangnya peran pemerintah sebagai derigent, agar semua pemangku kepentingan merasa diuntungkan dari pembagian margin dari bisnis jagung ini. Untuk itu bagaimana ada kebijakan yang berpihak dari pemerintah untuk lebih mereposisi kelembagaan ekonomi petani/koperasi dan BUMD sebagai penyedia pelayanan (delivery system) bagi petani, dan menjadi avalis dengan pihak penyedia dana/permodalan bunga rendah/tanpa bunga, tanpa agunan dan sistem bagi hasil.

Berdasarkan pengalaman dan bench marking, ternyata petani maju, modern dan kuat karena adanya delivery system dalam hal ini adalah koperasi. Zaman Orde Lama (OrLa) ada beberapa koperasi yang kuat dari beberapa komoditi, yaitu koperasi kelapa, koperasi karet, dan zaman Orde Baru (OrBa) telah dibangun catur sarana unit desa (BUUD/KUD, penyuluh, BRI Unit Desa dan Kios Sarana) di setiap desa dan tahun 1984 sukses mengantar Indonesia dari negara pengimpor menjadi negara berswasembada pangan. Bench Marking di beberapa negara (New Zealand, Jepang, Korea dan Turki), petani maju modern, karena adanya kebijakan yang berpihak memberdayakan Koperasi sebagai Kelembagaan Ekonomi Petani, sesuai amanah UUD 1945 Pasal 33 dan, UU No 25 tahun 1992 tentang Koperasi dan UU No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Masalahnya adalah tinggal bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi, permodalan, manajemen, dan kemampuan memberikan pelayanan prima (exelence service, lebih murah, lebih cepat). Kementerian Koperasi harus kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Perdagangan, untuk membina Koperasi yang bekerja pada kawasan yang memenuhi skala ekonomi 1.600-3.200 Ha. Latihan SDM managemen sampai operator, mengenai managemen, kepemimpinan, kewirausahaan dan penguasaan IT agar dapat diberikan. Pinjaman Modal tanpa bunga dan agunan, dan

sistem bagi hasil juga harus disiapkan. Untuk itu, koperasi perlu dimitrakan dengan BUMD atau Perusahaan Mitra yang menjamin suplai sarana/parasana dan pemasaran dan langsung kontrak dengan Perusahaan Pabrik Pakan. Harga kontrak inilah dan biaya produksi jagung per kg petani yang menjadi patokan dalam menentukan Harga Pembelian Koperasi (HPK) kepada petani jagung (kadar air 14 %) yang menjadi anggota. Pemerintah Daerah melalui BUMD harus investasi prasarana seperti silo, pengeringan (drier) kapasitas besar, gudang penyimpanan, alat angkut. Rencana Memperindag menyubsidi 30.000 ton dengan besaran Rp 1.500 /kg atau totalnya Rp 45 M untuk jangka pendek kurang tepat, karena tidak jelas siapa yang akan disubsidi, lebih baik dipinjamkan ke Koperasi tanpa bunga dengan sistem bagi hasil

Peluang peningkatan produksi jagung nasional masih cukup besar, baik melalui peningkatan produktivitas maupun peningkatan indeks pertanaman dengan penguatan delivery system, terutama menjaga stabilitas harga yang layak buat petani anggota koperasi di tingkat Kecamatan. Tantangannya adalah bagaimana menyiapkan modal untuk lebih kurang 2.250 unit koperasi, dari KEP/Koperasi Petani 4.694 unit yang sudah terdata on line (Data Simluhtan Kementan, 14 September 2021) untuk menjadikan Indonesia sebagai pengeksport jagung paling tidak di daerah 15 sentra produksi, termasuk untuk substitusi impor, dengan menjaga harga jagung petani minimal Rp 4.200/kg, kadar air 14 % (biaya produksi intensif rata-rata Rp 8-10 jt/ha, produksi 5 ton, atau biaya produksi Rp 1.600-2000/kg), dan harga kontrak koperasi dengan BUMD Rp 4.500, dan harga kontrak BUMD dengan pabrik Rp 5.000/kg, FOB. Kalau sistem ini terbangun, insya Allah harga akan stabil, baik di tingkat produsen maupun konsumen, dan ini akan mendorong semua pemangku kepentingan untuk saling membesarkan, karena ada kejelasan suplai-demand dan harga.

Kalau rata-rata satu unit koperasi melayani kawasan skala ekonomi seluas 2.400 Ha x 5 ton/ ha, total produksi 12.000 ton x Rp 4.200/kg, nilai produksinya lebih kurang Rp 50 M. Untuk keperluan cash flow koperasi cukup diberikan pinjaman tanpa bunga dengan sistem bagi hasil Rp 15 M/koperasi x 2.250 koperasi, lebih kurang Rp 33, 75 T. Sumber pembiayaannya bisa dari pinjaman APBD atau APBN yang yang disimpan di Bank Daerah atau melalui Kredit Usaha Rakyat yang plafondnya sudah tersedia lebih kurang Rp 70 T. □

Partai Pendukung Pemerintah Bertambah, Bagaimana Kekuatan Penyeimbang?

Terjadi dinamika politik dalam demokrasi di Indonesia pada tahun ini. Partai Amanat Nasional (PAN) masuk ke koalisi partai politik pendukung pemerintah. Masuknya PAN dalam koalisi membuat kekuatan politik pemerintah di parlemen semakin kuat. Benarkah kekuatan penyeimbang, *check and balances*, semakin tidak efektif seiring makin kuatnya partai pendukung pemerintah. Berikut pendapat dari para politisi.

Zulfikar Arse Sadikin, Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Dalam Politik Indonesia, Istilah Oposisi Kurang Tepat

BANYAK penggunaan istilah yang kurang tepat saat ini perihal politik di Indonesia, salah satunya soal oposisi. Dalam ilmu politik, sistem presidensial itu tidak mengenal istilah oposisi sebagaimana dimaksud dalam sistem parlementer. Tugas mengawasi pemerintah dalam sistem presidensial sepenuhnya di jalankan oleh legislatif sebagai wakil rakyat.

Dengan bergabungnya PAN dalam pemerintahan tentu tidak akan berpengaruh terhadap kualitas legislatif dalam mengawasi kinerja pemerintah, bahkan bisa membangun hubungan yang semakin sinergis antara eksekutif dan legislatif, serta sejalan dengan tujuan membentuk pemerintahan yang kuat dan efektif.

Masuk atau tidaknya ke dalam pemerintahan merupakan hak politik masing-masing partai. Bisa jadi dengan masuk ke pemerintahan partai bisa lebih mudah melaksanakan aspirasi konstituennya. Masuk ke pemerintahan tidak bisa selalu berkonotasi negative, seperti pragmatisme itu.

Dan, sekali lagi dalam sistem presidensial, semua partai mau tidak mau harus mendukung pemerintah, karena presiden merupakan pilihan rakyat. Bentuk dukungannya bisa ikut masuk dalam kabinet atau mengawasi jalannya pemerintahan lewat legislatif. Kita tidak bisa begitu saja mendefinisikan partai oposisi sebagai bukan pendukung pemerintah. Sekali lagi kita ini presidensial, bukan parlementer.

Dalam sistem parlementer, partai-partai



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

yang kalah pemilu tentu saja memiliki kerugian karena tidak bisa melaksanakan program kerjanya, sehingga mereka beroposisi kepada partai pemenang yang sedang memerintah, dengan mengkritisi kinerja dan kebijakannya, agar pemerintah jatuh, kemudian ganti oposisi tadi yang memerintah, meski belum waktunya pemilu.

Di dalam sistem presidensial Indonesia saat ini tidak bisa seperti itu. Eksekutif dan legislatif sama-sama dipilih rakyat lewat pemilu. Yang memenangkan pemilu memerintah, yang kalah di legislatif mengawasi. Dan, kekuasaan baru bisa berganti secara konstitusional lewat pemilu, bukan manuver politik di dalam Parlemen.

Di negara manapun menjadi partai yang tidak

bisa memerintah tidak menguntungkan, karena tidak bisa melaksanakan program kerja dan implementasi ideologinya. Makanya semua partai berkompetisi untuk merebut suara pemilih agar bisa memerintah. Keuntungan bagi yang memerintah adalah bisa menunaikan janjinya kepada pemilih saat pemilu.

Tapi di luar pemerintahan pun bukan berarti tidak beruntung. Contoh PKS dan Gerindra mendapatkan penambahan kursi masif di parlemen dari Pemilu 2019 lalu, meskipun berada di luar pemerintahan. Itu merupakan apresiasi dari pemilih atas kinerja mereka di legislatif dalam mengawasi pemerintah. Semua ada resikonya, baik di luar atau di dalam pemerintah.

Demokrasi pada dasarnya membutuhkan *check and balances*. Ini bisa dilakukan oleh sesama lembaga negara, oleh pers dan media, oleh mahasiswa, oleh *civil society*, bahkan langsung oleh warga negara itu sendiri. Mereka semua ini yang mengontrol kekuasaan. Sistem sudah ada dan sudah berjalan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan dari kuatnya dukungan bagi pemerintah.

Toh, partai-partai memerintah ini akan diadili oleh rakyat lewat pemilu nantinya. Kalau berhasil mereka tentu bisa mendapatkan mandat kembali untuk berkuasa. Sebaliknya, bila dinilai gagal, mereka pun kehilangan kekuasaan dan mandat untuk memerintah kembali. Begitu cara sistem presidensial bekerja. Kontrol tetap ada dalam kedaulatan rakyat.

Sekali lagi, mekanisme *check and bal-*

ances penting dalam demokrasi. Kalau yang di maksud oposisi adalah peran-peran yang mengawasi dan mengkritisi pemerintah, itu bisa ada di dalam dan luar legislatif. Dan hal

itu berjalan sampai saat ini.

Indonesia tidak pernah kehabisan dan kekurangan pengawas dan pengkritisi pemerintah. Baik itu dari legislatif main pun

dari kekuatan *civil society*. Demokrasi Indonesia baik-baik saja meski partai yang mendukung pemerintah semakin kuat. □

AWG

Fauzi H Amro, Anggota MPR FRaksi Partai Nasdem

Oposisi atau Masuk Kekuasaan, Sikap Politik Mesti Dihormati

DENGAN bergabungnya PAN dalam koalisi Partai Pendukung Pemerintah, kekuatan kelompok oposisi semakin melemah? Secara kalkulasi matematis ya, karena pasca merapatnya PAN ke dalam koalisi pemerintah berarti saat ini hanya tersisa PKS dan Partai Demokrat, partai pemilik kursi di DPR yang berada di luar koalisi Pemerintah. Sementara dengan merapatnya PAN, Jokowi mendapat dukungan dari tujuh partai politik di DPR. Mantan Walikota Solo itu berhasil mengamankan 471 kursi parlemen. Jokowi juga mengantongi perolehan suara partai pada Pemilu 2019 sebesar 77,31%.

Setiap partai politik punya hak untuk menjadi partai koalisi pemerintah atau menjadi oposisi. Tentu dengan berbagai pertimbangan politik yang mendasarinya. Dan, namanya partai politik pasti punya kepentingan pragmatis dalam setiap langkah politik. Apakah itu bakal dapat kursi di kabinet atau pun kepentingan lainnya? Atau semangatnya ingin membangun bangsa melalui pemerintahan, terlebih sekarang zaman pandemi, perlu ada upaya bersama-sama dan bergotong royong untuk menghadapi Covid-19 yang juga berimbas pada sisi ekonomi. Namun itu semua kembali pada kepada pimpinan masing-masing partai politik, termasuk ke rekan-rekan PAN.

Saya berharap, dengan bergabungnya PAN dalam koalisi Pemerintahan Jokowi akan semakin memperkaya ide, gagasan, serta memperkuat kerja pemerintah, terutama dalam menghadapi pandemi dan memulihkan ekonomi nasional kita.

Menjadi oposisi atau masuk dalam pemerintahan itu adalah sikap politik yang mesti dihormati, karena semuanya pasti niatnya untuk kebaikan bangsa. Ada bekerja di dalam pemerintahan, ada juga bekerja mengontrol di luar pemerintah, yang kita sebut sebagai oposisi.

Sebenarnya, kontrol jalan pemerintah tetap berjalan, sekalipun sekarang hanya tersisa 2 partai di luar pemerintahan, yakni PKS dan Demokrat. Meski kami berada dalam koalisi partai pendukung pemerintah, bukan berarti kita tidak kritis, tapi sebagai anggota parlemen kami tetap



menjalankan fungsi kontrol dan tetap kritis yang konstruktif atas berbagai kebijakan Pemerintah yang bersinggungan dengan kepentingan rakyat dan negara.

Misalnya saat ini Pemerintah tengah mendorong Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan saat ini sedang tahap pembahasan di Komisi XI DPR-RI. Fraksi Nasdem meski mendukung perluasan basis pajak untuk meningkatkan pendapat negara, namun Fraksi Nasdem di DPR-RI tetap menyuarakan kepentingan rakyat, dengan menolak klausul pasal-pasal yang bakal merugikan masyarakat. Misalnya, kami menolak dengan tegas pengenaan pajak sembako, pajak layanan medis, pajak

sosial, pajak keagamaan hingga pajak pendidikan, karena hal tersebut bersentuhan dengan hajat hidup rakyat, itu tidak boleh dipajaki. Itu hanya salah satu contoh kerja parlemen, meski berada dalam koalisi pemerintah, namun tidak serta merta menyetujui kebijakan pemerintah, apalagi kebijakan tersebut bakal merugikan masyarakat menengah ke bawah pasti akan dikritisi.

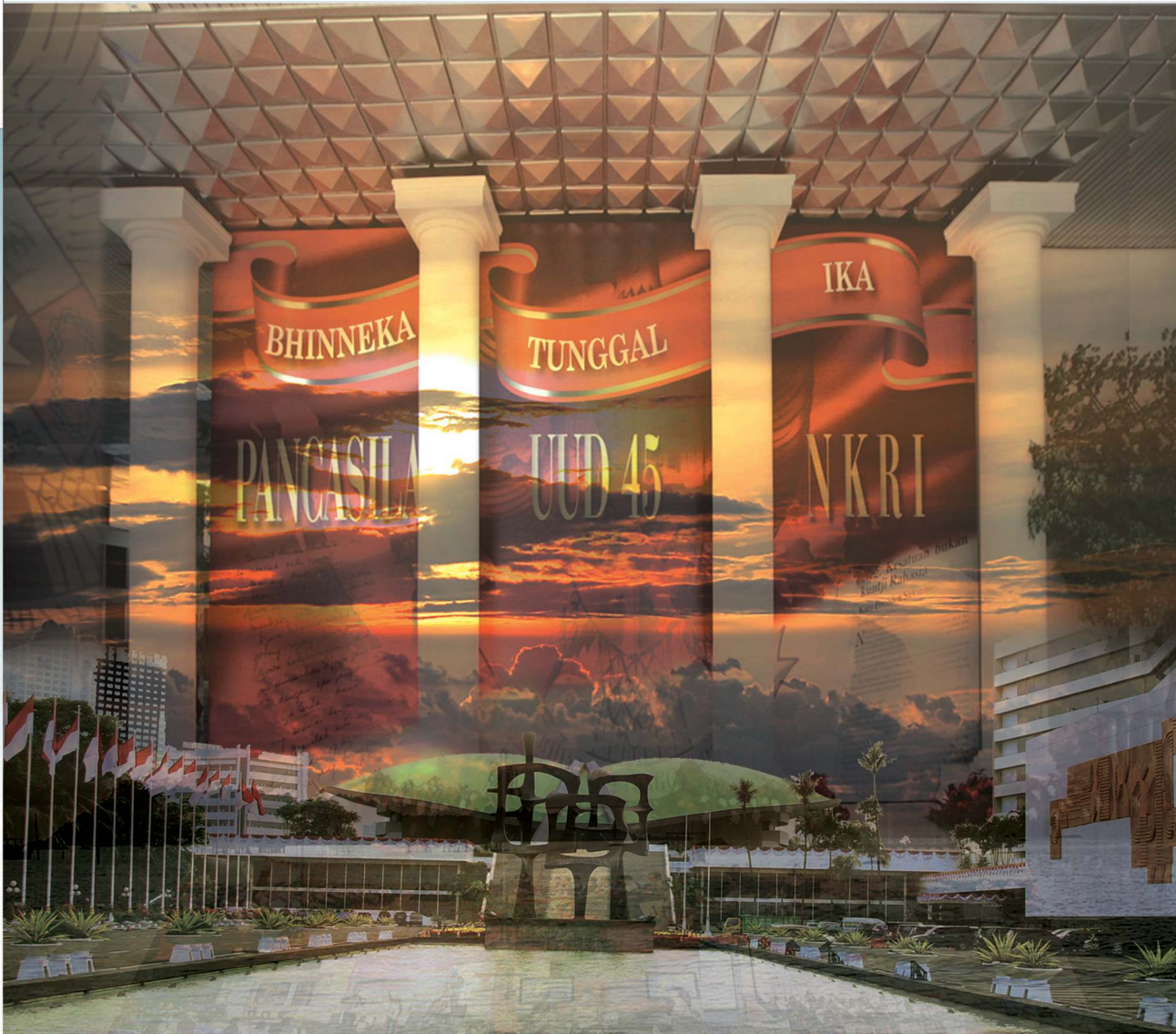
Selain itu, masyarakat sipil seperti NGO (LSM), ormas dan juga kalangan akademi tetap juga bisa berpartisipasi mengontrol jalannya pemerintahan. Jadi, semua pihak bisa berperan, baik melalui jalur parlemen maupun melalui parlemen jalanan, atau sekedar bersuara melalui sosial media dan media massa lainnya.

Menurut saya, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi perlu ada partai penyeimbang yang berfungsi untuk mengawasi pemerintah. Perlu ada partai yang mengkritik kinerja pemerintah agar tidak kebablasan, sehingga kebijakan pemerintah bisa tetap berada jalur benar, yakni untuk kemakmuran rakyat dan kemajuan bangsa dan negara. Karenanya, Nasdem sangat menghormati sikap kawan-kawan partai yang memilih di luar pemerintah. Kami sangat bersahabat baik dengan rekan-rekan PKS, demikian halnya dengan sahabat-sahabat saya di Partai Demokrat, hubungan kami rekan-rekan lainnya sangat akrab dan mencair.

Parlemen harus tetap menjalankan fungsinya sebagai pengontrol jalan pemerintahan, demikian halnya masyarakat sipil seperti NGO (LSM), ormas dan juga kalangan akademis mesti bergerak berpartisipasi mengontrol jalannya pemerintahan.

Jadi, semua pihak bisa berperan agar demokrasi kita tetap berjalan di rel yang benar. □

AWG



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT





Revitalisasi Hingga Berujung Batavia

Revitalisasi atau penataan ulang besar-besaran di kawasan Kota Tua, Jakarta, menciptakan ruang baru yang lapang, terbuka, dan ramah bagi pejalan kaki. Revitalisasi yang dilakukan menambah nyawa bagi kawasan yang berada di kawasan utara Jakarta itu. Dari masa ke masa kawasan itu terus dikembangkan. Pada masa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebutan Kota Tua untuk kawasan itu diganti dengan Batavia.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BEGITU keluar dari sisi utara pintu Stasiun Jakarta Kota, Jakarta, terlihat hamparan pedestrian atau trotoar yang lebar dan membentang panjang. Hadirnya pedestrian membuat suasana Kota Tua menjadi lebih lapang, nyaman, dan aman bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda. Beda dengan masa-masa sebelum Kota Tua direvitalisasi atau ditata ulang. Di mana situasi laluan kendaraan bermotor di Jl Lada dari arah utara menuju ke selatan terbilang padat, sehingga masyarakat yang hendak berwisata atau jalan-jalan ke kawasan Kota Tua harus ekstra hati-hati. Sebab, kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi yang kalau kurang hati-hati bisa menyenggol pejalan kaki. Kondisi semacam itu membuat suasana di kawasan cagar budaya Jakarta itu menjadi tak nyaman dan aman. Ditambah banyak jambret yang berkeliaran di sana.

Pedestrian yang berada di depan Kantor BNI itu merupakan salah satu ruas dari tampilan baru Kota Tua. Revitalisasi yang dilakukan Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga menghampiri depan Stasiun Jakarta Kota, Jl. Pintu Besar Utara, Jl. Ketumbar, Jl. Kemukus, Jl. Kali Besar Barat, Jl. Kali Besar Timur, dan Jl. Raya Pantura.

Revitalisasi besar-besaran tersebut mampu menghadirkan Kota Tua menjadi suatu lapangan besar, alun-alun besar, yang berbeda dengan Kota Tua sebelumnya. Gedung-gedung yang dulu bisa jadi tertutup oleh bangunan yang lain, Shelter Transjakarta, menjadi terbuka sehingga kemegahan dan kekokohnya terlihat jelas di depan mata.

Revitalisasi yang ada disebut oleh banyak orang mampu menghadirkan Kota Tua seperti kota-kota tua di Eropa. Hal inilah yang akan lebih banyak mengundang orang untuk datang ke sana. Bila dulu titik sentral orang berkumpul di depan Museum Sejarah Jakarta, selanjutnya, setelah revitalisasi, titik kumpul orang akan lebih menyebar, bisa di depan Stasiun Jakarta Kota, di Jl. Lada, di Jl. Pintu Besar Utara, atau di sisi kanan kiri Kali Besar.

Kota Tua pasca revitalisasi tidak hanya



akan mengundang lebih banyak orang datang ke sana, namun di beberapa titik yang baru akan menjadi lahan baru bagi pelaku usaha UMKM dan penjual jasa wisata. Dulu pelaku jasa wisata yang berdandan para tokoh pahlawan, noni belanda, atau bentuk cosplay lainnya, terkonsentrasi di kawasan Kota Tua yang berada di sisi barat atau sekitar Museum Sejarah Jakarta, namun kini bergeser ke Jl. Lada. Demikian juga penyedia jasa sewa sepeda, tidak hanya di depan museum yang ada di kawasan itu, juga

bergeser ke Jl. Lada. Pelaku UMKM, jasa kuliner pun, juga tumbuh di Jl. Kali Besar Timur.

Bagi pengguna sepeda, di kawasan Kota Tua itu juga dibuatkan jalur untuk mereka. Hal demikian membuat terciptanya ketertiban dalam menggunakan fasilitas umum. Masing-masing segmen masyarakat diberi fasilitas. Semua itu akan memberi nyawa bagi Kota Tua. Kawasan yang dulu bisa dikatakan sebagai kawasan yang terbengkalai, mulai dari masa ke masa dibenahi sehingga mampu

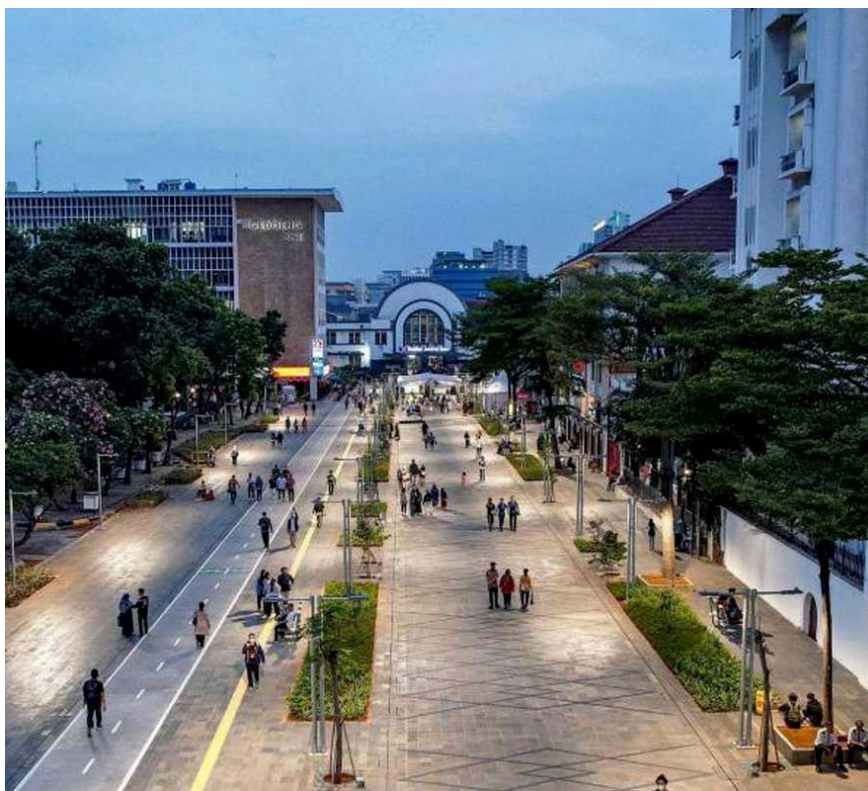


FOTO-FOTO: ISTEMEWA



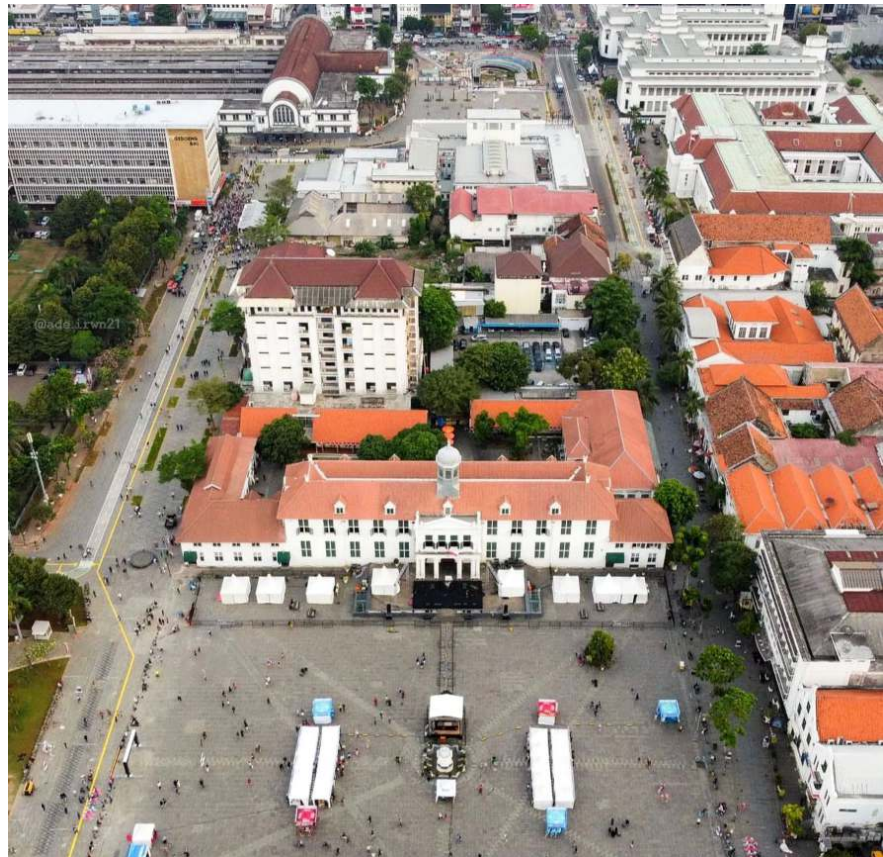
menjadi kawasan yang memberi banyak manfaat bagi warga.

Anies Baswedan saat membuka *Festival Batavia Kota Tua*, 26 Agustus 2022, mengatakan, revitalisasi Kota Tua dirancang untuk menghadirkan kawasan wisata yang memanesiakan pejalan kaki, berorientasi pada mobilitas yang aktif, setara untuk semua, serta ramah lingkungan. Menurut alumni UGM itu, di Kota Tua, tak hanya berdiri bangunan bersejarah namun juga ada kampung-kampung tua. Untuk itu dirinya meminta kampung-kampung tua yang ada jangan dihilangkan. “Harus dirawat, dikembangkan, karena itu bagian dari sejarah perjalanan bangsa kita”, tuturnya.

Terkait revitalisasi yang dilakukan, dirinya menyebut revitalisasi progresif tanpa melupakan akar sejarahnya. Kota Tua gambaran kota di masa lalu sekaligus di masa depan. Di tempat ini orang bisa melihat gambaran perjalanan Jakarta. “Di waktu yang sama, tampilan Kota Tua saat ini juga menyajikan wajah kota masa depan”, ujarnya. “Juga dapat mewakili wajah masa depan kota ditandai dengan pejalan kaki, difasilitasi transportasi umum, masa depan kota dengan emisi yang rendah”, ujar Anies Baswedan yang terkuip dalam berbagai media.

Di hari selanjutnya, 11 September 2022, saat meresmikan pembukaan kembali kawasan Kota Tua, ditutup setelah dilakukan revitalisasi besar-besaran, Anies Baswedan mengubah nama Kota Tua, yang sudah melekat pada kawasan tersebut, menjadi Batavia. Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengatakan hari ini adalah pembukaan kembali Kota Tua. “Kawasan Kota Tua ini kita namai kawasan Batavia sebagaimana nama aslinya dulu,” ujarnya seperti termuat dalam *metro.tempo.co*, 11 September 2022.

Kota Tua, eh Batavia, bisa bertahan hingga saat ini, memiliki sejarah yang panjang. Pada awalnya kawasan itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Hindu Padjadjaran. Pada masanya kawasan itu memiliki pelabuhan yang sangat populer yang disebut dengan Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa pun seolah menjadi nama



kawasan yang berada di tepi Laut Jakarta itu. Pada tahun 1526, seorang yang disebut utusan dari Kesultanan Demak, yang bernama Fatahillah, menyerang Sunda Kelapa. Setelah Sunda Kelapa berhasil ditaklukkan, selanjutnya Fatahillah mengganti namanya menjadi Jayakarta. Hampir seratus tahun Jayakarta di bawah kekuasaan Fatahillah.

Kedatangan VOC ke Nusantara membawa malapetaka bagi Jayakarta. Setelah mampu mengalahkan saingannya dalam perdagangan rempah-rempah, VOC ingin memonopoli perdagangan dan jalur-jalurnya. Jayakarta yang pada masa itu sebagai pusat perdagangan dunia, ingin dikuasai sebab di wilayah ini posisinya sangat strategis. Tak gampang untuk menjadikan Jayakarta sebagai pusat kekuasaan VOC.

Pada tahun 1619, kekuatan dagang itu mengerahkan pasukan di bawah komando Jan Pieterszoon Coen menyerang dan berhasil menaklukkan Jayakarta. Satu tahun setelah menduduki Jayakarta, di kawasan

itu dibangun kawasan perkantoran, gudang rempah-rempah, perumahan, dan sarana penunjang lainnya, seperti infrastruktur pelabuhan dan jalan sehingga membentuk kota baru. Kota baru itu dinamakan Batavia.

Dalam *Wikipedia* disebut, nama Batavia diambil dari nama *Batavieren*. Nama ini diambil untuk menghormati leluhur bangsa Belanda. Pada masanya, kota baru itu berada di kisaran sekitar tepi timur Sungai Ciliwung. Selanjutnya mereka yang di sana disebut sebagai *Batavianen*. Dari sinilah kemudian muncul suku Betawi yang terdiri dari etnis kreol yang merupakan keturunan dari berbagai etnis yang menghuni Batavia.

Sebagai kota baru dan pusat perdagangan dan pemerintahan VOC, Batavia terus berkembang. Tahun 1635, wilayah yang ada tidak sebatas pada bagian timur Ciliwung, namun sudah merambah ke tepi barat Ciliwung. Sebagai kota yang dibangun oleh bangsa Eropa, Belanda, pastinya kota itu bergaya sama dengan kota Amsterdam dan kota lainnya di negara asalnya. Bila kita



Anies Baswedan

pernah ke Amsterdam maka di Batavia juga kita temukan bangunan-bangunan yang sama, seperti kanal dan bangunan-bangunan megah, yang sekarang telah menjadi Museum Sejarah Jakarta, Museum Bahari, Menara Jakarta, Stasiun Jakarta Kota, Museum Bank Indonesia, Museum Mandiri, dan bangunan-bangunan lainnya yang sekarang sudah menjadi cagar budaya.

Dari waktu ke waktu Batavia berkembang sehingga dianggap tidak cukup untuk menampung perkembangan kota. Dirasa sudah cukup padat maka pada tahun 1835 ada keinginan untuk membuat kota baru di luar Batavia. Untuk mengembangkan kawasan perdagangan dan perkotaan maka dibangunlah kota baru yang bernama Weltevreden (sekarang menjadi Monas, Pasar Baru, dan Gambir). Di kawasan baru ini juga muncul gedung-gedung megah yang

sekarang menjadi Istana Merdeka, Kantor Kementerian Keuangan, Gereja Imanuel, Katedral Jakarta.

Era kejayaan Batavia dan Weltevreden berakhir ketika Jepang datang ke Pulau Jawa. Belanda yang tidak bisa membendung kedatangan pasukan Jepang itu akhirnya menyerah kepada Jepang. Wilayah yang diduduki Belanda pun dikuasai oleh Jepang. Ketika Jepang menguasai Jawa semua hal yang berbau Belanda diganti dan diubah. Nama Batavia dan Weltevreden diganti. Batavia pun diubah menjadi Jakarta.

Ketika Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, hingga ditetapkan oleh Gubernur Jakarta Ali Sadikin sebagai situs warisan, entah bagaimana rupa dan pemeliharaan gedung-gedung yang ada di Batavia masih ada yang tak terurus. Di tahun 2000-an saja masih banyak terlihat bangunan yang

terbengkalai, tak terurus hingga berujung pada kerusakan dan kehancuran.

Dalam *Wikipedia*, disebut ada beberapa gedung dan bangunan yang dihancurkan dengan alasan untuk mengembangkan Batavia. Itu tidak hanya terjadi selepas Indonesia merdeka, pada masa kolonialisme Belanda pun juga pernah terjadi penghancuran bangunan. Beberapa gedung yang dihancurkan, Benteng Batavia dihancurkan antara 1890–1910, beberapa material digunakan untuk pembangunan Istana Daendels (sekarang Departemen Keuangan Nasional); Gerbang Amsterdam (lokasinya berada dipertigaan Jl. Cengkih, Jl. Tongkol, dan Jl. Nelayan Timur) dihancurkan untuk memperlebar akses jalan. Dihancurkan pada tahun 1950-an untuk pelebaran jalan: Jalur Trem Batavia (Jalur ini pernah ada di kota Batavia, tetapi sekarang sudah ditimbun dengan aspal. Karena Presiden Soekarno menganggap Trem Batavia yang membuat macet).

Sampai saat ini juga tercatat banyak bangunan berada dalam kondisi mengesankan, kebanyakan akibat kepemilikan bangunan yang tidak jelas.

Seperti dikatakan oleh Anies Baswedan, di Batavia terdapat banyak bangunan bersejarah dan kampung-kampung tua. Di Batavia, ada 3 pahlawan nasional yang pernah merasakan hidup dalam penjara. Mereka adalah Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, dan Untung Suropati. Di Kantor Pemerintahan Kolonialisme Belanda, yang sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta, mereka diinterogasi dan dijebloskan dalam penjara sebelum akhirnya diasingkan. Diponegoro selama beberapa waktu mendekam di sana sebelum diasingkan di Manado hingga akhirnya Makassar. Pun demikian Cut Nyak Dien sebelum dibawa ke Sumedang.

Tak hanya itu, mereka yang pada saat itu disebut melawan atau menentang penjajahan Belanda dijebloskan ke dalam penjara yang gelap, pengap, dan tidak bisa berdiri bahkan dijatuhi hukuman gantung yang digelar di depan lapangan Batavia. □

AWG



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



Museum Besar, Lorong Memasuki Masa Lalu

Orang jalan-jalan ke Batavia tidak hanya sekedar mencari ruang terbuka. Mereka ke sana juga untuk melihat masa lalu dengan menatap bangunan tua dan mengunjungi museum yang ada. Di Batavia seolah-olah kita berada di masa kolonialisme Belanda.

KETIKA VOC berhasil menaklukkan Jayakarta, organisasi dagang itu merancang pembangunan kota untuk memperkuat kedudukannya. Satu persatu gedung dibangun, mulai dari perkantoran, pusat perdagangan, bank, pasar, stasiun, hingga tempat sosialita. Kota yang dibangun VOC sejak 1619 dan dilanjutkan oleh pemerintahan kolonialisme Belanda itu berhenti berdetak ketika Jepang berhasil mengambil alih kekuasaan di Pulau Jawa. Dari peralihan kekuasaan kolonialisme tersebut pembangunan di Batavia dan Weltevreden berhenti.

Dari waktu ke waktu, gedung-gedung besar dari peninggalan VOC dan pemerintahan kolonialisme Belanda itu tetap berfungsi peruntukannya, seperti Stasiun Jakarta Kota. Ada juga yang beralih fungsi, seperti menjadi museum dan ada pula yang terbengkalai hingga menjadi rusak dan runtuh.

Kepedulian pemerintah akan nasib Batavia membuat kawasan yang ada terlindungi keberadaannya. Bahkan kawasan itu menjadi kumpulan bangunan cagar budaya sehingga letak, posisi, dan bentuk bangunan yang ada tidak berubah atau tidak boleh diubah. Dengan demikian ketika berada di Batavia seolah-olah kita memasuki masa lampau. Aura masa kolonialisme terasa bila berada di Batavia. Suasana yang demikian, berada di gedung dan bangunan tua, membuat kawasan itu menjadi museum besar. Bangunan dan gedung yang ada menjadi saksi perjalanan masa lalu.

Selain Batavia menjadi museum besar, bangunan-bangunan yang melingkari kawasan itu saat ini mayoritas juga menjadi museum tersendiri. Museum yang ada Batavia, yakni *Museum Sejarah Jakarta*, *Museum Mandiri*, *Museum Bank Indonesia*, *Museum Wayang*, *Museum Bahari*, *Museum Keramik* dan *Seni Rupa*, serta



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

museum hidup lainnya, misalnya Pelabuhan Sunda Kelapa dan kawasan Glodok. Berikut uraian beberapa museum yang ada yang disarikan dari *Wikipedia* ditambah dengan pengalaman langsung kunjungan ke sana:

Museum Sejarah Jakarta. Museum ini berada di Jalan Taman Fatahillah Nomor 1, Jakarta Barat. Luas bangunan yang ada mencapai 1.300 meter persegi. Ruang museum terbagi dalam ruang prasejarah Jakarta, ruang Tarumanegara, ruang Jayakarta, ruang Fatahillah, ruang Sultan Agung, dan ruang Batavia.

Objek yang dapat dilihat dan ditemui di Museum Sejarah Jakarta adalah cerita fakta perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran, hasil penggalian arkeologi di Jakarta, mebel antik mulai dari abad ke-17 sampai 19, yang merupakan perpaduan dari gaya Eropa, Republik Rakyat Tiongkok, dan Indonesia.

Selain itu juga ada keramik, gerabah, dan batu prasasti. Terdapat juga berbagai koleksi tentang kebudayaan Betawi, numismatik, dan becak. Di museum itu juga terdapat bekas penjara bawah tanah. Mereka yang

pernah ditahan di sana adalah Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, dan Untung Surapati.

Museum Bahari. Museum ini berada di Jl. Pasar Ikan. Di bangunan yang berada di sisi Pelabuhan Sunda Kelapa itu tersimpan koleksi berupa sarana kebaharian bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Koleksi yang ada di museum ini berupa berbagai jenis perahu tradisional dengan aneka bentuk, gaya, dan ragam hias. Mulai dari perahu tradisional suku bangsa hingga kapal VOC. Tak hanya itu, di sana juga bisa dilihat berbagai model dan miniatur kapal modern dan perlengkapan penunjang kegiatan pelayaran serta peralatan yang digunakan oleh pelaut pada masa lalu seperti alat navigasi, jangkar, teropong, model mercusuar dan meriam.

Di Museum yang berada di tepi jalan itu, juga ada cerita dan kisah para pelaut nusantara dan dunia. Dari Marco Polo hingga Cheng Ho ada kisahnya di museum itu.

Museum Wayang. Museum ini berada di Jl. Pintu Besar Utara No. 27. Museum ini masuk dalam kawasan alun-alun Batavia. Museum ini bersebelahan dengan Museum



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Sejarah Jakarta. Dari sejarah yang ada, bangunan museum ini berkali-kali mengalami perombakan dan fungsi kegunaan. Dibangun pada 1640 sebagai *De Oude Hollandsche Kerk*. Kemudian berganti nama *De Nieuwe Hollandse Kerk*. Terakhir dirobak pada 22 Desember 1939 oleh Gubernur Jenderal Belanda, Tjarda van Starckenborgh, yang difungsikan sebagai museum Batavia Lama. Pada masa Jepang, museum Batavia Lama tidak terawat.

Koleksi Museum Wayang terdiri dari berbagai jenis dan bentuk wayang dari seluruh Indonesia, baik yang terbuat dari kayu dan kulit maupun bahan-bahan lain. Wayang dari luar negeri seperti dari Republik Rakyat Tiongkok, Kamboja, dan beberapa negara Eropa juga bisa dijumpai. Dari semua

koleksi tercatat ada lebih dari 4.000 wayang yang berupa wayang kulit, wayang golek, wayang kardus, wayang rumput, wayang janur, topeng, boneka, wayang beber dan gamelan.

Museum Bank Indonesia. Museum ini berada di Jl. Pintu Besar Utara No. 3, Jakarta. Dulu museum ini merupakan kantor *De Javasche Bank*. Sebagai kantor bank pada masa lalu, gedung yang ada sangat megah dengan gaya neo-klasikal. Dalam museum menceritakan peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah yang dimulai sejak sebelum kedatangan bangsa Eropa terbentuknya Bank Indonesia pada tahun 1953.

Sebagai museum yang modern, penyajian dalam museum dikemas dengan memanfaatkan berbagai teknologi modern

dan multi media, seperti display elektronik, panel statik, televisi plasma, dan diorama sehingga menciptakan kenyamanan pengunjung dalam menikmati sejarah dan koleksi museum.

Museum Bank Mandiri. Museum ini berhadapan dengan Stasiun Jakarta Kota. Museum yang memiliki area seluas 10.039 meter persegi dengan luas gedung sebesar 21.504 meter persegi pada awalnya adalah gedung *Nederlandsche Handel-Maatschappij* (NHM) atau kantor *Factorij* di Batavia yang merupakan perusahaan dagang milik raja Belanda yaitu Willem I yang kemudian berkembang menjadi perusahaan di bidang perbankan.

Bila memasuki museum tersebut kita bisa melihat berbagai macam koleksi yang terkait dengan aktivitas perbankan masa lalu dan perkembangannya. Koleksi yang dimiliki mulai dari perlengkapan operasional bank, surat berharga, mata uang kuno (numismatik), brandkast, dan perangkat dan budaya bank lainnya.

Museum Seni Rupa dan Keramik. Ia berada di Jl. Pos Kota No 2, Jakarta. Gedung yang dibangun pada tahun 1870 itu dari sejarah perjalanannya berubah-ubah fungsinya. Pernah dijadikan Kantor Kehakiman Belanda, tangsi militer KNIL, hingga Balai Kota Jakarta Barat. Baru pada tahun 1990 dijadikan Museum Seni Rupa dan Keramik.

Sesuai dengan namanya, di dalam gedung koleksi seni lukis Indonesia dibagi dalam beberapa ruangan, Ruang Masa Raden Saleh (karya-karya periode 1880 - 1890), Ruang Masa Hindia Jelita (karya-karya periode 1920-an), Ruang Persagi (karya-karya periode 1930-an), Ruang Masa Pendudukan Jepang (karya-karya periode 1942 - 1945), Ruang Pendirian Sanggar (karya-karya periode 1945 - 1950). Ruang Sekitar Kelahiran Akademis Realisme (karya-karya periode 1950-an), dan Ruang Seni Rupa Baru Indonesia (karya-karya periode 1960 - sekarang).

Untuk koleksi keramik menampilkan keramik dari berbagai daerah Indonesia. Ada juga keramik dari Tiongkok, Thailand, Vietnam, Jepang, dan Eropa. □



AWG



Membangun Amsterdam di Batavia

Ada kesamaan Amsterdam dan Batavia. Sama-sama di tepi laut dan memiliki kanal, sungai, yang membelah kota. VOC dan pemerintah kolonialisme Belanda membangun Batavia dengan konsep seperti membangun kota-kota di Eropa.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BILA berkunjung ke Amsterdam, Belanda, di sana kita jumpai banyak kanal (sungai) yang ditata rapi, bersih, dan dimanfaatkan untuk transportasi, baik wisata maupun umum. Di tepi kanal itu berdiri bangunan pertokoan, perkantoran, tempat hiburan, rumah penduduk, dan bangunan dengan fungsi lainnya. Kanal-kanal yang ada konon dibangun, ditata, agar Amsterdam bebas dari banjir sebab negara itu disebut di bawah permukaan air laut.

Kondisi kawasan Jayakarta pada masa lalu bisa dikatakan serupa dengan Amsterdam. Di mana selain berada di tepi laut juga ada sungai besar, Ciliwung, dan Kali Besar. Untuk itu ketika membangun Batavia, VOC menggunakan konsep bagaimana pemerintah Kerajaan Belanda membangun Amsterdam.

Untuk melihat kesamaan Batavia dan Amsterdam, bisa kita lihat di Kali Besar. Dalam *Wikipedia*, dipaparkan Kali Besar adalah suatu terusan yang mengalir sejajar dengan Sungai Ciliwung di sebelah baratnya, dan bermuara di Teluk Jakarta. Sebelum pusat pemerintahan kolonial Belanda dipindahkan ke selatan di awal abad ke-19, kawasan Kali

Besar adalah daerah permukiman kalangan atas. Pada masa VOC, Kali Besar juga menjadi urat nadi perdagangan Batavia, dan tidak jauh dari *Stadhuis*, kantor Gubernur Jenderal VOC. Di masa kejayaannya, kapal-kapal dapat masuk ke arah hulu Kali Besar melalui Jembatan Kota Intan yang dapat diangkat bagian tengahnya pada abad ke-17.

Saat ini Kali Besar, di Jl. Kali Besar Barat



dan Jl. Kali Besar Timur (sisi utara), telah dilakukan revitalisasi. Dampak dari revitalisasi, di kanan kiri Kali Besar terhampar trotoar yang besar, lebar, dan memanjang. Dengan hadirnya trotoar yang aman dan nyaman buat pejalan kaki membuat masyarakat yang berkunjung ke sana bisa menikmati sungai yang ada sambil menatap bangunan-bangunan masa lalu. Tak hanya itu, Jembatan Kota Intan sebagai jembatan yang langka terlihat lebih nyata.

Di Kali Besar (sisi selatan), periode sebelum Gubernur Anies Baswedan juga telah dilakukan revitalisasi. Revitalisasi yang ada di saluran selatan ini menciptakan ruang baru di Batavia, selain di alun-alun. Di tepi kali bahkan di tengahnya dipasang instalasi seni sehingga menambah keindahan tersendiri. Sebelum revitalisasi di masa Anies Baswedan, di tempat ini pengunjung Batavia berkumpul selain di alun-alun.

Terlepas dari revitalisasi di sisi utara dan selatan, di tepi Kali Besar berdiri bangunan-bangunan besar dan megah. Pada masa lalu bangunan itu berfungsi sebagai kantor dari berbagai perusahaan dagang dan bank. Di sana juga berdiri hotel. Dari bentuk yang demikian, apa yang kita lihat di Amsterdam sama seperti yang kita lihat di Batavia. Di mana di tepi kanal, sungai, berdiri bangunan yang menghadap ke sungai yang mana sungainya berfungsi sebagai sarana transportasi.

Kota Amsterdam hingga saat ini terjaga keindahannya sehingga mampu menjadi salah satu kota tercantik di dunia sehingga mampu menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Sementara Batavia masih menyisakan berbagai masalah. Revitalisasi yang terus dilakukan kelak membuat Batavia mampu mengejar, tak hanya Amsterdam namun juga kota-kota cantik lainnya di dunia. □

AWG

Banyak Jalan Menuju Batavia

Dari waktu ke waktu sebenarnya Batavia semakin tidak strategis, apalagi ada kota baru, Weltevreden. Sebab pada masanya dibangun sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan maka secara rekayasa dan alamiah jalan terbangun menuju ke sana. Saat ini dan ke depan, semakin beragam angkutan umum menuju ke Batavia, mulai dari Transjakarta, Commuterline, hingga MRT.

KETIKA VOC membangun Batavia, geografi kota itu berada di sisi utara. Berada di tepi Laut Jakarta. Model kota-kota lama berciri berada di tepi laut atau sungai yang mengandalkan transportasi pelayaran dalam beraktivitas. Sebab, pembangunan yang masif, kawasan itu menjadi strategis sebab di sana ada pusat pemerintahan, pertokoan, pasar, bank, dan fungsi ekonomi serta sosial lainnya.

Pusat pemerintahan dan perdagangan di sisi utara itulah yang membuat akses ke sana terbangun baik secara rekayasa maupun alamiah. Dari perjalanan waktu membuat banyak jalan terhubung ke Batavia meski dalam perkembangan zaman lokasinya sudah tidak strategis lagi, apalagi setelah ada pembangunan kota di Weltevreden.

Dari sinilah bila berkunjung ke Batavia, masyarakat tak usah bingung. Akses ke sana terbilang sangat mudah. Untuk pejalan kaki berjalan lurus dari Jl. Jenderal Soedirman dan Jl. Thamrin. Bila jalan terus dan lurus menuju ke arah utara dari kedua jalan protokol negara bisa nyampe di Batavia. Bila lelah jalan kaki, pesan ojek atau mobil online, juga taxi, tinggal duduk sudah nyampe.

Nah bagi masyarakat pengguna sarana transportasi umum, bila hendak ke Batavia banyak pilihan untuk menuju ke sana. Ada Transjakarta, ada commuteline (kereta api), dan kelak ada MRT. Akses-akses transportasi umum itu bukan hanya sekedar melintas, namun di titik-titik tengah Batavia terdapat terminal (berhenti). Lihat saja Stasiun Jakarta Kota. Angkutan kereta api yang jalurnya tersambung dari Cilegon sampai Banyuwangi itu berhentinya bisa persis berada di Batavia sehingga anker (anak kereta) yang ingin jalan-jalan ke sana bisa ditempuh dari berbagai arah selama ada stasiun. Pada hari Sabtu, Ahad, dan hari libur,



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Stasiun Jakarta Kota terlihat penuh sebab masyarakat, terutama dari Bogor, Depok, Bekasi, Cikarang, Rangkas, berduyun-duyun ke sana dengan menunggangi commuteline.

Untuk transjakarta, di Batavia ada 3 shelter. Shelter itu berada di Jl. Kali Besar Barat, Jl. Kunir, dan Jl. Lada Dalam (utara Stasiun Jakarta Kota). Sebagai angkutan terintegrasi dengan seluruh jaring-jaring busway, maka bila hendak ke Batavia bisa ditempuh dari seluruh titik yang ada di

Jakarta dan titik penyangga lainnya. Dari Cileungsi bahkan dari Marunda bisa ke Batavia dengan naik Transjakarta.

Kelak bila pembangunan MRT Fase II selesai, yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI ke Kampung Bandan dan ada Stasiun Batavia, maka akses ke tempat wisata ini akan semakin banyak dan bervariasi. Bisa disesuaikan isi kantong. □

AWG



Irfan Nasution

Ketua BUMDes Ciputri



Produk Daerah Bisa Diandalkan

YANG saya rasakan dan alami selama membantu mengelola Badan Usaha Milik Desa, masyarakat desa memiliki kemampuan untuk memproduksi produk, terutama kuliner, yang bisa diandalkan. Seperti masyarakat di Desa Ciputri, Cianjur, Jawa Barat ini.

Banyak produk kuliner yang tidak kalah menarik dengan produk kemasan yang ada di supermarket besar di kota, seperti minuman Sereh Wangi, Kripik Banana Chips, The Celup dan lainnya dengan rasa dan harga yang bersaing, dan kemasan modern.

Alhamdulillah, dari sisi bahan baku sangat melimpah dan kami tidak merasa kesulitan. Namun, perlu saya sampaikan bahwa ada memang beberapa kendala dan hambatan yang sangat terasa menghambat perkembangan produk lokal desa ini, terutama soal kemasan.

Selama ini untuk kemasan, kami biasanya memesan atau membeli dari luar daerah dengan harga yang lumayan, hal itu berpengaruh kepada nilai jual. Daerah kami memang tidak memiliki mesin cetak yang bagus, sehingga terpaksa mengambil dari luar.

Kami berharap, pemerintah provinsi atau pusat memberikan perhatian soal ini, penyediaan mesin cetak yang bagus tentu dengan harga yang terjangkau masyarakat desa. Sebab, saya rasa di daerah lain, selain desa Ciputri, juga memiliki masalah yang sama. □

DER

Wilianto Tanta

Ketum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia

Ingin Lebih Berkiprah Demi Bangsa



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KAMI adalah organisasi atau paguyuban warga Tionghoa yang ada di Indonesia, tersebar hampir di 33 provinsi. Pada dasarnya, kami bergerak dalam bidang kegiatan sosial dan budaya, itu menjadi landasan aktivitas organisasi untuk berkontribusi buat negara.

Namun, banyak anggota kita yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia menginginkan agar kiprahnya lebih luas lagi, demi bangsa dan negara. Salah satunya di bidang politik. Sebagai pimpinan, kami tidak melarang dan tidak juga mengarahkan anggota ke sisi politik tertentu, itu hak mereka untuk memilih.

Untuk berkiprah di dunia politik, tentu kami harus banyak belajar tentang hal itu agar kami tidak salah memahami. Kami sangat apresiasi partai politik atau elit partai memberikan edukasi politik yang benar dan sesuai dengan cita luhur bangsa, kepada elemen-elemen bangsa seperti kami ini, dan hal itu harus dipertahankan bahkan di tingkatkan lagi ke depannya. □

DER

dr. Zackya Yahya, Spok hd

Rela Jual Rumah Karena *Menolak Kalah*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SEJAK dulu, Ibu Pertiwi telah melahirkan anak-anak yang hebat bagi bangsa Indonesia. Hebat karena dia tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Hebat karena anak-anak yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi itu sebagian kehidupannya diberontakkan bagi orang lain. Dan, itu dilakukan dengan ikhlas, tanpa pamrih. Artinya, tak berharap penghargaan, penghormatan, tanda jasa, ataupun balas budi.

Kehebatan anak-anak Ibu Pertiwi itu terasa semakin besar, karena pengorbanan mereka dilakukan secara total. Tidak terbatas hanya berkorban waktu dan tenaga, tapi juga mereka rela mengorbankan diri dan hartanya. Fenomena ini, salah satunya diperlihatkan oleh dr. Zackya Yahya, Koordinator MER-C (Medical Emergency Rescue Committee) untuk Papua.

Selama 18 tahun bergabung dengan organisasi kemanusiaan yang didirikan Joserizal Jurnalis itu, dr. Zackya telah mewakafkan dirinya di berbagai aksi kemanusiaan. Bukan hanya waktu, tenaga, dan pikiran, tapi juga jabatan yang dulu dipegangnya sebagai salah satu manager di perusahaan swasta juga dikorbankannya. Bahkan, tiga rumah tempat tinggalnya yang dibeli dari hasil keringatnya sendiri, juga dikorban demi kelancaran aksi kemanusiaan yang dia pimpin.

"Saya haqqul yakin, rezeki itu sudah ada yang ngatur, dan rezeki tidak pernah salah

alamat. Dengan keyakinan itu, saya tidak pernah merasa ragu meninggalkan apa yang saya peroleh, demi membantu meringankan beban orang lain yang membutuhkan," kata Zackya kepada Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Keyakinannya itu terbayar lunas. Terbukti, setelah bergabung dengan MER-C, anak-anaknya mendapatkan beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan. Bahkan, puteri sulungnya mendapat beasiswa sejak dari bangku SLTP hingga mendapatkan gelar doktor di salah satu perguruan tinggi di Jepang. Sedangkan Zackya sendiri menjadi konsultan dengan gaji lebih besar dan waktu pekerjaan sangat longgar, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dengan leluasa.

Bunda, begitu Zackya biasa di panggil oleh koleganya, mengakui, selama ini kiprah dan perjuangan MER-C tidak begitu terdengar di masyarakat. Karena MER-C memang tidak selalu mempublikasikan aksi-aksi kemanusiaan yang dilakukannya.

Sesuai dengan tagline MER-C: Amanah, Ikhlas, dan Rahmatan lil 'Alamin. Keterbukaan MER-C terhadap pemberitaan, kata Bunda, baru terjadi beberapa waktu terakhir. Itu dilakukan karena mereka sadar pentingnya untuk membuka diri,

"Kami mencari dana, sesuai program yang dilakukan. Kalau aksinya selesai maka pencarian dananya pun kami hentikan. Jadi tidak ada uang berlebih, bahkan sering kurang. Karena itu, kami gunakan harta kami untuk keberlanjutan program," ujar dr. Zackya.

Melangahi Mayat

Zakya sendiri bergabung dengan MER-C sejak 2004, atau lima tahun setelah lembaga itu berdiri. Ketertarikannya terhadap MER-C datang secara tidak disengaja. Suatu hari ia membaca profil serta sepak terjang Joserizal Jurnalis dari sebuah majalah. Sejak itu, ia tertarik dan mendaftarkan





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

menjadi relawan di MER-C.

Setelah mendaftar, amanah pertama yang dipercayakan kepada Zacky adalah menangani kasus pencemaran di Teluk Buyat Sulawesi Utara. Selama lima tahun anak pasangan H. Muhamad Yahya dan Hj. Aisyah Tong itu bergelut dengan berbagai persoalan yang pelik terjadi di Teluk Buyat. Mulai dari serangan penyakit akibat pencemaran hingga yang berakibat kematian. Bersama beberapa lembaga lain, Zacky melakukan pendampingan hingga akhirnya masyarakat di sekitar Teluk Buyat direlokasi ke tempat yang jaraknya sekitar 300 km.

Di tengah perjuangannya mendampingi masyarakat di Teluk Buyat, akhir tahun 2004 Zackya diterjunkan ke Aceh membantu penanganan bencana tsunami. Tim MER-C yang dipimpin Zackya berangkat ke Aceh pada hari kedua pasca bencana. Tiba di lokasi bencana, Zackya langsung dihadapkan pada

pemandangan miris.

Ribuan mayat berserakan tak terurus. Fasilitas sosial nyaris lumpuh. Listrik padam, SPBU tutup. Rumah sakit dan pusat-pusat layanan kesehatan turut porak poranda diterjang air laut. Demikian pula pasar dan toko-toko penyedia bahan makanan.

“Mobil yang kami tumpangi kehabisan bahan bakar, sedangkan listrik padam. Beruntung, kami satu rombongan dengan beberapa kameramen televisi. Berkat bantuan lampu kamera, kami berjalan kaki sejauh 5 Km menuju posko. Dan, berkat penerangan lampu kamera, kami bisa menghindarkan diri dari menginjak mayat-mayat yang berserakan,” cerita Zackya lagi.

Sesampainya di posko, kata dr. Zackya, kondisinya tidak berbeda jauh dari jalanan. Tumpukan sampah, genangan air serta mayat yang berserakan juga ditemukan di sana. Mereka segera berkoordinasi dengan

semua pihak untuk mempercepat pemberian bantuan. Termasuk menentukan RS. Bunda sebagai tempat MER-C menolong para korban.

“Saya hanya 10 hari bertugas di Aceh, tapi itu memberi pengalaman sangat banyak. Berbagai negara, organisasi kemasyarakatan, kampus hingga kelompok-kelompok masyarakat menghubungi saya, mengajak kerjasama atau ingin menyalurkan bantuannya melalui MER-C. Dan, itu sangat melelahkan, karena harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait,” kata Zackya lagi.

Papua Barat

Saat ini, Zackya tengah berkonsentrasi dengan aksi-aksi di Papua Barat, yang sudah dijalani sejak 2006. Program di provinsi paling timur NKRI ini dianggap menjadi salah satu prioritas, karena minimnya ketersediaan sarana kesehatan di sana. Lamanya Zackya memegang program di Papua membuat dirinya dikenal oleh banyak masyarakat, termasuk para kepala suku. Karena saat terjadi perang antar suku, mereka akan membawa para korban untuk ditangani MER-C.

“Program di Papua itu awalnya kerjasama dengan BNI memakai dana CSR selama lima tahun, nayatannya sekarang sudah 16 tahun. Padahal donasi untuk Papua sangat minim. Karena itu, program yang sebelumnya diberlakukan bagi Papua dan Papua Barat, dalam empat tahun terakhir tinggal Papua Barat saja. Karena kondisi di Papua masih kurang kondusif,” katanya.

Meski tidak muda lagi, pemilik nama pemberian Buya Hamka itu tak pernah punya niat pensiun dari MER-C. Selama hayat masih di badan, dan kehadirannya masih dibutuhkan, perempuan yang sudah melanglang ke berbagai belahan bumi itu berniat akan terus mendarmabaktikan dirinya bagi usaha-usaha kemanusiaan. □

MBO

Sejarah Penjara



Dibangun untuk Mereka yang Berbuat Jahat

Penjara mulai dikenal pada Abad XVIII. Dibangun untuk tempat bagi para penjahat agar tidak mengulang kejahatan yang dilakukan. Kejahatan yang bertingkat membuat kelas penjara pun beragam. Penjara Alcatraz yang pernah dibangun pemerintah Amerika Serikat merupakan penjara kelas berat, diperuntukkan bagi pelaku kejahatan di luar batas kemanusiaan dan hukum. Sayangnya keberadaan penjara disebut tidak membuat orang jera melakukan kejahatan. Akibatnya, penghuni penjara bertambah melebihi kapasitas.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



Penjara Alcatraz

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KESEKIAN kalinya Kerajaan Spanyol mengeluarkan perintah kepada para pelaut untuk melakukan ekspedisi penjelajahan ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1770-an, perintah yang dikeluarkan kerajaan itu kepada pelautnya adalah menuju ke Amerika.

Pelayaran kali ini dipimpin oleh Kapten Juan Manuel de Ayala. Dalam pelayaran yang dipimpin oleh pria kelahiran Osuna, Andalusia, itu berbagai tantangan alam dihadapi. Singgah di beberapa pulau dan pantai, yang ia lakukan selain untuk beristirahat juga untuk mengisi perbekalan dan memperbaiki kapal.

Dalam pelayaran yang sudah berjalan kurang lebih lima tahun, pada suatu hari, tepatnya 12 Agustus 1775, ia melihat ada pulau kecil berupa karang. Di pulau itu terdapat banyak burung yang terbang atau hinggap di sana. Melihat fenomena alam yang demikian membuat de Ayala menamakan pulau itu dengan nama *Alcatraz*. Menurut catatan yang ada, nama itu berasal dari bahasa arab yang aslinya, *al qatras*, elang laut. Sumber lain mengatakan, Alcatraz berarti burung pelikan. Nama itu sematkan untuk pulau itu

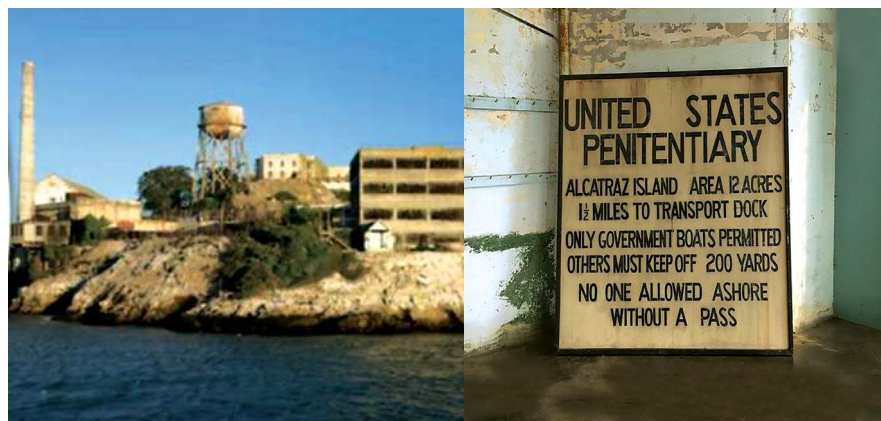
terdapat banyak berbagai jenis burung hidup di sana. Di pulau itulah yang membuat ia dan *crew* kapal yang di-pimpinnya, San Carlos, menjadi orang Eropa pertama yang berhasil menemukan Teluk San Fransisco, California, Amerika Serikat.

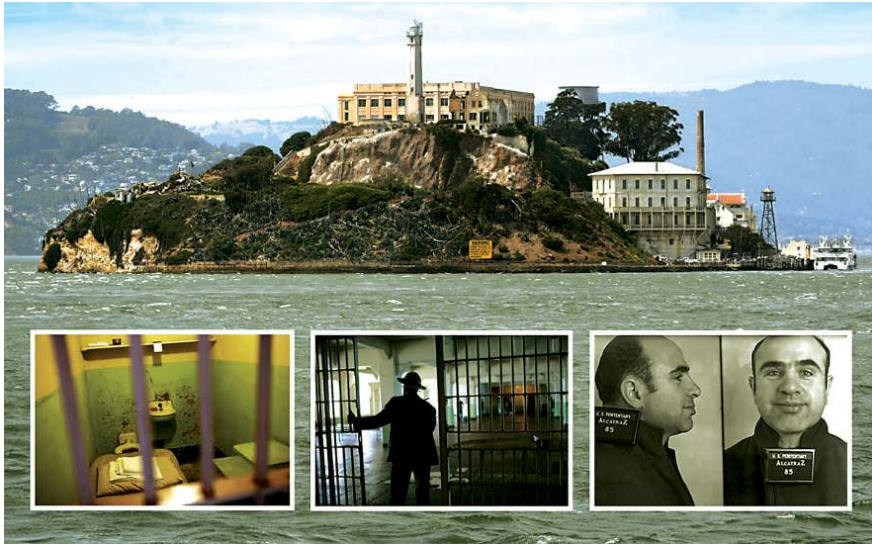
Keberadaan Pulau Alcatraz yang berada di Teluk San Fransisco ternyata sangat strategis, buktinya pada tahun 1850 di sana dibangun benteng atau pertahanan militer. Sebagai benteng atau pertahanan militer, pastinya di sana dilengkapi dengan bangunan besar, kokoh, kuat, serta dipasang puluhan meriam untuk meng-

halau kapal-kapal musuh.

Di pulau itu tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan militer. Para tentara Amerika Serikat juga menggunakan tempat itu sebagai penjara bagi mereka yang dianggap bersalah. Saat Perang Sipil terjadi, banyak *desertir* Union maupun simpatisan Konfederasi dijebloskan dalam Alcatraz. Bagi orang-orang Indian yang melawan pemerintah juga dijebloskan dalam benteng itu.

Ketika bangsa Amerika Serikat sudah terbentuk dan kondisi dalam negeri sudah tidak ada lagi perang saudara atau tak ada





Alphonse Gabriel Capone

lagi bangsa lain yang hendak menyerang Amerika Serikat maka keberadaan benteng di Alcatraz diubah fungsinya. Pulau itu yang awalnya di bawah Kementerian Pertahanan, maka sejak 12 Oktober 1933 beralih ke Kementerian Kehakiman. Selanjutnya, pada 1934, oleh Kementerian Kehakiman bangunan ini difungsikan sebagai penjara. Tentunya, ada perubahan dan penambahan bangunan berupa sel-sel.

Pada masa itu di negeri Paman Sam sudah banyak penjara yang dibangun, namun mengapa pemerintahan pada masa itu membuat lagi penjara, apalagi di pulau tandus, kecil, dan susah disinggahi. Rupanya penjara yang dibuat di Alcatraz adalah

penjara kelas berat atau penjara yang penghuninya adalah pelaku tindak kejahatan yang extraordinary alias luar biasa.

Kompas.com, 11/08/2021 menyebutkan, penjara Alcatraz dibangun ditujukan untuk narapidana-narapidana yang sering membuat masalah di penjara federal Amerika lainnya, seperti meloloskan diri, membuat keonaran, pembunuhan sesama napi, dan sebagainya.

Sebagai penjara kelas berat tentu pengamanannya di tempat itu juga sama beratnya alias sangat ketat. Menurut catatan, selama penjara itu beroperasi tidak ada satupun penghuni atau narapidana yang mendekam di sana bisa meloloskan

diri. Mereka yang mencoba pulang sebelum waktunya, akhirnya tertangkap kembali atau tewas tenggelam atau ditembak mati.

Salah seorang yang pernah mendekam di sana adalah Al Capone. Pria kelahiran Brooklyn, New York, 17 Januari 1899, ini *gangster*. *Gangster* adalah pelaku kejahatan dan kriminal yang terorganisir. Banyak kejahatan yang dilakukan Al Capone, seperti menjual dan memproduksi minuman keras yang memang dilarang, menjalankan bisnis prostitusi, pemerasan, menghindari pajak, dan menyuap pejabat untuk melancarkan bisnisnya.

Atas berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pria yang bernama lengkap Alphonse Gabriel Capone itu, ia mendekam di Alcatraz selama 11 tahun. Ia masuk dalam penjara pada tahun 1931 dan bebas bersyarat pada tahun 1939. Sebagai seorang *gangster*, nama Alcapone melegenda di mana-mana, termasuk di Alcatraz sendiri. Dalam, *Kompas.com*, 21/03/2019, diceritakan, di Alcatraz, ia menyuap para penjaga agar bisa mendapatkan perlakuan istimewa. Keistimewaan inilah yang bisa membuat dia tetap bisa menjalankan bisnis haramnya. Bila penjara merupakan tempat orang di mana kebebasannya dibatasi, namun Alcapone tetap bisa melakukan apa saja, seperti bermain banjo dan mengadakan konser musik tiap minggu.

Penjahat kelas berat lain yang pernah mendekam di sana adalah Robert Franklin Stroud. Stroud merupakan pembunuh yang kejam hingga akhirnya dia divonis hukuman mati, namun keputusan ini diubah menjadi hukuman seumur hidup. Akibatnya, Stroud harus menjalani sisa hidupnya di Alcatraz.

Ada beberapa pendapat mengenai sejarah penjara. Ada yang menyebutkan, penjara sudah ada sejak Abad XVI, namun ada pula yang mengatakan sudah ada pada Abad XIII di Florence, Perancis. Bahkan, pada masa 2000 SM, di Mesir sudah ada yang namanya penjara. Dari berbagai catatan sejarah yang menyebut keberadaan penjara, banyak yang menyinggung keberadaan *bridewell*. *Bridewell* merupakan tempat penampungan bagi para gelandang-



Bridewell

an, pengemis, dan anak-anak terlantar. *Bridewell* ada pertama kali pada pertengahan Abad XVI di bekas Kastil Raja Edward VI. Para penghuni *Bridewell* dilatih ketrampilan kerja.

Ketika *Act 1630* dan *Act of 170* disahkan, banyak yang menyebutkan muncul pidana penjara yang narapidananya dibina *The Hous of Correction*. Pada awal Abad XVIII mulai dibangun dan tumbuh pidana penjara. Dalam www.academia.edu/sejarah_pidana_penjara, diungkapkan, pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun Abad XVIII mulai tumbuh sebagai pidana baru berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan

penjara itu. Bagaimana penjara yang manusiawi tanpa mengurangi efek jera.

I Wayan Putu Sucana Aryana, dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Bali, dalam media.neliti.com memaparkan, di dunia terdapat tiga sistem kepenjaraan, yakni: Pertama, *Sistem Pensylvania*. Sistem ini menekankan pada penutupan secara terasing terhadap narapidana agar insyaf dan menyesal atas perbuatannya dan agar merasakan pidananya. Menurut sistem ini narapidana dimasukkan dalam sel, narapidana mendapatkan pekerjaan di selnya masing-masing dan mendapat bacaan kitab Injil. Sistem Pensylvania banyak dianut negara-negara Eropa. Dalam sistem

kelonggaran untuk bergaul antara narapidana satu dengan lainnya. Akhirnya setelah menjalani $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari lama pidana yang harus dijalani, narapidana dibebaskan dengan syarat.

Sucana Aryana dalam tulisannya itu menyebutkan, Indonesia tidak menganut secara tegas salah satu dari tiga kepenjaraan tersebut. Ia menyimpulkan pelaksanaan pidana penjara belum efektif untuk memberikan pembinaan dan menyiapkan mantan warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Penjara hanya akan menjadi tempat bagi seseorang untuk belajar tentang bagaimana melakukan kejahatan yang lebih profesional. Kelebihan



I Wayan Putu Sucana Aryana



Robert F. Kennedy

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana bagi narapidana.

Sebelumnya, di laman itu disebutkan bahwa pemberian pidana merupakan perwujudan dari rasa kebencian masyarakat dan sebagai pengungkapan rasa takut masyarakat terhadap para pelanggar hukum. Oleh karena itu, sistem koreksi dari masyarakat pada saat itu, selain bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum, juga sekaligus dimaksudkan untuk melindungi masyarakat.

Dari sinilah kemudian muncul perdebatan soal memberlakukan pidana penjara bagi narapidana. Masalah ini berkembang karena tuntutan soal hak asasi manusia (HAM), kemanusiaan, semakin tumbuh dan berkembang. Sehingga selalu dilakukan kajian, penelitian, dan riset bagaimana idealnya

ini, narapidana tidak diberi kesempatan menerima pengunjung, dan tanpa diberi kesempatan berbicara dengan orang lain.

Kedua, *Sistem Auburn*. Sistem ini pertama kali dilaksanakan di penjara Kota Auburn di Negara Bagian New York. Kemudian, karena sistem tersebut menunjukkan keberhasilan maka pada 1925 sistem ini juga dilaksanakan di penjara Sing Sing. Menurut sistem ini, narapidana pada malam hari harus tinggal di dalam sel, sedangkan pada siang hari mereka melakukan pekerjaan secara bersama-sama, tetap antara narapidana satu dengan lainnya dilarang berbicara. Sistem ini banyak dipraktikkan di Amerika.

Ketiga, *Sistem Irlandia*. Sistem ini menghendaki agar para narapidana pada awalnya ditempatkan terus-menerus dalam sel. Tetapi kemudian dipekerjakan bersama-sama. Pada tahap ke tahap narapidana diberikan

kapasitas di lembaga pemasyarakatan akan menyebabkan tendensi kerusuhan yang semakin besar.

Apa yang disimpulkan itu benar, buktinya Alcatraz sebagai penjara kelas berat dan super ketat dalam pengawasan tidak membuat penjahat yang lainnya kapok melakukan kejahatan. Semakin bertambah penghuni penjara, maka biaya operasionalnya pun membengkak. Akibatnya, Jaksa Agung AS Robert F. Kennedy terpaksa menutup penjara selamanya itu pada 21 Maret 1963. Alasannya, karena biaya operasionalnya jauh lebih mahal dibanding penjara federal lainnya. Untuk membiayai segala keperluan untuk 250 tahanan dan 60 pegawai dan keluarganya memakan banyak dolar Amerika Serikat yang harus dikeluarkan. □

AWG/dari berbagai sumber



Penjara Nusakambangan, Alcatraz-nya Indonesia

Ada yang menyebutkan, Penjara Nusakambangan adalah Alcatraz-nya Indonesia. Mungkin ada benarnya, karena Nusakambangan dan Alcatraz sama-sama ditemukan oleh pelaut Eropa. Dua pulau itu awalnya juga dirancang sebagai benteng. Penjara Alcatraz dan Nusakambangan sama-sama diperuntukan penjahat kelas berat. Bedanya, Alcatraz sudah ditutup, sedang Nusakambangan masih berfungsi.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ENTAH mengapa sejarah Penjara Alcatraz di Teluk San Fransisco, California, Amerika Serikat, mirip penjara di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Penghuninya, sama-sama narapidana kelas berat. Bila Pulau Alcatraz ditemukan dari hasil pelayaran oleh Pelaut Spanyol, Nusakambangan pun demikian.

Dalam *tirto.id*, 'Balada Pulau Penjara Nusakambangan: dari Amangkurat Hingga Teroris', diceritakan, pada pertengahan Abad XVI, kapal *Royal George* mendarat di timur pesisir Pangandaran. Berlabuhnya kapal berbendera Inggris tersebut membuat VOC yang merasa lebih dulu hadir di Jawa, Batavia, merasa terusik.

Untuk mencegah Inggris menguasai wilayah pesisir selatan hingga kelak bisa masuk ke Tanah Jawa, VOC yang didukung oleh pemerintah Belanda mengirimkan kapal-kapalnya ke sana. Pelayaran itu dipimpin oleh Paulus Paulusz. Paulusz sebenarnya bukanlah seorang awak kapal yang terlatih, namun ia seorang *kartografer*. Berbekal ilmu pemetaan itulah yang membuat dia bisa tiba di tempat tujuan.

Dalam pelayaran, Paulusz melihat ada suatu daratan yang bentuknya memanjang.

Daratan itu berada di antara wilayah Cilacap dan Pangandaran. Dari temuan itu, Paulusz merekomendasikan daratan itu cocok sebagai benteng pertahanan, tempat pengawasan, dan pelabuhan. Ketiga rekomendasi itu merupakan satu paket untuk VOC guna menguasai dan mengamankan otoritas pesisir selatan.

Rekomendasi itu diterima oleh VOC, namun saran dari Paulusz tidak segera dilakukan. Paling penting bagi VOC pada masa itu adalah mengklaim wilayah yang teraupung di Samudera Hindia itu sebagai otoritasnya. Klaim VOC atas pulau itu lebih kuat daripada Inggris.

Dalam perjalanan waktu, dengan semakin banyaknya pelaut Inggris berlayar ke belahan selatan (Australia dan Selandia Baru), serta selepas berakhirnya Perang Diponegoro, 1825-1830, membuat VOC menjalankan saran Paulusz, yakni membangun pulau yang bernama Nusakambangan pada 1836 sebagai benteng dan tempat pertahanan.

Untuk membangun tembok-tembok besar di pulau itu, VOC mendatangkan pekerja-pekerja dari daratan besar, Pulau Jawa. Ketika proyek berjalan, pada 1850 datanglah

wabah malaria di pulau itu. Wabah yang melanda membuat banyak pekerja terpapar hingga jatuh korban jiwa. Menghadapi serangan malaria tersebut, VOC tidak ingin proyek berhenti. Untuk mengatasi berkurangnya tenaga kerja maka didatangkanlah para narapidana sebagai gantinya.

Meski mereka menjadi pekerja, namun proses hukum yang menimpa tetap harus dijalani. Untuk menjalani proses hukum maka dibuatlah penjara bambu. Penjara sementara itu berada di Karang Bolong. Penjara bambu yang kapasitasnya mencapai 300 orang itu merupakan tempat tinggal sekaligus penjara bagi narapidana yang dipekerjakan di sana.

Peristiwa wabah malaria yang terjadi pada tahun 1850, kembali melanda pada 1862. Akibatnya, Nusakambangan dijadikan sebagai pulau yang tertutup, diisolasi, dengan tujuan memutus rantai penularan. Gelombang kedua wabah itu pastinya juga membuat korban jiwa. Pembangunan benteng pun terhenti.

Setelah dirasa aman dari wabah, awal Abad XX, pembangunan dilanjutkan. Selepas pembangunan selesai, rupanya ancaman kepada Belanda yang menguasai Jawa telah



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

berakhir. Pada masa itu, sepertinya bangsa-bangsa Eropa sudah mengkapling-kapling wilayah jajahan dan di antara mereka ada kesepakatan tidak saling mengganggu. Inggris sepertinya sudah puas menguasai Australia dan Selandia Baru, sehingga tidak lagi bernafsu merebut Jawa dari Belanda.

Benteng dan tempat pertahanan yang sudah dibangun oleh VOC yang selanjutnya dipegang pemerintah Belanda itu kurang berfungsi, sebab tidak ada lagi ancaman dari luar. Pemandangan narapidana ke Nusakambangan yang awalnya dipekerjakan di sana dan selanjutnya di sana sudah berdiri penjara bambu, membuat Belanda berpikir untuk menjadi Nusa-

kambangan sebagai penjara. Sebagai tindak lanjutnya, Belanda menetapkan Nusakambangan sebagai Poelaoe Boei (Pulau Bui). Bui artinya penjara. Keputusan itu ditetapkan pada tahun 1908.

Untuk menjadikan Nusakambangan sebagai Pulau Bui, Belanda dari waktu ke waktu terus membangun sel-sel. Dalam *jateng.suara.com*, 22 Juli 2021, diuraikan, pada 1910, dibangun Penjara Permisan. Penjara ini memiliki kapasitas 700 orang. Seperti kali pertama narapidana didatangkan di sana, narapidana yang ada pada tahun itu juga dipekerjakan, namun kali ini mereka dijadikan buruh di perkebunan karet.

Kejahatan yang ada masa itu bisa jadi

terus meningkat, terbukti dua tahun setelah Penjara Permisan dibangun, Belanda kembali membangun Penjara Karang Anyar dan Penjara Nirbaya. Pembangunan dua penjara sekaligus dilakukan pada tahun 1912. Masing-masing penjara mampu menampung 750 tahanan.

Selanjutnya, berturut-turut dibangun Penjara Batu pada 1924, Penjara Besi 1927, dan Penjara Gligier dan Penjara Karang Tengah pada 1928. Disebutkan, Belanda membangun bangunan penjara terakhir di Nusakambangan pada 1935. Penjara ini adalah Penjara Lumus Buntu.

Bila Alcatraz sudah ditutup oleh pemerintah Amerika Serikat, penjara di Nusakambangan dari kali pertama dibuka hingga saat ini masih difungsikan sebagai penjara. Bila di Alcatraz ada upaya pelarian diri, di tempat ini juga pernah terjadi.

Dalam *tirto.id* diceritakan, pada 1979, narapidana yang bernama Sastrowiyono berhasil lolos dari penjara. Perampok kejam itu lebih dulu harus melompati pagar setinggi 4 meter. Berhasil lolos dari tembok, ia mengarungi sungai di sisi utara pulau. Berhasil sampai di daratan Cilacap, selanjutnya Sastro berhasil sampai di kampung halamannya, Lampung. Pelarian yang dilakukan sia-sia, sebab dia berhasil ditangkap kembali.

Apa yang terjadi pada 1979 terulang pada 1982. Narapidana Johny Indo dan Bang Timong sebagai provokator bersama puluhan narapidana lainnya mengeroyok petugas. Mereka lolos dari bangunan penjara, namun sebelum keluar pulau di antara mereka ada yang ditangkap kembali, bahkan ada yang dihujani timah panas alias ditembak mati, dengan alasan tidak mau menyerahkan diri.

Dalam *Wikipedia*, mereka yang pernah di sana adalah, Johny Indo, Kusni Kasdut, Pramoeoya Ananta Toer, Tommy Soeharto, Bob Hasan, Amrozi, Imam Samudra, Mukhlas, Abu Bakar Ba'asyir, Jhon Kei, Umar Patek, Kelompok Bali Nine. Mereka memiliki kasus masing-masing dan terbilang kasus *extraordinary* alias kasus luar biasa. □

AWG/dari berbagai sumber





Kalisosok, Penjara Seram Tapi Enak

Penjara Kalisosok dibangun jauh lebih dahulu dibanding Benteng Alcatraz. Di Kalisosok pernah tinggal para pahlawan bangsa. Banyak cerita yang menyeramkan dari penjara itu, namun ada kesaksian tentang makanan yang enak dan kamar yang bersih dari tempat itu. Kalisosok sudah ditutup. Banyak keinginan agar penjara yang dibangun masa Daendels itu dijadikan cagar budaya dan wisata sejarah.



Purnawan Basundoro



Herman Willem Daendels

MESKI jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda terbilang singkat, dari 1808 hingga 1811, namun banyak catatan yang menorehkan nama Herman Willem Daendels dalam sejarah Indonesia. Salah satu yang dibangun Daendels di Jawa adalah Penjara Kalisosok. Penjara itu berada di Kota Surabaya, Jl. Kasuari No. 5, Krembangan. Dari berbagai sumber yang ada, penjara itu dibangun pada 1 September 1808. Tempat, di mana dibangun penjara itu, awalnya adalah loji, gedung besar, milik VOC, seluas 3,5 hektare. Bangunan ini berada di Surabaya Utara, di Jembatan Merah Plaza. Berdampingan dengan Jembatan Merah.

Dalam *tugujatim.id*, 9 Juli 2021, ahli sejarah Universitas Airlangga, Prof. Dr. Purnawan Basundoro, SS., MHum., menguraikan, sebelum Kalisosok dibangun sudah ada dua penjara, yakni *Binnenboei*, penjara dalam kota; dan *Buitenboei*, penjara luar kota. Kalisosok merupakan penjara dalam kota. "*Binnenboei* bertempat di lokasi yang kemudian dikembangkan menjadi Penjara Kalisosok", ujar Purnawan dalam media itu. Sedangkan *Buitenboei* berada di Pasar Besar. Dari dua penjara itu, pada 1845, *Buitenboei*

diusulkan untuk dibongkar, sedang *Binnenboei* diperbesar.

Usulan memperbesar penjara dalam kota disetujui pada 1848 dengan anggaran sebesar 60.000 Gulden. Pembangunan yang dimulai pada 1849 membuat tersedianya 12 *sell* (ruang tahanan) di tempat itu. Pada tahun 1850, penjara hasil renovasi itu sudah digunakan.

Himpunan informasi *Liputan6.com*, 29 Agustus 2019, menyebutkan, Kalisosok

merupakan penjara paling ditakuti oleh para penghuni, sebab ruangan yang ada sempit, gelap, dan pengap. Dinding antarsel dibuat sangat tebal. Satu ruangan hanya mampu menampung 20 orang, namun karena banyaknya narapidana membuat satu ruangan bisa dijepit 90 orang.

Di Kalisosok juga ada ruang bawah tanah. Ruang ini disebut sebagai tempat melakukan penyiksaan. Pada masa pendudukan Jepang bisa jadi hal demikian kerap di-



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

lakukan. Di tahun 1945, Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Saat itu di Surabaya masih banyak tentara Jepang, bahkan mereka masih menguasai Penjara Kalisosok. Orang-orang dan tentara Belanda pun banyak yang ditahan oleh Jepang, salah satunya Kolonel Huiyer. Kedatangan Sekutu di Surabaya tidak hanya ingin menguasai kembali Indonesia, namun mereka juga ingin membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan oleh Jepang. Untuk itulah, Sekutu menggempur Penjara Kalisosok. Operasi militer yang dilakukan Sekutu untuk merebut Kalisosok berhasil, orang-orang dan tentara Belanda berhasil dibebaskan.

Sempitnya ruangan diakui oleh Purnawan. Dia mengungkapkan, di Kalisosok ada ruang berukuran kecil, 2,5 meter x 5 meter, dibagi menjadi dua. Ruangan itu mungkin hanya muat dua-tiga orang saja. "Tak terbayangkan susahannya jika ruang tersebut diisi beberapa

orang", tuturnya.

Dari cerita-cerita yang berkembang di masyarakat terhadap Kalisosok, banyak yang menyebut bahwa penjara itu adalah penjara angker. Cerita lebih menyeramkan ketika dibumbui kisah-kisah mistis yang katanya pernah dialami oleh seseorang. Simak jawapos.com, 21 Maret 2021, yang menulis tentang Penjara Kalisosok dengan judul: *Sebelum Masuk Penjara Kalisosok Permisinya Dulu Sama Guno dan Grado*. Kedua nama itu diceritakan sebagai makhluk tak tampak yang sebagai penjaga bangunan penjara.

Ketika masyarakat menyebut penjara itu angker karena banyaknya cerita mistis, hal itu dibenarkan oleh Purnawan. Dia mengatakan, Kalisosok menyeramkan karena keketatan dalam penjagaan. Dia mengungkapkan, ada tahanan yang kakinya digelangi atau dipasang dengan bandul bola

besi yang berat. Hal demikian dilakukan agar tahanan itu tidak bisa melarikan diri.

Apa yang diungkapkan itu sama dengan penjara yang ada di Kantor Pemerintahan Hindia-Belanda (Batavia) yang sekarang menjadi Museum Jakarta. Di penjara ini, tahanan tidak hanya digelangi dengan bandul bola besi, namun juga harus berada dalam ruangan yang sempit dan atap yang pendek sehingga mereka tidak bisa berdiri.

Meski Kalisosok digambarkan demikian menyeramkan, namun Purnawan menyatakan, penjara ini merupakan tempat yang paling nyaman, fasilitasnya lengkap, dan makanannya tersedia dengan enak. Ada seorang tahanan pribumi mengatakan, selama mendekam di sana, dia diberi makanan yang enak. Kesaksian anggota militer Belanda yang ditahan juga menyebut kamar yang ada dan kebun yang selalu bersih, serta makanan yang enak. Hal demikian membuat suasana penjara menjai nyaman.

Penjara Kalisosok yang dibangun pada 1808 akhirnya ditutup oleh pemerintah pada tahun 2000-an. Mereka yang masih mendekam di tahun-tahun itu dipindahkan ke Lapas Medaeng atau Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Saat ini masih terjadi kesimpangsiuran soal kepemilikan lahan seluas 3,5 hektare itu. Akibatnya, bangunan menjadi tidak jelas mau dikemanakan dan mau diapakan. Banyak pihak ingin bangunan yang sudah mulai rapuh, runtuh, ditumbuhi semak belukar, dirusak tangan tidak bertanggungjawab itu dijadikan cagar budaya, tempat belajar sejarah, dan wisata kota. □

AWG/dari berbagai sumber



Penjara Kalisosok, Surabaya



Ujang Hamzah

Ketua RT 01 Desa Cibeber Jawa Barat

Penanganan Pandemi Harus Cepat

PANDEMI Covid-19 yang melanda Indonesia sudah banyak memakan korban rakyat Indonesia. Turunnya kondisi perekonomian rakyat, terutama rakyat kecil, sudah tampak nyata. Tapi, saya melihat pemerintah sudah sangat serius dalam penanganan pandemi ini.

Saya rasa sudah sangat baik usaha pemerintah itu. Upaya yang cepat, keras, dan terus-menerus untuk menekan laju penyebaran virus akan semakin meringankan beban rakyat, apalagi sampai tuntas menghentikan pandemi.

Saya berharap, berbarengan dengan program-program menghadapi pandemi, dalam jangka pendek juga mesti dilakukan berbagai program untuk meringankan beban masyarakat, seperti penyaluran bantuan baik langsung ataupun tidak langsung.

Saya melihat berbagai elemen masyarakat, terutama pejabat negara, banyak yang memperlihatkan kepeduliannya kepada rakyat. Banyak dari mereka yang turun langsung melihat kondisi rakyat lalu memberikan bantuan. Ini mesti diperbanyak dan diperluas lagi, kalau bisa ke daerah-daerah pelosok di berbagai wilayah Indonesia. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ibu Lasmi

Warga Desa Peuteuycondong Cianjur

Doa Bersama demi Keselamatan Bangsa



SEBAGAI rakyat kecil, saya hanya bisa menghaturkan terima kasih dan apresiasi sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang sudi turun langsung ke bawah, mengunjungi rakyat untuk memberikan bantuan dan dorongan semangat di masa pandemi ini.

Seperti yang dilakukan Pimpinan MPR, Bapak Syarifuddin Hasan, yang rela berkeliling kampung memberikan bantuan kepada kami yang sangat membutuhkan. Aspirasi saya adalah, mesti semakin banyak Bapak-Bapak di atas sana, terutama yang menjad wakil rakyat, agar gencar turun, membangkitkan kembali rakyatnya dari keterpurukan.

Kami akan memberikan doa yang terbaik untuk mereka. Saya harap juga ke depannya jika bisa jangan lagi terjadi pandemi seperti ini lagi. Kami berterima kasih sekali lagi kepada pemerintah yang sudah berusaha dan tetap akan berusaha agar rakyat terbebas dari pandemi. □

DER

KH. Ahmad Dahlan

Menyadarkan **Bangsanya** Sebagai *Kaum Terjajah*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PANDEMI Covid-19 yang mulai terdeteksi di Indonesia sejak awal tahun 2020 telah menyebabkan banyak kerugian. Pandemi telah menyebabkan terganggunya berbagai sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi dan pendidikan. Pandemi telah menyebabkan bertambah tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, dan terganggunya komunikasi sosial di masyarakat.

Tapi, di sisi lain, pandemi juga menyadarkan umat manusia bahwa pandemi adalah musuh bersama, dan harus dihadapi secara bersama-sama pula. Di masa pandemi tumbuh kembali semangat gotong-gotong di tengah masyarakat Indonesia. Semangat saling tolong-menolong ini ditunjukkan oleh warga masyarakat, baik secara perseorang maupun mengatasnama organisasi kemasyarakatan.

Salah satu organisasi keagamaan yang intens mengulurkan tangan membantu penanganan pandemi Covid-19 adalah Muhammadiyah. Sebanyak 83 dari 116 rumah sakit milik Muhammadiyah berpartisipasi aktif dalam penanganan pasien Covid-19 di Indonesia. Juga 75.000 relawan, baik tenaga kesehatan maupun kemanusiaan, turut ambil bagian dalam “perang” melawan virus korona.

Bayangkan, untuk mendukung penanganan

pandemi ini, organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ikut menggelontorkan dana lebih dari Rp 1 Triliun. Aksi kemanusiaan ini dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai pengejawantahan dari strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwa Islam, ‘amar ma’ruf nahi munkar’ dengan masyarakat sebagai medan perjuangannya.

Gerakan dakwah Islam, ‘amar ma’ruf nahi munkar’ ini memang telah melekat sebagai jati diri Muhammadiyah semenjak awal kelahirannya. Untuk menjaga marwah Muhammadiyah ini, KH. Ahmad Dahlan telah meninggalkan pesan yang sangat melegenda di kalangan warga Muhammadiyah. Pesan itu berbunyi: “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.

Siapa KH. Ahmad Dahlan yang waktu mudanya bernama Muhamad Darwis? Dia adalah putera keempat dari tujuh bersaudara, putera pasangan KH. Abu Bakar dan Nyai Abu Bakar. Lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868, dan meninggal di usia 54 tahun pada 23 Februari 1923. Sang Pembaharu—begitu KH. Ahmad Dahlan dijuluki—dimakamkan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelum mendirikan Muhammadiyah, 18 November 1912, Ahmad Dahlan ikut terlibat di berbagai pergerakan. Yaitu, Jam’iyatul

Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Ahmad Dahlan juga dikenal sebagai wirausahawan yang cukup berhasil. Ia ikut berdagang batik, profesi yang saat itu tumbuh subur seperti rumput di musim hujan.

Upaya Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah bukan tanpa sandung. Fitnah, tuduhan, dan hasutan datang bertubi-tubi. Ia dituduh sebagai kiai palsu yang merintis agama baru. Karena Ahmad Dahlan dekat dengan orang-orang Belanda, dan mengajar di OSVIA Magelang—sekolah khusus Belanda. Sang Kiai juga bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priyayi. Bahkan ada yang berusaha membunuhnya. Namun, ia tetap bergeming dan melanjutkan cita-cita perjuangan pembaruan Islam.

KH. Ahmad Dahlan adalah sosok yang memiliki pemikiran sangat maju. Di zamannya, dia sudah berkeinginan agar orang Islam memiliki wawasan luas. Ahmad Dahlan tidak menghendaki umat Islam terpaku pada literatur dari orang Islam sendiri. Bagi Ahmad Dahlan, untuk mencari kebenaran, orang tidak boleh merasa benar sendiri. Sehingga, orang harus membuka diri, berdialog dan berdiskusi dengan semua pihak, walau berbeda keyakinan sekalipun.



Di antara berbagai keteladanan yang telah ditunjukkan KH. Ahmad Dahlan, salah satunya telah menjadi kenangan yang masyhur di kalangan Muhammadiyah. Itu terjadi di sisa usianya, sebelum menghadap sang Khaliq. Saat itu kesehatan Ahmad Dahlan kian memburuk. Karena itu, dokter membatasi kunjungan para tamu. Untuk itu, sang dokter berinisiatif memasang tanda larangan bertamu, termasuk bagi para pengurus Muhammadiyah.

Tapi, berlawanan dengan anjuran dokter, sang Kyai justru memanggil masuk tamunya ke ruangan tempat istirahatnya. Di tempat itu, Ahmad Dahlan meminta progres amal Muhammadiyah yang telah dan sedang dikerjakan oleh pimpinan dan pengurus Muhammadiyah. Akibatnya, sang Kiai bukannya beristirahat, tapi malah aktif memikirkan amal soleh buat umat dan masyarakat tanpa henti.

Nyai Dahlan yang mendampingi sang Kiai tak kuasa melarang suaminya bersua dengan para tamu yang datang. Nyai Dahlan tak ingin menyakiti hati suaminya. Dia hanya menyampaikan isi hatinya seraya meneteskan air mata. "Kiai, bukankah dokter sudah memberi nasihat agar melepas fikiran-fikiran berat supaya penderitaan kiai berkurang. Cobalah memenuhi nasihat dokter, agar kesehatan Kiai cepat kembali," ujar Nyai Dahlan pada sang Kiai.

Mendengar pinta istrinya, KH. Ahmad Dahlan dibantu K.H. Ibrahim bangun dari tempat tidurnya. Raut wajahnya terlihat masam, pertanda marah. Sembari menunjuk ke arah istrinya, dengan nada pelan KH. Ahmad Dahlan berucap: "Sekarang iblis menjelma berwujud Nyai memecatku dari Islam- Muhammadiyah. Kemarin iblis sudah menjelma menjadi dokter, rupanya tidak puas lantas menjelma berupa Nyai. Oh, Nyai Iblis. Lupakah kau akan pelajaranku "Wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun?" (bertakwalah kamu kepada Allah dengan



sebenarnya takwa. Dan, janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam).

"Sekarang pergilah, jangan mendekat aku," kata Kiai Ahmad Dahlan pada Nyai Dahlan. Seketika itu Ibu Nyai menangis tersedu-sedu sambil minta maaf sebesar-besarnya. "Maaf atas perbuatanku yang dipandang salah itu," ungkap Nyai Dahlan sedih.

Pengakuan terhadap perjuangan Kiai Ahmad Dahlan bukan hanya datang dari kalangan umat Islam, terutama Muhammadiyah, melainkan juga datang dari pemerintah. Pada 1961, sesuai surat Keputusan Presiden No. 657, KH. Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Alasan peng-anugerahan gelar Pahlawan Nasional itu karena Ahmad Dahlan dianggap sebagai

pelopor kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah.

Selain itu, Muhammadiyah juga dinilai telah memurnikan ajaran Islam. Menuntun kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dengan dasar iman dan juga Islam. Muhammadiyah memelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan serta kemajuan bangsa. Sedangkan Aisyiyah (organisasi otonom Wanita Muhammadiyah) memelopori pendidikan bagi kaum perempuan, dan berfungsi sosial, seperti kaum pria.

Sikap dan pandangan hidup yang patut diteladani dari sosok Sang Pencerah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, adalah tetap sederhana lainnya masyarakat kebanyakan. □

MBO

Menerima Perwakilan PII Mesir

HNW Berpesan, Jadikan Tantangan Sebagai Peluang

Menurut Wakil Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., yang diperlukan generasi muda saat ini adalah agresivitas, mobilitas, totalitas, dan intelektualitas.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ORGANISASI Pelajar penting menikmati banyaknya tantangan. Tantangan bisa jadi vitamin bila dikelola agar menjadi peluang. Tantangan dan peluang justru akan membuat diri kita menjadi tangguh, unggulan dan tidak mudah menyerah. Dan, itulah yang dicontohkan oleh Bapak-Bapak Bangsa saat

mereka masih belajar atau kuliah di Luar Negeri, seperti di Belanda maupun Mesir.

Wakil Ketua MPR, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid MA (HNW) menyampaikan hal tersebut saat menerima Pimpinan Perwakilan Pelajar Islam Indonesia (PII) Mesir, di Lt. 9, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 13 September 2022.



Kehadiran Ketua Umum Perwakilan PII Mesir Fikri Haiqal Arif, yang didampingi oleh Sekretaris Umum Perwakilan PII Mesir Indri Raisa Hanum, dan Kadiv Kaderisasi Korpus PII Wati Mega Asyifa ke HNW untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan dinamika PII Mesir dalam melakukan aktivitasnya.

HNW mengungkapkan pengalaman dirinya ketika kuliah di Madinah, Arab Saudi. Saat itu, ia aktif dalam organisasi pelajar Indonesia, juga mengalami berbagai macam tantangan seperti yang dialami oleh PII Mesir. Kekurangan fasilitas, menurut HNW, tidak menjadi halangan dan beban bila kita berorganisasi dilandasi dengan kesukaan, kerelaan, pengabdian dan profesionalisme, dan peduli terhadap masa depan umat dan bangsa.

“Saat di Madinah, dalam beraktivitas organisasi, kami juga menghadapi banyak keterbatasan dan tantangan,” ungkap politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu. “Tapi itu tidak kami jadikan sebagai penghalang, malah jadi penyemangat. Sehingga di sana saya tetap bisa aktif berorganisasi, berdakwah, dan berolahraga tanpa melupakan sukses study juga,” tambahnya.

Menurut pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu yang diperlukan generasi muda saat ini adalah agresivitas, mobilitas, totalitas, dan intelektualitas. Kuliah di Mesir tentu harus terpatri keseriusan yang lebih, sebab tidak mudah dan murah kuliah di negeri Piramida itu. Segala kesulitan dan biaya yang tak murah harus menghasilkan pelajar Indonesia dengan kualitas yang lebih tinggi dari kalau belajar di dalam negeri.

Sesuai namanya, Kader PII harus mempunyai nilai lebih dibanding dengan kader organisasi pelajar dan mahasiswa lainnya. Kader organisasi ini harus menunjukkan

keislaman dan keintelektualannya dan keberpihakannya kepada bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana dicontohkan oleh beberapa tokoh.

Selanjutnya, HNW menceritakan, pada masa sebelum Indonesia merdeka sudah banyak pelajar dari Indonesia yang kuliah di Mesir. Mereka di sana juga mengalami banyak tantangan, namun mereka tetap bisa menjalankan keintelektualitasnya. Pelajar-pelajar Islam yang di Mesir pada saat perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia, seperti Kahar Muzakkar maupun

Saridi (Rasyidi) kerap menulis dan mempublikasikan perjuangan Bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Dan, lewat tulisan-tulisan itulah bangsa Arab, seperti Mesir dan lainnya, banyak tahu tentang perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. "Dari sinilah Mesir dan beberapa negara Arab menjadi yang pertama mendukung kemerdekaan Indonesia," ujar HNW.

Dukungan Mesir atas kemerdekaan Indonesia itulah yang membuat hubungan Indonesia-Mesir tercatat dalam sejarah

emas kedua negara. Peran-peran penting dan sukses sebagai organisator, aktivis pembela bangsa dan intelektual, seperti yang dicontohkan oleh para alumni Kairo Mesir, seperti Kahar Muzakkar, Rasyidi dll, penting dilanjutkan dan dihadirkan kembali dan terus menerus oleh Pelajar dan Mahasiswa Islam Indonesia di Mesir, dengan tetap mengantisipasi perkembangan zaman dengan generasi milenial, Z dan Alpha. "Itulah medan juang mereka sekarang dan saat yang akan datang," pungkasnya. □

Terima Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo

Yandri Susanto: Negara Harus Hadir Menyelesaikan Masalah Ganti Rugi

Hampir 17 tahun masalah ganti rugi kepada pengusaha korban lumpur Lapindo belum terselesaikan. Selasa (27/9/2022), para pengusaha tergabung dalam Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo mengadu ke MPR. Mereka diterima Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PULUHAN pengusaha tergabung dalam Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo pada Selasa, 27 September 2022, mendatangi Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Kedatangan mereka dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ke gedung wakil rakyat itu untuk mengadukan nasibnya. Bencana luapan lumpur yang terjadi sejak 26 Mei 2006

yang telah menenggelamkan tempat usaha, pabrik, membuat mereka kehilangan aset dan usaha. Hingga saat ini mereka belum menerima ganti rugi.

Di MPR, para pengusaha korban lumpur Lapindo tersebut diterima oleh Wakil Ketua MPR, H. Yandri Susanto, S.Pt., di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Lt.9, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, tersebut. Selama hampir

satu jam, mereka mencurahkan segala perasaan, keluhan, dan derita akibat dari bencana tersebut. Mereka ingin agar kerugian yang telah dialami diberi ganti rugi dan dibayar sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Yandri Susanto mengatakan, para pengusaha merupakan orang yang telah banyak memberi kontribusi penting bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Mereka



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

membayar pajak, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan efek-efek ekonomi di sekitar pabrik. Bencana luapan lumpur Lapindo, menurutnya, bukan keinginan semua.

Terkait masalah penyelesaian ganti rugi, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mendengar ada pihak-pihak yang sudah menerima serta terselesaikan, namun dari kelompok pengusaha masih belum tuntas. “Negara harus melihat masalah ini, siapapun yang terdampak, semua harus diselesaikan, termasuk dari kalangan pengusaha”, ujarnya.

Alumni Universitas Bengkulu itu meminta

kepada Presiden Joko Widodo atau pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. “Hampir 17 tahun masalah ganti rugi kepada pengusaha belum selesai”, ucapnya. Ia berharap, para pengusaha berkirir surat resmi kepada Presiden. “Saya harap Presiden menerima mereka,” tuturnya. Dia menyebut para pengusaha itu sebagai warga negara yang baik. Bila Presiden sudi menerima para pengusaha korban lumpur Lapindo, Yandri Susanto yakin akan ada solusi terbaik.

Bila masalah selesai, isu ganti rugi lumpur Lapindo yang selama ini berlarut-larut akan

tuntas. Ia heran mengapa ganti rugi yang dibayarkan tidak menyeluruh, buktinya kepada pengusaha belum dibayarkan. Pemerintah disebut bisa menggunakan banyak skema untuk membayar ganti rugi kepada pengusaha, apakah dari APBN atau dari post anggaran lainnya.

“Saya kira pemerintah punya skema”, ungkapnya. Bila pemerintah telah membayar ganti rugi maka aset-aset tersebut selanjutnya menjadi milik pemerintah, menjadi sumber kekayaan negara. Jadi tidak ada ruginya negara hadir untuk menyelesaikan tagihan yang jumlahnya kurang lebih mencapai Rp 800 miliar.

Bila masalah ini selesai, Yandri Susanto, menyebut kerja Presiden Joko Widodo yang kurang lebih tinggal 2 tahun lagi akan berakhir dengan paripurna. “Jangan sampai dua kali periode masa jabatan Joko Widodo dan berganti ke Presiden yang baru, masalah lumpur Lapindo belum selesai”, tegasnya. Dia memohon kepada pemerintah agar memerhatikan nasib para pengusaha korban lumpur Lapindo. “Mereka sudah menyampaikan haknya kepada berbagai pihak”, katanya. Untuk itu dirinya kembali berharap agar Presiden sudi menerima agar para pengusaha menyampaikan persoalan sesungguhnya. □



Agar Kemenag Percepat Realisasi Penyalurannya

Wakil Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., meminta agar Dana Abadi Pesantren segera disalurkan, karena itu adalah amanat umat dan konstituen.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., kembali mendorong Kemenag segera merealisasikan penyaluran dana abadi pesantren untuk program pengembangan SDM pesantren, baik untuk para santri maupun kiai. HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, berharap, distribusi dana abadi pesantren itu harus dilakukan secara amanah, adil, merata. Dan tersosialisasikan dengan baik juknis serta juklaknya sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari.

“Di rapat Panja Pendidikan Keagamaan antara Komisi VIII DPR-RI dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama kemarin, saya kembali mendorong di-realisasikannya keadilan anggaran dan kebijakan antara Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, baik yang terkait dengan fungsi pendidikan maupun keagamaan. Termasuk dalam hal ini realisasi dana abadi pesantren tahun 2022 agar segera didistribusikan dalam bentuk program pengembangan SDM Pesantren, baik santri maupun kiai,” ujar Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Hidayat yang juga Anggota Panja Pendidikan Keagamaan Komisi VIII DPR-RI

menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sudah menandatangani Perpres 82/2021 tentang Pendanaan Pesantren, juga Perpres 111/2021 tentang Dana Abadi Pendidikan. Perpres itu secara jelas mengamanatkan afirmasi anggaran untuk pesantren melalui Dana Abadi. Untuk itu, semestinya Kemenag segera memaksimalkan usaha agar Dana Abadi Pesantren bisa segera diwujudkan.

Karena itu, HNW mendorong Kemenag melalui Dirjen Pendis memperjuangkan realisasi penyaluran Dana Abadi Pesantren itu dengan menyusun rencana anggaran tahunan terkait alokasi Dana Abadi Pesantren, sehingga pembagian dan pendistribusiannya di LPDP semakin transparan, profesional, amanah, dan mendapatkan prioritas.

“Dana Abadi Pesantren agar segera disalurkan, karena itu adalah amanat umat dan konstituen, juga mendesak perlu dilakukannya kaderisasi ulama karena banyaknya ulama yang wafat akibat Covid-19,” sambungnya.

Selain soal Dana Abadi Pesantren, Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini juga mendukung kenaikan struktur organisasi Direktorat Pesantren di Kementerian Agama menjadi Direktorat Jenderal. Agar program afirmasi

dan keberpihakan negara bagi pesantren dengan segala kekhasan, peluang dan tantangannya bisa dilakukan dengan semakin amanah, profesional, dan kontribusi besar untuk laksanakan amanat UU Pesantren secara lebih meningkat.

Selain itu, HNW juga mendukung adanya program sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, lantaran banyak masyarakat pesantren yang belum memahami atau bahkan mengetahui terkait UU tersebut.

“Kami di PKS akan terus mendorong keberpihakan pemerintah melalui Kementerian Agama untuk pesantren dan peningkatan SDM Pesantren, baik santri, kiai, maupun sarana dan prasarana di lingkungan pesantren khususnya dan pendidikan Islam umumnya,” kata HNW lebih lanjut, “Karenanya, kami di FPKS DPR-RI, juga mendukung pendirian khususnya MAN unggulan seperti MAN Insan Cendikia di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Dan, umumnya pendirian Madrasah Negeri dari seluruh jenjang pendidikan secara proporsional di seluruh Indonesia. Agar kualitas pendidikan Islam baik melalui pesantren maupun madrasah semakin unggul, berkualitas dan dapat berkontribusi untuk hadirnya Islam Moderat, sebagai kontribusi hadirkan kemajuan umat, bangsa dan negara Indonesia.”

Dalam Rapat Panja yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, M. Ali Ramdhani, menerima dan menyepakati usulan tersebut serta langsung memerintahkan Direktur Pesantren dan Madrasah untuk segera mengeksekusi program-program yang berkaitan.

“Kami siap dan sedang menyiapkan teknisnya terkait penyaluran program beasiswa dan afirmasi bagi santri, Ustad, dan kiai yang bersumber dari hasil pengelolaan Dana Abadi Pesantren. Kami juga sepakat terkait pendirian MAN IC di setiap provinsi, serta upaya peningkatan kualitas dan kuantitas madrasah negeri maupun swasta,” ujar Ali. □

Terima Duta Besar Rusia

Bamsoet Buka Pintu Lebar Kedatangan Ketua Parlemen Rusia

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan, hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia telah terjalin baik sejak 1956. Rusia telah menjadi salah satu mitra penting bagi Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyambut baik keinginan Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Rusia Mrs. V.I. Matvienko untuk bertemu dirinya secara resmi selaku pimpinan MPR RI, Kamis, 6 Oktober 2022, di Gedung MPR RI. Bersamaan dengan kunjungan Mrs. V.I. Matvienko ke Indonesia untuk menghadiri Parliamentary Speaker's Summit (P20) yang dilaksanakan pada 5-7 Oktober 2022, sebagai bagian dari kepemimpinan Indonesia dalam G-20.

"Pertemuan tersebut sangat penting untuk membahas berbagai isu penting yang sedang terjadi di dunia, termasuk peningkatan hubungan Indonesia dengan Rusia. Antara lain, mendorong perdamaian Rusia - Ukraina, peningkatan hubungan diplomatik antarparlemen Rusia - Indonesia, peningkatan kerjasama Indonesia - Rusia di sektor investasi, perdagangan, pendidikan, pariwisata, hingga people to people contact antarwarga kedua negara," ujar Bamsoet usai menerima informal Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Mrs. Lyudmila Georgievna Vorobieva, di Kediaman Dinas

Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (26/9/22).

Turut hadir antara lain Anggota MPR RI/ DPR RI Robert Kardinal dan Wakil Menteri Pertanian RI Harvick Hasnul Qolbi.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, terkait situasi ketegangan antara Rusia dan Ukraina, sikap Indonesia tetap mengedepankan politik bebas aktif. Misalnya, ditunjukkan dengan menjadi salah satu dari 141 negara yang mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meminta Rusia menghentikan serangannya ke Ukraina. Hal ini bukan berarti Indonesia memihak kepada Ukraina, melainkan atas dasar kemanusiaan dan menolak perang. Walaupun mendukung resolusi, sikap Indonesia tetap mendorong adanya penegakan HAM di wilayah konflik dan penyelesaian melalui dialog dan diplomasi.

"Dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB tanggal 7 April 2022 mengenai pembekuan Rusia dari keanggotaan Dewan HAM, delegasi Indonesia memutuskan abstain. Pertimbangannya, Majelis Umum PBB perlu bersikap hati-hati dan tidak mencabut hak sahnya anggotanya sebelum memiliki seluruh

fakta yang ada. Majelis Umum PBB tidak boleh menciptakan preseden negatif yang dapat menjatuhkan kredibilitasnya sebagai badan yang terhormat," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, penyelesaian ketegangan Rusia - Ukraina membutuhkan dukungan dari negara-negara Barat, Eropa, bahkan Asia. Antara lain, seperti Amerika Serikat, Inggris, Turki, bahkan Indonesia. Karena itu, berbagai negara dunia lainnya juga harus turut membantu dan mendorong penyelesaian ketegangan yang terjadi antara Rusia - Ukraina. Sekaligus mewaspadaikan jangan sampai ada pihak-pihak yang memperkeruhnya.

"Berbagai proses menuju perdamaian sebenarnya telah dilakukan. Misalnya, Turki telah berperan lima kali menjadi tuan rumah perundingan Rusia - Ukraina. Bahkan Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian terpisah dengan Turki dan PBB untuk membuka jalan bagi Ukraina yang merupakan salah satu lumbung pangan utama dunia, untuk mengekspor 22 juta ton biji-bijian dan barang-barang pertanian lainnya seperti Gandum yang tertahan di pelabuhan Laut Hitam karena serangan Rusia. Kesepakatan itu juga memungkinkan Rusia mengekspor biji-bijian dan pupuk," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menambahkan, hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia telah terjalin baik sejak 1956. Rusia telah menjadi salah satu mitra penting bagi Indonesia. Sebagai Ketua MPR RI, Bamsoet setidaknya telah tiga kali menerima Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Mrs. Lyudmila Georgievna Vorobieva, yakni pada 26 November 2019, 22 Maret 2021, dan pada hari ini 26 September 2022. Di tingkat pemerintahan, selama tahun 2000-2020 tercatat 13 kali pertemuan bilateral antara

Presiden Joko Widodo dan Presiden Putin, 4 kali diantaranya dilakukan saat kunjungan, dan 9 kali lainnya di sela-sela konferensi internasional.

“Nilai investasi langsung Rusia di Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebesar USD 4,6 juta dengan 202 proyek, yang sebagian

besar di sektor industri kimia dan farmasi. Neraca perdagangan kedua negara tahun 2020 mampu mencatat surplus di pihak Indonesia sebesar USD 16 juta, dengan total volume perdagangan sebesar USD 1,93 miliar. Nilai ini terbilang kecil dibanding potensi yang ada. Mengingat Rusia adalah kekuatan

ekonomi nomor 12 dunia, sementara Indonesia nomor 16. Karena itu, masih terbuka berbagai peluang untuk meningkatkan neraca perdagangan kedua negara, misalnya dari sektor pertanian seperti palm oil, karet, kakao, gandum, hingga daging,” pungkas Bamsuet. □

Peningkatan Pengelolaan dan Jejaring Desa Wisata

Bangun Kolaborasi untuk Promosikan Potensi Wisata di Desa

Kemunculan desa wisata mampu menjadi salah satu ruang pemulihan untuk kembali menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kemampuan adaptif dan dinamis menuju kebangkitan ekonomi yang berkelanjutan.

BANGUN kolaborasi untuk mempromosikan setiap potensi daerah dan desa dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Pelestarian setiap destinasi wisata patut ditingkatkan untuk menarik semakin banyak pengunjung.

“Desa wisata dan kampung tematik merupakan solusi potensial bagi pemulihan ekonomi masyarakat pascapandemi. Perpaduan desa terbaik dengan pariwisata dapat menciptakan peluang sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka secara virtual Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Jejaring Desa Wisata yang digelar Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa (13/9).

Sosialisasi tersebut dihadiri Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), sejumlah kepala desa, pegiat pariwisata dan pengelola hotel BUMDES se Kabupaten Kudus, sebagai peserta.

Menurut Lestari, desa bisa menjadi potensi tujuan wisata melalui kekayaan yang dimiliki meliputi bentangan alam, keanekaragaman hayati dan budaya, aktivitas lokal dan adat istiadat, nilai moral termasuk gastronomi.

Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai, desa wisata merupakan pendorong yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pemberdayaan dan menggeliatnya ekonomi lokal.

Karena itu, tegas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, upaya membangun jejaring desa wisata harus menjadi gerak perubahan yang diinisiasi oleh masyarakat untuk berkembang, maju dan mandiri melalui wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata religi dan wisata buatan. Sehingga, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, pengembangan tata kelola desa wisata mesti dimulai dari kemauan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, tegas Rerie, sosialisasi pengelolaan desa wisata dan kawasan-kawasan wisata harus ditempatkan dalam koridor pembelajaran aktif dan peningkatan

keaktivitas. Dengan pembelajaran, tambahnya, memungkinkan setiap pelaku wisata dan pengembang desa wisata menemukan cara-cara efektif untuk mengelola setiap potensi desa melalui berbagai inovasi.

Menurut Rerie, keragaman budaya dan kekayaan alam di Indonesia memungkinkan terwujudnya inovasi pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Sehingga, tegasnya, kemunculan desa wisata mampu menjadi salah satu ruang pemulihan untuk kembali menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kemampuan adaptif dan dinamis menuju kebangkitan ekonomi yang berkelanjutan. □

Terima Wakil Ketua Parlemen Ukraina

Bamsoet Dorong Penghentian Perang Rusia - Ukraina Secara Damai

Sebagai negara menganut prinsip politik luar negeri Bebas Aktif, Indonesia tidak pernah memihak salah satu pihak yang bertikai, melainkan selalu berpihak kepada terwujudnya perdamaian dunia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyambut baik tawaran Wakil Ketua Parlemen Ukraina Mrs Olena Kondratiuk, agar Indonesia terlibat langsung dalam membangun kembali Ukraina pasca konflik militer dengan Rusia. Antara lain, melalui investasi pembangunan infrastruktur, bantuan kemanusiaan, hingga diplomasi multilateral dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk bersama-sama membantu pemulihan Ukraina.

Komitmen Indonesia dalam membantu memulihkan kehidupan warga Ukraina tersebut sebelumnya juga telah diperlihatkan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Ukraina pada Juni 2022, dengan memberikan bantuan kemanusiaan untuk warga sipil di Ukraina, berupa hibah uang tunai melalui Palang Merah Ukraina sebesar USD 250.000, obat-obatan, dan alat kesehatan, serta berkomitmen membantu proyek rekonstruksi pasca berakhirnya konflik militer Rusia - Ukraina.

"Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri Bebas Aktif, Indonesia tidak pernah memihak salah satu pihak yang

bertikai, melainkan selalu berpihak kepada terwujudnya perdamaian dunia. Terlebih Ukraina dan Rusia merupakan dua negara sahabat yang sama-sama memiliki hubungan bilateral sangat baik bagi Indonesia.

Karena itu, terhadap konflik militer antara Rusia dan Ukraina, sebagai sahabat Indonesia selalu menyerukan agar dapat segera dihentikan, dengan mengutamakan penyelesaian secara damai melalui negosiasi-diplomasi. Karena, konflik militer ini bukan hanya merugikan Ukraina dan Rusia saja, melainkan juga merugikan warga negara dunia lainnya," ujar Bamsoet usai menerima Wakil Ketua Parlemen Ukraina Mrs Olena Kondratiuk, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Kompleks MPR RI, Jakarta, Rabu (5/10/22).

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid dan Fadel Muhammad, Penasihat Diplomatik Wakil Ketua Parlemen Ukraina Ms. Kateryna Shydenko, serta Anggota Parlemen Ukraina sekaligus Ketua Komisi Kebijakan Luar Negeri dan Kerjasama Antar-Parlemen Mr. Oleksandr Merezhko, dan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Mr. Vasyi Hamianin.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan

Keamanan ini menjelaskan, terhadap hasil referendum di empat daerah Ukraina, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengeluarkan empat pokok pandangan. Pertama, setiap negara harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, sesuai prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua, Indonesia secara konsisten menjunjung tinggi dan menghormati prinsip tersebut.

"Ketiga, prinsip ini juga berlaku terhadap referendum empat wilayah Ukraina yang dinilai melanggar prinsip Piagam PBB dan hukum internasional. Keempat, Referendum tersebut justru semakin menyulitkan penyelesaian konflik melalui perundingan dan mengakibatkan perang semakin berkepanjangan yang akan merugikan semua pihak," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Indonesia telah mengambil berbagai langkah diplomasi internasional secara multilateral dalam membantu penyelesaian konflik militer Rusia - Ukraina. Antara lain, mendukung Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 2 Maret 2022, 'Aggression Against Ukraine', dan mendukung Resolusi Dewan HAM PBB 4 Maret 2022 'Situation of Human Rights in Ukraine Stemming from the Russian Aggression'.

"Indonesia juga mendukung Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 24 Maret 2022, 'Humanitarian Consequences of the Aggression Against Ukraine', dan abstain atas Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 7 April 2022 terkait penangguhan keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB. Berbagai langkah tersebut menegaskan sikap Indonesia yang konsisten mendukung penegakan hukum internasional dan Piagam PBB, khususnya mengenai kedaulatan dan keutuhan integritas teritorial suatu negara," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menambahkan,

penghentian konflik militer Rusia - Ukraina bukan hanya akan menyelamatkan anak-anak dan perempuan yang kini menjadi pengungsi, melainkan juga akan menyelamatkan perekonomian dunia yang kini dihadapkan pada resesi. Mengingat kedua negara merupakan pemain penting dalam berbagai kegiatan perekonomian dunia. Misalnya, Ukraina sebagai lumbung gandum dan minyak bunga matahari, penghasil sumber daya mineral, industri besi

logam, bahan kimia, mesin, peralatan industri, transportasi, serta produk pertanian dan makanan, serta sebagai salah satu negara dengan industri IT terkemuka di Eropa Tengah dan Timur, yang mengedepankan tenaga IT profesional dan perusahaan berbasis layanan IT.

“Selain menyebabkan krisis ekonomi, konflik militer Rusia - Ukraina juga telah menyebabkan krisis kemanusiaan. Dari sekitar 44 juta jiwa populasi penduduk

Ukraina, sebanyak 13 juta jiwa telah menjadi pengungsi, dengan 87 persennya merupakan anak-anak dan perempuan. Sedangkan data dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM/OHCHR, per 19 September melaporkan jumlah korban sipil mencapai 14.532 orang, di mana 5.916 orang korban jiwa dan 8.616 orang korban terluka. Korban jiwa terdiri dari 156 anak perempuan, 188 anak laki-laki, serta 35 anak-anak dan 1.649 orang dewasa,” pungkas Bamsuet. □

Pengembangan Seni Tari

Berpotensi Bantu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kehidupan masyarakat Indonesia erat dengan tradisi, sehingga tidak mengherankan jika tradisi atau upacara tertentu menjadi representasi diri suatu kelompok masyarakat.

EKONOMI kreatif salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Para pemuda pekerja seni dan para pelajar yang akan terjun dalam dunia seni, yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif, harus mempersiapkan diri dengan mengasah kemampuan dan keterampilan.

“Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif membuka ruang kreasi bagi setiap warga negara untuk kembali beraktivitas dengan tetap menyesuaikan diri secara disiplin lewat penerapan protokol kesehatan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka BISA Fest: Pesona Kreasi Tari secara daring di Taman Krida Wisata Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Ahad (18/9).

Hadir dalam acara tersebut sejumlah anggota DPRD Fraksi Nasdem Kab.Kudus, Mutrikah, S.H., (Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus), Joko Suharbowo (Subkoordinator Event Wilayah 1A/Sumatera dan Kalimantan), sejumlah pejabat dari Direktorat Event Daerah, Kemenparekraf dan pegiat seni tari Kabupaten Kudus. Pada kesempatan itu, Agung Ciptaningtyas (Seniman dan Budayawan) hadir sebagai narasumber.

Setidaknya, tambah Lestari, setiap pelaku usaha maupun kelompok telah memahami dengan benar terkait kebijakan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability) yang digalakkan oleh



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kemenparekraf.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mengakui, kehidupan masyarakat Indonesia erat dengan tradisi. Sehingga, tambahnya, tidak mengherankan jika tradisi atau upacara tertentu menjadi representasi diri suatu kelompok masyarakat.

Lewat beragam cara, termasuk melalui seni, ujar Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, tradisi dilestarikan dan salah satu tradisi masyarakat yang terus dijaga salah satunya adalah seni tari.

Di saat bangsa ini berusaha untuk bangkit dari berbagai krisis pasca pandemi, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, seni tari yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif berpotensi dikembangkan untuk mengakselerasi pertumbuhan perekonomian nasional.

Apalagi, ungkap Rerie, data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada 2021 menyebutkan sektor UMKM dan ekonomi kreatif menyumbang PDB Indonesia sebesar 61%.

Talenta-talenta muda dalam seni tari dari beragam daerah, ujar Rerie, harus mendapat perhatian untuk pengembangan diri mereka dalam berkesenian. Sehingga, tambahnya, keterampilan yang dimilikinya dalam bidang seni tari misalnya bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari sarana hiburan dan pelestarian budaya atau lapangan kerja.

Dengan berbagai pelatihan dan pendidikan seni yang direalisasikan lewat kolaborasi berbagai pihak, Rerie yakin bangsa Indonesia mampu membangun sektor seni dan budaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. □

Amandemen Terbatas Hadirkan PPHN

Bamsoet Kecil Kemungkinan Ada Penumpang Gelap



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan, keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sangatlah mendasar dan mendesak. PPHN diperlukan sebagai bintang panduan arah dan strategi pembangunan nasional. Selain untuk memastikan bahwa proses pembangunan nasional merupakan manifestasi dan implementasi dari ideologi negara dan falsafah bangsa, yaitu Pancasila.

Bamsoet menegaskan, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan atas rencana amandemen terbatas untuk menghadirkan kembali PPHN. “Kecil kemungkinan ada penumpang gelap untuk mengubah Pasal 7 terkait perodesasi, karena mekanismenya diatur ketat di dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Apalagi semua partai politik saat ini telah siap-siap running di 2024,” ungkap Bamsoet saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Universitas Pendidikan Nasional Bali secara luring dan daring, Jumat (17/9/21).

Turut serta sebagai pembicara Guru Besar bidang Hukum Universitas Pendidikan Nasional I Nyoman Budiana. Acara dihadiri oleh para pimpinan Universitas Pendidikan Nasional, antara lain Rektor Nyoman Sri Subawa, Wakil Rektor bidang Pengembangan Akademik Ni Wayan Widhiasthini, Wakil Rektor bidang SDM & Keuangan A.A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan I Made Wiryra Darma, serta civitas akademika Universitas Pendidikan Nasional.

Lebih lanjut Bamsoet menyatakan, keberadaan PPHN

mengisyaratkan pesan penting bahwa pembangunan nasional diselenggarakan dalam kerangka menjaga dan memperkuat ideologi negara agar tetap menjadi karakter dan jiwa bangsa. “Ke depan berbagai tantangan kebangsaan akan semakin kompleks dan dinamis sehingga perlu dibangun benteng ideologi dan penguatan karakter bangsa melalui pembangunan wawasan kebangsaan,” ujar Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR RI ini memaparkan, pasca perubahan UUD 1945, fungsi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025. Selanjutnya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) disusun berlandaskan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden terpilih.

“Dalam implementasinya, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kecenderungan yang bersifat eksekutif sentris dan menyisakan beragam potensi persoalan. Antara lain implementasi RPJPN secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan, serta ketidakselarasan antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah. Akibatnya, berpotensi menghasilkan program pembangunan yang tidak saling mendukung, bahkan mungkin saling menegasikan



satu sama lain,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, dengan adanya ketidakpastian kesinambungan kebijakan dan program pembangunan nasional pada akhirnya mendorong lahirnya wacana publik yang membawa arus balik kesadaran untuk menghidupkan kembali haluan negara ‘model GBHN’ atau hadirnya PPHN.

“Gagasan untuk mereformulasikan

sistem perencanaan pembangunan nasional telah direkomendasikan oleh MPR periode 2009-2014. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh MPR periode 2014-2019 dengan memunculkan gagasan melakukan perubahan terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945 guna mengembalikan wewenang MPR menetapkan pedoman pembangunan nasional atau PPHN,” urai Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Per-

tahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menandakan, untuk menghadirkan PPHN diperlukan amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. Perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945 hanya akan dilakukan pada dua pasal, yaitu Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, serta Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh Presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN.

“Secara substansi, PPHN hanya akan memuat kebijakan strategis yang akan menjadi rujukan atau arahan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah. PPHN harus dapat menggambarkan wajah Indonesia untuk 25 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun yang akan datang, mampu menjawab kebutuhan Indonesia di era milenial, serta mampu memberikan arahan untuk menjawab berbagai tantangan dan dinamika pembangunan, baik bersifat domestik maupun global,” pungkas Bamsoet. □

Talkshow 'Menuju Amandemen UUD NRI 1945'

Amandemen Terbatas UUD NRI 1945 Hanya Bahas PPHN



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, menuturkan, saat ini bangsa Indonesia sedang menginjakkan kaki pada fase akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Karenanya, di tahun 2021-2022 merupakan waktu yang ideal untuk meletakkan dasar legalitas yang tepat dalam menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai haluan negara dalam program pembangunan jangka panjang.

Urgensi menghadirkan PPHN dicetuskan oleh MPR RI periode 2009-2014. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 yang mengamanatkan dalam rangka mewujudkan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah, maka perlu dirumuskan kembali sistem perencanaan pembangunan yang tepat. Berorientasi pada demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

"Dilanjutkan MPR periode 2014-2019 melalui Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 merekomendasikan kepada MPR Periode

2019-2024 untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum PPHN. Termasuk membangun konsensus politik dalam penetapan bentuk hukumnya," ujar Bamsuet dalam talkshow 'Menuju Amandemen UUD NRI Tahun 1945' yang diselenggarakan *Tribun Network Kompas Gramedia*, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Rabu (22/9/21).

Turut menjadi narasumber, antara lain Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan, Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, serta Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Prof. Dr. Arif Satria.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum dan Keamanan DPR RI ini menjelaskan, menindaklanjuti berbagai rekomendasi MPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019, MPR RI periode 2019-2024 melalui Badan Pengkajian MPR sedang menyelesaikan rancangan PPHN beserta naskah akademiknya. Dari kajian Badan Pengkajian MPR RI yang disampaikan kepada Pimpinan MPR RI pada 18 Januari 2021,

bentuk hukum yang ideal terhadap PPHN adalah melalui Ketetapan MPR RI. Bukan melalui undang-undang yang bisa dibatalkan oleh Perppu, serta bukan dimasukkan secara langsung dalam konstitusi.

"Untuk menghadirkan PPHN melalui Ketetapan MPR terlebih dahulu harus dilakukan amandemen terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945. Amandemen terbatas hanya menambahkan satu ayat di pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 terkait kewenangan MPR menetapkan PPHN dan Pasal 23 tentang Persetujuan RUU APBN oleh DPR yang harus merujuk garis-garis kebijakan PPHN. Ini pun perlu dukungan seluruh partai politik, satu saja tidak setuju, amandemen sulit dilakukan," jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, jika seluruh partai politik sepakat terhadap pentingnya PPHN serta bentuk hukumnya melalui Ketetapan MPR maka diharapkan proses amandemen selesai di tahun 2022. Dilanjutkan penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait PPHN pada 2023, dan pada 2024 nanti, calon presiden dan calon wakil presiden dapat menetapkan visi dan misi sesuai dengan PPHN.

"Amandemen konstitusi tersebut tidak akan menyasar hal lain di luar PPHN. Misalnya menambah perodesasi jabatan kepresidenan menjadi tiga periode, ataupun memperpanjang beberapa tahun masa jabatan presiden. Mengingat tata cara amandemen konstitusi telah diatur pada Pasal 37 UUD NRI 1945, dan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI di pasal 101 sampai dengan Pasal 109," terang Bamsuet.

Senada dengan Bamsuet, Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Prof. Dr. Arif Satria menegaskan, membangun bangsa tidak bisa hanya berdimensi 5 tahunan. Namun, memerlukan perencanaan



jangka panjang yang terukur, obyektif, dan implementatif. Sebagaimana Tiongkok yang mampu memiliki visi jangka panjang, dan kemudian diterjemahkan ke dalam proyek tahunan yang sistematis. Masih menyambung terus, meski kepemimpinan politik berganti secara periodik.

“Tidak mungkin Tiongkok membangun Great Wall sepanjang 21 ribu kilometer hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Tidak mungkin juga Great Wall dibangun hanya dalam satu rezim kepemimpinan politik. Ternyata, butuh

kurang lebih 1.800 tahun untuk bisa menyelesaikan Great Wall yang bersejarah. Kini Tiongkok kembali hadir dengan gagasan besar tentang Blue Economy Valley di Qingdao, sebuah proyek raksasa untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa Tiongkok adalah sentral ekonomi kelautan masa depan,” tegas Arif Satria.

Arif Satria menambahkan, kondisi Singapura dan Indonesia di tahun 1960-an hampir sama. Kini kondisi Singapura berubah jauh lebih maju karena mempunyai visi besar yang di-

wujudkan melalui langkah-langkah strategis, sistematis, dan berkesinambungan. Singapura telah menjadi pusat pelabuhan terbesar kedua di dunia setelah Shanghai. Singapura juga telah menjadi pusat perdagangan dunia.

“Kita tentu ingin Indonesia menjadi bangsa besar. Proses menuju bangsa besar tidak sebentar. Diperlukan usaha dan perjuangan yang besar. Upaya utamanya adalah proses perencanaan jangka panjang yang matang, terukur, dan berkesinambungan,” pungkas Arif Satria. □



Yayasan Al Barokah Jayapura

Tidak Ada Agenda Perpanjangan Masa Jabatan Presiden



WAKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., menegaskan, salah satu dari Empat Pilar yang disosialisasikan MPR adalah UUD NRI Tahun 1945. Karena itu, seharusnya MPR jadi teladan dalam memegang teguh pelaksanaan ketentuan Konstitusi. Dan, menjalankan amanat reformasi, termasuk yang terkait dengan pembatasan masa jabatan Presiden. Belakangan, masa jabatan Presiden ini banyak dipolemikkan oleh pihak-pihak dari luar MPR.

Terkait amandemen UUD NRI Tahun 1945, ada dua isu yang dibicarakan publik. Yaitu, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Semua itu, menurut Hidayat, penting untuk didudukkan sesuai konstitusi dan dinamika di MPR. "Ini penting, karena banyak isu di luar MPR terkait wacana amandemen yang bisa mengalihkan dan menggerus kepercayaan rakyat terhadap Parlemen, serta Lembaga Negara," ujar Hidayat saat melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Yayasan Al Barokah di Jayapura, Papua, Sabtu (11/9/2021).

HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, mengingatkan, peluang terjadinya amandemen diatur dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Amandemen bisa dilakukan jika memenuhi persyaratan, apalagi juga ada kajian di MPR untuk menghadirkan kembali GBHN dengan nama PPHN. Tetapi itu bukanlah rencana, apalagi program final MPR

untuk melakukan amandemen. Melainkan pelaksanaan terhadap Rekomendasi dari MPR periode sebelumnya.

HNW menyatakan, kajian untuk hadirnya amandemen UUD NRI Tahun 1945. Faktanya, tidak seluruh fraksi di MPR RI menyetujui amandemen UUD. Misalnya, Fraksi PKS istiqamah menolaknya. Bahkan, menurut PKS, Partai Demokrat, dan Gerindra, PPHN bisa dihadirkan tanpa amandemen. Cukup melalui Undang-undang.

"Apalagi menimbang Negara lagi berjuang atasi Covid-19, sementara rencana materi amandemen bukan hal yang sangat diperlukan oleh negara dan rakyat. Argumentasi penolakan amandemen itu semakin kuat," ujarnya.

Menurut HNW, wacana amandemen UUD

juga belum jadi keputusan final, karena kajiannya belum selesai dan belum disepakati. Apalagi belum ada satupun anggota MPR RI yang mengusulkannya. Merujuk Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 ada batasan aturan yang sangat jelas dan tegas. Yaitu, usulan yang bisa ditindaklanjuti oleh MPR untuk melakukan amandemen hanyalah yang diusulkan oleh anggota MPR, dengan aturan yang sangat ketat. Bukan yang diwacanakan oleh individu mantan pimpinan partai, atau aktivis lembaga survei, atau kelompok relawan.

"Anggota MPR yang mengusulkan amandemen UUD NRI Tahun 1945 minimal berjumlah 1/3 dari total jumlah anggota MPR. Usulan disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan alasan perubahan dan alternatif usulannya. Itu semua harus





sudah dipenuhi sebelum sidang Paripurna MPR. Begitu aturan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Jadi tidak bisa tiba-tiba, dengan mengusulkan pasal titipan baru, soal perpanjangan masa jabatan Presiden misalnya. Jadi, syaratnya sangat ketat. Berbeda dengan kasus lain ataupun ketentuan UUD 45 sebelum perubahan yang bisa terjadi keputusan yang mendadak," jelasnya.

Masa Jabatan

Oleh karena itu, proses amendemen UUD NRI Tahun 1945 di MPR RI, apabila memang akan terjadi, hanya akan dilakukan secara ketat sesuai ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang berlaku. Bukan karena desakan opini ataupun survei. Karenanya, HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, percaya bahwa ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang membatasi dua kali masa jabatan Presiden tidak akan diamandemen.

"Tidak ada kajian dan agenda MPR terkait perubahan UUD untuk memperpanjang masa jabatan Presiden. Yang baru ada kajian terkait dengan PPHN. Itu pun tidak semua Fraksi dan Kelompok DPD setuju diberlakukannya melalui amendemen UUD NRI Tahun 1945," ujarnya.

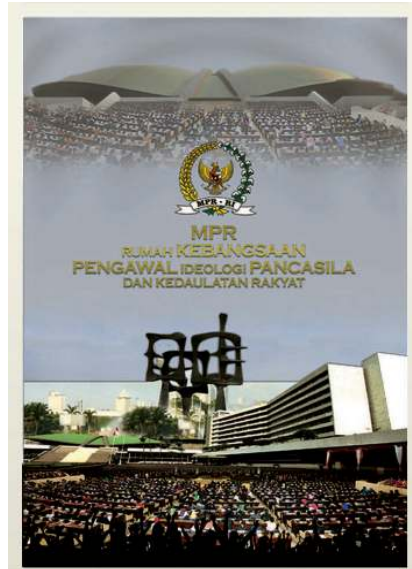
"Di tengah manuver yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden, tidak ada satupun Pimpinan maupun anggota MPR yang secara resmi ikut mengusulkan perubahan UUD NRI Tahun 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden. Itu tandanya, memang di MPR tidak ada agenda perubahan UUD NRI Tahun 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden," tambahnya.

Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode merupakan ketentuan yang krusial. "Itu merupakan tuntutan reformasi yang terpenting. Dari 6 tuntutan Reformasi, salah satunya adalah mengamandemen UUD (Pasal 7) untuk membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode saja," ujarnya.

Menurut HNW, bangsa Indonesia telah melewati sejarah kelam di mana Presiden yang terlalu lama berkuasa, bisa dipilih berkali-kali tanpa batasan, sehingga menghadirkan penumpukan kekuasaan yang ujungnya otoriter dan koruptif. Itu terjadi karena UUD tidak tegas membatasi masa jabatan presiden. Jadi, agar sejarah itu tidak terulang maka Reformasi menghendaki hadirnya pembatasan tersebut. Dan, itulah pasal yang paling pertama diubah oleh MPRRI era reformasi pada 1999. Sekalipun demikian, rakyat dan para akademisi penting untuk terus mengawal konsistensi MPR dalam melaksanakan seluruh ketentuan UUD NRI Tahun 1945, termasuk yang terkait manuver untuk perpanjangan masa jabatan Presiden.

Berkali-kali MPR menegaskan dan menyosialisasikan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 soal adanya pembatasan masa jabatan Presiden maksimal 2 periode (pasal 7 UUD NRI 1945) sehingga tidak bisa diperpanjang menjadi 3 periode. Atau bahwa Pemilu untuk memilih Presiden atau Anggota DPR/DPD itu dilakukan sekali dalam lima tahun (pasal 22E ayat (1) dan (2)), sehingga masa jabatan Presiden tidak bisa ditambah dengan 3 tahun misalnya, karena tak sesuai dengan ketentuan UUD. □

MBO



Implementasi Sila-sila Pancasila

- Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur
- Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.
- Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
- Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
- Berhenti bersikap tidak, mulailah bermusyawarah
- Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi

EMPAT PILAR MPR RI

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

Gelora Serayu Purwokerto

Pandemi Jadi Momentum Memperkuat Nilai Kebangsaan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR, Dr. Lestari Moerdijat, SS., MM., mengatakan, konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, telah menjadi perekat bangsa dan teruji dalam menghadapi krisis sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Di masa pandemi ini, seyogyanya menjadi momentum kembali memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

“Karena dengan bersatu kita bisa menghadapi tantangan (pandemi) ini,” kata Lestari Moerdijat yang hadir secara virtual dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu (8/9/2021). Sosialisasi yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Gelora Serayu menghadirkan narasumber anggota MPR Fraksi Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, anggota DPRD Kabupaten Banyumas Djadjat Sudrajat, dan staf pengajar ilmu politik Fisp Unsoed, Andi Ali Said Akbar.

Rerie, sapaan Lestari Moerdijat, mengungkapkan, masyarakat melihat pandemi Covid-19 sebagai sebuah ancaman. “Tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan

saja, tapi juga memiliki efek pada ancaman stabilitas masyarakat,” ujarnya.

Rerie memberi contoh dampak Covid-19 di Jawa Tengah. Pengangguran terbuka





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pada Februari 2021 tercatat naik 5,59%, atau 1,12 juta dibandingkan pada sebelum pandemi Februari 2020. Sebanyak 11.438 pekerja di-PHK di Jateng. Selain itu, 5.400 anak di Jawa Tengah kehilangan orangtua karena Covid-19.

Rerie menambahkan, sebuah survei (Word Cloud Analysis) menunjukkan bahwa gotong royong merupakan nilai dasar ideologi kebangsaan yang saat ini diperlukan dalam rangka mempererat tali kebangsaan dengan memperkuat persatuan bangsa. "Semangat solidaritas dan kolaborasi antardaerah lebih diutamakan daripada kompetisi dalam upaya menghentikan rantai penyebaran wabah," imbuhnya.

Rerie menegaskan, karakter bangsa diturunkan dari empat konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Karakter bangsa itu, antara lain saling hormat-menghormati, rasa kebersamaan dan tolong menolong, rasa persatuan dan kesatuan, rasa peduli dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan.

"Karakter berbangsa ini diuji dalam hidup bermasyarakat, terutama saat menghadapi tantangan seperti halnya pandemi Covid-19," tegasnya.

Rerie menyebutkan, badai pandemi Covid-19 pasti berlalu. Manusia pasti bertahan, sebagian hidup dalam dunia yang berbeda.

"Keputusan ini tentukan masa depan. Kita tidak hanya berhadapan dengan wabah, tetapi juga ujian terhadap kemanusiaan," ucapnya.

Sosialisasi Empat Pilar MPR yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat diikuti anggota DPC Partai Nasdem Banyumas, Himpunan Guru Paud Banyumas, para pendamping keluarga harapan, mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai kampus di Banyumas. □

Kebumen, Jawa Tengah Karakter Kebangsaan Tameng Hadapi Pandemi

Karakter dan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki saat ini mampu menjadi tameng bagi

bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dan membawa kita keluar dari krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19.

"Dalam konteks solidaritas nasional, kita memiliki konsensus kebangsaan sebagai pondasi untuk menjaga kehidupan kebangsaan dan menjadi jalan keluar dari setiap masalah bangsa," kata Wakil Ketua MPR Dr. Lestari Moerdijat, SS, MM, dalam pengarahannya secara virtual pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/9/2021).

Turut berbicara dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR itu Amelia Anggraini (Ketua DPP NasDem Bidang Perempuan dan Anak, dr. Faiz Alaudien Reza Mardhika (anggota Departemen Kesehatan DPP Partai NasDem),





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

mahasiswa, dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Kebumen.

Lestari Moerdijat mengungkapkan, pandemi Covid-19 di Indonesia mulai menurun setelah mencapai puncak pada Juli 2021. “Sekarang sudah terjadi penurunan drastis. Kita mampu menurunkan angka secara signifikan,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Mengutip hasil sebuah survei, Rerie menyebutkan, mayoritas responden dalam survei itu memahami bahwa pandemi bukanlah ancaman kesehatan semata.

Pandemi ini bisa berujung pada problem sosial yang pada gilirannya menjadi ancaman pada stabilitas nasional.

“Pandemi bukan hanya mengacaukan tapi memporakporandakan kehidupan kita. Lalu di mana konsensus kebangsaan di masa pandemi ini? Dari survei yang sama ditemukan ada kepercayaan dan keyakinan bahwa ada nilai-nilai yang sudah kita miliki dan nilai-nilai itu bisa menjadi tameng untuk menghadapi pandemi,” papar Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Nasdem ini.

Rerie menggarisbawahi gotong-royong

sebagai nilai dasar ideologi kebangsaan yang perlu diperkuat. Dia mencontohkan program Jogo Tonggo yang diterapkan pemerintah daerah Jawa Tengah. Dalam program ini, setiap warga ikut menjaga tetangganya. Apabila setiap rumah saling menjaga, ujarinya, maka komunitas itu bisa terlindungi.

“Inilah semangat solidaritas dan kolaborasi yang kemudian memberikan proteksi bagi seluruh masyarakat berbasis gotong royong untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Program Jogo Tonggo





ini cukup berhasil,” katanya.

Bukan hanya gotong royong, Rerie juga menyebut nilai dan karakter pokok kebangsaan lainnya, seperti karakter religius, mandiri, toleransi, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan, rasa persatuan, peduli dalam bermasyarakat, memiliki moral, dan akhlak yang dilandasi nilai-nilai agama. “Karakter kebangsaan ini juga menjadi tameng untuk berhadapan dan membawa kita keluar dari pandemi Covid-19,” tuturnya.

Karakter dan nilai kebangsaan dalam konsensus kebangsaan, lanjut Rerie, merupakan pondasi menjaga kehidupan bangsa dan menjadi jalan keluar dari setiap masalah. “Sebagai bangsa yang besar dan bermartabat, maka keragaman, gotong royong, dan saling menjaga merupakan kunci persatuan,” ucapnya. □

Brebes, Jawa Tengah
Empat Pilar Terbukti Mampu Menjadi Perekat Bangsa

Wakil Ketua MPR RI, Dr. Lestari Moerdijat, SS., MM., percaya bahwa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia pada umumnya pasti akan berlalu. Bahkan, tanda-tanda akan berakhirnya pandemi ini sudah terlihat. Antara lain, berkurangnya jumlah kasus penularan, berkurangnya tingkat keterisian rumah sakit, serta berkurangnya jumlah kematian akibat Covid-19.

Tetapi, Lestari mengingatkan, Covid-19 tidak akan serta merta hilang dari bumi Indonesia dan dunia pada umumnya. Seperti diingatkan para pakar Covid-19, virus ini akan

berubah dari pandemi menjadi endemi. Karena itu, masyarakat harus bersiap melakukan situasi new normal, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

“Pandemi mengakibatkan krisis yang multidimensional. Karena itu, kita harus tetap bersatu, bergotong royong, menghadapi segala kemungkinan dengan berpegangan pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Lestari Moerdijat.

Pernyataan itu disampaikan Lestari di hadapan peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI). Acara tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan Islamic Centre Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Ahad (12/9/2021).

Empat Pilar MPR RI, kata Rerie panggilan akrab Lestari, sudah terbukti mampu

merekatkan bangsa Indonesia dalam menghadapi segala ancaman dan tantangan, termasuk pandemi Covid-19 saat ini. Karena pandemi yang hadir sekarang ini bukanlah yang pertama. Tetapi sudah ada pandemi-pandemi lain yang lebih dulu datang, dan Empat Pilar MPR RI sebagai konsensus mampu mengatasi.

“Konsensus ini bisa menjadi panduan dalam kehidupan, termasuk panduan menuju cita-cita, adil makmur dan beradab,” kata Rerie lagi.

Karena itu, meski banyak ideologi yang masuk, kata Rerie, bangsa Indonesia tidak boleh berpaling dari Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi bangsa. UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. □

MBO



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**Kertosari, Kabupaten Temanggung
Perkuat Nilai-Nilai Kebangsaan Hadapi
Permasalahan Bangsa**

Wakil Ketua MPR, Dr. Lestari Moerdijat, SS., MM., mengatakan bahwa sampai saat ini bangsa Indonesia masih mengalami permasalahan berat, yakni pandemi Covid-19 yang dampak negatifnya luar biasa dan sangat menyengsarakan rakyat.

Akibat pandemi, selain banyak rakyat yang terganggu kesehatannya dan bahkan meninggal dunia, pandemi juga melumpuhkan perekonomian sehingga banyak perusahaan tutup dan terpaksa merumahkan karyawannya, hal ini menimbulkan banyak pengangguran.

“Faktanya, pandemi ini ternyata tidak main-main, dan usaha pemerintah sejauh ini baik sekali dalam menghadapi masalah ini dan itu mesti diapresiasi,” kata Pimpinan MPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang akrab disapa Rerie.

Rerie menyampaikan hal itu saat berbicara secara virtual sebagai narasumber acara acara ‘Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,’ di Omah Kebon Resto, Kertosari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (17/9).

Hadir dalam acara yang diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat tersebut, tokoh masyarakat Harry Poernomo, Ketua Perkumpulan Keluarga Besar Satpam Temanggung (PKBST) Yohanes



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Agus Setiyono, dan para anggota PKBST serta masyarakat sekitar sebagai peserta.

Namun, lanjut Rerie, selain upaya keras pemerintah bersama jajarannya dalam melawan pandemi, ada satu lagi upaya yang mesti dilakukan seluruh anak bangsa, yakni memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai kebangsaan.

Hal tersebut diketahui Rerie saat bersama timnya melakukan jajak pendapat kepada masyarakat pada Juni 2020. Saat itu, sebagai Pimpinan MPR, Rerie ingin mengetahui sampai dimana pengetahuan rakyat seputar Covid-19 ini.

Setelah dianalisa menggunakan metode Word Cloud Analysis, hasilnya adalah: *Pertama*, masyarakat ternyata telah memahami betul bahwa ancaman pandemi itu bukan hanya masalah kesehatan

semata. Tapi, juga mengakibatkan menurunnya aktivitas perekonomian yang berujung kepada terancamnya stabilitas nasional.

Kedua, publik menyadari bahwa nilai-nilai kebangsaan bisa menjadi tameng yang menjaga bangsa ini dari kehancuran. *Ketiga*, gotong royong yang merupakan nilai dasar ideologi kebangsaan, saat ini mesti diperkuat untuk menjaga persatuan bangsa.

“Intinya, rakyat Indonesia sudah sangat menyadari betapa berbahayanya pandemi ini dan juga telah mengetahui solusi untuk menghadapinya,” ujarnya.

Untuk itu, Rerie mengajak seluruh anak bangsa agar mulai saat ini utamakan memperkuat semangat solidaritas dan sinergitas dalam upaya memutus rantai penyebaran virus korona. □



Sosialisasi di Sumenep

Empat Pilar MPR Adalah Kesepakatan Harus Dijaga



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., menegaskan, umat Islam memberi kontribusi sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia. Bahkan peran itu dilakukan oleh para ulama dan umat Islam di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Di Madura, terdapat seorang ulama besar, memiliki santri yang dikemudian dikenal bernama KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan. Keduanya, masing-masing sebagai pendiri Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Baik KH. Hasyim Asy'ari maupun KH. Ahmad Dahlan pernah mengenyam ilmu dari Syaikhona Muhammad Kholil yang dikenal juga sebagai Syaikhona Kholil al-Bangkalani.

"Syaikhona Kholil al-Bangkalani sangat layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Saya selaku Wakil Ketua MPR ikut mendukung usaha tersebut, meski beliau sendiri tak pernah mengharap. Tetapi kita sebagai penerus, tentu merasa senang jika orang yang kita hormati mendapat penghargaan yang layak. Apalagi, kedua santrinya, H. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan sudah mendapat anugerah Pahlawan Nasional," kata HNW, begitu Hidayat biasa disapa.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat secara virtual saat memberikan Sosialisasi

Empat Pilar MPR di hadapan warga Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Acara yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Yayasan Dakau Lamak itu berlangsung di Kabupaten Sumenep, Sabtu (25/9/2021).

Selain Hidayat, juga hadir anggota MPR Fraksi PKS, Ahmad Syaikhul, sebagai pembicara pendamping. Serta hadir pula Ketua Yayasan Dakau Lamak, Dr. Mohammad Hidayatullah; Ketua Umum DPW PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan; Sekretaris DPW PKS Jawa Timur, Ahmadi; Ketua DPD PKS Sumenep, Rimbun Hidayat; dan Sekretaris DPD PKS Seumenep, Manansyah.

Peninggalan sejarah dari jejak langkah Syaikhona Kholil, menurut HNW, patut ditiru dan menjadi inspirasi bagi masyarakat Sumenep. Terlebih ketika bangsa Indonesia memperingati peristiwa pengkhianatan PKI, pada bulan September ini.

"Jasa ulama bagi bangsanya sangat besar. Tetapi keselamatan mereka selalu terancam. Pada September 1948, saat pecah peristiwa Madiun, para ulama, santri, dan pondok pesantren menjadi korban kekejaman PKI," papar HNW.

Zaman sekarang, lanjut HNW, keamanan ulama juga belum sepenuhnya terjaga. Terbukti masih banyak ulama yang mengalami penyerangan oleh orang-orang tak

bertanggung jawab, termasuk ketika mereka menjalankan tugasnya membina masyarakat.

Menurut HNW, peristiwa pengkhianatan PKI maupun maraknya kasus penganiayaan ulama menjadikan isyarat bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR masih sangat dibutuhkan.

"Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah hasil kesepakatan seluruh bangsa. Termasuk kesepakatan para ulama dengan kelompok nasionalis sehingga ada titik tengah yang bisa diterima kedua pihak. Karena itu, kesepakatan itu harus dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari," pinta HNW.

Sementara itu anggota MPR Fraksi PKS, Ahmad Syaikhul, mengatakan, sosialisasi tidak hanya diberikan kepada masyarakat umum. Tetapi juga anggota DPR, TNI, Polri, dan pejabat di lingkungan eksekutif. Itu artinya seluruh bangsa Indonesia berhak mengikuti sosialisasi MPR.

Presiden PKS itu berharap, setelah menerima sosialisasi, para peserta bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi mereka yang kerap menyampaikan sosialisasi, mudah-mudahan bisa menginspirasi agar lebih baik dalam mengaktualisasikan pada kehidupan mereka. □

MBO

Terima Puteri Anak dan Remaja Indonesia Bali 2022

Ketua MPR RI Ajak Sebarkan Vaksin Ideologi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, bahwa perkembangan media informasi, media sosial dan komunikasi yang berkembang pesat telah mendorong percepatan proses diseminasi informasi yang nyaris tanpa batas. Derasnya arus globalisasi yang ditopang pesatnya kemajuan teknologi informasi, telah mengantarkan pada era disrupsi, era digital, era ‘the internet of things’, dan turut menghadirkan berbagai tantangan kebangsaan yang muncul dengan berbagai dimensinya.

“Karenanya, membangun wawasan kebangsaan di era digital mempunyai tantangan yang lebih kompleks. Loncatan kemajuan teknologi informasi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi menawarkan efisiensi dan simplifikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, di sisi lain juga berpotensi menghasilkan residu dan dampak negatif pada dimensi kehidupan kebangsaan kita. Fenomena ini dapat dirasakan dalam bentuk melemahnya rasa toleransi dalam keberagaman, demoralisasi generasi muda bangsa, tergerusnya kearifan lokal dan nilai-nilai luhur adat budaya bangsa,

serta hadirnya faham-faham dan produk-produk yang dikemas menarik, khususnya bagi generasi muda,” ujar Bamsuet usai menerima Puteri Anak dan Remaja Indonesia Bali 2022 di Bali, Selasa (13/9/22).

Hadir antara lain Puteri Anak Indonesia Bali Putu Ayu Marscha Kiaradiva Brahmantya, Puteri Anak Indonesia Bali Pariwisata Komang Ayu Diah Putri Maheswari, Puteri Remaja Indonesia Bali Ni Luh putu Carla Greycia Meytria Kencana, Putri Remaja Indonesia Bali Pariwisata Dewa Ayu Puji Satya Merta Putri, Puteri Remaja Intelegensia Bali Ni Luh Komang Chika Widhi Sari.

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, berdasarkan data Digital Report 2021, diperkirakan bahwa pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 telah mencapai 202,6 juta jiwa. Artinya, akses publik terhadap layanan koneksi internet jangkauannya semakin luas, walaupun dari aspek pemerataan belum optimal.

“Namun sayangnya, besarnya angka pengguna internet tersebut tidak diimbangi dengan tingkat keadaban yang memadai. Hasil riset Digital Civility Index (DCI) menyebutkan bahwa etika dan tingkat



keadaban warganet di Indonesia kian rendah. Indonesia berada di peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei. Rendahnya etika berinternet tersebut ditandai dengan maraknya berita bohong dan penipuan di internet sekitar 47%, ujaran kebencian

sekitar 27% serta diskriminasi sekitar 13%," kata Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, menyikapi perkembangan

dan dinamika zaman, yang dapat dilakukan hanyalah dua hal, yaitu adaptasi dan inovasi. Era digital telah 'memaksa' semua pihak untuk hidup berdampingan dengan lompatan kemajuan teknologi. Di masa pandemi saat ini pun dituntut untuk memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai bagian proses adaptasi dan inovasi tersebut.

"Di sinilah peran penting Puteri Anak dan Remaja Indonesia Bali 2022 untuk turut menyebarkan wawasan kebangsaan kepada generasi muda. Salah satunya dengan ikut serta memfasilitasi pemberian vaksin ideologi berupa sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Sehingga mampu menangkal masuknya ideologi lain seperti radikalisme, ekstrimisme, hingga intoleransi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," pungkas Bamsuet. □

Bicara Buku Pustaka Bersama Wakil Rakyat

Fadel Muhammad: Cobaan itu Biasa Dalam Hidup, Tanpa itu Hidup Akan Sepi

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, meninggalkan jejak yang sangat bagus selama dua periode memimpin Provinsi Gorontalo. Ia berhasil menemukan jalan menuju perbaikan sumber daya manusia melalui program beasiswa. Agar keberlangsungan menyiapkan SDM generasi muda Gorontalo berjalan berkelanjutan, Fadel juga mengupayakan lahirnya perguruan tinggi. Dan, itu dibuktikan dengan lahirnya Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sebagai universitas pertama di sana.

Di bidang ekonomi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Kabinet Indonesia Bersatu II itu berhasil meningkatkan produksi jagung. Fadel juga berhasil meningkatkan pendapatan petani, dengan jalan menaikkan harga jagung, dari sebelumnya Rp 400/kg menjadi Rp 800/kg. Keberhasilan Fadel meningkatkan produksi jagung terjadi karena ia melibatkan ratusan mahasiswa dan sarjana pertanian sebagai tenaga pendamping petani.

Keberhasilan itu adalah sebagian kecil isi dari buku berjudul: *Building A legacy* "Menimba Ilmu, Mengajar, Mengembangkan Bisnis dan Berbakti Pada Bangsa", karya Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad. Buku tersebut dibahas pada acara Bicara Buku Pustaka Bersama Wakil Rakyat. Acara tersebut berlangsung di Gedung Rektorat, Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Selasa (27/9/2022).

Bedah buku itu terlaksana berkat kerjasama MPR RI dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Gorontalo. Dua orang narasumber hadir untuk membahas buku tersebut. Keduanya adalah, Bupati Kabupaten Gorontalo Prof. Dr. Ir Nelson Pomalingo, M.Pd., dan dosen UNG Dr. Lukman Naleo. Ikut hadir pada acara tersebut Wakil Rektor UNG Bidang Akademik Dr. Harto Malik M. Pd.

Saat menyampaikan pengantar, Bicara Buku Pustaka Bersama Wakil Rakyat, Fadel antara lain mengatakan, pembuatan buku



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Building Legacy adalah jawaban dari anak-anaknya, ketika ia bertanya tentang apa yang harus dilakukan setelah melewati berbagai tantangan dan rintangan yang dihadapi. Ternyata, anak-anaknya sepakat meminta Fadel menulis buku perjalanan hidupnya, agar bisa diingat dan teladani generasi muda. Apalagi, jalan terjal yang menanjak dan berliku mewarnai kehidupannya. Mulai dari

semasa kuliah, menjadi pengusaha dan menjabat gubernur Gorontalo selama dua periode.

"Saat kuliah di ITB saya mendapat pengalaman besar, bisa bergaul dengan mahasiswa berbagai latar belakang budaya. Saya menjalani kuliah relatif lama, selama enam tahun, karena ikut berbagai kegiatan di kampus," kata Fadel.



Lepas dari kampus, Fadel Muhammad berhasil membangun gurita usahanya. Padahal modal awal yang dimiliki relatif kecil. Tetapi perusahaan yang dihasilkan memberikan keuntungan besar. Dan, saat menjadi gubernur, kata Fadel, dia banyak bersyukur karena bisa berbuat banyak untuk rakyat.

“Kesuksesan itu adalah sebuah perjalanan, bukan akhir dari tujuan. Kalau kesuksesan itu adalah tujuan, maka setelah berhasil kita akan berhenti. Saya tidak, karena itu saat menjadi gubernur saya kuliah lagi di S3 UGM, sehingga menemukan clean government. Ingat, hidup itu tidak pernah landai, berliku dan menanjak. Pasti ada

cobaan, dan seolah mengajak untuk berhenti. Padahal, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Cobaan itu biasa dalam hidup, tanpa itu hidup akan sepi. Seperti makan tanpa garam,” kata Fadel lagi.

Fadel menegaskan, keberhasilannya di bidang entrepreneur dan politik tak lepas dari kemampuannya berfikir kritis. Mampu berkolaborasi, punya kompetensi dan kampuan berkomunikasi. Serta memiliki kemampuan untuk berinovasi dan kritis dalam memenangkan masa depan. Juga menguasai ilmu pengetahuan dan melek teknologi.

Sebelumnya, koordinator perpustakaan MPR Yusniar SH, mengundang seluruh

peserta Bicara Buku Pustaka Bersama Wakil Rakyat, untuk datang dan melihat langsung koleksi buku di Perpustakaan MPR. Karena di Perpustakaan MPR terdapat buku-buku yang bagus dan tidak diperjualbelikan. Perpustakaan MPR juga menyimpan risalah sidang, yang sangat bagus untuk mendukung penelitian maupun pembuatan desertasi.

“Kami terbuka menerima kunjungan bapak ibu dan para mahasiswa. Tetapi kalau kesempatan untuk datang langsung belum ada, buku-buku itu bisa diakses melalui buku digital, dengan mendownload terlebih dahulu di AppStore atau playstore,” kata Yusniar. □

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Fadel Muhammad Ajak Mahasiswa Siapkan Diri Jadi Entrepreneur



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, mengingatkan mahasiswa untuk tidak beramai-ramai ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena kemampuan negara menampung keinginan masyarakat menjadi ASN sangat terbatas. Dan, tidak sebanding dengan minat pencari kerja untuk bergabung menjadi abdi negara.

Sebagai gantinya, Fadel Muhammad mengajak mahasiswa mempersiapkan diri menjadi entrepreneur. Karena kesempatan menjadi pengusaha sangat besar, tidak dibatasi lapangan pendidikan serta modal. Dan meliputi berbagai sektor kehidupan. Tidak seperti ASN, seorang pengusaha bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang lain dalam jumlah yang tak terbatas

“Menjadi entrepreneur, itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, menggunakan modal yang tidak besar. Seperti menjual pisang goreng, tidak serta merta digoreng begitu saja. Tapi digoreng memakai tepung, dipotong mengikuti bentuk tertentu. Ini sama, seperti saat saya membangun perusahaan, tenaga dan modal terbatas, tetapi terus melakukan inovasi produk yang dihasilkan,” cerita Fadel Muhammad.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMG). Acara tersebut berlangsung di Gedung Serba Guna David Bobihoe Akib, UMG, Rabu (28/9/2022). Ikut hadir pada acara tersebut, Anggota MPR dari Kelompok DPD Djafar Alkatiri, serta Wakil Rektor 2 dan 3 UMG, yaitu Dr. Salahudin Pakaya M.H. dan Dr. Apris Ara Tilome M. Si. Sosialisasi tersebut merupakan kerjasama MPR dengan Ruang Anak Muda Connection Gorontalo dan Badan Eksekutif Mahasiswa UMG.

Fadel menegaskan, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas bisa didapat dari kampus. Karena itu, ia berharap, warga kampus bisa berkontribusi besar terhadap



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

lahirnya entrepreneur baru, sehingga tersedia juga banyak lapangan kerja. Agar saat datangnya puncak bonus demografi pada 2030, tidak terjadi banyak kasus pengangguran maupun tenaga kerja bergaji rendah.

“Fenomena ini harus diantisipasi dari sekarang. Dan, itu tidak mungkin ditangani melalui jalur penerimaan ASN. Karena jumlahnya sangat terbatas. Tetapi kalau kampus bisa

melahirkan banyak entrepreneur, pada waktunya mereka akan menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Fadel lagi.

Pernyataan serupa disampaikan Anggota MPR dari Kelompok DPD Djafar Alkatiri. Menurutnya, bonus demografi bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menguntungkan, jika tenaga kerja yang tersedia bisa berproduksi dengan baik. Sebaliknya, bonus demografi akan menjadi

beban, jika tenaga kerja yang tersedia, tidak memiliki pekerjaan atau para pegawai berpenghasilan rendah. Karena itu, Djafar menyebut, menjadi pengusaha adalah salah satu pilihan yang baik.

“Teman-teman yang saat ini bisa kuliah sangat beruntung, semoga saja selama belajar di kampus mereka juga bisa menumbuhkan ide-ide yang inovatif, dan berguna bagi masa depan,” kata Djafar lagi.

Pada kesempatan itu, Djafar juga mengingatkan pentingnya para generasi muda selalu menjaga dan memupuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, diharapkan mereka bisa mempertahankan NKRI dari ancaman perpecahan. Karena potensi Indonesia terpecah belah menjadi negara-negara kecil sangatlah besar.

“Cinta tanah air itu adalah bagian dari pada iman. Bahkan, Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kalau para entrepreneur memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air niscaya kedatangan bonus demografi itu akan menjadi tonggak kemajuan bagi bangsa Indonesia,” pungkas Djafar Alkatiri. □



MBO

Temu Tokoh Nasional di Desa Cimahpar

Jalani Hidup Berpegang pada Nilai Agama dan Nilai Luhur Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., atau biasa disapa Syarif Hasan mengungkapkan bahwa negara besar pasti memiliki tantangan dan masalah yang besar pula. Demikian juga dengan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, dihuni ratusan juta penduduk dengan keberagaman luar biasa, mulai dari suku, agama, bahasa, serta budaya.

Berbagai masalah yang dihadapi Indonesia sudah pasti sangat berdampak pada rakyat, terutama rakyat kecil, seperti pandemi Covid-19 dan kenaikan harga-

harga kebutuhan hidup. "Dari berbagai dialog langsung dengan rakyat yang saya lakukan di berbagai daerah, termasuk di wilayah Bogor Utara, ini saya mendengar suara kegelisahan mereka," ujarnya usai menghadiri acara Temu Tokoh Nasional yang diselenggarakan MPR bekerja sama dengan Paguyuban Sundawani, di Desa Cimahpar, Kecamatan, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/9/2022).

Suara rakyat sekecil apapun, lanjut Syarif Hasan, harus segera mendapatkan respon positif. "Saya sendiri langsung memberikan tanggapan kepada rakyat.

Antara lain, sebagai Pimpinan MPR, saya memberikan motivasi kepada mereka agar bersabar, mendorong untuk tetap optimistis dan beradaptasi dalam menghadapi kesulitan. Jalanilah hidup dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai agama dan nilai luhur bangsa. Dengan begitu, akan terjalin rasa kebersamaan dan toleransi yang begitu kuat hingga bisa saling membantu satu sama lain," ucap Syarif Hasan.

Syarief melanjutkan, sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, ia memberikan dukungan atas segala upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan rakyat, sekaligus memberikan berbagai masukan yang baik. "Masukan yang kami berikan tentu sesuatu yang bagus dan solutif, karena kami Partai Demokrat pernah berada dalam pemerintahan. Ini kami lakukan sebagai bentuk sinergi sesama elemen bangsa demi rakyat," tambahnya.

Syarief Hasan menambahkan, ada satu hal lagi yang penting, yakni rakyat harus berkiprah nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai pembuktian menjadi seorang warga yang baik. Salah satu bentuknya adalah berpartisipasi aktif pada Pemilu 2024 nanti.

"Dari sini saya membangkitkan semangat rakyat bahwa partisipasi aktif mereka dalam pemilu akan mengubah keadaan bangsa secara keseluruhan. Suara rakyat menjadi



kuncinya. Jika suara mereka diberikan secara tepat maka Indonesia akan bisa keluar dari berbagai kesulitan yang ada dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kalau ini terjadi, maka kesejahteraan akan terwujud untuk semua rakyat tanpa kecuali," tegas Syarif Hasan.

Acara Temu Tokoh Nasional yang dihadiri Ketua DPD Paguyuban Sundawani Kota Bogor Heryana Bima Saputra, para anggota Sundawani, tokoh masyarakat serta

masyarakat sekitar berlangsung sangat meriah. Keseluruhan sesi acara mulai dari dialog interaktif, pertanyaan, dan kuis dadakan mendapatkan antusiasme penuh peserta.

Antusiasme masyarakat ini muncul karena metode dialog yang disampaikan Syarif Hasan sebagai pembicara tunggal sangat merakyat. Seraya berdialog, Syarif Hasan berjalan hilir mudik mendekati para peserta, sehingga keakraban terjalin. Pada

sesi tanya jawab, Syarif Hasan serius mendengarkan dan mencatat semua pertanyaan serta menjawabnya dengan lugas sehingga rakyat merasa diperhatikan.

Pada sesi kuis dadakan, Syarif Hasan tidak sekedar memberi kuis, namun menanamkan pemahaman seputar lembaga MPR, juga Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika), sehingga meninggalkan kesan mendalam di sanubari peserta. □

Sesjen MPR, Ma'ruf Cahyono, Raih Gelar Profesor Kehormatan

Birokrasi dan Akademik Harus Bisa Dilaksanakan Secara Seimbang

Gelar profesor menjadi tujuan bagi setiap insan dalam pendidikan, di mana di dunia ini penuh dengan nilai-nilai ideal dan moral. "Dunia akademis mendorong saya untuk lebih bersemangat, karena sebagai seorang birokrat yang juga diberi tanggung jawab dalam dunia akademik," ujar Ma'ruf Cahyono.

RUANG Ujian Terbuka, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah, 6 Oktober 2022, terisi penuh. Tampak para profesor dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah, seperti Universitas Djenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri (UIN) Purwokerto, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto (UNU) dan Unissula memenuhi aula, tempat ujian terbuka itu berlangsung. Di antara mereka itu, hadir Rektor Unissula Prof. Dr. Gunarto SH., MHum; Rektor Unsoed Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik MSc.Agr; Dekan FH Unsoed Prof. Dr. Muhammad Fauzan SH., MHum.; dan Staf Khusus Pimpinan MPR, Prof. Dr. Djafar Hafisah.

Hari itu, di kampus Unissula, sebuah perguruan tinggi terakreditasi A di Jawa Tengah itu, berlangsung acara istimewa, Penyerahan Gelar Profesor Kehormatan kepada Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH. Acara penyerahan gelar profesor itu dimulai tepat pukul 10.00 WIB, diawali prosesi penyerahan Surat Keputusan kepada Ma'ruf Cahyono. Sesjen MPR, Ma'ruf Cahyono, didampingi oleh para guru besar sebagai



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

reivewer, yakni Prof. Dr. Gunarto; Prof. Dr. Anis Masdurohatusun; Dr. Bambang Tri Bawono; dan Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, dipandu oleh panitia sidang menuju ke mimbar.

Dalam pidatonya, Prof. Dr. Gunarto menyatakan, perjuangan untuk memperoleh guru besar kehormatan di bidang hukum di Unissula harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan Peraturan Mendikbud Ristek No. 38 Tahun 2021. "Ada prosedur penting

yang ingin saya sampaikan terkait seseorang yang berhak mendapat gelar guru besar kehormatan," ujarnya seraya menjelaskan, "Orang itu harus melahirkan gagasan pemikiran baru di bidang hukum yang berguna untuk pembangunan bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia."

Lalu, Prof. Dr. Gunarto memberi alasan kenapa gelar guru besar kehormatan ini diberikan kepada Ma'ruf Cahyono, Sesjen MPR RI. Ma'ruf Cahyono, lanjut Prof.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Gunarto, telah memberikan gagasan baru itu, yaitu melahirkan gagasan tentang Lembaga Pengkajian MPR yang telah memberi kontribusi dalam proses ketatanegaraan di Indonesia. Kontribusi itu adalah: *Pertama*, melahirkan konvensi ketatanegaraan tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara di setiap tahun pada bulan Agustus.

Kedua, gagasan penting yang berguna untuk kepetingan bangsa dan negara, yakni reformasi kelembagaan MPR, di mana dari MPR lahir Lembaga Pengkajian MPR yang terus memberikan pemikiran besar sehingga MPR semakin dipercaya yang memiliki reputasi hingga dunia internasional. Ketiga, Ma'ruf Cahyono juga menulis dan mempublikasi artikel di berbagai jurnal yang

terakreditasi.

Setelah pengukuhan menjadi guru besar, kepada wartawan Ma'ruf Cahyono mengatakan, dirinya bersyukur telah diberi amanah sebagai profesor kehormatan. Gelar ini, menurut Ma'ruf, menjadi tujuan bagi setiap insan dalam pendidikan yang di mana di dunia itu penuh dengan nilai-nilai ideal dan moral. "Dunia akademis mendorong saya untuk lebih bersemangat, karena sebagai seorang birokrat yang juga diberi tanggung jawab dalam dunia akademik," ujar pria yang menjadi dosen magister hukum di berbagai perguruan tinggi itu. "Antara birokrasi dan akademik dua-duanya harus bisa dilaksanakan secara seimbang," ujar Ketua Keluarga Alumni FH Unsoed itu.

Gelar profesor kehormatan, jelas Ma'ruf,

memberikan kesempatan yang lebih kepada dirinya. Sebagai birokrat tentu dalam menjalankan aturan akan mendapat pengayaan dari nilai-nilai akademik yang ideal. Dunia akademik juga demikian, menjadi kaya dan penuh dengan warna empirik. Simbiosis antara dunia akademik dan praktik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu harus seimbang.

Banyak aspek yang telah dilakukan oleh Ma'ruf Cahyono sehingga dapat meraih gelar Profesor Kehormatan. Dalam orasi pengukuhan, dia menyebutkan, ada tiga hal sehingga Unissula memberinya gelar Profesor Kehormatan. Ketiga hal itu, adalah: *Pertama*, dalam membangun sistem tata negara yang demokratis diperlukan adanya akuntabilitas. Akuntabilitas yang dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan. Di sini MPR hadir sebagai fasilitator untuk menggelar laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Dengan konvensi tersebut lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat.

Kedua, pentingnya ideologi dan dasar negara, Pancasila, terus dibumikan dan dibunyikan dalam seluruh ruang dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. "Oleh karena itu, Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih populer disebut Empat Pilar MPR menjadi bagian penting," ujar pria asal Banyumas, Jawa Tengah, itu.

Dia mengungkapkan, saat sebelum dan sesudah reformasi, nilai-nilai itu tidak menjadi perhatian. Lembaga BP7 pun dibubarkan dan peraturan terkait P4 juga dicabut. "Oleh karena itu intisari dari MPR untuk membumikan dan membunyikan kembali nilai-nilai Empat Pilar," tuturnya.

Ketiga, dalam demokrasi, suara rakyat adalah paling utama. Partisipasi publik adalah penting. Oleh karena ada terobosan yang diperlukan agar partisipasi publik itu bisa dikelola secara baik, tidak ada yang tertinggal, semua unsur terwakili, semua suara bisa diakomodir sehingga bisa diformula menjadi satu kebijakan yang nanti kembalinya juga untuk rakyat. "Kebijakan yang demokratis berasal dari rakyat, bisa dikontrol oleh rakyat, dan juga manfaatnya dirasakan oleh rakyat," tegasnya. □



F-PG MPR Serap Aspirasi Terkait PPHN

FRAKSI Partai Golkar (FPG) MPR sampai saat ini belum menetapkan pandangan resmi fraksi terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), terutama substansi dan bentuk hukumnya. Namun, upaya keras dan serius untuk mengeluarkan pandangan resmi itu terus dilakukan Fraksi Partai Golkar MPR dengan berbagai metode.

Salah satu metode yang dilakukan adalah melakukan serap aspirasi untuk meminta masukan dari para pakar tata negara Indonesia dan juga dari para senior kader Partai Golkar yang menjadi pelaku sejarah pada saat perubahan UUD 1945.

"Masukan dari para ahli dan para senior sangat penting untuk memperkaya wawasan kami terkait PPHN ini. Pemikiran para pakar akan kami serap dan kami lakukan pendalaman di FPG," ujar Bendahara FPG MPR Mujib Rohmat, usai acara Seminar Fraksi Partai Golkar MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan,

dilakukan serap aspirasi lanjutan.

"Jika dirasa perlu, maka akan dibentuk satu tim kecil untuk melakukan kajian lebih dalam dan lebih intens lagi. Kemudian, segera disampaikan kepada Ketua Umum Partai untuk mendapatkan arahan. Arahan itu yang menjadi keputusan atau pandangan resmi FPG MPR sebagai kepanjangan tangan DPP Partai Golkar di Paripurna MPR mendatang," tutupnya.

Seminggu sebelumnya, tepatnya Kamis 8/9/2022, FPG MPR juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema: 'Urgensi Pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Pasca Amandemen UUD 1945', di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Hadir dalam FGD itu, Ketua MPR RI yang juga sebagai Penasihat FPG MPR Bambang Soesatyo dan Adies Kadir, Ketua FPG MPR Idris Laena, Sekretaris FPG Ferdiansyah, Pimpinan dan anggota Komisi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Seminar bertema 'Kewenangan MPR RI Pasca Amandemen UUD 1945 Dalam Pembentukan PPHN' ini dihadiri Sekretaris FPG MPR Ferdiansyah, Pimpinan dan anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR, Rambe Kamarul Zaman, Rully Chairul Azwar, Andi Mattalatta, dan Syamsul Bahri, lalu Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti sebagai narasumber, serta perwakilan beberapa ormas dan perguruan tinggi seperti, Gema MKGR, HMI, Satkar Ulama dan Universitas Pamulang sebagai peserta.

Diungkapkan Mujib, seminar yang dilaksanakan ini adalah kegiatan kedua setelah acara Forum Group Discussion (FGD) pada tanggal 8 September 2022, yang menghadirkan dua orang ahli tata negara, yaitu Refly Harun dan Feri Amsari. "Dari dua kegiatan itu, kami banyak menyerap berbagai pencerahan baru yang sangat berbobot seputar PPHN ini," tambahnya.

Hasil dari dua kegiatan serap aspirasi tersebut, lanjut Mujib, ditampung dan dipelajari lalu akan diambil keputusan apakah perlu

Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR, Rambe Kamarul Zaman, Rully Chairul Azwar, Andi Mattalatta, dan Syamsul Bahri. Juga hadir Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan Feri Amsari sebagai narasumber, serta para anggota FPG MPR sebagai peserta.

Dalam sambutannya, Idris Laena mengungkapkan bahwa FGD diselenggarakan dengan agenda utama untuk mendiskusikan dan mendengarkan pandangan para ahli tata negara terkait PPHN terutama soal substansi dan bentuk hukumnya.

"Atas dasar itulah kita buka ruang diskusi melalui FGD ini. Kami FPG MPR berharap bisa mendapatkan masukan, pengayaan, serta pencerahan untuk mengambil sikap dan pandangan tentang PPHN dalam rangka kontribusi kami kepada kemajuan bangsa dan negara," ucapnya.

Acara FGD sendiri berlangsung lancar. Para pakar narasumber bergantian memaparkan materi mereka sesuai tema. Di sesi tanya jawab, para peserta antusias melakukan dialog interaktif dua arah dengan narasumber dan pimpinan diskusi. □

DER

Raker Sesjen MPR RI dengan Komisi III DPR RI



SEKRETARIS Jenderal MPR RI, Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., didampingi Plt. Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM., bersama Wakil Jaksa Agung RI, Perwakilan Kapolri, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, dan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI.

Rapat Kerja yang digelar pada hari Rabu, 21 September 2022, tersebut dipimpin Pimpinan Komisi III DPR, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., serta dihadiri secara fisik dan virtual 27 dari 53 anggota Komisi III.

Raker digelar dengan agenda, penjelasan mitra kerja terkait dengan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2023 (Rincian Program), berdasarkan hasil pembahasan dengan Badan Anggaran, diakhiri dengan tanya jawab dan penutup.

Dalam penjelasannya kepada Komisi III, Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono melaporkan penyesuaian dan penyempurnaan rencana kerja dan anggaran MPR Tahun 2023 terkait perubahan (penambahan) pagu anggaran MPR yang telah disetujui DPR. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dr. Abdul Kharis Almasyhari, Anggota MPR Fraksi PKS

UU PDP, Payung Hukum Perlindungan Data Pribadi

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang. RUU PDP disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I tahun sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara I, Selasa, 20 September 2022. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus, diampingi Wakil Ketua Rachmat Gobel.

Pemerintah menilai, pengesahan UU PDP tersebut merupakan momen yang sangat bersejarah, setelah menunggu sejak 2019. UU ini ditunggu oleh berbagai pihak, termasuk lembaga negara, aparat penegak hukum, ekosistem digital, platform, dan media sosial, serta oleh segenap elemen masyarakat Indonesia. Menurut Menkominfo Johnny G Plate, UU PDP dapat dimaknai sebagai pengejawantahan kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara untuk perlindungan data pribadi, khususnya dalam ranah digital.

"Dari sisi hukum, UU PDP dapat dimaknai

sebagai kehadiran sebuah payung hukum perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif, yang memadai dan berorientasi ke depan. UU PDP juga memberikan kesetaraan dan keseimbangan hak subjek data pribadi dengan kewajiban pengendali data pribadi di mata hukum," ungkap Johnny.

Untuk mengetahui lebih jauh UU PDP ini, Majelis mewawancarai anggota MPR dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari. Berikut percakapan dengan Abdul Kharis yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR. Petikannya.

Bisa dijelaskan secara umum tentang pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi UU?

RUU ini sudah dibahas sejak dua tahun lalu. Pemerintah menyampaikan RUU Perlindungan Data Pribadi karena melihat pentingnya perlindungan data dan banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi selama ini. Karena itu, diperlukan sebuah undang-undang. UU ini dimaksudkan sebagai rujukan dan dasar hukum untuk segala hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Pembahasan RUU PDP ini cukup dinamis. Dari draf RUU sebelumnya yang disampaikan pemerintah terdiri dari 15 bab dan 72 pasal menjadi 16 bab dan 76 pasal. Komisi I DPR dalam proses pembahasan RUU tentang PDP proaktif dan responsif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Selama dua tahun lebih Komisi I DPR berusaha keras melakukan pembahasan intensif dan berhasil menyepakati aspek-aspek substantif atas RUUPDP.

UU ini menjadi payung hukum bagi warga negara dalam perlindungan data pribadi. UU ini benar-benar menjadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin dan memastikan perlindungan data pribadi warganya. UU ini menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia.

(Secara terperinci sistematika dari UU PDP adalah Bab I Ketentuan Umum, Bab 2 Asas, Bab 3 Jenis Data Pribadi, Bab 4 Hak Subjek Data Pribadi, Bab 5 Pemrosesan Data Pribadi, Bab 6 Kewajiban Pengendalian Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dalam Pemrosesan Data Pribadi, Bab 7 Transfer

Data Pribadi, Bab 8 Sanksi Administratif, Bab 9 Kelembagaan, Bab 10 Kerja Sama Internasional, Bab 11 Partisipasi Masyarakat, Bab 12 Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara, Bab 13 Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi, Bab 14 Ketentuan Pidana, Bab 15 Ketentuan Peralihan, dan terakhir Bab 16 Ketentuan Penutup).

Menkominfo dalam salah satu pernyataannya justru meminta masyarakat menjaga datanya masing-masing, mulai dari menjaga NIK hingga sering mengganti password. Jika data pribadi menjadi tanggungjawab masing-masing, lalu bagaimana peran pemerintah sendiri?

Kalau dari UU PDP yang baru disahkan, tanggungjawab terhadap data pribadi menjadi tanggungjawab pengendali data. Sebab, tidak diperbolehkan orang lain menggunakan data pribadi seorang individu lainnya kecuali atas persetujuan yang bersangkutan.

(Kewajiban pengendali data pribadi diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 50 UU PDP di antaranya wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan subjek data pribadi saat melakukan pemrosesan data pribadi, wajib menjaga kerahasiaan data pribadi, dan wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah.

Pasal 47 UU PDP secara tegas menyebutkan bahwa: Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi).

Pengesahan RUU PDP menjadi UU bertepatan dengan peretasan (kebocoran data pribadi) beberapa tokoh Indonesia oleh hacker Bjorka. Banyak kalangan yang mengaitkan pengesahan UU PDP ini terkait juga dengan terjadinya peretasan data oleh hacker Bjorka, atau memang karena kebetulan saja?

Bukan. DPR mengesahkan RUU PDP menjadi UU karena memang pembahasannya sudah selesai. Jadi, memang tidak ada kaitannya dengan peretasan (kebocoran) data pribadi orang Indonesia oleh hacker Bjorka. Begitu DPR bersama pemerintah selesai membahas sebuah RUU, maka RUU itu bisa disahkan melalui persetujuan anggota

dalam rapat paripurna DPR.

Kita sudah membahas RUU PDP ini sejak dua tahun lalu. Kita sudah membahas secara serius RUU PDP ini melewati berkali-kali rapat yang tidak terhitung jumlahnya untuk menyelesaikan RUU ini. Jadi, bukan karena ada Bjorka, lalu kita sahkan RUU PDP menjadi UU, tapi memang karena pembahasannya sudah selesai.

Bagaimana bila terjadi kebocoran data di badan (lembaga) publik atau lembaga swasta (korporasi)?

Dalam UU ini hanya ada subjek data, kemudian orang memahaminya sebagai pemilik data, dan pengendali data atau pemroses data. Jadi, sepanjang (badan) lembaga publik, korporasi, atau apapun,

secara perseorangan yang melekat data pribadi pada dirinya. Perihal hak-hak subjek data ini dituliskan secara terperinci pada Pasal 5 hingga Pasal 15.

Dalam UU PDP, pengendali data merupakan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali terkait pemrosesan data pribadi. Merujuk pengertian tersebut berarti institusi pemerintahan atau lembaga swasta yang meminta dan memproses data pribadi masyarakat dapat dikategorikan sebagai pengendali data. Sementara itu, terkait kewajiban pengendali data ini diperinci dalam Pasal 20 hingga Pasal 50.



menjadi pengendali data, maka akan terkena sanksi bila terjadi kebocoran data. Misalnya, terjadi kebocoran data di lembaga publik, tapi lembaga itu bukan sebagai pengendali data, maka tidak terkena sanksi. Dalam UU ini, lembaga publik akan terkena sanksi kalau lembaga publik itu sebagai pengendali data.

Jadi, UU ini hanya ada subjek data dan pengendali data. Lembaga publik, korporasi, atau swasta, kalau bukan sebagai pengendali data, pemroses data, maka tidak akan terkena dengan UU ini. Kalau lembaga publik bukan sebagai pengendali dan pemroses data, tidak terkena dengan UU ini. Tetapi kalau lembaga publik juga sebagai pengendali data maka akan terkena dengan UU ini.

(Istilah masyarakat sebagai pemilik data diartikan sebagai subjek data, yaitu orang

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (3) serta Pasal 47 UU PDP dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif. Penjatuhan sanksi administratif diberikan oleh lembaga dan untuk denda paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran).

Apakah UU bisa mengurangi terjadinya kebocoran data pribadi?

Harapannya, penegak hukum memiliki dasar hukum yang pasti dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kebocoran data. □

Diskusi Publik DPD RI

Dinamika Wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WACANA amandemen UUD NRI Tahun 1945 juga menjadi perhatian Kelompok DPD di MPR. Untuk membahas wacana itu Kelompok DPR menggelar 'Diskusi Publik'. Acara yang diselenggarakan di Tangerang, Banten, 10 September 2021, tidak hanya dihadiri oleh anggota DPD namun juga para pakar di bidangnya.

Hadir dalam acara selepas salat Jumat itu adalah Ketua Kelompok DPD di MPR, Tamsil Linrung; Sekretaris Kelompok DPD di MPR, H. M. Syukur; Fahira Idris, Husain Alting Sjah, Abdul Rachman Thaha, Arniza Nilawati, serta beberapa anggota DPD lainnya hadir lewat 'daring'. Sedangkan paara pakar yang hadir dalam kesempatan itu adalah Refly Harun, Rizal Ramli, Rocky Gerung, G. Seto Harianto, dan Natalius Pigai.

Tamsil Linrung mengungkapkan, wacana terkait amandemen UUD berawal ketika MPR periode 2014-2019 mengeluarkan tujuh rekomendasi. Tujuh rekomendasi itu disebutkan oleh mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu adalah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), Penataan Kewenangan MPR, Penataan Kewenangan DPD, Penataan Sistem Presidensial, Penataan Kekuasaan Kehakiman, Penataan

Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila sebagai Sumber Segala Hukum Negara, dan Pelaksanaan Pemasarakatan Nilai-Nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Ketetapan MPR.

Saat ini, jelas Tamsil Linrung, wacana amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 kuat terdengar di masyarakat, terutama untuk masalah PPHN. Menurut Tamsil Linrung, ada dinamika dalam masalah PPHN ini. Apakah

landasan hukumnya tertuang dalam UUD atau lewat undang-undang atau Ketetapan MPR. "Bila landasan hukumnya dituangkan dalam Ketetapan MPR maka perlu dilakukan amandemen terbatas UUD," tuturnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah, Tamsil Linrung mendengar aspirasi dari rakyat. Saat bertemu dengan masyarakat, tutur Tamsil Linrung, mereka juga mengikuti perkembangan politik ketatanegaraan, terutama soal rencana amandemen. "Masyarakat mempertanyakan tentang





wacana memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode, atau pengunduran pemilu”, ungkapnya. “Banyak pertanyaan muncul demikian di tengah masyarakat”, tambahnya.

Mendengar pertanyaan seperti itu, anggota DPD dari Sulawesi Selatan itu heran, sebab wacana terkait masa jabatan

presiden menjadi 3 periode tak masuk dalam rekomendasi yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh MPR Periode 2014-2019. “Kita mendengar aspirasi masyarakat dan mereka mengatakan hal demikian jangan sampai terjadi,” paparnya.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu mengakui, amandemen bukan

sesuatu yang tabu, sebab itu sangat memungkinkan. Menurut Tamsil Linrung, lebih memungkinkan bila dalam amandemen, fungsi DPD diperkuat.

Dalam diskusi dengan bahasan mengenai ‘Presiden Perseorangan’, ‘Presiden Threshold’, dan ‘Penataan Kewenangan DPD’, alumni Universitas Negeri Makassar itu tidak hanya mendorong penguatan lembaga DPD, namun juga mengkritik ‘President Threshold’. Dalam menjangkau suara dari masyarakat, menurut Tamsil Linrung, ‘President Threshold’ menjadi penyebab terbatasnya calon-calon yang bisa ditampilkan. “Hanya di Indonesia ada pembatasan yang demikian,” ungkapnya.

Selanjutnya, Tamsil Linrung menyatakan, DPD menganggap, pembatasan itu tidak perlu. Tak hanya itu, DPD malah mendorong perlu adanya calon perseorangan. Berdasarkan pengalaman, munculnya 2 calon presiden membuat terjadinya pembelahan di masyarakat. “Bila calonnya banyak, dampak negatifnya lebih kecil”, paparnya. □

AWG



Diskusi Empat Pilar MPR

Bangsa Indonesia Butuh Sosok Teladan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. Jazilul Fawaid SQ, MM., mengatakan, memperkuat Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat merupakan tema yang menarik. Hal itu diungkapnya pada diskusi 'Empat Pilar MPR' yang digelar di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, 20 September 2021.

Selain Jazilul Fawaid, hadir pula sebagai pembicara dalam kegiatan yang diikuti para wartawan Parlemen itu adalah anggota MPR dari Kelompok DPD, Dr. Agustin Teras Narang, SH.; dan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo.

Menurut Jazilul Fawaid, tema tentang Pancasila selalu hangat, sebab Pancasila adalah etika dan landasan segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. "Pancasila merupakan azimat yang ditemukan oleh para pendiri bangsa", tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Sila-sila yang ada dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. "Semua konsep Pancasila bisa masuk dalam sendi-sendi kehidupan, dan keberadaan Pancasila tidak perlu dipertentangkan dengan agama," katanya.

Pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu menyebutkan, cita-cita Pancasila sangat ideal, namun dia mengakui antara idealnya Pancasila dengan realita yang ada di masyarakat sering tidak

nyambung. Hal demikian, menurut Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, masih sering menjadi menjadi masalah.

Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu, selanjutnya menegaskan, agar Pancasila bisa hidup di tengah masyarakat atau diamalkan maka nilai-nilai yang ada harus dipahami. Kiat untuk memahami dasar negara itu ditempuh lewat pendidikan dan keteladanan. Untuk menyosialisasikan Pancasila, kata Gus Jazil, tidak cukup bila hanya dilakukan oleh MPR dan BPIP. "MPR dan BPIP mempunyai tugas untuk menguatkan Pancasila hidup di tengah masyarakat", ujarnya.

Agar Pancasila bisa menjadi gaya hidup dalam keseharian maka harus ada sosok yang bisa menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. "Nah anak-anak milenial zaman sekarang butuh sosok seperti itu", tegasnya.

Selanjutnya Gus Jazil mengungkapkan, prinsip perekonomian nasional adalah usaha yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan. "Nah, apakah prinsip perekonomian yang berjalan sudah seperti demikian, sudah seperti nilai-nilai Pancasila?" tanyanya. Untuk itu, Gus Jazil menegaskan, bila prinsip-prinsip perekonomian sudah disusun secara ke-





keluargaan maka hal demikian sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila. “Bila tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di sinilah salah satu contoh dari tidak nyambungannya antara cita-cita dan realita,” paparnya.

Maka, kata Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu, perlu adanya ‘role model’

yang bisa dijadikan acuan untuk menjadi contoh keteladanan. “Keteladanan yang kita inginkan sampai saat ini belum berhasil ditemukan”, ungkapnya. Untuk itulah, Gus Jazil ingin agar Pancasila menjadi ruh dalam segala sendi kehidupan bagi semua, sehingga Pancasila bisa membumi. “Bila implementasi Pancasila belum terjadi maka

masyarakat, anak-anak muda, akan semakin menjauh”, ujarnya.

Teras Narang yang hadir dalam diskusi lewat ‘daring’ mengatakan, semua warga negara harus memahami pentingnya Pancasila. “Ini pekerjaan yang tak boleh berhenti,” tegasnya. Untuk memberi sosialisasi atau memahamkan nilai-nilai ini, menurut mantan Gubernur Kalimantan Tengah, itu harus menyesuaikan dengan era yang ada. Unsur kebersamaan harus selalu didengarkan.

Benny Susetyo menyebutkan, seseorang itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila bisa dilihat apakah dia dalam kehidupan mempunyai rasa ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Bila nilai-nilai itu ada maka seseorang itu mampu membuat tatanan hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nilai-nilai yang demikian, menurut Benny, ada pada sosok Wakil Presiden Mohammad Hatta. Hatta merupakan sosok yang bisa dijadikan teladan.

“Elit politik memang harus memberikan contoh keteladanan”, tegas Benny. □

AWG





Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.

Wakil Ketua MPR RI Periode 2019-2024

Pengakaran Kembali Pancasila di Masyarakat

TANTANGAN dan problematika bagi Pancasila dewasa ini lebih didominasi oleh hal-hal yang bersifat kontekstual ketimbang konseptual. Kita semua memahami bahwa secara konseptual Pancasila merupakan dasar bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta landasan ideologis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sejak merdeka. Namun demikian, secara kontekstual, terdapat kesenjangan (gap) antara pemahaman dan aktualisasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Masih adanya kelompok-kelompok yang mempertentangkan antara agama dan negara adalah satu dari sekian banyak contoh kesenjangan yang ada. Oleh sebab itu, pengakaran kembali atau reinternalisasi Pancasila di tengah-tengah masyarakat menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan.

Adanya kesenjangan antara pemahaman dan aktualisasi Pancasila di masyarakat merupakan sebuah fenomena empirik, bukan sembarang asumsi atau generalisasi saja. Masyarakat Indonesia bukannya tak paham akan Pancasila. Sejak di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah, atau bagi mereka yang beruntung untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, nilai-nilai Pancasila secara kontinyu diinternalisasikan oleh tenaga pendidik dan pengajar kepada para murid atau peserta didik melalui materi pelajaran yang mereka terima. Materi seputar toleransi, tenggang rasa, tepa selira, hingga gotong royong, adalah materi-materi dasar dari Pancasila sebagai ideologi negara. Pada tataran lebih lanjut, masyarakat juga mendapat pembinaan dari lembaga-lembaga negara yang mengampu tugas untuk mendiseminasikan nilai-nilai Pancasila.

Melalui serangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis tersebut, pemahaman masyarakat yang komprehensif mengenai Pancasila, baik aspek

sejarah maupun nilai-nilai dasarnya, merupakan hal yang niscaya untuk terwujud. Namun demikian, urgensi dari Pancasila sebagai dasar negara, terlebih lagi sebagai ideologi bagi seluruh warga negaranya, tidak bisa berhenti pada sekedar pemahaman saja. Pancasila memerlukan kontekstualisasi secara nyata sebagai laku hidup sehari-hari oleh seluruh bangsa Indonesia. Dengan kontekstualisasi itu, Pancasila menjadi ideologi yang benar-benar hidup. Keluhuran Pancasila sebagai landasan idiil bangsa dan negara Indonesia, bukan terletak pada barisan kata-kata saja, akan tetapi nilai-nilai dasarnya mewujud dan terefleksi sebagai habituasi dan gaya hidup manusia Indonesia yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tantangan Pancasila

Cita-cita untuk menjadikan Pancasila sebagai habituasi dan gaya hidup manusia Indonesia, tidak dimungkiri belum terwujud secara paripurna sampai hari ini. Pancasila, seperti layaknya ideologi lainnya, memiliki tantangan sebagai konsekuensi dari zaman yang terus bergerak dan berubah. Tantangan Pancasila hari ini sangat beragam. Globalisasi yang berlangsung sangat masif, tidak hanya menggerus batas-batas fisik antarnegara (deteritorialisasi), tapi juga melunturkan sekat-sekat sosial dan budaya. Budaya asing begitu cepat masuk ke Indonesia, tanpa saringan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia terpapar oleh budaya asing yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tak hanya itu, tantangan Pancasila hari ini juga disebabkan oleh hadirnya ideologi-ideologi alternatif yang dengan cerdas memanfaatkan celah rapuh problematika sosial dan ekonomi masyarakat untuk menolak dan berpaling dari Pancasila.

Ada fenomena kontemporer yang menarik untuk dicermati, sebagai pembelajaran bahwa upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai habituasi dan gaya hidup masih perlu diperjuangkan dengan lebih

keras. Pandemi Covid-19 yang membekap Indonesia sejak 2020 yang lalu menghasilkan temuan bahwa situasi pandemi menjadi lahan yang cukup subur untuk berkembangnya intoleransi beragama. Data yang dirilis oleh Setara Institute mengenai kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) sepanjang 2020 dapat menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Sepanjang 2020, peristiwa pelanggaran KBB cukup banyak terjadi, yakni hampir 180 peristiwa. Jumlah ini sebenarnya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 200 peristiwa. Hanya saja dari sisi tindakan, pada 2020 yang merupakan tahun pandemi, angka tindakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni 422 berbanding 327. Kondisi ini cukup memprihatinkan. Pandemi yang seyogianya menjadikan bangsa Indonesia menjadi lebih guyub dan bergotong royong, namun dicerai oleh pihak-pihak yang berlaku intoleran dan bertentangan dengan nilai ketuhanan Pancasila.

Fenomena lainnya yang paling mutakhir untuk dicermati adalah dari lanskap politik internasional, yakni eksistensi rezim Taliban yang mampu bangkit dan berkuasa kembali di Afghanistan setelah Pemerintah Amerika Serikat menarik mundur seluruh pasukannya pada akhir Agustus 2021 yang lalu. Banyak negara-negara di dunia, seperti India, Cina, Rusia, bahkan Indonesia yang khawatir bahwa berkuasanya Taliban di Afghanistan akan menjadi suar bagi bergeliatnya sel-sel terorisme yang sekian lama pasif. Kekhawatiran ini tidak berlebihan. Di Indonesia sendiri, sepanjang Agustus hingga September 2021, puluhan teroris berhasil dibekuk oleh aparat. Secara ideologis, sejatinya kekhawatiran semacam ini tidak perlu ada. Radikalisme dan terorisme hanya berkembang di masyarakat yang “kering” nilai-nilai ideologisnya. Namun demikian, permasalahan Indonesia saat ini adalah nilai-nilai ideologis tersebut masih berproses untuk menjadi habituasi dan gaya hidup manusia Indonesia. Celah dalam berproses itu bisa menjadi peluang bagi kelompok-kelompok teroris untuk membuat masyarakat Indonesia terpapar dan terkontaminasi dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pengakaran Kembali

Melihat kompleksitas tantangan tersebut, langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang benar-benar hidup di masyarakat (living ideology), tidak cukup

hanya dengan melakukan diseminasi atau internalisasi nilai-nilai saja yang digaungkan di ruang-ruang tertutup semacam kelas belajar-mengajar atau ruang-ruang seminar saja. Yang dibutuhkan lebih dari itu, yaitu mengakar kembali keseluruhan nilai-nilai Pancasila dalam cipta, rasa, karsa, dan karya, seluruh manusia Indonesia. Solusi pengakaran kembali ini sepintas seperti suatu hal yang normatif, bahkan utopis. Namun menjadi suatu solusi yang sangat mudah dan logis untuk diimplementasikan, apabila manusia Indonesia menyadari dua hal utama; pertama, asal muasal Pancasila adalah nilai-nilai yang digali dari kebiasaan dan cara hidup manusia Indonesia itu sendiri, serta kedua, manusia Indonesia menyadari tanggung jawab untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sesuai tugas dan kapasitas masing-masing.

Pancasila bukanlah ideologi atau dasar negara yang digali dari belahan bumi lainnya. Pancasila adalah refleksi atau cerminan dari budaya bangsa Indonesia sendiri, budaya dalam konteks yang paling adiluhung untuk dijadikan sebagai pijakan dalam praktik berbangsa dan bernegara. Karena digali dari bumi Indonesia dan budaya masyarakat Indonesia sendiri sejak dulu kala, maka seyogianya manusia Indonesia hari ini tidak perlu merasa gamang, tidak familiar, atau merasa berjarak dengan Pancasila. Inilah modal utama untuk melakukan pengakaran kembali Pancasila di tengah masyarakat. Agar pengakaran kembali ini memiliki daya cengkeram yang kuat, seluruh bangsa Indonesia harus berani berkomitmen untuk mewujudkannya dalam laku hidup sehari-hari sesuai dengan tugas dan kapasitas mereka. Pemerintah misalnya, harus berkhidmat pada prinsip keadilan sosial dalam menetapkan kebijakan. Legislatif harus berpegang teguh pada prinsip musyawarah mufakat sebagai representasi rakyat. Masyarakat sendiri harus menjaga persatuan dan kesatuan, apapun situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal-hal tersebut merupakan contoh pengakaran secara teknis yang bisa dilakukan. Hal-hal tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang dan konsisten, sehingga menjelma sebagai habituasi dan gaya hidup. Dengan demikian, diharapkan Pancasila dapat mengakar secara kokoh sebagai dasar negara dan ideologi yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. □

Setjen MPR Hadiri Rakernas Kemenkeu Secara Virtual



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKRETARIAT Jenderal MPR hadir secara virtual pada acara 'Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021: bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi,' yang digelar Kementerian Keuangan RI, Selasa (14/9/2021). Hadir mewakili Setjen MPR pejabat eselon II, III dan IV.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Melalui rangkaian kegiatan Rakernas ini diharapkan dapat dicapai sebuah komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi modal yang sangat berharga bagi sinergi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. □

DER



Setjen MPR Gelar Sosialisasi Hukum

SEKRETARIAT Jenderal MPR gelar acara Sosialisasi Hukum dengan tema 'Pelaksanaan Pelayanan Publik di Tengah pandemi Covid-19'. Acara yang dilaksanakan di Ruang GBHN Lantai III, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021), ini menghadirkan narasumber Heru Tjahjono dari Ombudsman RI, dan CPNS di

lingkungan Setjen MPR sebagai peserta.

Acara tersebut digelar ditujukan kepada pegawai di lingkungan Setjen MPR, khususnya para pegawai yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pelayanan publik agar mampu memberikan pelayanan secara optimal. □

DER

Rakor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI



SEKRETARIAT Jenderal MPR RI, Rabu (29/9/2021), menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2021. Rapat yang dilaksanakan di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, ini dihadiri dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono.

Rapat ini diadakan untuk menyinergikan pemahaman dan tujuan, agar reformasi birokrasi yang menjadi fokus Setjen MPR dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan negara berhasil dengan baik.

Di berbagai kesempatan, Setjen MPR Ma'ruf Cahyono selalu mengingatkan agar reformasi birokrasi harus dicapai dan ditingkatkan. Baginya, reformasi birokrasi harus memberi dampak dan manfaat yang lebih terasa di lingkungan kerja Setjen MPR sehingga bisa mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. □



DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Rahmad Handoyo, SPI., MM., Anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan

Tetap Waspada, Pandemi Belum Sepenuhnya Terkendali

PERTAMBAHAN kasus positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sejak awal Agustus 2021 memperlihatkan tren menurun atau melandai. Merujuk pada data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sepanjang Juli – September 2021, tren penurunan angka kasus positif tampak saat memasuki Agustus hingga awal September 2021. Tren penurunan terus berlanjut di bulan September. Pada akhir September angka kasus positif Covid-19 berada di kisaran 2.000 kasus, bahkan di bawah 2.000 kasus.

Kabar ini membawa angin segar dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Masyarakat pun seolah euforia dengan keadaan ini. Tampaknya, masyarakat mulai beradaptasi dengan kehidupan new normal di tengah pandemi Covid-19. Bagaimana tanggapan anggota dewan terhadap fenomena ini? Berikut perbincangan Majelis dengan anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo, SPI., MM. Petikannya.

Sejak awal Agustus 2021, penambahan kasus Covid-19 mulai melandai. Merujuk data Satgas Penanganan

Covid-19, penambahan kasus positif Covid-19 menunjukkan tren menurun sejak Agustus hingga September 2021. Apa pendapat Bapak?

Kita tentu berterima kasih kepada pemerintah, presiden, dan seluruh jajarannya di pusat dan daerah, dan juga seluruh rakyat Indonesia, yang dengan penuh kesabaran dan bergandengan tangan, kita bisa menurunkan rate positif Covid-19 maupun dari tingkat kematian. Hasil ini patut kita syukuri dan inilah hasil kerja kita bersama. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi adanya penurunan kasus positif Covid-19 ini dan tidak ber-euforia. Sebab, penurunan kasus Covid-19 dan tingkat kematian sebenarnya masih bersifat labil. Artinya, sewaktu-waktu kasus Covid-19 bisa kembali meledak dan naik kembali.

Kita harus berkaca dari negara-negara lain. Di beberapa negara, kasus Covid-19 nyaris terkendali, misalnya Singapura. Sekarang aktivitas masyarakat di negara itu nyaris lumpuh karena meningkatnya kembali kasus Covid-19. Begitu juga di Amerika Serikat terjadi kenaikan kembali kasus Covid-19 setelah sebelumnya nyaris terkendali. Contoh lain adalah Israel, Inggris, yang

tadinya terkendali sekarang kasus Covid-19 meningkat kembali.

Bahkan, di negara asal virus korona ini, yaitu Cina yang bisa dikatakan pandemi Covid-19 sudah terkendali, tetapi sekarang pemerintah kembali melakukan pengetatan dengan mewajibkan protokol kesehatan. Bercermin dari negara-negara itu maka tidak ada negara yang benar-benar bisa mengendalikan Covid-19. Artinya, kasus Covid-19 bisa melandai, tetapi sewaktu-waktu bisa naik kembali. Karena itu, meskipun kita berhasil menurunkan angka Covid-19, kita tetap waspada dan berjaga-jaga dengan menjalankan protokol kesehatan.

Dengan kata lain, pemerintah belum sepenuhnya mengendalikan pandemi Covid-19?

Kalau dari sisi jumlah kasus positif Covid-19 yang sudah turun dan melandai, Indonesia menjadi salah satu negara terbaik di dunia yang bisa mengendalikan pandemi Covid-19. WHO, negara-negara lain, bahkan Presiden Amerika Serikat mengundang Presiden Joko Widodo untuk memberikan masukan terhadap pengendalian pandemi Covid-19. Hal ini merupakan prestasi bagi Indonesia.

Meski demikian, belum ada negara di dunia yang sepenuhnya bisa mengendalikan pandemi Covid-19. Bahkan para epidemiolog menyebutkan bahwa Covid-19 tidak akan pernah hilang dari muka bumi, tetapi dari pandemi akan berubah menjadi endemi. Karena itu, perlu kerja keras dari pemerintah bersama semua pihak dan masyarakat bergandengan tangan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Termasuk di Indonesia, sekalipun pemerintah berhasil menurunkan jumlah kasus Covid-19, tetapi tidak ada jaminan kasus Covid-19 tidak akan kembali naik dan tidak ada jaminan pemerintah bisa mengendalikan terus-menerus pandemi Covid-19. Karena itu, kita perlu waspada dan perlu kerjasama semua pihak, karena keadaan sekarang masih labil. Dengan demikian, kita tidak boleh melupakan protokol kesehatan. Itu (protokol kesehatan) itu wajib dalam kehidupan keseharian kita.

Masyarakat seolah-olah menganggap kehidupan kembali berjalan normal. Ada euforia di tengah-tengah masyarakat. Bahkan sekolah pun sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Bagaimana menurut Bapak?

WHO sudah mengingatkan bahwa Indonesia bisa mengalami gelombang ketiga pandemi Covid-19. Kita berterimakasih karena sudah diingatkan WHO. Yang penting bagi kita adalah jangan euforia berlebih bahwa virus korona sudah tidak ada. Berkaca dari negara lain kita harus berjaga-jaga bahwa pandemi Covid-19 ini belum bisa dikendalikan sepenuhnya.

Silakan pemerintah untuk mengambil kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Ketika pandemi Covid-19 mulai terkendali, PPKM dilonggarkan sesuai dengan levelnya. Tetapi ketika dilonggarkan, masyarakat jangan menganggap seolah-olah Covid-19 sudah tidak ada, kemudian euforia, tidak lagi menjalankan protokol kesehatan. Karena itu, kita semua saling mengingatkan dan mengedukasi, baik oleh tokoh masyarakat, agama, daerah, agar tetap menjalankan protokol kesehatan.

Sedangkan pembelajaran tatap muka memang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Meski demikian, pelaksanaan pembelajaran tatap muka harus dengan ke-

waspadaan dan kehati-hatian. Misalnya, dengan *random test*. Jika dari *random test* diindikasikan penyebaran virus korona, maka harus diselesaikan dan dilakukan *tracing* agar tidak terjadi kluster. WHO sudah mengingatkan pembelajaran tatap muka bisa memunculkan kluster baru. Karena itu, protokol kesehatan harus dilaksanakan secara ketat di sekolah.

Apakah Indonesia juga bakal mengalami gelombang ketiga pandemi Covid-19?

Potensi untuk terjadinya gelombang ketiga pandemi Covid-19 di Indonesia tetap ada dan cukup besar. Banyak yang memprediksi pada bulan Desember, saat terjadi liburan akhir tahun, perayaan Natal dan Tahun Baru,



kasus Covid-19 akan melonjak lagi. Kita punya pengalaman, pada saat liburan panjang dan libur bersama, kasus Covid-19 selalu naik. Libur panjang memberi kontribusi signifikan terhadap penambahan kasus baru Covid-19.

Jadi, untuk mengantisipasi gelombang ketiga yang diprediksi pada Desember nanti, kita harus hati-hati. Jangan euforia. Kita harus antisipasi sejak dini. Kita juga harus mempersiapkan logistik seperti alat-alat kesehatan, obat-obatan. Jangan sampai terjadi kelangkaan obat atau kelangkaan oksigen seperti kemarin. Kita minta pemerintah untuk mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk mengantisipasi gelombang ketiga.

Bagaimana dengan program vaksi-

nasi massal untuk menghadapi pandemi Covid-19? Masih banyak juga warga yang menolak divaksin sekalipun pemerintah menyebutkan wajib vaksin?

Sebenarnya program vaksinasi massal kita sudah bagus, *on the track*. Kita bukan negara produsen, vaksin seluruhnya adalah impor, tetapi kita menduduki nomor empat dari segi jumlah yang divaksin dan nomor enam untuk prosentase penduduk yang sudah divaksin. Ini merupakan sebuah prestasi. Kita tetap dukung target vaksinasi dari pemerintah, yaitu target 80% bisa tercapai pada akhir tahun ini.

Tetapi, kita menyadari masih ada orang yang tidak mau divaksin. Kita melakukan upaya persuasif kepada mereka yang masih menolak vaksin. Di sisi lain, saya mengapresiasi masyarakat karena mereka begitu antusias untuk mendapatkan vaksin.

Apakah nanti bakal tercipta herd immunity?

Dalam rapat dengan Kementerian Kesehatan disampaikan bahwa kemungkinan untuk *herd immunity* tidak akan tercapai. Itu adalah masukan dari epidemiolog UI, UGM, dan lainnya. Sebab efikasi dari vaksin menurun, setelah disuntik vaksin, enam bulan kemudian menurun, satu tahun kemudian menurun. Karena itu, ada wacana tahun depan pemberian suntik booster ketiga. Artinya, kita harus berdamai dan hidup berdampingan dengan Covid-19.

Bagaimana kesiapan masyarakat hidup berdampingan dengan Covid-19?

Siap atau tidak siap memang harus disiapkan karena fakta dan realitasnya seperti sekarang, yaitu Covid-19 akan tetap ada. Bahkan, dari pandangan pakar, akademisi, epidemiolog, bahwa Covid-19 ini tidak akan pernah hilang. Karena itu, siap atau tidak siap, memang harus siap mandiri, yaitu perubahan pola dan perilaku hidup kita. Misalnya, sebelumnya kita tidak memakai masker, mau tidak mau, kita mengubah pola hidup dengan selalu memakai masker.

Pandemi ini dikendalikan tidak sebatas obat, vitamin, vaksin, tetapi yang paling penting adalah perubahan pola hidup dan perilaku. Jadi, perlu edukasi dan sosialisasi tentang perubahan perilaku hidup masyarakat. □

Jadi Juri Lomba Karaoke

HUT MPR RI ke-77 Seru



Lita Zein

WOW.. jadi juri lomba karaoke antar Biro MPR dalam rangka HUT MPR, seruuuu banget," begitu bunyi cuitan **Lita Zein** yang diunggahkannya di media sosial pekan terakhir Agustus lalu.

Perempuan yang bernama lengkap R.A. Suryani Yanti Lalita Zen mengungkapkan kesannya sebagai salah seorang Juri Lomba Karaoke dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 MPR RI, yang digelar 25 Agustus 2022.

Lomba karaoke ini diikuti oleh para karyawan MPR, mewakili Biro-Biro yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Seru. Salah satu peserta menampilkan aksi goyang hebohnya, dan Lita Zen terkekeh-kekeh menyaksikannya. "Wah itu sih harusnya jadi juara terheboh," kata penyangi yang tegabung dalam grup vocal Indonesia, Elfa's Singer, itu. □

DER



Olahraga Harusnya Mempersatukan

SELEBRITAS dan presenter **Arie Untung** sangat menyesalkan terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Sabtu malam (1 Oktober 2022). Dalam pertandingan *derby* antara Arema FC vs Persebaya terjadi kerusuhan yang menyebabkan 131 orang meninggal dunia (data 5 Oktober 2022).

Waktu peristiwa itu terjadi, Arie Untung mengaku, sedang berada di Surabaya. Lewat Instagram pribadinya, ia membagikan sebuah video memperlihatkan betapa semrawut keadaan di stadion Kanjuruhan.

“Guys. Sayang banget, hidup dirawat orang tua, disekolahkan, bagi yang berkeluarga anak istri menunggu di rumah, akhirnya meninggal hanya karena skor akhir sepakbola tidak memuaskan. Yuk, kita fikir2 apakah worth it?” ujar Arie Untung.

“Semoga next tidak terulang seperti ini lagi ya guys. Olahraga harusnya mempersatukan. Turut berduka untuk semua korban semoga husnul khotimah, Aamiin,” kata Arie Untung. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Arie Untung



Ariel Tatum dan Tamara Dai

Wakil Indonesia Pertama di Paris Fashion Week

ARTIS cantik **Ariel Tatum** dan selebgram di media sosial Tiktok **Tamara Dai** memastikan partisipasinya dalam Paris Fashion Week Spring/Summer 2023. Keduanya jadi wakil Indonesia pertama berjalan di runway show *Le Defile L'Oreal Paris*.

Di acara rangkaian pekan mode bergengsi dunia tersebut, Ariel Tatum dan Tamara Dai menyuarakan soal Pemberdayaan Perempuan. Keduanya menyampaikan pesan bertajuk: *Walk Your Worth*. *Walk Your Worth* diambil dari tagline terkenal L'Oréal Paris, 'Because You're Worth It' atau 'Karena Kamu Begitu Berharga'.

“Harapanku melalui Le Défilé L'Oréal Paris ini tidak ada lagi perempuan yang ragu untuk mengekspresikan dirinya, termasuk dalam bermake-up dan pilihan pakaian yang nyaman mereka gunakan,” ujar Tamara Dai. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Festival Payung Indonesia Cermin Keanekaragaman Budaya Nusantara

PERIBAHASA mengatakan, Sedia Payung Sebelum Hujan. Artinya, harus bersiap-siap atau berjaga-jaga sebelum sesuatu terjadi. Terutama, kemungkinan menghadapi hal-hal buruk yang tak dikehendaki. Peribahasa itu cukup masyhur di kalangan masyarakat. Tak jarang, para orangtua menyampaikan peribahasa itu kepada anak-anaknya, baik saat anak-anak hendak bepergian jauh atau saat akan menjalani hidup berumah tangga.

Terlepas dari makna pepatah tersebut, manfaat payung memang tidak kecil. Payung sangat lumrah digunakan di saat hujan. Lalu, payung juga tak jarang juga dipakai saat berjalan di bawah terik matahari, atau untuk melindungi badan dari sengatan matahari. Di masa kini, fungsi payung terus berkembang. Salah satunya sebagai kelengkapan dalam berbusana atau berpenampilan.

Fungsi payung sebagai kelengkapan dalam berbusana dan berpenampilan, itu terlihat pada Festival Payung Indonesia (FESPIN), 2-4 Agustus 2022, di Puro Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah. Ratusan jenis payung, mulai dari bentuk warna, ukuran hingga kegunaan ditampilkan pada

acara yang mengangkat tema *The Kingdom and Umbrella* itu.

Festival Payung Indonesia, di Puro Mangkunegaran Solo itu mampu menghadirkan pemandangan yang tidak lazim. Bisa dibayangkan, keberadaan payung-payung itu dapat mengubah suasa di dalam Puro Mangkunegaran menjadi lebih semarak



dan meriah.

Hampir seluruh bagian Puro Mangkunegaran ditutupi payung dengan berbagai corak dan warnanya. Salah satunya bisa dilihat di tenan-tenan kerajinan payung dari Kabupaten Tasikmalaya. Setidaknya ada tiga tenan dari Kabupaten Tasikmalaya yang ambil

bagian dalam Festival Payung Indonesia 2 ini. Salah satunya adalah Sateja Payung Geulis.

Sateja Payung Geulis menghasilkan payung-payung yang berwarna cerah dengan corak bunga. Beberapa payung dari daerah yang juga dikenal sebagai penghasil karya border ini memiliki corak Tionghoa, baik pemilihan warna maupun bunga.

Menurut penjaga tenan, corak Tionghoa pada payung karya Sateja sudah berlangsung lama. Itu terjadi berkat adanya asimilasi budaya Tionghoa di daerah Jawa Barat, khususnya di Tasikmalaya. Karena itu, sebagian payung Sateja memiliki motif dan corak, layaknya produk payung dari negeri Tirai Bambu.

Origami Indonesia

Selain Sateja, keindahan dan keanekaragaman payung Indonesia juga bisa dilihat dari karya-karya Asosiasi Origami Indonesia. Seperti Sateja, payung buatan Asosiasi Origami Indonesia juga memilih warna-warna cerah. Seperti merah, hijau dan biru. Bahkan Asosiasi Origami Indonesia tak jarang menggunakan warna-warna pastel, sehingga terlihat jelas meski dari kejauhan.



Seperti nama pembuatnya, payung produksi Asosiasi Origami Indonesia ini mengandalkan seni lipatan sebagai aksesoris utamanya. Berbagi bentuk seni lipatan ditempelkan di bagian atas payung, sehingga tampak ramai dan beda dibanding payung yang lain. Ada yang menyerupai bunga, daun, kupu-kupu, sampai lipatan berbentuk burung dan kapal.

Ada juga payung-payung yang dibuat berdasar seni rajut dan kain perca. Kedua jenis produksi payung ini jelas tidak bisa digunakan sebagaimana fungsi payung melindungi diri dari hujan. Tetapi payung ini masih bisa melindungi diri dari sengatan sinar matahari. Namun, payung jenis ini sangat cantik dan cocok menjadi aksesoris berpakaian.

Bahkan ada beberapa payung rajut yang dibuat berdasarkan tema tertentu dengan bentuk yang sangat cantik. Salah satunya adalah Son: Song of Kenes. Payung ini terinspirasi dari batik motif udan liris. Yang memiliki arti ketabahan, keprihatinan dan kesabaran, akan sebuah kebahagiaan. Terdapat tujuh tingkatan yang mewakili di setiap rasanya. Ada rasa haru, kebahagiaan, kehilangan, sedih, kesal, marah, dan rasa syukur. Jadi, pada saat proses pembuatan payung teringat ketika mengandung dan

melahirkan anak, ya payung ini aku dedikasikan untuk anakku kenes, yang saat ini sudah bahagia di sisi Allah.

Selain itu, ada pula kain rajutan yang buat sesuai motif Batik Truntum. Yaitu, motif batik yang diciptakan oleh kanjeng ratu kencana (Permaisuri Ingkang sinuhun Sri Susuhunan Pakubuwono III dari Surakarta). Motif batik ini bermakna cinta yang tumbuh kembali. Dia



menciptakan motif ini sebagai simbol cinta yang tulus tanpa syarat, abadi, dan semakin lama semakin terasa subur berkembang.

Nama truntum berasal dari kata Jawa, yaitu Teruntum. Artinya tumbuh, bersemi atau semarak kembali. Truntum merupakan gambaran serupa kuntum, yaitu kembang di

langit yang bentuknya digambarkan serupa kembang tanjung. Filosofi itu sering dinarasikan pula sebagai hubungan pesona jawa dengan tuhan. Batik truntum bukan hanya sekedar motif, batik ini menjadi simbol kekinian yang merepresentasikan kesetiaan, kasih sayang, dan harmonisasi.

Yang tak kalah menarik, Festival Payung Indonesia 2022 juga menampilkan replika payung raksasa pola Pura Mangkunegaran. Terdapat 20 motif Pura Mangkunegaran yang ditampilkan pada FESPIN 2022, salah satunya adalah Songsong. Replika ini dibuat dengan ukuran diameter 6 meter, berguna sebagai media edukasi," kata Direktur Program FESPIN 2022 Heru Mataya di sela membuka festival di Pura Mangkunegaran Solo tersebut.

Festival Payung Indonesia tahun 2022 ini melibatkan 81 grup seni dan 50 komunitas kreatif dari berbagai daerah di Indonesia. Ikut juga dalam kegiatan tersebut, seniman dari Thailand, India, dan Spanyol. Kehadiran Sankhampaeng Cultural Centre Thailand adalah bentuk komitmen mereka dalam hubungan sister festival antara FESPIN (Festival Payung Indonesia) dan Borsang Umbrella Festival (Chiang Mai). □

MBO

Romo H. R. Muhammad Syafi'i, SH, M.Hum

Kasus Sambo, Momentum Reformasi

Bagi Polri



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SUDAH menjadi rahasia umum, jika lembaga legislative Senayan Jakarta, dikenal sebagai salah satu institusi yang glamor. Namun, tidak banyak yang tahu kalau lembaga Legislative tersebut juga menjadi salah satu sekolah kehidupan. Ada banyak kisah perjuangan, dan jatuh bangunnya kehidupan anak manusia di sana. Salah satu tokoh yang harus menjalani kisah sedih dan jatuh bangun sebelum menjadi anggota legislative itu adalah Romo H. R. Muhammad Syafi'i, SH, M.Hum, (62), anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

Siapa sangka, Romo H.R. Muhammad Syafi'i yang pernah menjadi calon Wakil Gubernur Sumatera Utara itu pernah merasakan kerasnya perjuangan hidup. Saat kecil, ketika duduk di bangku sekolah dasar, pria kelahiran Medan, 21 November 1959, ini sudah ikut membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Setiap pagi saat berangkat ke sekolah ia membawa kue-kue basah buatan ibunya untuk dijual. Kalau ada kue yang belum laku, cerita anggota legislative dapil Sumut I, dia kembali menjualnya di siang hari sepulang sekolah, sembari juga ikut menjual kue-kue lain dari sisa jualan kue saudara-saudaranya yang juga berdagang.

"Selain bekerja, saya juga hidup prihatin sejak kecil. Pagi hari, saya sarapan kue, itu pun kalau ada kue yang rusak, karena karena kue yang baik saja yang dijual. Jadi, kalau tidak ada kue rusak berarti tidak sarapan. Semua itu harus dikerjakan, karena ayah saya hanya seorang supir truk, gajinya hanya cukup untuk kebutuhan satu pekan, sementara anaknya ada delapan," kata anak keenam delapan bersaudara pasangan H. Raden Muhamad Sanusi dan Hj. Latifah Hanum.

Pada sore hari, Romo begitu ia biasa disapa, berkewajiban memelihara 15 induk ayam milik orangtuanya. Ia harus memikul beban itu sendiri, karena saudaranya yang lain tidak ada yang peduli dan berminat terhadap ternak. Nahasnya, meski sudah memelihara ayam, Romo tidak bisa menikmati hasilnya. Karena sebagian telurnya dijual, sebagian lagi dieramkan agar menetas jadi anak ayam.

"Saya baru bisa makan telur kalau ada yang jatuh, atau retak sehingga tidak bisa dieramkan atau dijual. Kemudian, kalau ada ayam yang mau mati, buru-buru dipotong, saat itulah saya baru bisa makan daging ayam," cerita Romo tentang masa lalunya.

Saat duduk di bangku SLTA, kehidupan Romo semakin membaik. Ia sudah bisa memegang uang dari hasil jerih payahnya sendiri, upahnya bekerja membantu tukang bangunan. Ia juga mengajarkan seni Maramis, membaca Alquran, dan karate. Pada saat tertentu ia juga mengisi acara peringatan hari besar Islam.

Ketika duduk di bangku kuliah, bapak tujuh anak dan kakek dari 25 cucu hasil pernikahannya dengan Dra. Khairina Rosyita, itu sudah semakin mandiri. Ketika duduk di bangku SD Romo berjalan kaki sejauh lima kilo meter saat berangkat dan pulang sekolah. Jarak tempuh tersebut semakin jauh lagi saat ia duduk di bangku SLTA, mencapai 17 km. Tetapi sejak kuliah ia selalu diantar jemput oleh teman-temannya. Fasilitas antar jemput didapat Romo karena ia membantu teman-temannya mengatasi kesulitan pelajaran. Sebagai gantinya mereka mengantar jemput Romo dari kampus ke rumah dan sebaliknya.

Ketika meraih Sarjana Muda Hukum, Romo diangkat menjadi kepala sekolah. Saat itu ia juga mengajar semua pelajaran ilmu sosial.



Karena kesibukannya itulah, kuliahnya terlantar. Apalagi saat itu ia juga melangsungkan pernikahan. Sehingga praktis empat tahun kemudian, baru menyelesaikan sarjananya.

“Saya diingatkan seorang kawan, untuk segera menyelesaikan pendidikan sarjana, kalau tidak akan di DO (drop out). Saya segera memenuhi segala persyaratan, dibantu istri saya menyelesaikan ujian dan alhamdulillah berjalan lancar,” kata Muhamad Syafi’i lagi.

Tentara Nasional Indonesia

Sejak menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, perekonomian Syafi’i dan keluarganya semakin membaik. Berbagai jenis pekerjaan dilakoninya. Tetapi, seluruh aktifitas yang dilakukannya itu bukanlah cita-cita yang diinginkan. Dulu, Romo ingin menjadi tentara. Karena waktu itu tentara masih memegang Dwi Fungsi ABRI. Namun cita-cita itu kandas, karena kecelakaan lalu lintas yang ia alami saat masih di SMA. Ia menderita patah tulang, dan tidak bisa menjadi anggota TNI.

Gagal menjadi anggota TNI, Romo pun berganti cita-cita. Agar bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara, kandidat doktor Tafsir Qur’an, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, ini berkeinginan menjadi dosen, supaya bisa mengusahakan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Tetapi, cita-cita itupun tidak bisa direngkuh, karena lamanya waktu yang dia perlukan untuk menyelesaikan sarjana.

“Pada 1997, ada kesempatan menjadi anggota DPRD melalui Partai Persatuan Pembangunan. Namun, pada 1999, PPP pecah kongsi,

saya dipercaya KH. Zainuddin MZ memegang Partai Bintang Reformasi Sumatera Utara, dan menjadi anggota DPRD provinsi hingga 2009. Pada 2008, saya mencalonkan diri menjadi Wakil Gubernur, tetapi kalah,” kata Romo K. H. Muhammad Safi’i lagi.

Pada 2009, Muhammad Safi’i terpilih menjadi anggota DPR RI, namun partai yang mengusungnya gagal mencapai ambang batas parlemen. Praktis Muhammad Safi’i pun urung duduk di kursi parlemen. Baru pada Pemilu 2014, bersama Partai Gerindra, Muhammad Safi’i sukses merengkuh kursi di Senayan, sebagai anggota DPR RI. Keberhasilan itu, diulanginya lagi pada Pileg 2019.

Kini, Romo dipercaya oleh Fraksi Partai Gerindra duduk di Komisi III DPR RI. Sebagai anggota komisi yang membidangi Hak Asasi Manusia dan Keamanan, Romo mengaku prihatin munculnya kasus pembunuhan yang menimpa Brigadir Yosua. Menurutnya, kasus pembunuhan yang didalangi Ferdy Sambo itu harus menjadi momentum untuk meletakkan Polri pada tugas dan fungsinya sebagaimana perundangan yang berlaku. Dan, tidak menarik-narik Polri keluar dari tupoksinya. Yaitu, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi melayani dan mengayomi masyarakat. Serta menegakkan hukum.

“Kasus Sambo menunjukkan biasanya tupoksi polisi. Dalam UUD NRI Tahun 1945, tugas polisi itu sudah jelas, yaitu: melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat serta menegakkan hukum untuk ketertiban masyarakat. Apa yang ada dalam UUD itu juga tertuang dalam Tap MPR Nomer 6/2000 tentang Pemisahan TNI-Polri.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ini penting, karena TNI - Polri punya tugas yang jelas, satu tantara yang lain sipil,” kata Romo.

Dalam Tap MPR VI/2002 tentang Pemisahan TNI-Polri ditegaskan adanya penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Artinya, baik TNI maupun Polri harusnya tidak memiliki apa yang disebut Dwi Fungsi, tidak melakukan pekerjaan selain tupoksinya. Kemudian Tap VII tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparaturnya dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tap ini juga menegaskan, anggota kepolisian tidak boleh memegang jabatan di institusi sipil, kecuali setelah pensiun.

Selain itu, dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga memuat bahwa polisi harus netral tidak berpolitik, dan baru boleh duduk dalam institusi sipil kecuali setelah pensiun. Tugas dan fungsi Polri, kata Romo, jadi bias karena jabatan polisi di institusi sipil malah menggurita.

“Akhirnya, banyak orang yang bilang, polisi itu seperti partai politik. Bahkan, ada sindiran sadis lagi bahwa makna NKRI berubah menjadi Negara Kepolisian Republik Indonesia. Karena partai politik, polisi menjadi parpol yang memiliki portofolio paling besar. Gerindra dapat dua menteri, PKB dapat tiga menteri, tapi polisi selain menteri, kepala badan, kepala lembaga, bahkan salah satu atau dua dirjen adalah polisi. Akibatnya, mereka kehilangan arah sebagai alat negara yang bertugas melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat serta menegakkan hukum. Polisi juga memiliki tujuan untuk mendapatkan posisi-posisi di institusi sipil itu, karena itu ia bertindak seperti partai politik, yaitu memihak,” kata Romo lagi.

Konsekuensinya, menurut Romo, penguasa sering menggunakan polisi sebagai alat politik. Sedangkan polisi memanfaatkan keinginan penguasa untuk melebarkan gurutannya. Karena itu, polisi kerap melakukan apa saja pesanan penguasa dalam rangka mewujudkan kepentingannya. Untuk memantapkan jabatan-jabatan di institusi sipil.

“Inilah yang mengubah arah kerja dari polri. “Tidak lagi melindungi dan mengayomi masyarakat,” karena hukum yang ditegakkan lebih sebagai kepentingannya ketimbang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Karena itu, “Sudah saatnya polisi dikembalikan ke jati dirinya, yaitu sebagai alat negara yang bertugas menegakkan

kamtibmas dan memastikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat,” kata Romo.

Munculnya peristiwa Sambo, kata Romo, harus menjadi momentum untuk menegakkan hukum. Mengembalikan polisi sesuai ketentuan perundangan. Meskipun, jalan kearah sana masih terlihat terjal. Presiden seolah enggan melakukan reformasi kepolisian. Sedangkan DPR tidak bisa mengurangi kewenangan yang menempel pada Kepala Negara.

Prabowo Subianto

Sebagai politisi, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, SH., M.Hum., terbukti tangguh dan pilih tanding. Kesimpulan itu bisa didapat dari rentetan karier politiknya yang relatif panjang dan beliku. Seperti, saat Romo memilih untuk meloncat dari PPP menjadi PBR. Tidak lama setelah itu, kepemimpinannya di PBR Sumut menjadi yang terbaik se Indonesia. Bahkan, Romo juga sempat terpilih menjadi anggota DPR RI dari PBR. Hanya saja langkahnya urung terjadi karena PBR tidak lolos Parliamentary Threshold.

Semua itu terjadi karena Romo senantiasa memperjuangkan nilai yang diyakininya secara totalitas. Itu salah satunya terjadi ketika Romo merelakan menjual rumahnya, sesaat sebelum PBR akhirnya bergabung dengan Partai Amanat Nasional.

“Saya sampai habis-habisan. Pemilihan Gubernur di Sumut saya menjadi wakil gubernur ternyata kalah. Kemudian Pileg 2009, terpilih ke DPR RI, tetapi gagal ke senayan, semua itu butuh pengorbanan, dan saya harus menjual rumah untuk membiayai semua perjuangan tersebut,” ujar Romo.

Kini, sebagai salah satu orang kepercayaan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Muhammad Syafi’i berhasil menambah kantong-kantong pemilih Gerindra di Provinsi Sumatera Utara. Dia juga berhasil menarik simpati tokoh-tokoh masyarakat untuk maju menjadi caleg maupun simpatisan Partai Gerindra.

“Banyak yang selalu saya ajak turun ke masyarakat, memberantas kejahatan, dan akhirnya mereka sadar tugas tersebut tidak bisa saya lakukan sendiri. Mereka pun sepakat untuk maju menjadi caleg maupun menyalurkan suaranya buat Gerindra,” kata Muhammad Syafi’i.





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Selain politisi tangguh dan pilih tanding, nama Romo yang di depan terdapat H.R. Muhamad Syafi'i membuatnya mudah dikenali. Awalnya, Romo digunakan sebagai panggilan anak kepada ayahnya, sebagaimana lazimnya orang Jawa. Lambat laun, nama tersebut malah menjadi sebutan yang tak terpisahkan dari H.R. Muhamad Syafi'i. Akibatnya, masyarakat beranggapan bahwa Romo adalah bagian dari nama H. R. Muhamad Syafi'i.

Masalah muncul paska Pemilu 2014. Banyak simpatisan H.R. Muhamad Syafi'i menyatakan tidak memilihnya karena tidak ada nama Romo di depan namanya. Beruntung, meski tidak mendapat suara sebagai mana seharusnya, namun Romo H.R. Muhamad Syafi'i tetap terpilih sebagai anggota DPR RI dengan perolehan suara sebanyak 49.000.

"Jelang Pemilu 2019, kawan-kawan mengusulkan saya memakai nama Romo di depan nama sesungguhnya, yaitu H.R. Muhamad Syafi'i. Setelah berproses di pengadilan akhirnya diputuskan, saya boleh pakai nama Romo. Dan, perolehan suara saya pada Pemilu 2019 pun meningkat hampir lima kali menjadi 217.000 pemilih," pungkash Romo H.R. Muhamad Syafi'i. □

MBO



Biodata

H. Romo Muhammad Syafi'i, SH, M.Hum

Tempat tanggal lahir : Medan, 21 November 1959.

Nama Istri : Dra Khairina Rosita

Riwayat Pendidikan

- SD , SD Negeri 88 Medan. Tahun: 1967 – 1973
- SMP , SMP Negeri 12 Medan. Tahun: 1973 – 1976
- SMA , SMA Joshua. Tahun: 1976 – 1979
- S1 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Tahun: 1979 – 1988
- S2 Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara. Tahun: 2004 – 2007
- S3 Tafsir Qur-an, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Tahun: 2018 – sekarang

Perjalanan Karir

- 1982-1995 Mengajar di Perguruan Ade Irma,
- 1982-1995 Guru di Taman Siswa Polonia
- 1982-1995 Guru di Nasional Khalsa
- 1982-1995 Guru di Agus Salim
- 1982-1995 Guru di Budi Satria
- 1990-1995 Penatar P4 BP7 Provinsi Sumatera Utara.
- 1997-1999 Anggota DPRD Kota Medan
- 1999-2000 Dosen Agama Islam Universitas Sisingamangaraja XII
- 2004-2009 Ketua Fraksi, Partai Bintang Reformasi DPRD Provinsi Sumatera Utara
- 2014-2019 Anggota Komisi VIII, dan Anggota Komisi III Fraksi Partai Gerindra DPR-RI
- 2019-2024 Anggota Komisi III, Fraksi Partai Gerindra DPR-RI
- 2019-2024 Anggota Badan Legislasi DPR RI,
- 2019-2024 Anggota Badan Pengkajian MPR RI.

Pengalaman Organisasi

- 1978-1985 Ketua Umum Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
- 1983-1984 Ketua Bidang Dakwah HMI Komisariat Fakultas Hukum USU.
- 1985-1995 Ketua PAC PPP Kecamatan. Medan Timur dan Medan Perjuangan, Kota Medan.
- 1995-2000 Wakil Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kota Medan,
- 2002-2006 Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi (DPW PBR),
- 2006-2011 Komisi Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara.
- 2006-2011 Wakil Ketua Umum DPP Partai Bintang Reformasi
- 2007-2012 Dewan Penasehat Wadoryu Karate-Do Indonesia (WADOKAI)
- 2007-2011 Ketua Harian, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- 2012-2020 Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, sebagai, tahun
- 2013-2018 Ketua FAHMITAMAMI Sumatera Utara.
- 2015-2020 Dewan Penasehat HKTI Kota Medan
- 2017-2021 Ketua Umum, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- 2018-2022 Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (PP IKA USU)
- 2020-2025 Ketua Bidang Pembelaan dan Bantuan Hukum DPN HKTI.
- 2020-2025 Wakil Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra

Mendesaknya Kebutuhan Kerja Sama Pusat dan Daerah Berbasis Data

DORONGAN Presiden Joko Widodo agar jajaran pemerintah pusat dan daerah mengintensifkan kerjasama untuk mengatasi inflasi tinggi harus segera direalisasikan. Sinergi ini sebenarnya sudah ada kerangkanya, yakni Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN). TPIN terdiri dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi, dan TPID Kabupaten/Kota. TPIP beranggotakan sejumlah menteri, Gubernur Bank Indonesia, hingga Kapolri, sedangkan TPID beranggotakan gubernur, bupati, dan wali kota beserta jajaran terkait.

Harapan Presiden agar sinergi TPIN ditingkatkan yang disampaikannya di depan 500-an perwakilan pemerintah daerah dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 pada 18 Agustus 2022 lalu, tentunya karena tantangan yang dihadapi saat ini begitu urgen atau tidak normal yang membutuhkan upaya mengatasinya dengan segera. Hal lainnya, karena koordinasi di tim tersebut selama ini dianggap kurang terjalin dengan baik. Indikasi ini terlihat dari desakan Presiden agar jajaran pemerintah pusat dan daerah bekerja memperkuat kerjasama dalam hubungan TPIP-TPID dengan melihat persoalan secara makro, mikro, dan detail dengan berbasis data.

Penyebab Ketidaknormalan

Tantangan besarnya adalah dampak dari perang Rusia-Ukraina yang telah mendorong inflasi tinggi di sejumlah negara akibat terganggunya rantai pasok global. Beberapa negara anggota G-20 mengalami inflasi (secara tahunan, yoy) lebih dari dua digit pada Juli 2022, yakni: Turki (79,6%), Argentina (71%), Rusia (15,1%), UK (10,1%), dan Brazil (10,07%). Indonesia ikut terpengaruh kondisi tersebut sehingga dalam dua bulan terakhir, inflasi tahunan lebih dari patokan tertinggi 4%, yakni 4,35% pada bulan Juni dan 4,94% pada bulan Juli.

Negara-negara Asean lain juga mengalami inflasi tinggi, lebih dari 5%. Singapura inflasi Juli 2022 mencapai 6,7%, Thailand (7,61%), Filipina (6,4%), Kamboja (7,8%), Myanmar (17,78%), dan Laos (23,6%). Sementara Vietnam, Malaysia, dan Brunei berada di kisaran 3-4%.

Inflasi Tahunan (YoY) Bulan Juli 2022 di Negara-Negara G-20

Negara dan Inflasi (%)	Negara dan Inflasi (%)	Negara dan Inflasi (%)	Negara dan Inflasi (%)
Afrika Selatan 8,5	Australia 6,1	Italia 7,9	Meksiko 8,15
Amerika Serikat 2,7	Brazil 10,07	Jepang 2,6	Prancis 6,1
Arab Saudi 2,7	China 2,7	Jerman 7,5	Rusia 15,1
Area Eropa (UE) 8,9	India 6,7	Kanada 7,6	Turki 79,6
Argentina 71,0	Indonesia 4,94	Korea Selatan 6,3	UK 10,1

Sumber: Tradingeconomics.com

Tingginya inflasi di sejumlah negara bahkan menyeret ke ancaman kebangkrutan suatu negara. Pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2022, Presiden Jokowi menyebutkan, ada 107 negara terdampak krisis dan beberapa di antaranya diperkirakan akan jatuh bangkrut. Sebanyak 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrim, dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Ini menunjukkan dampak berkejolakannya ekonomi global harus sangat diwaspadai.

Tantangan lainnya bagi Indonesia adalah kondisi musim dan bencana alam seperti banjir yang masih terjadi di sejumlah daerah. Dampak langsung dari kondisi tersebut adalah tingginya inflasi untuk kelompok *volatile foods* seperti beras, minyak goreng, telur ayam ras, dan lain-lain. Menurut catatan Bank Indonesia (BI), inflasi kelompok *volatile foods* pada bulan Juli 2022 sebenarnya menunjukkan penurunan menjadi 1,41% (mtm) dari inflasi pada bulan Juni yang sebesar 2,51% (mtm). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh komoditas minyak goreng, telur ayam ras, bawang putih, dan sayur-sayuran. Akan tetapi tren penurunan tersebut tertahan oleh naiknya inflasi untuk komoditas pangan aneka cabai, bawang merah, dan ikan segar akibat gangguan pasokan karena curah hujan yang tinggi di sejumlah sentra. Hal tersebut membuat inflasi kelompok *volatile foods* mengalami kenaikan menjadi 11,47% (yoy) pada bulan Juli 2022 dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,07% (yoy).

Indonesia sebenarnya cukup beruntung karena memiliki kekayaan alam pangan yang melimpah. Seharusnya potensi ini tidak

Oleh:
Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
Wakil Ketua MPR RI



menimbulkan ancaman kelaparan. Selain itu, luasnya wilayah yang dimiliki juga membuat sentra produksi pangan di sejumlah wilayah mengalami musim yang berbeda yang mendatangkan unsur keberuntungan. Ketika curah hujan tinggi di satu daerah yang dalam keadaan tertentu bisa menimbulkan banjir yang mengganggu produksi pangan, di daerah lain bisa normal dan membuat produksi pangan melimpah. Daerah-daerah ini bisa saling membantu membangun rantai pasok produk pangan sesuai kebutuhan. Masalahnya adalah transportasi, apalagi transportasi dilakukan antarpulau dalam jarak yang cukup jauh.

Biaya transportasi yang terlampau tinggi akan membuat harga produk pangan di daerah tujuan akan tetap tinggi pada saat permintaannya melonjak. Tanpa campur tangan kebijakan pemerintah kondisi tersebut tetap membuat inflasi di daerah bersangkutan akan tinggi. Pemberian subsidi biaya transportasi dari anggaran tak terduga, seperti yang dikemukakan Presiden, akan menjadi solusi mengatasi tingginya biaya transportasi tersebut. Ini harus segera direalisasikan oleh para menteri terkait.

Persoalan Data

Hal lain yang mendapat perhatian Presiden adalah mengenai data. Data di era sekarang merupakan bentuk kekayaan lain hingga Presiden pernah mengatakan bahwa data lebih berharga dari minyak. Dengan data kita bisa mengetahui permasalahan di daerah dengan lebih baik hingga bisa mencari dan menemukan solusinya. Kerjasama antardaerah bisa diperkuat dengan berbasis data.

Hanya saja masalah data masih menjadi persoalan. Membangun kultur pemerintahan daerah yang mampu mengelola kinerjanya dengan berbasis data tampaknya masih perlu dorongan. Dalam kaitan kondisi saat ini, Presiden mengharapakan pemaparan permasalahan yang dihadapi setiap daerah dilakukan secara detail berbasis data sehingga bisa diketahui dengan baik faktor penyebab permasalahan yang timbul. Dengan keterbukaan data dan kerjasama yang makin terjalin, permasalahan ini akan cepat teratasi. Dampaknya tentu masalah ekonomi nasional akan terkendali juga.

Dengan ketersediaan data yang detail dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, akan memudahkan dan mempercepat

mengatasi masalah yang timbul. Ketersediaan data juga akan memengaruhi operasional rantai pasok nasional untuk beragam produk. Karena itu program Satu Data Indonesia sangat penting. Satu Data Indonesia seharusnya menjadi titik temu kolaborasi data antara pemerintah daerah, lembaga-lembaga pemerintah, dan pemerintah pusat dalam mengelola data.

Dengan data yang tersedia pemerintah bisa merencanakan program kerja yang lebih baik. Dalam kondisi yang tidak normal seperti saat ini, proses pengambilan keputusan bisa terhambat oleh ketersediaan data yang tidak memadai. Kekurangan pangan di satu wilayah, misalnya, harus didetailkan datanya agar solusi yang diharapkan benar-benar bisa dicapai dengan cepat dan tepat sasaran. Demikian juga kelebihan produk pangan di daerah yang mengalami panen raya, harus dibekali data yang detail. Termasuk data pendukungnya, seperti moda transportasi, biaya-biaya terkait, pajak, dan lain sebagainya.

Dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masalah pengumpulan data dan pengolahannya sebenarnya bisa lebih mudah dan lebih cepat dilakukan. Sudah sejak lama kita sering berdebat dengan data. Masalah produksi beras saja sering menjadi perdebatan panas karena masalah data yang tidak klop di antara sejumlah pihak. Karena itu upaya memperbaiki pengelolaan data ini patut didukung dengan menguatkan kolaborasi, koordinasi, dan menghilangkan silo-silo antar-kementerian, antar-lembaga, dan lain-lain. Fokusnya adalah demi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Saya sendiri setuju dengan imbauan dan upaya Presiden dan mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil dalam kaitan mengatasi inflasi yang sangat tinggi saat ini. Bahwa kondisi saat ini bukan kondisi yang harus dijalankan melalui pola kerja rutinitas biasa, namun harus dihadapi dengan sikap urgen dengan melihat persoalan secara makro, mikro, detail, dan berbasis data dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Saya optimistis, Indonesia bisa mengatasi ancaman yang sedang berada di depan mata, kuncinya, koordinasi, kolaborasi, dan berbasis data. □

Launching Buku 'Meniti Buih di Antara Karang'

Testimoni Presiden Jokowi Apresiasi Peran Bamsuet Warnai Perpolitikan Nasional

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo kembali meluncurkan dua judul buku bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-60, tanggal 10 September 2022. 'Meniti Buih di Antara Karang' menjadi judul buku yang menandai 60 tahun perjalanan hidup Bamsuet, sebagai sosok politisi dan pengusaha. Bamsuet juga membukukan ratusan opini yang ditulisnya di berbagai media massa sepanjang lima belas tahun terakhir selama menjadi anggota DPR RI dalam lima seri buku berjudul 'Bunga Rampai Opini Bambang Soesatyo 2007-2022'.

"Buku 'Meniti Buih di Antara Karang' banyak memuat kisah kehidupan saya yang jarang terekspos di publik. Dari mulai kisah saat remaja, hingga perjalanan karir saya sebagai wartawan, pengusaha, dan politisi. Dalam buku ini juga banyak memuat testimoni dari para sahabat, termasuk dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin," ujar Bamsuet saat launching buku 'Meniti Buih di Antara Karang' dan 'Bunga Rampai Opini Bambang Soesatyo 2007-2022', di Black Stone Garage (IMI Lounge) di Jakarta, Sabtu (10/9/22).

Turut hadir antara lain, Duta Besar Maroko untuk Indonesia H.E Mr. Ouadiâ Benabdella dan Group CEO Asia Cargo Network (Black Stone Airline) Marco Isaak. Jajaran BOS Production sebagai pengelola Black Stone Garage, antara lain Direktur Utama Hendra Noor Saleh, Direktur Operasional Djoko Iman Santoso, serta Manager Marcom sekaligus Project Manager Bostixx Saras Shintya Putri Soesatyo. Hadir pula berbagai komunitas otomotif seperti Hogers Indonesia, Motor Besar Club Indonesia, Motoladies Indonesia, Anak Elang Indonesia, Motor Besar Club Indonesia dan VW Beetle Club Indonesia.

Dalam testimonya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran Bamsuet dalam mewarnai perpolitikan nasional. Bersama pimpinan MPR yang lain, Bamsuet membuat lembaga MPR menjalankan beberapa agenda penting. Selain terus memantapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, MPR juga mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara, serta mengembangkan kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan global.

"Selain perannya dalam perpolitikan saya juga mengapresiasi

kontribusi Pak Bambang dalam berbagai kegiatan sosial dan hobi. Melihat usia beliau yang sudah menginjak 60 tahun, dengan aktivitas politik dan hobi yang sangat padat, Pak Bambang termasuk dalam katagori 'the young-old'. Walaupun sudah berusia 60 tahun, tetapi Pak Bambang masih bugar dan bersemangat, serta sangat aktif berkontribusi dalam karier maupun peran di masyarakat," ujar Jokowi.

Sementara, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menceritakan, dirinya tidak pernah melupakan saat diminta Bamsuet mengenakan rompi khas anak motor pada acara 'Riding Kebangsaan dan Grand Final Cerdas Cermat Empat Pilar', di Kompleks MPR RI, Jakarta, sekitar



akhir Februari 2020. Padahal, dalam keseharian Abah, panggilan akrab Bamsuet kepada Wapres KH Ma'ruf Amin, selalu mengenakan sarung dan jas.

"Inilah pertama kali dalam hidup Abah mengenakan rompi khas anak motor. Ini demi Pancasila, demi Empat Pilar MPR RI, demi para bikers Indonesia. Abah sempat juga menggeber-geber gas motor. Itulah, hari yang sangat mengesankan Abah dengan Mas Bamsuet, yang Abah ketahui penyuka otomotif, dan banyak koleksi mobil klasik, maupun motor gedanya," kata Wapres KH Ma'ruf Amin.

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, Bamsuet sebagai seorang politisi yang selalu aktif dalam mengartikulasikan tugasnya sebagai anggota DPR RI. Berbagai tugas DPR RI telah dilaksanakan secara konstitusional melalui kerja sebagai anggota komisi, pansus, bahkan

menjadi ketua DPR RI.

“Mas Bamsuet merupakan seorang yang memahami fatsun politik. Cara bicarannya, walau sering penuh canda, namun tetap santun, dan hati-hati. Dalam mengelola berbagai kepentingan politik yang menjadi dinamika di DPR RI maupun di MPR RI, Mas Bamsuet juga terlihat mengedepankan prinsip-prinsip yang taat aturan, taat azas, dan selalu menjaga adab,” puji Puan.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memaparkan, Bamsuet merupakan salah satu kader terbaik Partai Golkar dan taat azas. Bamsuet dan Airlangga pernah sama-sama maju bersaing



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

memperebutkan Ketua Umum Partai Golkar beberapa waktu lalu. Keduanya bertanding untuk bersanding. Terbukti, Bamsuet hingga saat ini menjadi bagian dari kepemimpinan Airlangga sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Dari mulai periode pertama saya menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar hingga saat ini.

Ketua KPK Komjen (Pol) Firlil Bahuri menegaskan, Bamsuet selalu memberi perhatian khusus terhadap upaya pencapaian zero korupsi di Indonesia. Ini bisa dibaca dari opini ataupun statemen Bamsuet di media massa. Salah satu gagasan Bamsuet yang bernas adalah ‘bagaimana agar KPK menggalakkan fungsi pencegahan dalam menyelamatkan keuangan negara’.

“Saya mengenal Bamsuet sebagai seorang teman diskusi yang mengasyikkan, sejak Beliau menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR

RI, Ketua DPR RI hingga saat ini sebagai Ketua MPR RI. Termasuk diskusi untuk masalah serius soal kebangsaan dan kenegaraan..,” ujar Firlil.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (P) Budi Gunawan, mengatakan, perjalanan hidup Bamsuet merupakan potret pengabdian terbaik seorang warga negara. Bahkan, selama Pandemi Covid-19 Bamsuet aktif mendorong berbagai kalangan, termasuk Badan Intelijen Negara, untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 ke berbagai lapisan kalangan masyarakat.

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengenang Bamsuet sebagai sosok yang “extrovert” dan “people oriented” membuat-nya dikelilingi banyak teman, dan dengan berjalan-nya waktu menjadi semakin “well connected”. “Saya tidak bisa menyatakan secara pasti kemana masa depan Mas Bamsuet akan mengalir. Tapi yang pasti potensi Mas Bamsuet akan semakin membesar dengan berjalan-nya waktu ke masa depan,” tuturnya.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menuturkan, sejak menjabat Ketua Komisi III DPR RI perhatian Bamsuet pada Polri sangat besar. Selain mengkritisi hal-hal yang dirasakan masih kurang di jajaran Polri, Bamsuet selalu memberi solusi dan penuh gagasan. “Bagi saya pribadi Bamsuet adalah sosok pemimpin yang solutif. Selalu memberikan saran dan menyampaikan masukan,” ujarnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, menceritakan tentang sosok Bamsuet. “Jika ingin jadi politisi, tirulah Bamsuet. Semua diraih by process. Tidak ada yang dilakukan secara instan.. Kerja keras, kerja cerdas, dan tekadnya yang pantang menyerah saya kira jadi kunci sukses. Tentu tidak terlepas dari kepintaran mengatur strategi, agar tetap berada di orbit, terjaga elektabilitas dan popularitasnya. Bamsuet berhasil menggabungkan semua potensi yang ada pada dirinya, dengan peluang saat berjuang di lapangan.

Kunci lainnya adalah kemampuan membangun jaringan. Bamsuet ada di mana-mana, di nyaris semua organisasi. Jika bukan pengurus, ia selalu berusaha agar terkoneksi ke sana. Saya menilai Bamsuet juga mampu memaksimalkan fungsi positif media sosial. Saya kira tidak ada pemimpin lembaga tinggi negara, yang sekaligus menjadi YouTuber, punya podcast sendiri dan aktif menjadikan dirinya sumber berita,” pungkas Perry. □

Menuntaskan Dialektika Tentang NKRI

Banyak sudah buku yang membahas tentang NKRI, namun buku yang satu ini, menurut penulisnya, menuntaskan dialektika yang ada. Berisi bahasan tentang NKRI dari sejarah hingga konstitusinya.

SLOGAN NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) Harga Mati saat ini kerap terdengar di tengah masyarakat. Ia tidak hanya diteriakkan dari mulut orang, namun juga ditulis di berbagai media, dari mural di dinding, spanduk, poster, hingga media sosial seperti *facebook*, *youtube*, dan *twitter*. MPR sendiri, terkait NKRI, merupakan salah satu pilar di antara pilar-pilar lainnya, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ke-empat pilar ini disosialisasikan ke berbagai elemen masyarakat, dari Sabang hingga Merauke.

Hadirnya buku *NKRI Harga Mati* karya Prof. Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah, IPM., melengkapi ungkapan dan tulisan di atas tentang NKRI. Buku karya pria asal Soppeng, Sulawesi Selatan, itu terbilang cukup tebal, xxviii + 478 halaman, yang terbagi dalam XII Bab, dan masing-masing bab memiliki puluhan sub bab.

Dalam pengantarnya, penulis menjelaskan mengapa buku tentang NKRI dibuat. Menurutnya, menulis buku NKRI secara tuntas karena beberapa referensi yang lain tentang NKRI belum membahas secara tuntas mengenai NKRI. Bahkan, bahasan tentang konsep NKRI hanya beberapa item sehingga pengetahuan yang diterima oleh pembaca tidak mendalam. Meski demikian dirinya juga mengakui bahwa buku yang ada masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan sehingga mengharapkan masukan dan kritikan demi kesempurnaan.

Dijelaskan, NKRI merupakan negara yang dikenal sebagai Nusantara, yang artinya negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan didiami oleh ratusan juta penduduk. NKRI dikenal juga sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, dan agama, yang berbeda-beda sehingga tercermin dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua.

Proses terbentuknya NKRI, menurut pria yang pernah aktif di HKTI (Himpunan Kerukunan Tani se-Indonesia), itu terbilang panjang. Dalam Bab III dijelaskan proses terbentuknya NKRI. Dimulai dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, selanjutnya babak-babak kedatangan bangsa-bangsa Eropa dan Jepang, masa persiapan kemerdekaan Indonesia, hingga lahirnya NKRI.

Dirasakan oleh banyak pihak, termasuk Jafar Hafsah sendiri, dalam perjalanan waktu, ada upaya dari kelompok tertentu untuk menggantikan NKRI. Upaya yang demikian disebut tidak bertahan lama dan selalu digagalkan oleh rakyat. Untuk itu, lewat buku yang ada, dirinya mengajak generasi penerus wajib turut serta dalam usaha membela negara. Menjaga sikap dan perilaku dalam mempertahankan NKRI.

Dalam buku ini, Jafar Hafsah menjelaskan NKRI tidak hanya secara fisik yang berupa gugusan pulau dan manusia serta alam yang mendiami, namun juga dipaparkan tentang konstitusi (Bab VI), sistem pemerintahan (Bab VII), dan partai politik (Bab XI). Sebagai pria yang pernah menjadi anggota MPR/DPR dan rajin melakukan

Sosialisasi Empat Pilar MPR, bab-bab yang ini persis dengan materi yang ada dalam sosialisasi.

Buku karya alumni Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin itu mendapat perhatian dari banyak pihak. Di dalam buku ada sambutan dari Ketua MPR Bambang Soesatyo, Rektor Universitas Pancasila Prof. Dr. Edie Toet Hendratno SH., MSi., serta dari beberapa tokoh lainnya.

Bambang Soesatyo dalam buku menyebut NKRI Harga Mati tidak hanya menarik, namun juga penting. Alasannya, dalam konstitusi tertinggi negara, UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Lebih lanjut dikatakan, bila disebut NKRI Harga Mati, hal demikian sangatlah tepat sebab sejarah

membuktikan pilihan negara kesatuan merupakan hal yang paling tepat dan cocok bagi bangsa Indonesia. Pengalaman sejarah negara serikat, menjadi bukti nyata bahwa bangsa ini hanya cocok dengan semangat persatuan kolektivisme yang dibingkai dengan negara kesatuan.

Menurut Edie Toet, buku Jafar Hafsah menjawab pertanyaan dan bahasan orang dari segala pertemuan. Buku bercover merah kehitaman itu dianggap memecah kebuntuan dan menjadi suatu harapan baru. Yakni, harapan bahwa buku ini dapat diterima oleh berbagai kalangan karena berisi tentang hal yang mendasar tentang NKRI. □

AWG





MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT





MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Lagu Persembahan *untuk Bangsa*



Piyu Padi

GRUP BAND PADI pada 2021 ini mengeluarkan single terbaru. Judulnya, 'Memberi Makna Indonesia.' "Judulnya terkesan nasionalisme banget. Lagu ini dibuat untuk memberi semangat dan berbagi energi positif kepada masyarakat di tengah keterpurukan akibat pandemi," ujar **Piyu Padi**, gitaris band PADI usai launching di Jakarta, Jum'at (10/9/2021).

Melalui lagu ini, Piyu mengajak masyarakat Indonesia untuk terus melihat ke depan. "Inilah waktu yang tepat untuk membangun optimisme. Kami mengajak masyarakat melalui apa yang kami bisa, yaitu melalui lagu," kata pria yang terlahir dengan nama Satriyo Yudi Wahono ini.

Di tengah pandemi sekarang ini, Piyu juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berkarya, bergandeng tangan, dan melangkah bersama, jangan sampai terpecah belah. "Itulah inti dari pesan dalam lirik lagu ini," tegasnya. □

DER



Aksi *Bagi Sembako* di Tengah Pandemi

ARTIS, model, dan selebgram, **Hana Hanifah** kepergok sedang melakukan aksi bagi-bagi sembako di wilayah Bogor, Jawa Barat. Hari itu, artis yang kerap berpenampilan seksi dan sering menuai sensasi itu membagikan sekitar 500 paket sembako kepada masyarakat kecil di lingkungan tempat tinggal di wilayah Bogor.

Artis pemeran Nyai Sanca dalam sinetron Jaka Tingkir tahun 2020 ini ternyata memiliki kepedulian kepada masyarakat, terutama kepada para pedagang kecil. "Bukan apa apa ya, aku juga terdampak pandemi, tapi aku lebih terganggu, sebab banyak yang lebih susah dari aku," ungkap artis kelahiran Bogor, 26 tahun silam itu. Dia menunjuk contoh, banyak pedagang yang jualan karena habis modal. Atau jualan tapi gak laku.

Hana berharap, kegiatan yang dilakukannya ini dapat memotivasi teman-temannya agar bisa bersama-sama menyisihkan rezeki untuk disampaikan kepada mereka yang membutuhkan.

"Kalau semua bergerak saya yakin banyak orang akan terbantu di saat sulit ini". □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Hana Hanifah



Angela H. Tanoesoedibjo

Industri Perfilman Indonesia Harus Bangkit

PERFILMAN Indonesia yang sempat terpuruk karena terdampak pandemi Covid-19 harus bangkit," kata **Angela H. Tanoesoedibjo**, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ketika menjelaskan program Bantuan Pemerintah untuk Promosi Film Indonesia, Jumat (1/10/2021).

Angela menyatakan, program bantuan ini adalah bentuk dukungan pemerintah agar perfilman Indonesia kembali bangkit. Ini merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Subsektor Film yang terdiri dari tiga skema: promosi, lisensi, produksi.

Periode pendaftaran untuk program promosi film dimulai 1 Oktober 2021 dan berakhir pada 10 Oktober 2021. □

DER



Museum Sasmitaloka Ahmad Yani Saksi Bisu Keberanian Seorang A. Yani

BANGSA Indonesia baru saja memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2021. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu ditandai dengan gugurnya 9 Pahlawan Revolusi. Mereka adalah korban penculikan dan pembunuhan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI). Peristiwa penculikan dan pembunuhan sadis terhadap para jenderal dilakukan dalam sebuah pemberontakan didalangi oleh PKI pada 30 September 1965, yang selanjutnya disebut dengan Gerakan 30 September atau G-3—S/PKI.

Kesembilan putera kusuma bangsa yang gugur dalam peristiwa G-30-s/PKI itu adalah: Letjen TNI Ahmad Yani, Mayjen TNI Raden Suprpto, Mayjen TNI Mas Tirtodarmo, Mayjen TNI Siswondo Parman, Brigjen Donald Isaac Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo, dan Lettu CZI Pierre Andreas Tendean. Sementara di Yogyakarta terdapat dua korban keganasan PKI, yaitu: Brigjen (anm) Katamsa Darmokusumo, dan Kolonel (anm) Sugiyono Mangunwiyoto.

Salah satu saksi bisu kekejaman PKI pada peristiwa G-30-S/PKI itu rumah kediaman



Letjen TNI Ahmad Yani, yang saat ini diabdikan menjadi Museum Sasmitaloka Ahmad Yani. Di lokasi Museum Sasmitaloka Ahmad Yani yang beralamat di Jalan Lembang Nomor 67, RT 11, RW 7, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, itulah Letjen TNI Ahmad Yani dieksekusi oleh PKI.

Telah 56 tahun peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap Letjen TNI Ahmad Yani berlalu, gedung tersebut masih terawat dengan baik. Tembok dan gentengnya masih terlihat kokoh. Demikian pula lantai, pintu, serta jendela-jendela terlihat berfungsi dengan baik.

Rimbun pepohonan di sekitar Museum Sasmitaloka membuat suasana terasa teduh.



Meski matahari bersinar, tinggi dan rimbunnya dedaunan di sana mampu melindungi mereka yang berteduh dari teriknya panas di siang bolong. Sementara bunga-bunga kamboja yang berjatuhan mampu memberikan kesegaran dan wewangian layaknya di taman bunga.

Halaman di tempat ini terlihat bersih dan asri. Tidak ada tumpukan sampah apalagi botol-botol bekas minuman. Seluruh tanamannya baik yang tinggi menjulang maupun pendek tertata dengan rapi. Rumput di tempat tersebut juga terlihat subur menghijau. Menenangkan siapapun yang melihatnya.

Meski sudah berumur lebih dari setengah abad, Museum Sasmitaloka terlihat masih



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kokoh dan maskulin. Ada kesan pemberani, tak takut melawan sakit dan itu membuatnya berbeda dengan bangunan lain di sekitarnya. Ini terjadi, salah satunya karena keberadaan Patung perunggu Ahmad Yani setinggi tiga meter yang berdiri tegap sambil mengenakan seragam Angkatan Darat (AD). Patung tersebut merupakan karya seniman Soenarto Pr yang menggambarkan kegagahan Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani. Dan patung itulah yang membuat Sasmitaloka lebih menonjol dari bangunan lain di sekitarnya.

Tujuh Tembakan

Selain sebagai rumah tinggal Ahmad Yani, Museum Sasmitaloka juga menjadi saksi eksekusi PKI atas Letjen TNI Ahmad Yani. Tujuh tembakan yang memuntahkan tujuh peluru dari senapan pasukan Tjakrabirawa langsung mengoyak tubuh Ahmad Yani.

Lokasi tumbangnya Ahmad Yani ditandai dengan sebuah plakat warna kuning bertuliskan: "Di sinilah gugurnya Pahlawan Revolusi Jendral TNI A. Yani pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 04.35". Saat penembakan terjadi, Letjen TNI Ahmad Yani sedang mengganti bajunya dengan pakaian dinas.

Dari tujuh peluru yang dilepas pasukan Tjakrabirawa pada 1 Oktober 1965 pukul 04:35 WIB itu lima di antaranya meninggalkan lubang di sebuah pintu. Fakta tersebut menunjukkan betapa kejamnya PKI. Mereka tega membunuh dari jarak sangat dekat sekalipun. Dan, itu membuat nilai historis Museum Sasmitaloka menjadi abadi, tidak mudah dihapus meski oleh peristiwa dan cerita di zaman kekinian.

Yang menarik, bekas kediaman Ahmad Yani itu masih sama seperti saat ditinggalkan penghuninya. Barang-barang pribadi milik

Sang Jenderal masih ada di tempatnya. Karena itu, saat berada di tempat tersebut pengunjung seolah-olah dibawa untuk menembus lorong waktu, berada di masa saat Ahmad Yani masih hidup.

Apalagi kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur, dan bahkan kompor, serta perabotan lainnya yang ada di sana semua adalah milik keluarga Ahmad Yani. Barang-barang tersebut dirawat dan dipertahankan hingga saat ini.

Sejumlah koleksi pribadi milik Ahmad Yani masih tersimpan dengan rapi di sana. Semua itu membuat pengunjung merasa melakukan napak tilas kehidupan Sang Jenderal. Terlebih saat melihat Kamar Ahmad Yani yang tertata rapi. Di kamar itu juga terdapat seragam dan pakaian dinas yang tersimpan dalam lemari kaca.

Peristiwa yang terjadi di Sasmitaloka pada 30 Oktober 1965 itu menunjukkan betapa pemberani para pahlawan, termasuk seorang Letjen TNI Ahmad Yani. Di hadapan puluhan pasukan Tjakrabirawa yang bersenjata lengkap, dan terus membentak serta mendorongnya, A. Yani tetap tenang. Ia memaksa berganti baju dengan pakaian lebih layak untuk memenuhi undangan, seperti yang disampaikan oleh Tjakrabirawa kepadanya. Padahal saat itu para tamu yang tidak diundang itu memaksanya untuk langsung pergi. Tetapi A. Yani bergeming hingga tujuh peluru menembus tubuhnya, membuat badannya terjeremban ke lantai. Sang jenderal gugur sebagai Pahlawan Revolusi. □

MBO





Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E.

Anggota MPR RI Fraksi PPP

Cut Nyak Dhien di Era Demokrasi



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DI ZAMAN revolusi fisik dahulu, Aceh dikenal memiliki pejuang-pejuang perempuan yang tangguh. Mereka tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga mahir menyiapkan tak-tik peperangan. Terbukti perlawanan pejuang-pejuang perempuan Aceh ini tak mudah dipadamkan. Sebut saja Cut Nyak Dhien dan Cut Mutia, dua nama yang melegenda, dan selalu dikenang sepanjang masa.

Di ranah politik, perempuan Aceh senantiasa berkontribusi memperjuangkan kepentingan masyarakat Serambi Mekah. Salah satu nama perempuan Aceh yang menjadi buah bibir karena kesuksesannya di bidang politik adalah Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E., anggota MPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Fraksi PPP).

Terpilih menjadi anggota Legislatif pada Pileg 2019, perempuan kelahiran Banda Aceh, 31 Desember 1973, ini berhasil menghilangkan dahaga masyarakat Aceh terhadap wakil perempuannya di Senayan. Maklum, dalam tiga pelaksanaan pileg sebelumnya, atau dalam lima belas tahun tak ada satupun anggota DPR yang merepresentasikan kaum hawa masyarakat Aceh.

"Awalnya saya hanya ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPR Aceh. Tapi, partai menghendaki saya maju di tingkat pusat. Jadi surprise juga pada akhirnya saya berhasil lolos ke Senayan," kata Illiza yang akrab disapa Bunda Illiza, baik oleh kolega maupun konsituennya di dapil Nangroe Aceh Darussalam I, kepada Majelis beberapa waktu lalu.

Keberhasilan Bunda Illiza melenggang ke Senayan bukan karena berkalung nasib baik semata. Keberhasilan itu memang layak

diperoleh, karena Illiza memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan di bidang politik. Di bidang eksekutif, Ia memiliki pengalaman sebagai Wakil Walikota dan Walikota Banda Aceh. Illiza juga sempat berkecimpung di berbagai organisasi politik dan kemasyarakatan. Dan, mempeoleh banyak penghargaan sebagai perempuan berprestasi, baik di daerah maupun tingkat nasional.

Jadi, Illiza memang mengantongi modal sosial yang sangat besar, dan itu memudahkannya ke Senayan. Karena itu, tak heran jika Ia sangat dekat dengan masyarakat Aceh. Dia bisa merasakan dan berempati terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat. Terlebih persoalan pendidikan, yang menjadi tugasnya di Komisi X DPR RI.

Menyangkut nasib dunia pendidikan di masa pandemi Covid-19 misalnya, Illiza begitu prihatin terhadap nasib para peserta didik. Apalagi, jelang tahun kedua pandemi Covid-19, pemerintah tak kunjung mampu mengantisipasi potensi terjadinya *Lost Generation* akibat serangan virus korona. Pasalnya, program-program yang disiapkan hanya bisa dilakukan dengan tatap muka. Sementara sistem belajar *offline*-nya masih dilarang.

Menurut Illiza, selama pandemi Covid-19, hanya 40% peserta didik yang memiliki akses untuk mengikuti proses belajar-mengajar secara daring. Dari jumlah itu sebanyak 41,4% sudah bosan mengikuti sistem belajar online. Lebih mengkhawatirkan, prosentase kebosanan itu lebih besar dirasakan oleh siswa di Pulau Jawa (41.7%) dibanding siswa luar Jawa (39,3 %)," kata Illiza.

Tingginya tingkat kebosanan siswa yang mengikuti sistem belajar daring di Pulau Jawa, kata Illiza, terjadi karena kebijakan penanganan



Covid-19 tak kunjung membuahkan hasil. Sementara di luar pulau Jawa, terutama di pedalaman, masih banyak anak sekolah yang tetap melaksanakan sistem belajar tatap muka. Bahkan, di Pedalaman Aceh, ada juga sekolah yang tidak bernah melakukan pembelajaran jarak jauh. Mereka tetap menjalankan belajar tatap muka, dan tidak pernah libur.

Dalam kesempatan itu, Illiza mengungkapkan pengalamannya ketika beberapa kali melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Dalam melaksanakan kegiatan itu, ia selalu membawa dan memakai masker. "Dan, itu membuat saya terlihat aneh," cerita Illiza. Tetapi, kepada peserta konstituennya, dia menjelaskan bahwa dia datang dari Jakarta, khawatir membawa virus. "Saya pakai masker agar tidak menular, baru mereka bisa menerima," ungkap alumni Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta ini.

Bahkan, saat beberapa kali melaksanakan reses, kata Wakil Walikota dan Walikota perempuan pertama di Banda Aceh, ini banyak kepala desa meminta agar Dia tidak usah menerangkan program yang hendak disampaikan. Tetapi, lebih baik menjelaskan persoalan manfaat vaksinasi, karena di tempat itu kesaradan untuk menerima vaksin memang rendah. Baru, setelah mendapat penjelasan mengenai vaksin, masyarakatpun sadar untuk pergi ke Puskesmas untuk divaksin.

Meski begitu, kata Illiza, pandemi juga memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat. Hadirnya pandemi membuat masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan teknologi. Masyarakat semakin



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

melek dan terbiasa dengan sistem online. Menguasai teknologi komunikasi, dan mempercepat alih teknologi menuju era industri 4.0.

Wanita Pertama

Persinggungan Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal dengan dunia politik, bak pepatah mengartakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dalam tubuhnya mengalir darah kepemimpinan, turun dari kakeknya. Sang kakek dari garis ibunya dulu dikenal sebagai kepala daerah. Jabatannya Residence Kota Banda Aceh, Bupati Aceh Besar, Bupati Aceh Timur, dan Aceh Tengah.

Sedangkan bersenggolan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengikuti jejak ayahnya. Bahkan, tak berlebihan jika Illiza dibilang sebagai anak bilologis dari PPP. Karena ayahnya, Sa'aduddin Djamal, merupakan Ketua PPP di Aceh. Sa'aduddin Djamal juga sempat menjadi anggota MPR, hingga akhir hayatnya. Sementara ibunya, Hamriah, adalah pengurus PPP sekaligus anggota DPR Provinsi Aceh.



Dari ayahnya, dalam diri Illiza mengalir darah ulama-ulama besar Nangroes Aceh Darussalam. Seperti Abu Dapuri, Abu Lampu, dan Abu Niran. Mereka adalah ulama-ulama yang gemar menimba ilmu, bahkan hingga ke Mekah Al Mukarramah. Dan, saat kembali ke Tanah Air, mereka mendirikan pondok pesantren. Termasuk yang saat ini Illiza geluti, yaitu mendirikan dan mengasuh Pesantren Tahfiz Qur'an di Banda Aceh.

Semasa kecil, Illiza yang sangat dekat dengan ayahnya. Ia sering ikut serta di berbagai acara PPP. Bahkan, di kalangan PPP Aceh, sosok Illiza sudah dikenal sangat dekat. Mereka menerima kehadirannya, seperti saat menyambut kedatangan ayahnya selaku petinggi partai.

Karena itu, setelah merampungkan pendidikan Sarjana Ekonomi dan Ilmu Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Banda Aceh, Illiza tak bisa menolak saat diminta menjadi salah satu pengurus di DPC PPP Banda Aceh. Ia berfikir, dengan menjadi pengurus, berarti menyambung tali silaturahmi orangtuanya.

"Waktu itu saya membantu ibu menyiapkan acara pemilihan pengurus. Saya bawa karpet, bunga, dan mendekor panggung. Setelah itu, saya malah dimasukkan menjadi pengurus DPC PPP Banda Aceh," kata Illiza lagi. Nah, sejak itu, kepercayaan yang didapat Illiza makin besar. Ia diberi mandat memimpin DPC PPP. Tidak hanya sampai di situ, kepercayaan yang diberikan pun semakin besar, masyarakat memilihnya menjadi anggota DPR Aceh. Dan, lima tahun berikutnya Illiza didaulat mencalonkan diri sebagai Walikota, mendampingi Mawardi Nurdin.

"Saya menjalani semua itu dengan niat beribadah kepada Allah. Karena itu, saya merasa ringan, tidak terbebani dan tidak ingin mencari masalah. Berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Saya berfikir, semua orang memiliki potensi yang sama, karena itu saya tidak mau meremehkan orang lain," kata Illiza lagi.

Karena itu, saat ia gagal memenangkan kontestasi Pilkada Walikota Banda Aceh 2017, tak menunggu lama, Illiza langsung menyampaikan selamat kepada pasangan terpilih. Ia tak ingin, kontestasi berkepanjangan dan menyebabkan gesekan antarpendingung.

Di belakang hari, keikhlasan serta kesabarannya menerima kekalahan di Pilkada Walikota berbuah manis. Hanya dua tahun menunggu, Illiza terpilih menjadi anggota Legislatif. Keberhasilan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

itu memutus kekosongan perempuan Aceh di dunia politik nasional. Dan, menempatkan Illiza sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.

Al Azhar Kebayoran Baru

Sebagai wanita karier, Illiza tetap mengakui qodratnya sebagai istri dari Amir Ridha, dan ibu bagi M. Luthfi, M. Hakiki, M. Hanafi, dan Ade Nazirah. Setiap ada kesempatan berkumpul bersama keluarga, Illiza berusaha mengurus kepentingan keluarga dengan tangannya sendiri. Seperti memasak maupun menata rumah. Juga mendidik serta mengawasi anak-anaknya belajar.

"Saya tidak merasa ada perubahan. Semua berjalan seperti apa adanya. Bahkan, saya sering makan di dapur, atau merawat tanaman," kata alumni SMA Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta, ini. □

MBO

Bio Data

Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E.

Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 31 Desember 1973
 Nama Suami : Amir Ridha
 Pendidikan Akhir : Sarjana Ekonomi dan Ilmu Manajemen
 STIM Banda Aceh

Pengalaman Organisasi

2019-2022 : Ketua Umum PB Persatuan Panahan
 Indonesia (Perpani)
 2019-2022 : Ketua Harian FKA ESQ Pusat
 2019 : Alumni IVLP Women and Political (USA)
 2016-2017 : Bendahara Asosiasi Pemerintah Kota
 Seluruh Indonesia (Apeksi)
 2006-2016 : Ketua DPC PPP Banda Aceh

Pengalaman Pekerjaan

2019-sekarang : Anggota DPR RI Fraksi PPP
 2014-2017 : Walikota Banda Aceh
 2007-2014 : Wakil Walikota Banda Aceh
 2004-2006 : Anggota DPR Kota Banda Aceh

Habis Badai Covid-19, Antisipasi Terbitlah Kehidupan Normal Baru

SEJAK badai Covid-19 diakhir tahun 2019 mulai menyerang Propinsi Wuhan RRC, terus dengan cepat menjalar ke seluruh dunia secara masif, termasuk ke Indonesia awal tahun 2020. Untuk pengendalian penularannya pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, yaitu menerapkan sosial distancing/lock down yang tidak terlalu ketat, dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah mengalami beberapa kali perpanjangan, dengan tetap penerapan SOP Kesehatan /Prokes, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan diikuti dengan makan yang bergizi, istirahat cukup, olah raga, berjemur di sinar matahari, pengaturan jam kerja di kantor maupun di pasar, dan tentunya sebagai bangsa yang religius diikuti dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kebijakan tersebut berimplikasi kebijakan Fiskal untuk tanggap Covid, melalui revisi APBN maupun APBD 2020 dan 2021 dengan fokus bagaimana membiayai kegiatan pengendalian Covid-19, yang sekarang ada lagi varian baru, yaitu D, untuk pengadaan APD, Maskers, Sanitizer, Vaccin, alat tes Covid (PCR, Antigen), dan belanja sosial untuk ketahanan pangan rumah tangga masyarakat miskin agar jangan sampai terjadi kelaparan. Disamping juga untuk belanja alat komunikasi daring, baik hard ware maupun soft ware, dan masyarakat sudah mulai terbiasa komunikasi secara *online* dengan menggunakan *zoom meeting*, *google meet*, *microsoft team* dan lainnya.

Setelah lebih dari 1 tahun 6 bulan, dampak serangan wabah ini telah menyerang semua aspek kehidupan, bidang ekonomi adalah pengangguran, kemiskinan, penurunan daya beli, sosial budaya terutama di sektor pendidikan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja

bersama Badan Anggaran DPR RI menyampaikan bahwa penerimaan negara tahun 2020 mengalami kontraksi sangat dalam, sementara belanja meningkat sangat tinggi saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Realisasi pendapatan negara pada APBN 2020 sebesar Rp 1.647,7 triliun atau 96,9% dari anggaran pendapatan pada APBN TA 2020. "Pendapatan ini turun Rp 312,8 triliun atau 15,9% dibanding kondisi sebelum Covid, yaitu tahun anggaran 2019." Selanjutnya Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 mengalami minus 2,07% secara *year on year*. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, kontraksi ini dipengaruhi oleh pelemahan di berbagai sektor ekonomi karena pandemi Covid-19.

Sudah menjadi sunnatullah, kejadian suatu bencana alam, termasuk Covid-19, selalu menimbulkan keseimbangan baru, ada dampak negatif, baik kerugian materi maupun non materi, ada hikmah tersembunyi yang kita baru tahu setelah kita mengalaminya dan bersabar. Di bidang ekonomi kita bersyukur bahwa sektor pertanian, terutama pangan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif di atas 2 %, ini memberikan sinyal kepada kita untuk ke depan bagaimana penguatan ketahanan pangan kita harus mendapat perhatian, dan alhamdulillah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional. Diharapkan ke depan lembaga ini mampu membuat kebijakan pangan nasional yang lebih komprehensif, dan antisipatif, terutama bagaimana mewujudkan visi Indonesia sebagai negara pengekspor pangan (Feed the World)

Sebagaimana disampaikan Presiden, pada kabinet Indonesia Maju jilid 2 ini fokusnya adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Penutupan sementara lembaga pendidikan sebagai upaya

Oleh:
Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
Wakil Ketua MPR RI



menahan penyebaran pandemi Covid-19 berdampak pada jutaan pelajar dan mahasiswa. Gangguan dalam proses belajar langsung antara siswa dan guru dan pembatalan penilaian belajar berdampak pada psikologis anak didik dan menurunnya kualitas keterampilan murid. Beban itu merupakan tanggung jawab semua elemen pendidikan, khususnya negara dalam memfasilitasi kelangsungan sekolah bagi semua stakeholders pendidikan guna melakukan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana mestinya Indonesia merencanakan, mempersiapkan, dan mengatasi pemulihan Covid 19 untuk menekan kerugian dunia pendidikan di masa mendatang.

Pandemi Covid-19 telah mengubah dunia pendidikan, mulai dari proses pembelajaran, dimana biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka, namun sejak pandemi berlangsung berubah menjadi belajar daring (dalam jaringan). Guru, siswa, dan orang tua dituntut untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan aktif walaupun dilaksanakan dari rumah masing-masing.

Di tengah pandemi yang terus melaju, dunia Pendidikan harus terus mendapatkan perhatian khusus agar tidak terdampak buruk. Apabila membahas tentang dunia pendidikan, maka akan membahas masa depan suatu bangsa. Melihat dari kacamata umum sekarang ini, pandemi Covid-19 memang banyak menimbulkan ancaman bagi dunia pendidikan. Namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda, ancaman dapat diubah menjadi dampak peluang untuk memajukan dunia pendidikan.

Pandemi Covid-19 yang begitu banyak berdampak negatif juga berdampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dampak positif ini dapat memotivasi melalui masa-masa sulit untuk terus mencapai tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju. Dampak

positifnya adalah; a). Memicu Percepatan Transformasi Pendidikan, pemberlakuan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau pembelajaran daring (online); b). Banyak Muncul Aplikasi Pembelajaran Online; c). Jumlah Kursus Online Gratis; d).Munculnya Kreativitas Tanpa Batas; e). Kolaborasi Orang Tua dan Guru; f). Penerapan Ilmu dalam Keluarga; g). Guru menjadi lebih akrab dan melek teknologi; h). Internet sebagai sumber informasi yang positif; i). Siswa dapat diawasi oleh orang tua secara langsung.

Pada dasarnya setiap anak memiliki potensi yang tidak terbatas. Tetapi ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi apakah mereka pada akhirnya dapat memenuhi potensi tersebut. Para ahli meyakini bahwa peran orang tua dalam kehidupan seorang anak berdampak luas dan dengan pengawasan orang tua anak akan mudah untuk memantau perkembangannya secara langsung. Keterlibatan orang tua sangat penting agar anak berprestasi di sekolah. Beberapa orang tua mungkin berpikir bahwa itu adalah peran guru untuk mengajar, bukan mereka. Namun, kepercayaan seperti itu tidak merugikan orang tua dan anak. Anak-anak tidak mulai dan berhenti belajar hanya selama hari sekolah. Mereka selalu terbiasa belajar, di rumah, dengan teman, dan melalui pengaruh lain. Kementerian Komunikasi dan Informasi diharapkan mampu mengantisipasi pengaruh negatif situs-situs yang tidak mendidik dan dapat memblokir situs yang merusak dunia pendidikan kita.

Itulah beberapa hal positif dari pandemi Covid-19. Tentu masih banyak lagi hal positif yang bisa kita rasakan. Meski demikian, kami tetap berharap pandemi segera berakhir dan pembelajaran tatap muka segera dilakukan lagi. □

Amandemen UUD, Ingat Pesan ‘Jenderal Besar’

Forum di bawah arahan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dan Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri menyusun kajian dan naskah akademik terkait amandemen UUD. Hasil kajian itu mengatakan, amandemen yang dilakukan secara tergesa-gesa telah mengubah sistem ketatanegaraan yang menyimpang dari Pembukaan UUD dan Pancasila.

ADA dinamika di kalangan ahli tata negara, politisi, dan masyarakat terkait adanya keinginan mengubah atau mengamandemen kembali UUD NRI Tahun 1945. Dinamika itu muncul ketika MPR Periode 2014-2019 merekomendasikan 7 hal harus dikerjakan atau dituntaskan oleh MPR periode selanjutnya, 2019-2024.

Satu di antara tujuh rekomendasi tersebut adalah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Masyarakat dan politisi menyebut tidak adanya panduan pembangunan, seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), panduan pembangunan pada masa Orde Baru, membuat pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sinkron. Tidak hanya itu, pembangunan antarpresiden pun tidak berkesinambungan. Hal demikian dikhawatirkan membuat pembangunan secara keseluruhan menjadi tanpa arah. Panduan pembangunan yang dihela saat ini, berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan presiden. Bila masa jabatan mereka berakhir maka berakhirlah arah pembangunan yang dilakukan.

Agar memiliki arah yang jelas hingga 50 tahun ke depan, maka masyarakat dan politisi ingin ada haluan negara yang saat ini disebut PPHN. Di sinilah mulai terjadi perdebatan dan dinamika. Apakah haluan negara itu kelak akan dituangkan dalam UUD ataukah cukup dengan pijakan hukum di bawah UUD.

Bila PPHN hendak dituangkan dalam UUD maka perlu diamandemen, *nah* di sini dinamika bertambah kembali sebab ada kekhawatiran amandemen akan melebar ke mana-mana, tidak hanya membahas soal PPHN, namun juga ke masalah-masalah yang sebelumnya tidak dibahas secara terbuka. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat *Diskusi Empat Pilar MPR*, mengatakan, hati-hati bila hendak melakukan amandemen.

Apa yang disampaikan oleh alumni doktor Universitas Indonesia itu jauh-jauh hari sudah diungkapkan oleh *Forum Bersama Purnawirawan TNI-Polri* (FOKO) dan Organisasi Mitra Seperjuangan. Forum ini dengan tegas mengatakan lewat buku yang disusunnya dengan judul *Kaji Ulang Perubahan UUD 1945*. Cakupan yang disampaikan oleh forum yang beranggotakan para ‘jenderal besar’ itu tidak hanya soal

perlu kehati-hatian dalam mengubah konstitusi, namun amandemen yang telah dilakukan juga perlu dikaji ulang.

Buku bersampul merah-putih, dalam pengantar FOKO mengatakan, berusaha keras mengingatkan bahkan mendesak kepada MPR serta masyarakat agar proses amandemen dilakukan secara hati-hati dan waspada. FOKO merasa bahwa peringatan yang disampaikan itu dianggap *berteriak di padang pasir* sehingga bak *anjing menggonggong kafilah tetap berlalu* sehingga amandemen UUD berlangsung mulai dari 1999 hingga 2002.

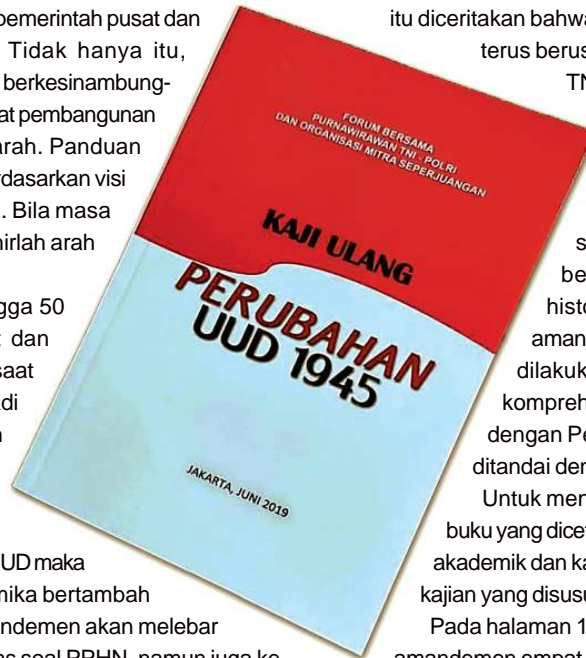
Meski demikian, dalam buku yang memiliki ketebalan 198 halaman itu diceritakan bahwa FOKO tidak mengenal menyerah dan

terus berusaha. Buku yang disusun oleh Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo, Brigjen TNI (Purn) Badjoeri Widagdo, Letjen TNI (Purn) Toni Hartono, dan rekan-rekannya purnawiran TNI matra laut dan udara, ditambah dari kepolisian serta ahli hukum, mengungkapkan, dari berbagai tinjauan filosofis, ideologis, historis, sosiologis, empiris, dan yuridis, amandemen yang telah dilakukan, empat kali, dilakukan tanpa konsep (*grand design*), tidak komprehensif, tergesa-gesa, dan bertentangan dengan Pembukaan UUD dan Pancasila bahkan ditandai dengan adanya ‘campur tangan asing’.

Untuk mendukung alasan tersebut, FOKO dalam buku yang dicetak pada Juni 2019 memaparkan, naskah akademik dan kajian yang dibuat. Naskah akademik dan kajian yang disusun itu terurai dalam Bab II hingga Bab VI. Pada halaman 16, ada salah satu kesimpulan berbunyi, amandemen empat kali UUD telah membawa dampak yang besar, baik sekarang maupun masa depan, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil amandemen tidak lagi bersifat menyempurnakan, akan tetapi “telah mengubah sistem ketatanegaraan” yang menyimpang dari Pembukaan UUD dan Pancasila.

Dengan membaca buku ini, kita banyak belajar akibat dari amandemen UUD, sehingga pesan dari para ‘jenderal besar’ dalam buku itu yang mengatakan, agar proses amandemen dilakukan secara hati-hati dan waspada, perlu diingat kuat-kuat. □

AWG





MANIFESTO

Masih Indonesiakah kita
setelah sekian banyak jatuh bangun
setelah sekian banyak tertimpa dan tertempa
setelah sekian banyak terbentur dan terbentuk

Masihkah kita meletakkan harapan di atas kekecewaan
persatuan di atas perselisihan
musyawarah di atas amarah
kejujuran di atas kepentingan

Ataukah ke-Indonesia-an kita telah pudar
dan hanya tinggal slogan dan gambar?

Tidak!

Karena mulai kini nilai-nilai itu kita lahirkan kembali
Kita bunyikan dan kita bumikan
menjadi jiwa dan raga setiap manusia Indonesia

Dari Sabang sampai Merauke
kita akan melihat lebih banyak lagi
senyum ramah dan tegur sapa
gotong royong dan tolong menolong
kesantunan bukan anjuran tapi kebiasaan
kepedulian menjadi dorongan

Dari terbit hingga terbenamnya matahari
kita melihat orang-orang berpeluh tanpa mengeluh
berkeringat karena semangat
kerja keras menjadi ibadah
ketaatan menjadi kesadaran
kejujuran menjadi bagian harga diri dan kehormatan

Wajah mereka adalah wajah Indonesia yang sebenarnya
tangan mereka adalah tangan Indonesia yang sejati
keluhuran budi mereka adalah keluhuran Indonesia yang sesungguhnya

Hari ini kita gemakan, Ini Baru Indonesia!

INI BARU
INDONESIA



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, ULUD NKRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

MEWAH INFORMATIKA DAN KOMUNIKAS KONSTITUSI
MAJELIS

INDONESIA
MPR RUMAH KERANGSAAN PENGKAH IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAJULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR RI
Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

